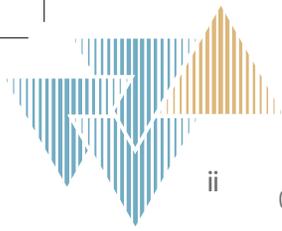


**LAPORAN TRIWULANAN**  
TRIWULAN IV - 2016





Laporan Triwulanan ini diterbitkan oleh  
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.  
Versi digital (PDF) dapat diunduh melalui  
[www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

Otoritas Jasa Keuangan  
Gedung Soemitro Djohadikusumo Lantai 4  
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta 10710  
Phone. (021) 29600000  
fax. (021) 386 6032  
email: [konsumen@ojk.go.id](mailto:konsumen@ojk.go.id)



## Kata Pengantar

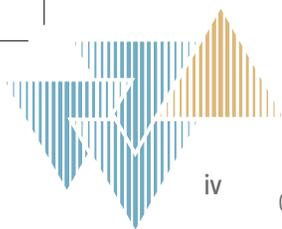
Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas perkenan dan bimbingan-Nya, OJK dapat terus meningkatkan kinerjanya dalam mengemban tugas pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan.

Secara umum, kinerja ekonomi global pada triwulan IV-2016 berjalan dinamis, namun masih diliputi ketidakpastian. Perbaikan perekonomian AS terus menunjukkan pemulihan, di tengah ketidakpastian global pasca Pemilu Presiden Amerika Serikat (AS). Hal ini tercermin dari meningkatnya inflasi dan menguatnya sektor tenaga kerja, serta keputusan The Fed untuk menaikkan *Fed Funds Rate* (FFR). Perekonomian Zona Euro juga mengalami pemulihan tercermin dari peningkatan inflasi dan penurunan tingkat pengangguran, serta keputusan *European Central Bank* (ECB) memperpanjang program stimulus. Di kawasan Asia, perbaikan perekonomian Jepang terus berlanjut, tercermin dari tingkat inflasi yang memasuki zona positif, serta kinerja manufaktur yang mulai menunjukkan ekspansi. Sementara itu, perekonomian beberapa *Emerging Market* (EM) seperti Tiongkok, India, dan Meksiko

terpantau membaik, dipicu perbaikan kinerja eksternal seiring membaiknya harga komoditas global.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan IV-2016 tumbuh sebesar 4,94% *yoy*, sedikit lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya (5,01% *yoy*). Hal ini didorong melambatnya konsumsi Pemerintah seiring kebijakan penghematan belanja pada APBN 2016. Namun demikian, secara tahunan ekonomi Indonesia 2016 tercatat tumbuh sebesar 5,02% *yoy*, membaik dibandingkan tahun 2015 (4,88% *yoy*). Sektor perdagangan tercatat menjadi pendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi di 2016. Kinerja eksternal juga melanjutkan tren pemulihan, tercermin dari nilai ekspor yang tercatat tumbuh 15,5% *yoy*, sementara impor tumbuh 5,8% *yoy*. Tingkat inflasi juga masih terkendali dan berada pada level 3,02% *yoy*.

Industri pasar modal pada triwulan IV-2016 sedikit mengalami penurunan dipengaruhi dinamika perekonomian global. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tercatat mengalami



## Kata Pengantar

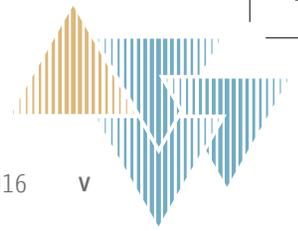
penurunan sebesar 1,27% *qtq*. Investor non-residen mencatatkan *net sell* dan mengubah komposisi kepemilikan non-residen di pasar saham, dari 63,79% (2015) menurun menjadi 54,49% (2016). Seiring dengan *outflow* dari pasar keuangan domestik, nilai tukar Rupiah melemah 3,03% *qtq* ke level Rp13.470,- per USD. Nilai kapitalisasi pasar saham mengalami penurunan sebesar 0,79%. Sejalan pelemahan tersebut, kinerja pasar obligasi juga mengalami penurunan, tercermin dari *yield* obligasi Pemerintah menunjukkan *trend* kenaikan dengan rata-rata *yield* untuk seluruh tenor naik sebesar 97,60 *bps*.

Industri perbankan di lain pihak mencatat perkembangan yang cukup baik, tercermin dari kenaikan aset, kredit, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) dari Bank Umum Konvensional (BUK) masing-masing sebesar 1,80% (*qtq*), 1,73% (*qtq*), dan 2,86% (*qtq*). Kondisi permodalan juga meningkat dengan rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) sebesar 23,04%. Kinerja Industri Keuangan Non Bank (IKNB) juga bergerak positif, dimana total aset IKNB naik 3,02% menjadi Rp1.861,63 triliun.

Di bidang pengaturan, OJK menerbitkan 42 Peraturan OJK (POJK) untuk memperkuat sektor jasa keuangan. Peraturan yang diterbitkan terdiri dari 10 POJK yang mengatur sektor Perbankan, dan 21 POJK yang mengatur sektor Pasar Modal serta 11 POJK yang mengatur sektor IKNB.

Di bidang pengawasan, beberapa kegiatan strategis dilakukan dalam rangka pengembangan infrastruktur sektor jasa keuangan, antara lain: Peluncuran Sistem Informasi Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT) Penjualan Reksa Dana Melalui Bank Selaku APERD (Agen Penjual Efek Reksa Dana) dan Pendaftaran Akuntan Publik, Penerbitan peraturan terkait dengan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis *Online*, Penerapan Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), serta pelaksanaan proyek *Risk Management, Economic Sustainability & Actuarial Science Development in Indonesia (READI)*.

Pada bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, OJK terus mendorong peningkatan inklusi keuangan, melalui pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)



di 14 lokasi yang tersebar di berbagai provinsi, kabupaten dan kota, pelaksanaan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan dengan wawancara langsung kepada 9.680 responden di 34 provinsi, penguatan infrastruktur digital melalui penyempurnaan layanan pada *Minisite* dan Aplikasi *Mobile (mobile app)* "Sikapuangmu", dan Kampanye Ayo Menabung. Selain itu, dalam rangka meningkatkan perlindungan konsumen, OJK menetapkan Badan Mediasi Pembiayaan, Pegadaian dan Ventura Indonesia (BMPPVI) ke dalam daftar LAPS dan melaksanakan kegiatan *Capacity Building* anggota *Working Group* IDR yang merupakan bentuk program manfaat balik kepada PUJK.

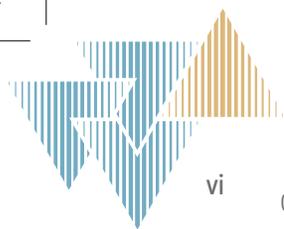
Dalam rangka pengembangan kapasitas manajemen internal, OJK berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai pengembangan kompetensi, penyempurnaan *Standard Operating Procedure (SOP)* dan membentuk Komite Pengaturan Terintegrasi, serta pemenuhan kebutuhan infrastruktur penunjang operasional. Berkaitan dengan hal tersebut, OJK melaksanakan pengembangan infrastruktur untuk mendukung pengawasan sektor jasa keuangan,

antara lain melalui pengembangan Sistem Informasi Pelaporan *Tax Amnesty* (SITATY), Sistem Informasi Ketentuan Perbankan *Online* (SIKEPO), Sistem Informasi *Banking Surveillance Dashboard* (BSD), dan Sistem Aplikasi Pembukaan Rahasia Nasabah Perbankan (SI AKRAB).

Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pegawai yang telah menjalankan tugas dengan baik dan menjunjung tinggi nilai-nilai strategis institusi. OJK berupaya memperbaiki kinerjanya secara terus menerus untuk meningkatkan layanan sektor jasa keuangan dan perlindungan konsumen, serta senantiasa meningkatkan kerjasama dan koordinasi yang efektif dengan Pemerintah, DPR dan para pemangku kepentingan terkait, dalam rangka mewujudkan industri keuangan nasional yang stabil dan inklusif.

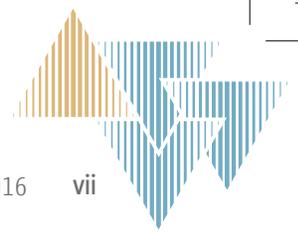
**Ketua Dewan Komisiner  
Otoritas Jasa Keuangan**

**Muliaman D. Hadad, Ph.D**

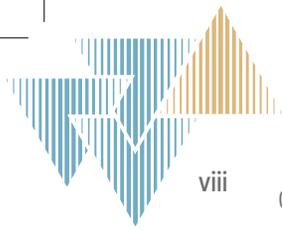


# DAFTAR ISI

iii	<b>KATA PENGANTAR</b>
vi	<b>DAFTAR ISI</b>
viii	<b>DAFTAR TABEL</b>
ix	<b>DAFTAR GRAFIK</b>
x	<b>DAFTAR GAMBAR</b>
xi	<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b>
01	<b>BAB I. TINJAUAN INDUSTRI SEKTOR JASA KEUANGAN</b>
03	1.1 PERKEMBANGAN EKONOMI INDONESIA DAN DUNIA
03	1.1.1 Perkembangan Ekonomi Global
05	1.1.2 Perkembangan Ekonomi Domestik
06	1.1.3 Perkembangan Pasar Keuangan
07	1.2 PERKEMBANGAN INDUSTRI PERBANKAN
07	1.2.1 Perkembangan Bank Umum Konvensional
10	1.2.2 Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
12	1.2.3 Perkembangan Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
13	1.2.4 Penguatan Sektor Riil Melalui Penyaluran Kredit Produktif
16	1.3 PERKEMBANGAN INDUSTRI PASAR MODAL
16	1.3.1 Perkembangan Perdagangan Efek
19	1.3.2 Perkembangan Perusahaan Efek
19	1.3.3 Perkembangan Pengelolaan Investasi
21	1.3.4 Perkembangan Emiten dan Perusahaan Publik
24	1.3.5 Perkembangan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal
26	1.4 PERKEMBANGAN INDUSTRI KEUANGAN NON BANK
27	1.4.1 Perkembangan Perasuransian Konvensional dan BPJS
28	1.4.2 Perkembangan Industri Dana Pensiun
30	1.4.3 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan
32	1.4.4 Perkembangan Industri Perusahaan Modal Ventura
33	1.4.5 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur
34	1.4.6 Perkembangan Industri Jasa Keuangan Khusus
36	1.4.7 Perkembangan Industri Jasa Penunjang IKNB
37	1.4.8 Perkembangan Industri Lembaga Keuangan Mikro
37	1.5 PERKEMBANGAN PROGRAM <i>FLAGSHIP</i> OJK
37	1.5.1 Layanan Keuangan Tanpa Kantor (LAKU PANDAI)
38	1.5.2 Jangkau, Sinergi, dan <i>Guideline</i> (JARING)
38	1.5.3 Simpanan Pelajar (SIMPEL)
38	1.5.4 Reksadana Penyertaan Terbatas (RDPT) Sektor Riil
39	1.5.5 Efek Beragun Aset - Surat Partisipasi (EBA SP)
39	1.5.6 Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)
39	1.5.7 Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)
39	1.5.8 Asuransi Nelayan
39	1.5.9 Asuransi Kerangka Kapal
41	<b>BAB II. TINJAUAN OPERASIONAL SEKTOR JASA KEUANGAN</b>
43	2.1 AKTIVITAS PENGATURAN
43	2.1.1 Pengaturan Bank
45	2.1.2 Pengaturan Pasar Modal
46	2.1.3 Pengaturan IKNB
49	2.2 AKTIVITAS PENGAWASAN
49	2.2.1 Pengawasan Terintegrasi
49	2.2.2 Pengawasan Perbankan
53	2.2.3 Pengawasan Pasar Modal
58	2.2.4 Pengawasan IKNB
65	2.3 AKTIFITAS PENGEMBANGAN
65	2.3.1 Pengembangan Pengawasan Terintegrasi
68	2.3.2 Pengembangan Industri Perbankan



2.3.3	Pengembangan Industri Pasar Modal	69
2.3.4	Pengembangan IKNB	72
2.4	<b>STABILITAS SISTEM KEUANGAN</b>	73
2.4.1	Pasar Keuangan dan Lembaga Jasa Keuangan	73
2.4.2	Respons Kebijakan	75
2.5	<b>EDUKASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	78
2.5.1	Inklusi Keuangan	78
2.5.2	Literasi dan Edukasi Keuangan	80
2.5.3	Perlindungan Konsumen	83
2.5.4	Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan	85
2.5.5	<i>Market Conduct</i>	87
2.6	<b>PENYIDIKAN SEKTOR JASA KEUANGAN</b>	89
2.6.1	Koordinasi dengan Instansi Terkait	89
2.6.2	Penanganan Perkara	89
2.6.3	Sosialisasi Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan	90
2.6.4	Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi (Satgas Waspada Investasi)	90
2.6.5	Tim Kerja Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi Daerah (Tim Kerja Satgas Waspada Investasi Daerah)	90
2.7	<b>PENANGANAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME</b>	91
2.7.1	Harmonisasi Pengaturan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan	91
2.7.2	Pengembangan <i>Risk Based Supervisory Tools</i> dalam Pengawasan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan	91
2.7.3	Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia	91
2.8	<b>HUBUNGAN KELEMBAGAAN</b>	92
2.8.1	Kerjasama Domestik	92
2.8.2	Kerjasama Internasional	92
2.9	<b>HUBUNGAN KOORDINASI KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER</b>	93
<b>BAB III.</b>	<b>TINJAUAN INDUSTRI DAN OPERASIONAL SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH</b>	95
3.1	<b>TINJAUAN INDUSTRI KEUANGAN SYARIAH</b>	97
3.1.1	Perkembangan Perbankan Syariah	97
3.1.2	Perkembangan Industri Pasar Modal Syariah	98
3.1.3	Perkembangan IKNB Syariah	102
3.2	<b>PENGATURAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH</b>	103
3.2.1	Pengaturan Perbankan Syariah	103
3.2.2	Pengaturan Pasar Modal Syariah	104
3.2.3	Pengaturan IKNB Syariah	104
3.3	<b>PENGAWASAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH</b>	105
3.3.1	Pengawasan Perbankan Syariah	105
3.3.2	Pengawasan Pasar Modal Syariah	105
3.3.3	Pengawasan IKNB Syariah	106
3.4	<b>PENGEMBANGAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH</b>	107
3.4.1	Pengembangan Perbankan Syariah	107
3.4.2	Pengembangan Pasar Modal Syariah	109
3.4.3	Pengembangan IKNB Syariah	110
<b>BAB IV.</b>	<b>MANAJEMEN STRATEGIS DAN TATA KELOLA ORGANISASI</b>	111
4.1	<b>MANAJEMEN STRATEGI DAN KINERJA OJK</b>	113
4.1.1	Pelaksanaan Siklus Manajemen Strategi dan Kinerja	113
4.1.2	Pelaksanaan Sasaran Strategis (IS) OJK	115
4.1.3	Pelaksanaan Inisiatif Strategis OJK	116
4.2	<b>AUDIT INTERNAL, MANAJEMEN RISIKO, DAN PENGENDALIAN KUALITAS</b>	118
4.3	<b>RAPAT DEWAN KOMISIONER</b>	121
4.4	<b>KOMUNIKASI</b>	122
4.4.1	Komunikasi Informasi OJK	122
4.4.2	Kunjungan Instansi	124

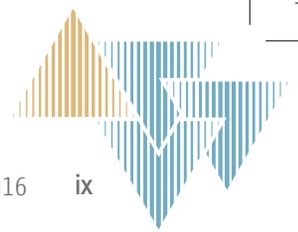


124	<b>4.5 KEUANGAN</b>
124	4.5.1 Anggaran dan Penggunaan
125	4.5.2 Pengembangan Sistem Keuangan Internal
125	<b>4.6 SISTEM INFORMASI</b>
125	4.6.1 Penguatan Sistem Informasi untuk Mendukung Pelaksanaan Tugas Pokok
127	4.6.2 Penguatan Sistem Informasi untuk Meningkatkan Kapasitas Organisasi
127	<b>4.7 LOGISTIK</b>
127	4.7.1 Penyiapan Gedung Kantor Pusat
127	4.7.2 Penyiapan Gedung Kantor Regional/OJK
127	4.7.3 Pengembangan Pengaturan dan Sistem Logistik
128	<b>4.8 SDM DAN TATA KELOLA ORGANISASI</b>
128	4.8.1 Pengelolaan Sumber Daya Manusia
128	4.8.2 Pengembangan Organisasi
129	<b>4.9 OJK INSTITUTE</b>
129	4.9.1 Program Pengembangan Kepemimpinan Berjenjang (PPKB)
129	4.9.2 Program Pengembangan Kompetensi
130	4.9.3 Program Pendidikan Formal
130	4.9.4 Program Asesmen
130	4.9.5 Program Sertifikasi
130	4.9.6 Program Pengembangan SDM Sektor Jasa Keuangan (SJK) - <i>Recycling</i>
130	4.9.7 Program Kerja sama dengan Temasek <i>Foundation</i> Singapore
130	4.9.8 <i>Benchmarking</i> Perpustakaan dan Museum/Galeri
131	<b>4.10 MANAJEMEN PERUBAHAN</b>
131	4.10.1 Program Budaya
131	4.10.2 <i>Monitoring</i> Program Budaya
132	4.10.3 Media Komunikasi Budaya dan Perubahan

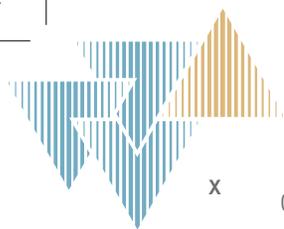
**AKRONIM**

## DAFTAR TABEL

08	Tabel I.1	Kondisi Umum Perbankan Konvensional
10	Tabel I.2	Kondisi Umum BPR
11	Tabel I.3	Porsi Kredit BPR
13	Tabel I.4	Konsentrasi Penyaluran UMKM
13	Tabel I.5	Porsi UMKM berdasarkan Kelompok Bank
14	Tabel I.6	PDB Sektor Ekonomi Prioritas
14	Tabel I.7	Konsentrasi Kredit Perbankan Menurut Sektor Ekonomi (%)
18	Tabel I.8	Perkembangan Perdagangan Saham Oleh Pemodal Asing dan Domestik
18	Tabel I.9	Perkembangan Transaksi Perdagangan Surat Hutang (laporan CTP PLTE)
19	Tabel I.10	Jumlah Perusahaan Efek
19	Tabel I.11	Jumlah Lokasi Kegiatan PE Selain Kantor Pusat
19	Tabel I.12	Proses Izin Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek
19	Tabel I.13	Proses Perpanjangan Izin Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek
20	Tabel I.14	Perkembangan NAB per Jenis Reksa Dana
20	Tabel I.15	Perkembangan Reksa Dana dan Produk Investasi Lainnya
20	Tabel I.16	Jenis Reksa Dana Yang Mendapat Surat Efektif
21	Tabel I.17	Perkembangan Pelaku di Industri Pengelolaan Investasi yang Memperoleh Izin
21	Tabel I.18	Perkembangan Penawaran Umum (Emisi)
22	Tabel I.19	Tabel Perkembangan Nilai Emisi Berdasarkan Sektor Industri pada Triwulan IV
22	Tabel I.20	Perusahaan Yang Melakukan Penawaran Umum Perdana Saham
22	Tabel I.21	Perusahaan Yang Melakukan Penawaran Umum Terbatas
23	Tabel I.22	Perusahaan yang telah Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Utang
23	Tabel I.23	Perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Utang
23	Tabel I.24	Perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Utang
24	Tabel I.25	Rencana Penggunaan Dana Atas EPP yang Melakukan Aksi Korporasi Berdasarkan Sektor Industri
25	Tabel I.26	Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal



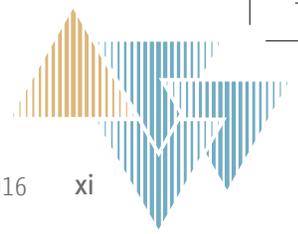
Tabel I.27	Komposisi Peringkat Perusahaan yang Masuk Kategori <i>Investment Grade</i> Dan <i>Non Investment Grade</i>	25
Tabel I.28	Perkembangan Profesi Penunjang Pasar Modal	26
Tabel I.29	Kegiatan Pendidikan Terkait Akuntan	26
Tabel I.30	Kegiatan Pendidikan Terkait Konsultan Hukum	26
Tabel I.31	Kegiatan Pendidikan Terkait Penilai	26
Tabel I.32	Total Aset IKNB	26
Tabel I.33	Indikator Perusahaan Perasuransian Konvensional dan BPJS	27
Tabel I.34	Jumlah Perusahaan Perasuransian Konvensional dan BPJS	28
Tabel I.35	Densitas dan Penetrasi Perusahaan Perasuransian Konvensional dan BPJS	28
Tabel I.36	<i>Risk Based Capital (RBC)</i> Industri Asuransi	28
Tabel I.37	Distribusi Aset Industri Dana Pensiun	29
Tabel I.38	Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun	29
Tabel I.39	Portofolio Investasi Dana Pensiun	29
Tabel I.40	Jumlah Dana Pensiun	30
Tabel I.41	Piutang Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan sektor Ekonomi	31
Tabel I.42	Indikator Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan	31
Tabel I.43	NPF Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi	31
Tabel I.44	Pembiayaan/Penyertaan Berdasarkan sektor Ekonomi	33
Tabel I.45	Pembiayaan Berdasarkan Jenis Infrastruktur	34
Tabel I.46	Indikator Keuangan Industri Jasa Penunjang IKNB	36
Tabel I.47	Jumlah Perusahaan Jasa Penunjang IKNB	36
Tabel I.48	Jumlah Lembaga Keuangan Mikro	37
Tabel I.49	Indikator Keuangan Lembaga Keuangan Mikro	37
Tabel I.50	Realisasi Laku Pandai Triwulan IV-2016	37
Tabel I.51	NPL Kegiatan Usaha Kredit Maritim (%)	38
Tabel II.1	Pemeriksaan Khusus Bank	49
Tabel II.2	Produk dan Aktivitas Baru Perbankan Triwulan IV-2016	50
Tabel II.3	Jumlah <i>Track Record</i>	50
Tabel II.4	Pemberian Keterangan Ahli/Saksi Tahun 2016	51
Tabel II.5	Perizinan Perubahan Jaringan Kantor Bank Umum Konvensional	51
Tabel II.6	Jaringan Kantor Bank Umum Konvensional	52
Tabel II.7	FPT Calon Pengurus dan PSP Bank Umum Selama Triwulan IV-2016	52
Tabel II.8	Perizinan BPR	52
Tabel II.9	Daftar Hasil <i>Fit and Proper Test New Entry</i> BPR	53
Tabel II.10	Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik	55
Tabel II.11	Penyampaian Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan (LBPP), Perusahaan Modal Ventura (LBPMV) dan Perusahaan Infrastruktur (LBPI)	59
Tabel II.12	Hasil Pemeriksaan Langsung	59
Tabel II.13	Detail Sanksi Administratif Lembaga IKNB	60
Tabel II.14	LKM yang Mendapatkan Izin Usaha Bersyarat	60
Tabel II.15	LKM yang Mendapatkan Izin Usaha Penuh	60
Tabel II.16	<i>Progress</i> Pelayanan Kelembagaan dan Produk IKNB	61
Tabel II.17	Rincian Pemberian Izin Usaha	61
Tabel II.18	Rincian Pemberian Izin Usaha Bidang IKNB	62
Tabel II.19	Rincian Pencabutan Izin Usaha	62
Tabel II.20	Penyelesaian Pencabutan Izin Usaha	62
Tabel II.21	Rincian Permohonan Terkait Kepemilikan	63
Tabel II.22	Rincian Perusahaan yang Melakukan Perubahan Nama	63
Tabel II.23	Rincian Permohonan terkait Jaringan Kantor	63
Tabel II.24	Rincian Permohonan <i>Fit and Proper Test</i> Pihak Utama IKNB berdasarkan Sektor	64
Tabel II.25	Rincian Permohonan berdasarkan Jenis Perusahaan	64
Tabel II.26	Rincian Permohonan Kepengurusan Perusahaan	64
Tabel II.27	Rincian Permohonan Produk Asuransi	64
Tabel II.28	Rekapitulasi Kegiatan Pelayanan di Direktorat Jasa Penunjang IKNB selama Triwulan IV tahun 2016	65
Tabel II.29	Pendaftaran Profesi (sejak Agustus 2016)	65
Tabel II.30	Jumlah Penetapan Hasil Pengujian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) selama Triwulan IV 2016	65



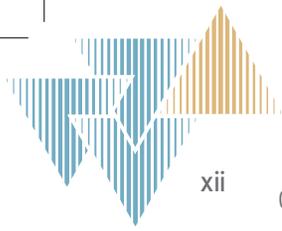
79	Tabel II.31	Pengukuhan TPAKD Triwulan IV-2016
80	Tabel II.32	Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan 2016
80	Tabel II.33	<i>Training of Trainers (ToT)</i> Guru
81	Tabel II.34	Pameran Edukasi Keuangan
83	Tabel II.35	Iklan Layanan Masyarakat
84	Tabel II.36	Penerimaan Layanan per <i>Business Unit</i>
86	Tabel II.37	<i>Monitoring</i> LAPS
89	Tabel II.38	Perkara atau Pengaduan Berdasarkan Sektor
98	Tabel III.1	Indikator Perbankan Syariah
99	Tabel III.2	Perkembangan Kapitalisasi Saham Syariah
99	Tabel III.3	Perkembangan Indeks Saham Syariah
100	Tabel III.4	Perkembangan Emisi Sukuk Korporasi
100	Tabel III.5	Perkembangan Reksa Dana Syariah
101	Tabel III.6	Perkembangan Surat Berharga Syariah Negara <i>Outstanding</i>
102	Tabel III.7	Aset IKNB Syariah
102	Tabel III.8	Indikator Perusahaan Perasuransian Syariah
103	Tabel III.9	Komponen Aset Perusahaan Pembiayaan Syariah
106	Tabel III.10	Permohonan Perbankan Syariah
123	Tabel IV.1	Judul Siaran Pers Triwulan IV-2016
123	Tabel IV.2	Jumpa Pers OJK selama Triwulan IV-2016
124	Tabel IV.3	<i>Media Gathering, Focus Group Discussion</i> , dan Pelatihan Jurnalistik Triwulan IV - 2016
124	Tabel IV.4	Kunjungan Instansi Triwulan IV - 2016
127	Tabel IV.5	Kantor Regional dan Kantor OJK

## DAFTAR GRAFIK

03	Grafik I.1	Tingkat Inflasi dan Tingkat Pengangguran Amerika Serikat
03	Grafik I.2	Tingkat Inflasi dan Tingkat Pengangguran Uni Eropa
04	Grafik I.3	Tingkat Inflasi dan PMI Manufaktur Jepang
04	Grafik I.4	Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara EM
04	Grafik I.5	Perkembangan Harga Minyak Dunia
05	Grafik I.6	Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
05	Grafik I.7	Kinerja Eksternal Indonesia ( <i>yoy</i> )
05	Grafik I.8	Tingkat Inflasi Indonesia ( <i>yoy</i> )
06	Grafik I.9	Cadangan Devisa Indonesia
06	Grafik I.10	Perkembangan Indeks Saham Global dan Regional
07	Grafik I.11	Perkembangan Nilai Tukar Global dan Regional
07	Grafik I.12	Perkembangan <i>Yield</i> SBN
08	Grafik I.13	Perkembangan Aset BUK
08	Grafik I.14	Tren Pertumbuhan DPK
09	Grafik I.15	Tren Pertumbuhan Kredit
11	Grafik I.16	Tren Aset BPR
11	Grafik I.17	Tren Pertumbuhan DPK
11	Grafik I.18	Pertumbuhan Kredit BPR
12	Grafik I.19	NPL Gross Kredit BPR (%)
12	Grafik I.20	Grafik ROA dan BOPO BPR
13	Grafik I.21	Penyebaran UMKM Berdasarkan Wilayah
15	Grafik I.22	Pertumbuhan Kredit Perbankan ( <i>qtq</i> )
16	Grafik I.23	NPL Gross Sektor Ekonomi
16	Grafik I.24	Kinerja Indeks di Beberapa Bursa Utama ( <i>qtq</i> )
17	Grafik I.25	Kinerja Indeks di Beberapa Bursa Utama ( <i>ytd</i> )
17	Grafik I.26	Perkembangan Indeks Industri Indonesia ( <i>qtq</i> )
17	Grafik I.27	Perkembangan IHSG dan Nilai Rata-rata Perdagangan Saham Harian
18	Grafik I.28	Perkembangan IHSG dan Net Asing
18	Grafik I.29	Perkembangan Imbal Hasil Surat Berharga Negara
24	Grafik I.30	Rencana Penggunaan Dana



Grafik I.31	<i>Market Share</i> BAE Berdasarkan Jumlah Klien Sampai Triwulan IV 2016	25
Grafik I.32	<i>Market Share Company Rating</i> Triwulan IV 2016	25
Grafik I.33	Komposisi Jumlah Pelaku IKNB Triwulan IV-2016	27
Grafik I.34	Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun Per Triwulan IV 2016	29
Grafik I.35	Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas Perusahaan Pembiayaan	30
Grafik I.36	Piutang Perusahaan Pembiayaan	31
Grafik I.37	Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas	32
Grafik I.38	Pertumbuhan Pembiayaan/Penyertaan Modal	33
Grafik I.39	Sumber Pendanaan Perusahaan Modal Ventura	33
Grafik I.40	Tren Aset, Liabilitas dan Ekuitas	34
Grafik I.41	Pertumbuhan Aset LJK	34
Grafik I.42	Pertumbuhan Aset Perusahaan Penjaminan	34
Grafik I.43	<i>Outstanding</i> Penjaminan	35
Grafik I.44	Pertumbuhan Aset Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	35
Grafik I.45	Pertumbuhan Nilai Pembiayaan Ekspor Indonesia	35
Grafik I.46	Aset dan <i>Outstanding</i> Penyaluran Pinjaman PT SMF (Persero)	35
Grafik I.47	Pertumbuhan Aset PT Pegadaian	36
Grafik I.48	<i>Outstanding</i> Pinjaman PT Pegadaian (Persero)	36
Grafik I.49	Wilayah Penyebaran Agen Laku Pandai Triwulan IV-2016	37
Grafik I.50	Kredit & NPL Sektor Maritim terkait JARING	38
Grafik II.1	Sebaran Jenis Dugaan Tipibank Pada Triwulan IV-2016	50
Grafik II.2	Pelaku <i>Fraud</i> yang diduga Tipibank Pada Triwulan IV-2016	50
Grafik II.3	Penyebaran Jaringan Kantor BUK di Indonesia Triwulan IV-2016	52
Grafik II.4	Penyebaran Jaringan Kantor BPR Triwulan IV-2016	53
Grafik II.5	Penyampaian LKT 2015	55
Grafik II.6	Penyampaian LT 2015	56
Grafik II.7	Penyampaian LKTT 2016	56
Grafik II.8	Tingkat Kelulusan Pihak Utama IKNB pada Penilaian Kemampuan dan Kepatutan per Triwulan IV 2016	64
Grafik II.9	Konglomerasi Keuangan	68
Grafik II.10	IHSG dan Arus Modal Nonresiden di Pasar Saham	73
Grafik II.11	Penghimpunan Dana di Pasar Modal	74
Grafik II.12	<i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) Perbankan	74
Grafik II.13	<i>Risk-Based Capital</i> (RBC) Perasuransian	74
Grafik II.14	<i>Gearing Ratio</i> Perusahaan Pembiayaan	74
Grafik II.15	Perkembangan dan Jenis <i>Fintech</i> di Indonesia	76
Grafik II.16	Rekapitulasi Pelaksanaan Kegiatan ORP Selama 2016	81
Grafik II.17	Tingkat Penyelesaian Layanan Kumulatif	83
Grafik II.18	Layanan Per Sektor	84
Grafik II.19	Kanal Layanan	84
Grafik II.20	Perbandingan Penerimaan Layanan Berdasarkan Satuan Kerja	85
Grafik II.21	Akumulasi Iklan Berdasarkan Sektor	87
Grafik II.22	Tren Pelanggaran	88
Grafik II.23	Klasifikasi Dugaan Pelanggaran	88
Grafik II.24	Tren Dugaan Pelanggaran Iklan Triwulan IV Tahun 2016	88
Grafik II.25	Tren Dugaan Pelanggaran Iklan per Kategori Pelanggaran Triwulan IV Tahun 2016	88
Grafik III.1	Sektor Industri Saham Syariah di Indonesia	99
Grafik III.2	Perkembangan Penerbitan Sukuk Korporasi dan Sukuk Korporasi <i>Outstanding</i>	100
Grafik III.3	Perbandingan Jumlah Sukuk <i>Outstanding</i> Berdasarkan Jenis Akad	100
Grafik III.4	Perbandingan Nilai Sukuk <i>Outstanding</i> Berdasarkan Jenis Akad	100
Grafik III.5	Perkembangan Jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah	101
Grafik III.6	Perkembangan Sukuk Negara <i>Outstanding</i>	101
Grafik III.7	Jumlah Pelaku IKNB Syariah Triwulan IV-2016	102
Grafik IV.1	Siklus Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK)	115
Grafik IV.2	Komposisi Realisasi Mitigasi Risiko OJK <i>Wide</i> Triwulan IV 2016	119
Grafik IV.3	Jumlah Laporan Gratifikasi Berdasarkan Jabatan	120
Grafik IV.4	Jumlah Laporan Gratifikasi Menurut Jenis Gratifikasi	120



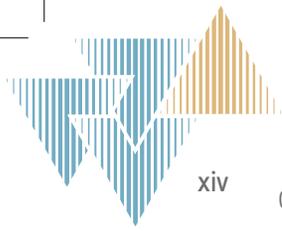
120	Grafik IV.5	Jumlah Laporan Gratifikasi per Satker
121	Grafik IV.6	Gambaran Topik yang Dibahas dalam Rapat Dewan Komisioner
122	Grafik IV.7	Statistik Pengunjung <i>Website</i> OJK
122	Grafik IV.8	<i>Tone</i> Pemberitaan Triwulan IV-2016
124	Grafik IV.9	Realisasi Anggaran

## DAFTAR GAMBAR

78	Gambar II.1	Peresmian Strategi Nasional Keuangan
79	Gambar II.2	Peluncuran SNKI
83	Gambar II.3	Tampilan Terkini <i>Minisite</i> (kiri) dan <i>Mobile App</i> <i>Sikapiuangmu</i> OJK (kanan)
115	Gambar IV.1	Laporan Kinerja OJK 2016



**Ringkasan  
Eksekutif**

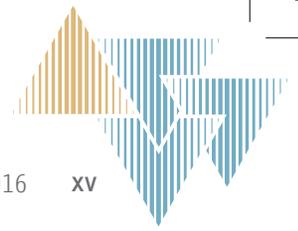


## Ringkasan Eksekutif

### TINJAUAN PEREKONOMIAN DUNIA DAN INDONESIA

Pemulihan perekonomian global selama triwulan IV-2016 berjalan tidak seimbang dan diliputi ketidakpastian. Hal ini ditunjukkan melalui perbaikan ekonomi Amerika Serikat (AS) yang semakin solid sehingga mendorong kenaikan *Fed Funds Rate* (FFR) di 2016. Perekonomian Zona Euro mengalami pemulihan tercermin dari tren peningkatan inflasi yang mengarah ke target inflasi jangka menengah 2%, penurunan tingkat pengangguran serta keputusan *European Central Bank* (ECB) memperpanjang program stimulus. Di Jepang, perbaikan perekonomian terus berlanjut diindikasikan oleh tingkat inflasi yang memasuki zona positif serta kinerja manufaktur yang mulai ekspansif. Sementara itu, perekonomian beberapa *Emerging Market* (EM) seperti Tiongkok, India, dan Meksiko terpantau membaik dipicu perbaikan kinerja eksternal seiring dengan membaiknya harga komoditas global.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia secara kuartalan pada triwulan IV-2016 tumbuh sebesar 4,94%, sedikit lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang didorong oleh melambatnya konsumsi Pemerintah seiring kebijakan penghematan belanja pada APBN 2016. Namun demikian, secara tahunan ekonomi Indonesia 2016 tumbuh sebesar 5,02% yoy. Sejalan arah perbaikan ekonomi global, kinerja eksternal turut melanjutkan tren pemulihan. Pada akhir 2016, ekspor dan impor masing-masing tumbuh 15,5% yoy dan 5,8% yoy. Hal ini dipicu perbaikan kinerja negara-negara mitra dagang utama. Tingkat inflasi terkendali dan berada pada level 3,02% yoy dan merupakan tingkat inflasi terendah sejak 2009. Rendahnya inflasi dipengaruhi oleh harga-harga di kelompok *administered price*, sementara inflasi inti terpantau masih terus menurun. Cadangan



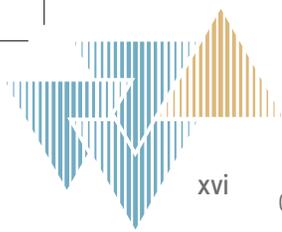
## TINJAUAN OPERASIONAL SEKTOR JASA KEUANGAN

devisa akhir 2016 menunjukkan tren menguat dibandingkan akhir 2015. Jumlah cadangan devisa dimaksud cukup membiayai 8,8 bulan impor atau 8,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional, sekitar tiga bulan impor.

Pasar keuangan domestik terpantau melemah secara *point-to-point* dipengaruhi oleh faktor global terkait hasil Pemilu Presiden AS, ekspektasi kenaikan FFR dan peningkatan aksi jual oleh investor nonresiden. Peningkatan aksi jual investor nonresiden berdampak pada pasar saham domestik yang tercermin dari penurunan kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebesar 1,27%. Secara keseluruhan, sepanjang 2016 pasar saham masih mencatatkan *net buy* sebesar Rp16,2 triliun.

Untuk mendukung terwujudnya misi OJK yaitu mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, selama periode laporan OJK melakukan beberapa inisiatif antara lain:

1. Penerbitan Peraturan OJK terkait dengan industri *Financial Technology (FinTech)*  
Penerbitan peraturan ini diharapkan mendukung pertumbuhan industri *fintech lending* sebagai alternatif sumber pembiayaan baru bagi sebagian besar masyarakat Indonesia dan belum dapat dilayani secara maksimal oleh industri jasa keuangan konvensional.



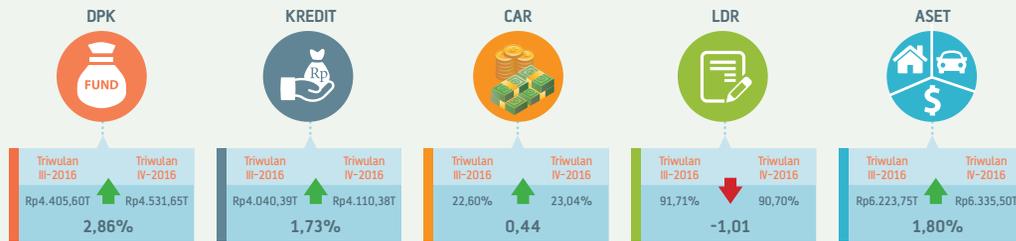
2. Peluncuran Sistem Perizinan Registrasi Terintegrasi (SPRINT)  
Terkait proses perizinan penjualan Reksa Dana melalui bank selaku APERD (Agen Penjual Efek Reksa Dana) dan pendaftaran Akuntan Publik, SPRINT berhasil mempersingkat proses dari 105 hari menjadi 19 hari kerja.
3. Perkembangan FSAP di Indonesia  
FSAP merupakan mekanisme untuk menilai stabilitas dan pengembangan sistem keuangan suatu negara secara komprehensif dan keterkaitannya dengan negara lain dalam rangka menjaga stabilitas keuangan global. Sampai saat ini, telah dibentuk Tim Kerja Nasional FSAP antara OJK dan lembaga terkait dan telah dilakukan kegiatan FSAP sebanyak dua kali.
4. Penguatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)  
TPAKD merupakan bentuk upaya OJK mendorong percepatan akses keuangan. Selama periode laporan, telah dilakukan penguatan TPAKD di 14 lokasi yang tersebar di berbagai provinsi, kabupaten dan kota.
5. Pelaksanaan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan  
Survei ini dilaksanakan untuk mengukur tingkat literasi dan inklusi masyarakat Indonesia sesuai Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI). Survei dilakukan melalui wawancara langsung kepada 9.680 responden di 34 provinsi yang tersebar di 64 kota/kabupaten di Indonesia.
6. *Minisite* dan Aplikasi *Mobile* "Sikapiuangmu"  
Penguatan infrastruktur digital melalui penyempurnaan layanan pada *Minisite* dan Aplikasi *Mobile (mobile app)* "Sikapiuangmu" dalam rangka mendorong kemudahan akses informasi keuangan bagi konsumen dan masyarakat.
7. Pembentukan Tim Kerja Satgas Waspada Investasi Daerah  
Telah dibentuk Tim Kerja Satgas Waspada Investasi Daerah di 38 Daerah baik di tingkat Provinsi/Kabupaten maupun Kota yang bertugas menghentikan atau menghambat maraknya kasus pelanggaran hukum terkait investasi di daerah.

Selain menjalankan fungsi pengaturan, pengawasan serta edukasi dan perlindungan konsumen, OJK melakukan hubungan kelembagaan domestik dengan menyelenggarakan 40 kegiatan kelembagaan yang melibatkan beberapa lembaga negara, antara lain: *Focus Group Discussion* (FGD) mengenai program inklusi keuangan, penguatan TPAKD dan Satgas Waspada Investasi, implementasi KUR, dan perkembangan perekonomian daerah. Terkait dengan kelembagaan internasional, OJK menyelenggarakan berbagai kegiatan antara lain penyelenggaraan *Dialogue Meeting* dengan Bank of Thailand, penyelenggaraan dialog tahunan OJK dengan Jakarta Japan Club Financial Services Committee (JJCFSC), dan *Focus Group Discussion* "Menggali Potensi Sukuk Diaspora untuk Pembangunan Indonesia".

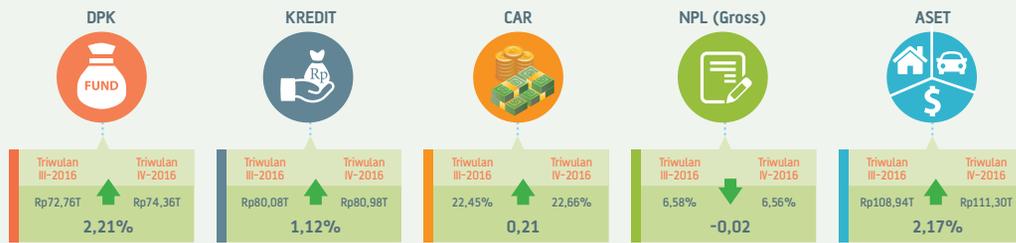
Terkait penguatan kapasitas organisasi dalam rangka implementasi manajemen strategi, OJK melakukan operasionalisasi strategi, penyusunan dan penetapan RKA, serta penandatanganan kesepakatan kinerja 2017. Dalam rangka mendukung pelaksanaan manajemen kinerja, OJK melakukan penyempurnaan sistem dengan mengintegrasikan Sistem Pengelolaan Kinerja (SIMPEL) dengan Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMARIO). Untuk mendukung pengembangan pengawasan sektor jasa keuangan, OJK mengembangkan beberapa sistem informasi antara lain Sistem Informasi Pelaporan *Tax Amnesty* (SITATY), Sistem Informasi Ketentuan Perbankan *Online* (SIKEPO), Sistem Informasi *Banking Surveillance Dashboard* (BSD), dan Sistem Aplikasi Pembukaan Rahasia Nasabah Perbankan (SI AKRAB). Selain itu, dalam rangka memberikan edukasi kepada media terhadap perkembangan sektor keuangan dan berbagai aspek kebijakan di sektor keuangan, OJK menyelenggarakan 36 siaran pers dan melakukan 17 jumpa pers serta menyelenggarakan satu pelatihan, dua *workshop*, dan satu *Focus Group Discussion* untuk wartawan. OJK juga menerima delapan kunjungan instansi dengan total 742 peserta. Ulasan lengkap mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OJK dalam mewujudkan visi OJK selama triwulan IV-2016 dijabarkan dalam buku Laporan Triwulanan IV-2016.

## Sektor Jasa Keuangan

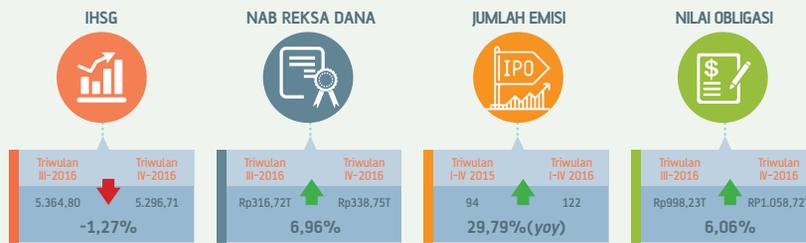
### Bank Umum Konvensional



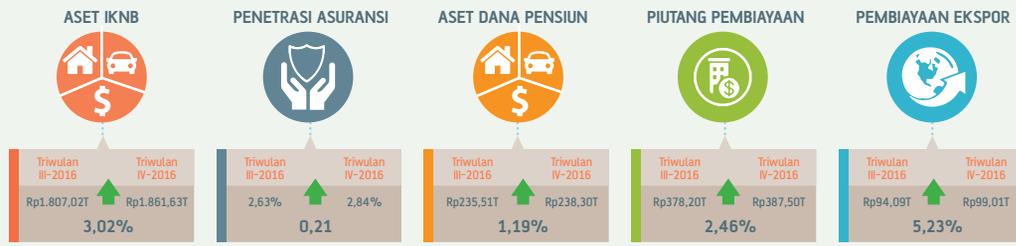
### BPR



### Pasar Modal

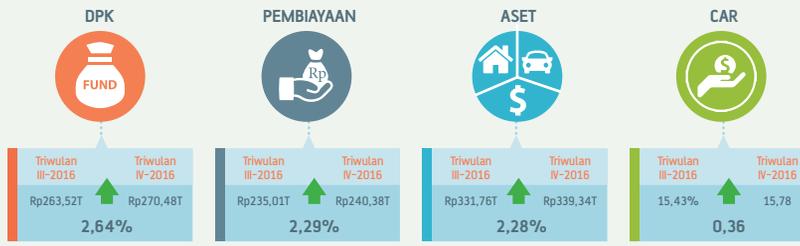


### IKNB

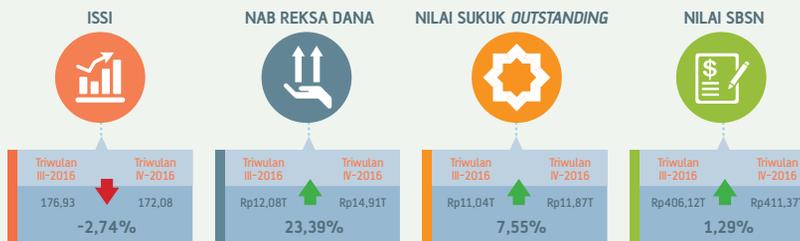
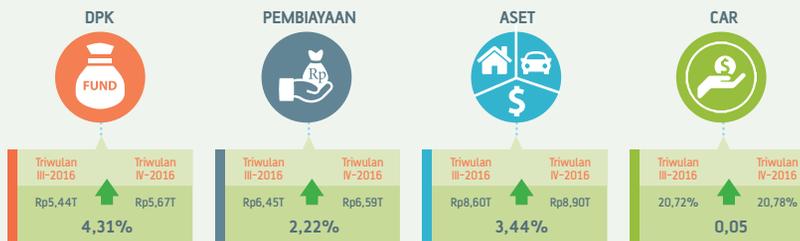


## Sektor Jasa Keuangan Syariah

### Bank Umum Syariah



### BPRS

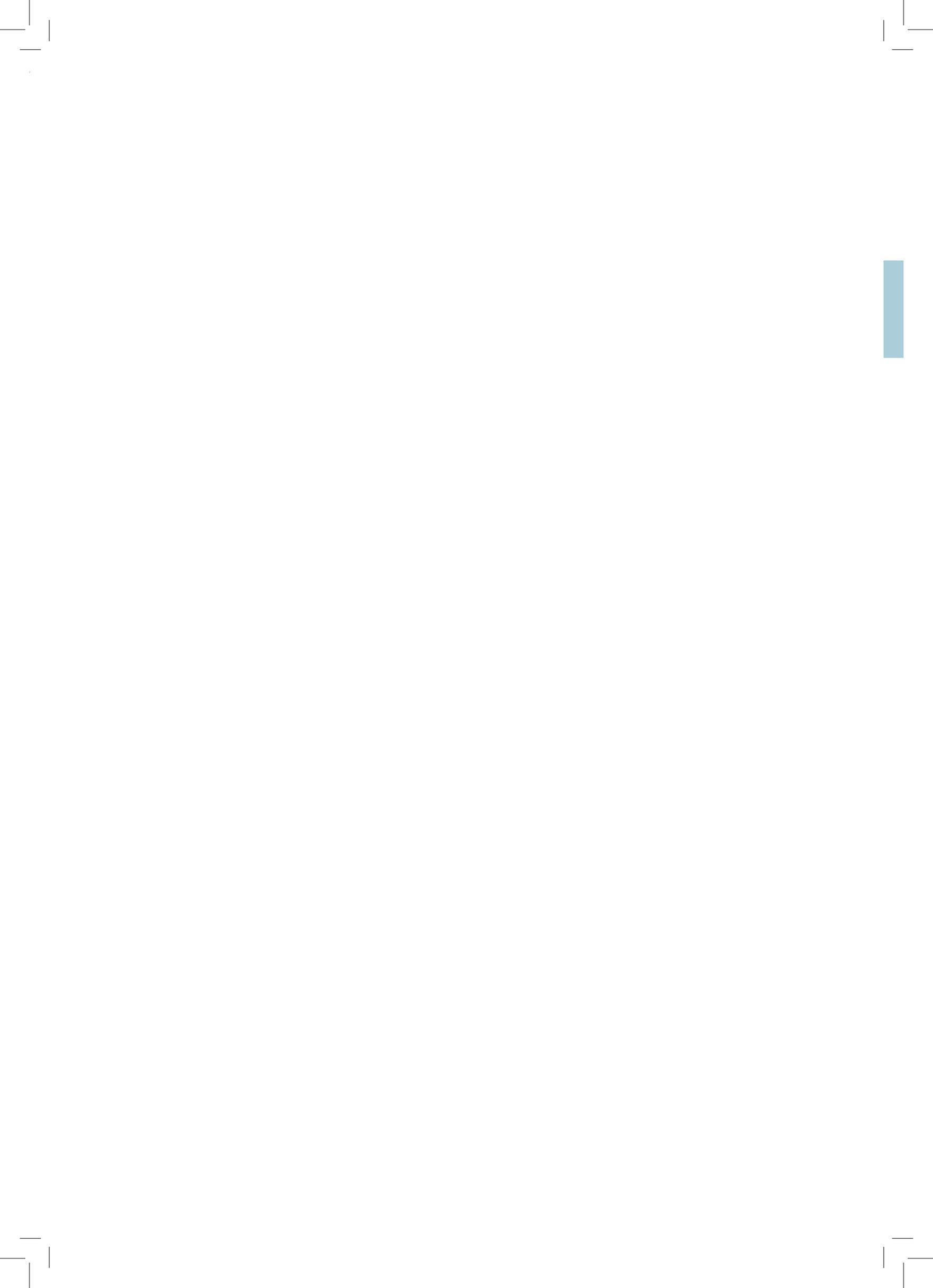


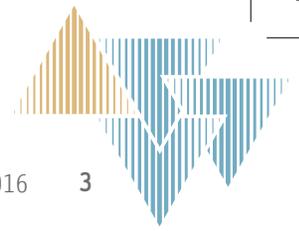
### IKNB SYARIAH



# Tinjauan Industri Sektor Jasa Keuangan







# Tinjauan Industri Sektor Jasa Keuangan

I

## 1.1 PERKEMBANGAN EKONOMI INDONESIA DAN DUNIA

### 1.1.1 Perkembangan Ekonomi Global

Pemulihan perekonomian global selama triwulan IV-2016 berjalan tidak seimbang dan diliputi ketidakpastian. Sebagian besar negara maju berada dalam proses pemulihan yang cenderung berjalan lambat. Sementara itu, ekonomi Amerika Serikat (AS) menunjukkan perbaikan yang semakin solid. Ketidakpastian di pasar keuangan terpantau meningkat pasca Brexit, Pemilu Presiden AS, dan referendum konstitusi Italia. Di pasar komoditas, perbaikan harga komoditas turut mendorong perbaikan kinerja eksternal negara-negara pengekspor komoditas.

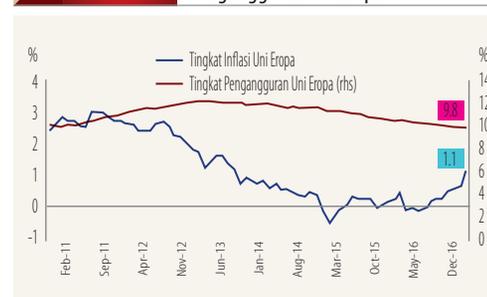
Di tengah ketidakpastian global yang meningkat pasca Pemilu Presiden AS, perekonomian AS menunjukkan perbaikan yang semakin solid, tercermin dari meningkatnya inflasi dan menguatnya sektor tenaga kerja. Perbaikan ini mendorong kenaikan *Fed Funds Rate* (FFR) di Desember 2016 dan diproyeksikan akan mengalami kenaikan tiga kali di 2017. Di sisi sisi, ekspektasi perbaikan ekonomi AS akan mendongkrak pertumbuhan global. Di sisi lain, laju normalisasi kebijakan moneter AS yang relatif lebih cepat, berpotensi mendorong *outflow* dari *Emerging Markets* (EM) ke AS dan *safe haven countries*.

Grafik I - 1 Tingkat Inflasi dan Tingkat Pengangguran Amerika Serikat

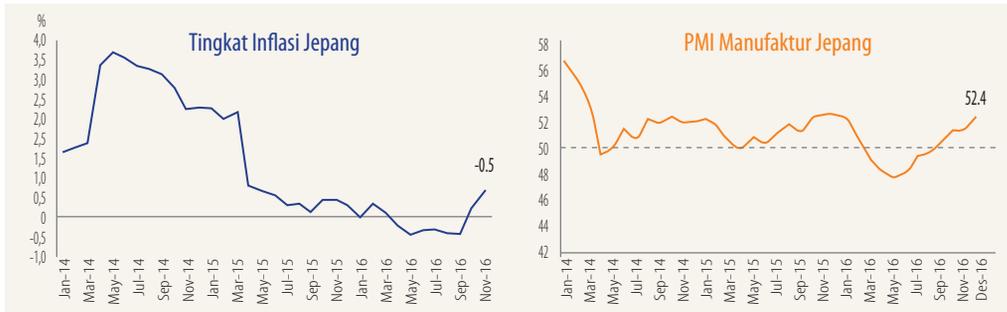


Pemulihan negara maju lainnya, seperti Uni Eropa, terus berlanjut di tengah meningkatnya risiko politik pasca kemenangan pendukung Brexit dan hasil referendum Italia yang menolak reformasi konstitusional. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan meningkatnya gerakan nasionalisme di Eropa yang bersikap skeptis terhadap manfaat keanggotaan negaranya di Uni Eropa. Sinyal perbaikan perekonomian Eropa terlihat dari berlanjutnya tren peningkatan inflasi yang mengarah ke target inflasi jangka menengah 2% dan penurunan tingkat pengangguran.

Grafik I - 2 Tingkat Inflasi dan Tingkat Pengangguran Uni Eropa



**Grafik I - 3** Tingkat Inflasi dan PMI Manufaktur Jepang



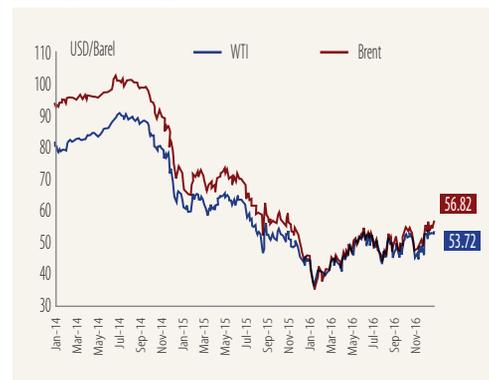
Untuk mempertahankan momentum perbaikan perekonomian, *European Central Bank* (ECB) memperpanjang program stimulus (pembelian obligasi pemerintah) yang sebelumnya berakhir pada Maret 2017 menjadi Desember 2017 dengan jumlah pembelian obligasi diturunkan dari EUR80 miliar/bulan menjadi EUR60 miliar/bulan.

Meski terbatas, perbaikan perekonomian Jepang secara keseluruhan juga terus berlanjut. Hal tersebut diindikasikan oleh tingkat inflasi yang sudah memasuki zona positif di akhir triwulan IV-2016 serta kinerja manufaktur yang mulai ekspansi.

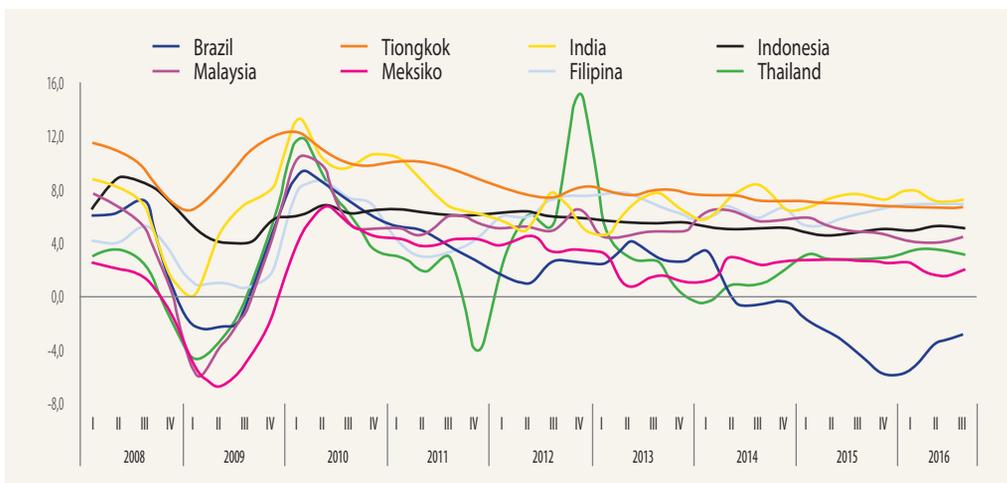
Sementara itu, perekonomian beberapa EM seperti Tiongkok, India, dan Meksiko terpantau membaik dipicu perbaikan kinerja eksternal seiring dengan membaiknya harga komoditas global.

Perbaikan harga komoditas global ditandai dengan kenaikan harga minyak yang persisten sepanjang triwulan IV-2016. Bank Dunia, dalam laporannya, memperkirakan bahwa kenaikan harga komoditas akan berlanjut pada 2017, meski dibayangi ketidakpastian terkait implementasi kesepakatan OPEC untuk mengurangi produksi mulai Januari 2017.

**Grafik I - 5** Perkembangan Harga Minyak Dunia



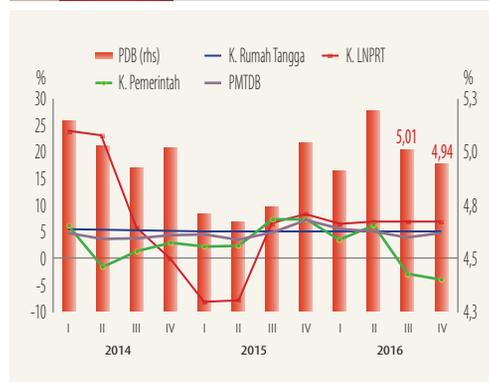
**Grafik I - 4** Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara EM



### 1.1.2 Perkembangan Ekonomi Domestik

Di tengah ketidakpastian ekonomi global, pertumbuhan ekonomi domestik triwulan IV-2016 tumbuh sedikit lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya terutama akibat melambatnya konsumsi Pemerintah. Stabilitas makroekonomi domestik secara umum masih terjaga, tercermin dari kinerja eksternal yang terus menunjukkan perbaikan dan tingkat inflasi yang rendah.

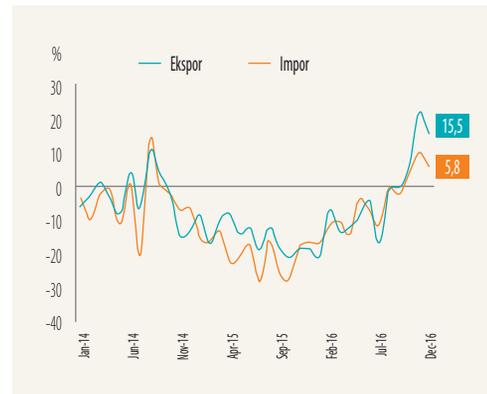
**Grafik I - 6** Pertumbuhan Ekonomi Indonesia



Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan IV-2016 tumbuh sebesar 4,94% yoy, sedikit lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,01% yoy terutama disebabkan melambatnya konsumsi Pemerintah seiring dengan kebijakan penghematan belanja pada APBN 2016. Secara keseluruhan, ekonomi Indonesia 2016 tercatat sebesar 5,02% yoy, tumbuh membaik dibandingkan 2015 yang sebesar 4,88% yoy.

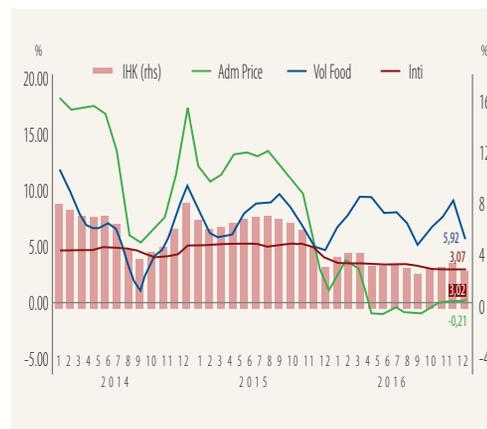
Sektor perdagangan tercatat menjadi pendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi di 2016. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi didorong oleh penurunan impor. Pengeluaran Pemerintah mencatatkan kontraksi, sementara investasi terpantau turun. Dari sisi pengeluaran, laju konsumsi Pemerintah terpantau mengalami pelambatan, sementara komponen lain relatif stabil. Dari sisi sektoral, laju pertumbuhan sektor pertambangan kembali melanjutkan perbaikan, setelah sejak triwulan I-2015 mencatatkan kontraksi.

**Grafik I - 7** Kinerja Eksternal Indonesia (yoy)



Pada akhir triwulan IV-2016, tingkat inflasi terkendali dan berada pada level 3,02% ini merupakan tingkat inflasi terendah sejak 2009. Rendahnya inflasi dipengaruhi oleh harga-harga di kelompok *administered price*, sementara inflasi inti terpantau masih terus menurun.

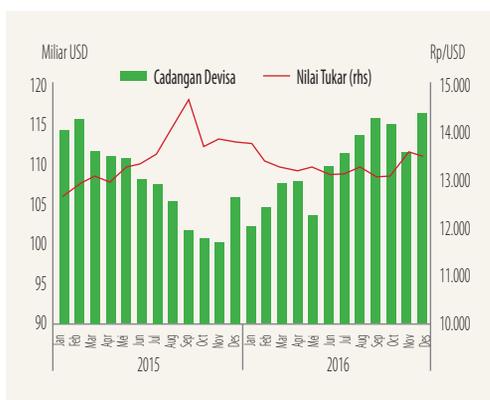
**Grafik I - 8** Tingkat Inflasi Indonesia (yoy)



Cadangan devisa pada akhir 2016 menunjukkan tren menguat dibandingkan akhir 2015. Pada Oktober - November 2016 cadangan devisa sempat mengalami penurunan sejalan dengan langkah stabilisasi nilai tukar oleh Bank Indonesia. Sampai akhir 2016, cadangan devisa meningkat menjadi sebesar USD116,4 miliar terkait penarikan pinjaman luar negeri Pemerintah dan penerbitan *global bonds*.

Jumlah cadangan devisa tersebut cukup untuk membiayai 8,8 bulan impor atau 8,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Jumlah tersebut berada di atas standar kecukupan internasional yaitu sekitar tiga bulan impor.

**Grafik I - 9** Cadangan Devisa Indonesia



### 1.1.3 Perkembangan Pasar Keuangan

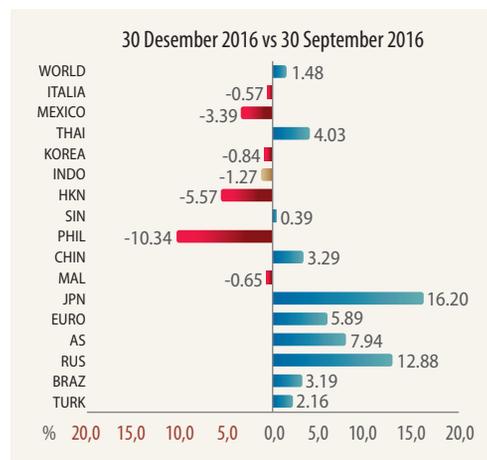
Sejalan meningkatnya risiko ketidakpastian di pasar keuangan global, pasar keuangan domestik pada triwulan IV-2016 sempat mengalami tekanan dengan volatilitas yang meningkat. Hal ini terutama dipengaruhi oleh sentimen kenaikan FFR dan hasil pemilihan presiden AS yang menyebabkan keluarnya aliran keluar modal nonresiden.

Sepanjang triwulan IV-2016, pasar keuangan domestik terpantau melemah secara *point-to-point* terutama dipengaruhi oleh faktor global terkait hasil pemilu presiden AS dan ekspektasi kenaikan FFR. Tekanan di pasar keuangan domestik terutama terjadi pada akhir triwulan juga dialami oleh bursa-bursa EM lainnya seiring peningkatan aksi jual oleh investor nonresiden.

Kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan sebesar 1,27% dibandingkan triwulan sebelumnya dipicu oleh aksi jual investor nonresiden. Koreksi harga saham juga dialami oleh sebagian besar bursa regional, diantaranya bursa Filipina yang mengalami penurunan 10,34% *qta*. Dari sisi domestik, sentimen positif terkait perbaikan ekonomi dan pencapaian *tax amnesty* belum

mampu menahan keluarnya aliran modal nonresiden. Selama periode pelaporan, investor nonresiden mencatatkan *net sell* yang signifikan mencapai Rp18,3 triliun dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencatatkan *net buy* Rp21,43 triliun. *Net sell* tertinggi terjadi pada November 2016 (Rp12,4 triliun), namun terpantau mereda pada Desember 2016. Secara keseluruhan, sepanjang 2016 pasar saham masih mencatatkan *net buy* sebesar Rp16,2 triliun.

**Grafik I - 10** Perkembangan Indeks Saham Global dan Regional

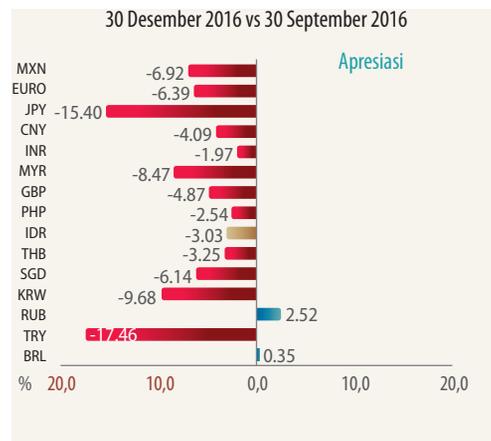


Meningkatnya tekanan jual nonresiden di pasar saham terutama terjadi pada empat bulan terakhir di 2016. Hal ini mengubah komposisi kepemilikan nonresiden di saham yang mengalami penurunan dari 63,79% (2015) menjadi 54,49% (2016).

Dinamika pasar keuangan di akhir 2016 relatif lebih *volatile* terkait dengan terjadinya berbagai *shocks* yaitu hasil pemilihan presiden di AS, hasil referendum Italia, serta ekspektasi kenaikan FFR. Berbagai *shocks* tersebut menjadikan investor nonresiden mengalihkan sebagian investasi portfolionya ke aset yang lebih aman (*safe haven assets*, seperti *UST-notes* dan *Japan Government Bonds*). Hal ini turut mendorong penurunan harga aset lain di negara berkembang, termasuk Indonesia. Sampai akhir periode laporan, seiring dengan *outflow* dari pasar keuangan domestik, semakin solidnya pemulihan ekonomi AS dan menguatnya

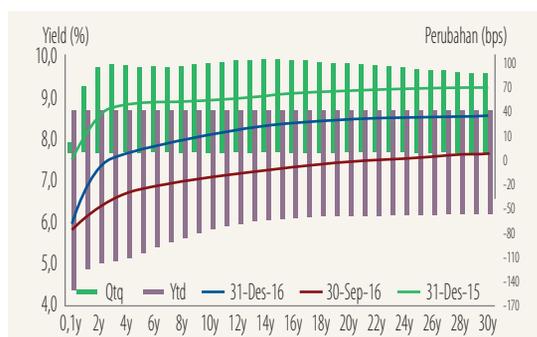
ekspektasi pengetatan kebijakan moneter AS nilai tukar Rupiah melemah 3,03% *qtq* ke level Rp13.470,- per USD.

**Grafik I - 11** Perkembangan Nilai Tukar Global dan Regional



Sejalan pelemahan IHSG dan nilai tukar Rupiah, pada triwulan IV-2016 kinerja pasar surat utang dalam negeri juga terpantau menurun tercermin dari kenaikan *yield* SBN di semua tenor. Imbal hasil (*yield*) SBN secara keseluruhan mengalami kenaikan rata-rata sebesar 95 *bps* apabila dibandingkan triwulan sebelumnya *yield* jangka pendek, menengah dan panjang naik masing-masing sebesar 76 *bps*, 98 *bps*, dan 99 *bps*. Sementara itu, *yield benchmark* Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun naik sebesar 101 *bps*. Sebagaimana di pasar saham, tekanan

**Grafik I - 12** Perkembangan Yield SBN



di pasar SBN juga diiringi oleh aksi jual investor nonresiden. Pada triwulan IV-2016, tercatat *net sell* investor nonresiden di pasar SBN sebesar Rp19,2 triliun (triwulan III: *net buy* Rp41,0 triliun).

Tekanan di pasar SBN domestik terjadi pada periode Oktober-November 2016 dan berdampak terhadap penurunan kepemilikan nonresiden di SBN dari 38,21% (2015) menjadi 37,55% (2016). Namun demikian, investor nonresiden kembali masuk pada Desember 2016. Atas perkembangan tersebut, secara *ytd* investor nonresiden masih membukukan *net buy* yang signifikan sebesar Rp107,3 triliun.

## 1.2 PERKEMBANGAN INDUSTRI PERBANKAN

### 1.2.1 Perkembangan Bank Umum Konvensional

Pada triwulan IV-2016, secara umum kondisi Bank Umum Konvensional (BUK) masih terjaga baik (*financially sound*), tercermin dari meningkatnya pertumbuhan aset, kredit, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) masing-masing sebesar 1,80% (*qtq*), 1,73% (*qtq*), dan 2,86% (*qtq*). Kondisi ketahanan BUK juga masih terjaga dengan CAR yang cukup tinggi (23,04%) atau meningkat 44 *bps* (*qtq*), serta rentabilitas yang stabil dengan ROA dan NIM masing-masing sebesar 2,37% dan 5,62%.

Di sisi lain, tingkat efisiensi BUK menurun terlihat dari BOPO yang naik 366 *bps* (*qtq*) menjadi 84,67%. Kualitas kredit juga sedikit menurun terlihat dari NPL *gross* yang naik 8 *bps* menjadi 3,12%, meskipun masih di bawah *threshold* 5%.

**Tabel I - 1** Kondisi Umum Perbankan Konvensional

Rasio	2016				qtq	ytd
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV		
Total Aset (dalam miliar rupiah)	5.954.688	6.146.676	6.223.754	6.335.502	▲ 1,80%	▲ 7,03%
Kredit (dalam miliar rupiah)	3.847.481	4.010.165	4.040.397	4.110.389	▲ 1,73%	▲ 5,28%
Dana Pihak Ketiga (dalam miliar rupiah)	4.294.176	4.397.620	4.405.603	4.531.654	▲ 2,86%	▲ 6,92%
- Giro (dalam miliar rupiah)	1.028.170	1.055.331	1.047.140	1.099.903	▲ 5,04%	▲ 13,08%
- Tabungan (dalam miliar rupiah)	1.274.070	1.366.924	1.370.365	1.398.567	▲ 2,06%	▲ 4,11%
- Deposito (dalam miliar rupiah)	1.991.936	1.975.364	1.988.098	2.033.176	▲ 2,27%	▲ 5,76%
CAR (%)	22,00	22,56	22,60	23,04	▲ 0,44	▲ 1,65
ROA (%)	2,44	2,31	2,38	2,37	▼ (0,01)	▲ 0,04
NIM (%)	5,55	5,59	5,65	5,62	▼ (0,02)	▲ 0,23
BOPO (%)	82,96	82,23	81,02	84,67	▲ 3,66	▲ 3,18
NPL Gross (%)	2,73	2,95	3,04	3,12	▲ 0,08	▲ 0,63
NPL Net (%)	1,28	1,39	1,37	1,38	▲ 0,01	▲ 0,24
LDR (%)	89,60	91,19	91,71	90,70	▼ (1,01)	▼ (1,41)

Ket : ▲ Menunjukkan peningkatan pertumbuhan dan berdampak baik ▼ Menunjukkan penurunan pertumbuhan dan berdampak kurang baik  
 ▲ Menunjukkan peningkatan pertumbuhan dan berdampak baik ▼ Menunjukkan penurunan pertumbuhan dan berdampak kurang baik

Sumber: Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI) dan LBU, November 2016

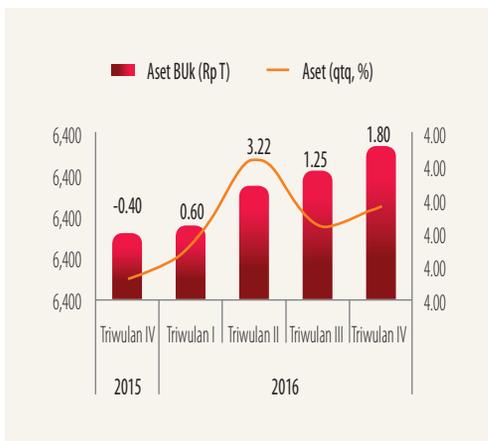
**A. Aset**

Total aset BUK pada triwulan IV-2016 tumbuh 1,80% (qtq), meningkat dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang tumbuh 1,25% (qtq). Aset tersebut sebagian besar terpusat pada kelompok BUSD (41,25%) dan Bank BUMN (40,22%). Adapun total aset kelompok BUSND, BPD, dan KCBA memiliki porsi aset di bawah 10% terhadap aset BUK.

**B. Dana Pihak Ketiga**

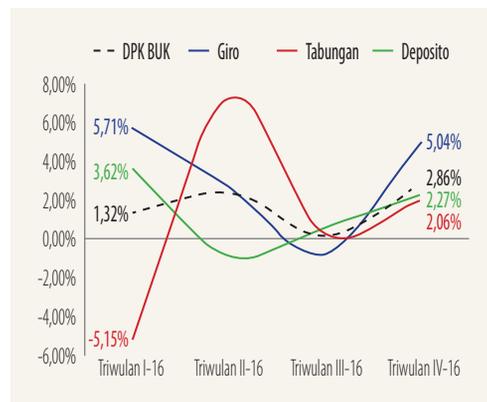
Sumber dana BUK masih didominasi oleh DPK dengan porsi mencapai 89,91%, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 88,77%. Pada triwulan IV-2016, DPK BUK tumbuh 2,86% (qtq) menjadi Rp4.531,6 triliun. Peningkatan DPK tersebut utamanya didorong oleh pertumbuhan giro sebesar 5,04% (qtq), diikuti tabungan dan deposito masing-masing sebesar 2,06% (qtq) dan 2,27% (qtq). Berdasarkan porsinya, deposito masih mendominasi DPK sebesar 44,87%, diikuti tabungan dan giro masing-masing sebesar 30,86% dan 24,27%.

**Grafik I - 13** Perkembangan Aset BUK



Sumber: LBU, November 2016

**Grafik I - 14** Tren Pertumbuhan DPK



Sumber: LBU, November 2016

Sementara itu, berdasarkan kelompok kepemilikan, DPK BUK masih dikuasai oleh kelompok BUSD (44 bank) sebesar 42,34%, diikuti oleh kelompok BUMN (empat bank) sebesar 41,39%. Sementara porsi DPK terkecil berada pada kelompok BUSND yaitu hanya sebesar 2,70%.

C. Kredit

Penggunaan dana BUK sebagian besar disalurkan untuk kredit (66,86%), yang umumnya diberikan kepada pihak ketiga non bank (99,29%). Pada triwulan IV-2016, pertumbuhan kredit BUK sebesar 1,73% (*qtq*), meningkat dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 0,75% (*qtq*).

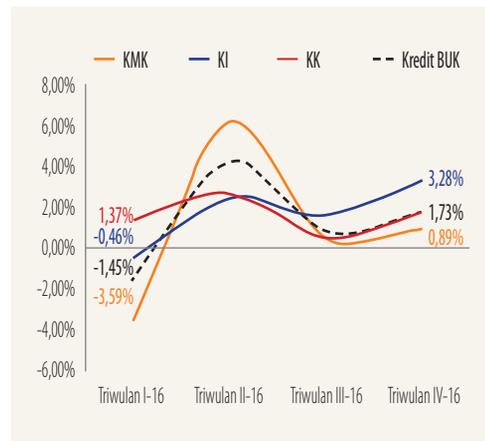
Perlambatan tersebut merupakan dampak dari pertumbuhan ekonomi yang masih terbatas serta sikap hati-hati perbankan dalam menyalurkan kreditnya sejalan dengan tren kenaikan risiko kredit (NPL). Meskipun demikian, pertumbuhan kredit mulai menunjukkan perbaikan seiring dengan indikasi perbaikan konsumsi dan aktivitas dunia usaha menjelang akhir tahun.

Berdasarkan penggunaan, kredit masih didominasi oleh Kredit Modal Kerja (KMK) dengan porsi 46,78%, diikuti dengan Kredit Konsumsi (KK) dan Kredit Investasi (KI) dengan porsi masing-masing sebesar 27,33% dan 25,90%. Pertumbuhan kredit tertinggi terjadi pada KI yaitu sebesar 3,28% (*qtq*), diikuti pertumbuhan KK dan KMK masing-masing sebesar 1,73% (*qtq*) dan 0,89% (*qtq*). Dibandingkan awal 2016, pertumbuhan kredit mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan ekonomi domestik yang mulai membaik.

D. Rentabilitas

Rentabilitas BUK pada triwulan IV-2016 relatif stabil, tercermin dari ROA dan NIM

**Grafik I - 15** Tren Pertumbuhan Kredit

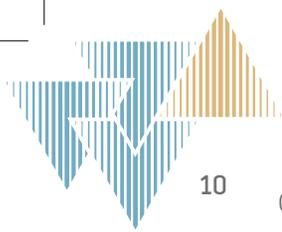


Sumber: LBU, November 2016

masing-masing sebesar 2,37% dan 5,62%, walaupun mengalami sedikit penurunan. Penurunan ROA tersebut disebabkan oleh pertumbuhan aset (0,75%, *qtq*) yang lebih besar dibandingkan pertumbuhan laba perbankan (0,27%, *qtq*).

Berdasarkan kelompok bank, ROA tertinggi berada pada kelompok bank BUMN sebesar 2,82%, sementara NIM tertinggi terdapat pada kelompok BPD sebesar 7%. Tingginya NIM pada kelompok BPD dipengaruhi oleh dominasi kredit konsumsi (69,65%) seiring dengan relatif tingginya suku bunga KK dibandingkan jenis kredit lainnya. Sementara itu, porsi KMK dan KI pada BPD masing-masing hanya sebesar 19,03% dan 11,32%.

Di sisi lain, terdapat penurunan efisiensi perbankan yang terindikasi oleh peningkatan BOPO sebesar 366 *bps* (*qtq*) menjadi 84,67%. Berdasarkan kelompok bank, kelompok BUSND memiliki rasio BOPO tertinggi yaitu sebesar 92,47%. Hal tersebut sejalan dengan karakteristik BUSND yang memberikan suku bunga simpanan yang lebih tinggi yang berpengaruh pada besarnya beban bunga BUSND.



## E. Permodalan

Pada triwulan IV-2016, modal BUK tumbuh 2,69% (*qtq*), meningkat dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya. Permodalan tersebut sebagian besar didominasi oleh modal inti sebesar 92,53%, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 92,44%. Sementara itu, Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) BUK tumbuh stabil 0,72% (*qtq*). Rasio kecukupan modal (CAR) BUK dan rasio modal inti terhadap ATMR masing-masing meningkat 44 *bps* (*qtq*) menjadi 23,04% dan 43 *bps* (*qtq*) menjadi 21,32%.

Berdasarkan kelompok bank, CAR tertinggi berada pada kelompok Kantor Cabang Bank Asing (KCBA), yaitu 48,28%, jauh di atas CAR industri. Hal tersebut sebagai dampak kewajiban KCBA dalam memenuhi pembentukan *Capital Equivalency Maintained Assets* (CEMA) yang umumnya menempatkan modal pada Surat Utang Negara (SUN) yang memiliki bobot ATMR sebesar 0%. Selain itu, tingginya CAR KCBA juga sesuai dengan karakteristik-nya yang mendapat dukungan pendanaan dari *head office* untuk memperkuat kegiatan operasional.

1.2.2 Perkembangan Bank  
Perkreditan Rakyat (BPR)

Pada triwulan IV-2016, industri BPR menunjukkan kondisi yang cukup baik, terlihat dari permodalan yang terjaga dengan rasio CAR mencapai 22,66%. Dari fungsi intermediasi, terjadi perlambatan yang terekam dari penurunan LDR menjadi 77,19%. Penurunan tersebut disebabkan kredit yang hanya tumbuh sebesar 1,12% di sisi lain DPK tumbuh lebih tinggi yakni 2,21%.

Di sisi lain, kualitas kredit BPR belum menunjukkan perbaikan. Hal tersebut tercermin dari NPL *gross* dan NPL *net* masing-masing sebesar 6,56% dan 4,70%. Sementara likuiditas BPR cukup memadai tercermin dari *cash ratio* (CR) yang tercatat 16,73% atau meningkat 80 *bps* (*qtq*) dan jauh di atas *threshold* 4,05%.

## A. Aset

Aset BPR tumbuh melambat 2,17% (*qtq*) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya 2,90% (*qtq*). Perlambatan dipengaruhi oleh komponen aset penempatan pada bank lain, agunan yang diambil alih, dan aset lain-lain yang tumbuh melambat masing-masing

Tabel I - 2 Kondisi Umum BPR

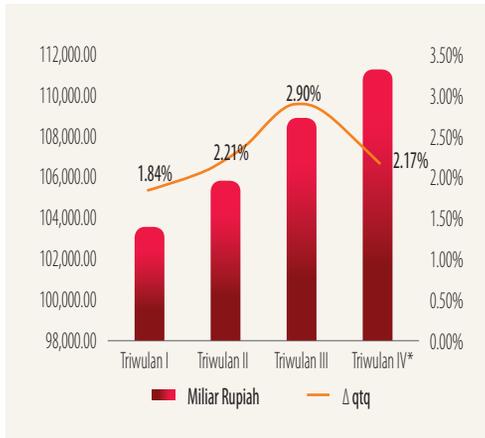
Rasio	2016				<i>qtq</i>	<i>ytd</i>
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV		
Total Aset (dalam miliar rupiah)	103.583	105.867	108.943	111.307	↑ 2,17%	↑ 9,43%
Kredit (dalam miliar rupiah)	76.216	79.764	80.083	80.982	↑ 1,12%	↑ 8,25%
Dana Pihak Ketiga (dalam miliar rupiah)	69.354	70.238	72.756	74.364	↑ 2,21%	↑ 10,55%
- Tabungan (dalam miliar rupiah)	20.910	20.723	22.013	23.040	↑ 4,66%	↑ 9,93%
- Deposito (dalam miliar rupiah)	48.444	49.516	50.743	51.325	↑ 1,15%	↑ 10,84%
NPL Gross (%)	6,16	6,19	6,58	6,56	↓ (0,02)	↑ 1,19
NPL Net (%)	4,39	4,51	4,17	4,70	↑ 0,53	↑ 1,36
ROA (%)	2,87	2,62	2,58	2,67	↑ 0,09	↓ (0,04)
LDR (%)	77,22	79,67	77,72	77,19	↓ (0,53)	↓ (0,62)
CR (%)	16,57	14,85	15,93	16,73	↑ 0,80	↓ (2,41)
KAP (%)	4,05	4,19	4,38	4,40	↑ 0,02	↑ 0,72
ROE (%)	25,93	23,32	23,09	24,14	↑ 1,05	↓ (0,62)
BOPO (%)	81,18	82,33	82,04	81,15	↓ (0,89)	↓ (0,44)
CAR (%)	23,64	22,17	22,45	22,66	↑ 0,21	↑ 0,73

Ket : ↑ Menunjukkan peningkatan pertumbuhan dan berdampak baik ↓ Menunjukkan penurunan pertumbuhan dan berdampak kurang baik  
 ↓ Menunjukkan penurunan pertumbuhan dan berdampak baik ↑ Menunjukkan peningkatan pertumbuhan dan berdampak kurang baik

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia BPR, November 2016

sebesar 5,20%, 7,12%, dan 4,33%. Sementara itu, porsi aset terbesar BPR merupakan kredit yang diberikan (72,76%) diikuti penempatan pada bank lain (23,43%).

**Grafik I - 16** Tren Aset BPR

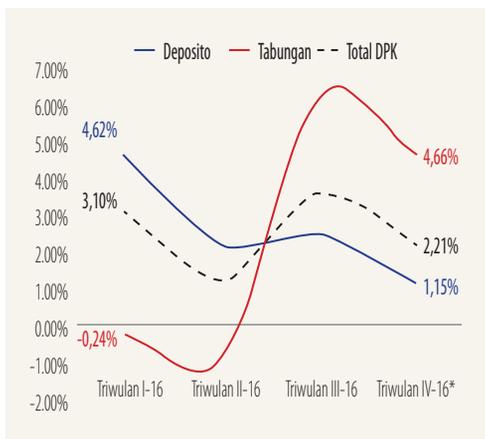


Sumber: Statistik Perbankan Indonesia BPR, November 2016

**B. Dana Pihak Ketiga (DPK)**

Komposisi sumber dana BPR masih didominasi oleh DPK (81,83%), diikuti pinjaman yang diterima (14,35%), dan antar bank pasiva (3,82%). DPK BPR tumbuh melambat 2,21% (qtq) dibandingkan dengan 3,56% (qtq) pada triwulan sebelumnya, yang terjadi pada deposito dan tabungan. Porsi terbesar DPK masih dikuasai oleh deposito yaitu sebesar (69,02%) sedangkan tabungan hanya 30,98%.

**Grafik I - 17** Tren Pertumbuhan DPK

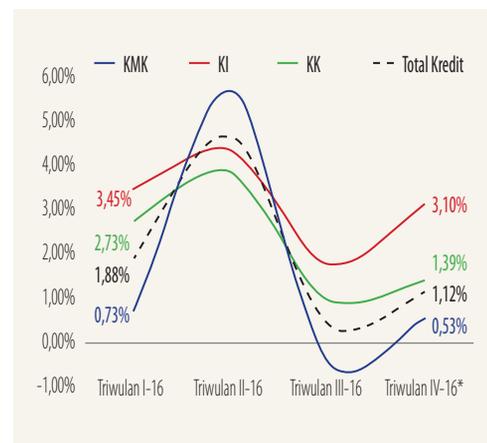


Sumber: Statistik Perbankan Indonesia BPR, November 2016

**C. Kredit**

Penyaluran kredit BPR tumbuh sebesar 1,12% (qtq) atau lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 0,40% (qtq). Penyaluran kredit BPR didominasi kredit konsumsi dan modal kerja masing-masing sebesar 49,06% dan 44,09%. Adapun kredit investasi BPR hanya sebesar 6,85%, namun mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 3,10%(qtq).

**Grafik I - 18** Pertumbuhan Kredit BPR dalam miliar rupiah



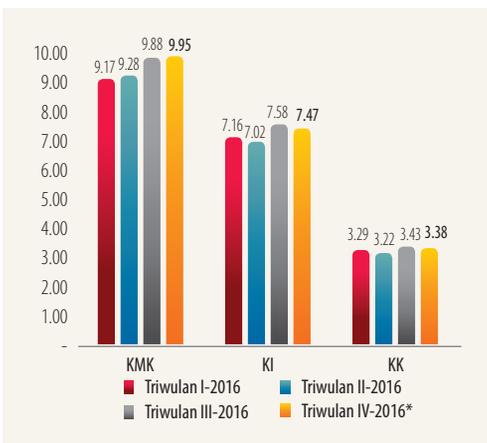
**Tabel I - 3** Porsi Kredit BPR dalam miliar rupiah

Jenis Penggunaan	2016				Porsi Triwulan IV
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
Modal Kerja	33,759.60	35,664.53	35,517.14	35,703.97	44.09%
Investasi	5,068.64	5,286.94	5,378.40	5,545.34	6.85%
Konsumsi	37,387.33	38,812.79	39,187.16	39,732.73	49.06%
<b>Total Kredit</b>	<b>76,215.58</b>	<b>79,764.26</b>	<b>80,082.70</b>	<b>80,982.04</b>	<b>100%</b>

Kredit konsumsi, yang memiliki porsi terbesar, mempunyai kualitas kredit yang lebih baik dibandingkan jenis kredit lain. NPL kredit konsumsi tercatat sebesar 3,38% lebih kecil dibandingkan NPL pada kredit modal kerja (9,95%) dan kredit investasi (7,47%). Secara umum terdapat sedikit perbaikan kualitas kredit BPR, terlihat dari NPL gross yang turun 2 bps menjadi 6,56%. Penurunan tersebut didorong oleh penurunan NPL

pada kredit investasi dan konsumsi. Sementara NPL pada kredit modal kerja meningkat menjadi 9,95%.

**Grafik I - 19** NPL Gross Kredit BPR (%)

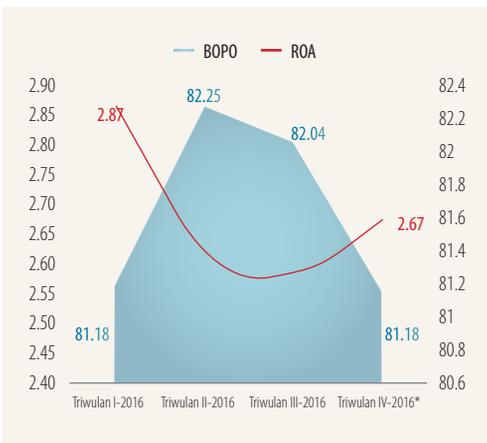


Sumber: Statistik Perbankan Indonesia BPR, November 2016

**D. Rentabilitas**

Rentabilitas BPR masih terjaga, tercermin dari ROA BPR yang relatif stabil sebesar 2,67%. Pertumbuhan ROA disebabkan peningkatan laba BPR sebesar 29,42%. Selain itu, efisiensi BPR juga membaik terlihat dari BOPO yang turun menjadi 81,15%.

**Grafik I - 20** Grafik ROA dan BOPO BPR



Sumber: Statistik Perbankan Indonesia BPR, November 2016

**E. Permodalan**

Rentabilitas yang terjaga berdampak pada kondisi permodalan BPR dengan CAR yang cukup tinggi sebesar 22,66%. Tingginya CAR dipengaruhi modal BPR yang tumbuh 2,53% atau mencapai Rp16 triliun pada triwulan IV-2016 dan relatif memadai untuk menyerap risiko yang dihadapi. Pertumbuhan modal ini dipengaruhi adanya tambahan modal disetor dan peningkatan laba BPR.

**1.2.3 Perkembangan Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Pada triwulan IV-2016, kredit UMKM tumbuh 2,84% (*qtq*) menjadi Rp804,1 triliun, setara dengan 18,77% dari total kredit perbankan, dan mencapai lebih 10% dari total kredit pada akhir 2016.

Berdasarkan sektor ekonomi, kredit UMKM terpusat pada sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 53,27%, diikuti oleh industri pengolahan 10,38%, serta pertanian, perburuan dan kehutanan 8,39%.

Dari ketiga sektor tersebut, rasio NPL *gross* UMKM tertinggi terdapat pada sektor industri pengolahan sebesar 4,30%, diikuti sektor pertanian, serta perdagangan besar dan eceran masing-masing sebesar 4,13% dan 4,04%. Secara keseluruhan, terdapat perbaikan kualitas kredit dengan penurunan jumlah NPL sebesar 1,28% (*qtq*) menjadi Rp33,7 triliun.

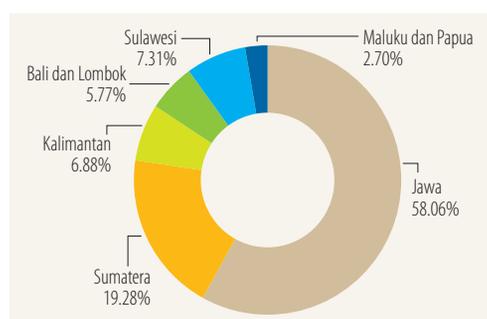
**Tabel I - 4** Konsentrasi Penyaluran UMKM

Jenis	Triwulan I-2016		Triwulan II-2016		Triwulan III-2016		Triwulan IV-2016		NPL
	miliar rupiah	Δ	miliar rupiah	Δ	miliar rupiah	Δ	miliar rupiah	Δ	
<b>Pertanian, Perburuan dan Kehutanan</b>									
Baki Debet	61,959	1.43%	64,227	3.66%	64,040	-0.29%	67,453	5.33%	
NPL	2,730	8.33%	2,813	3.04%	2,720	-3.29%	2,783	2.31%	4.13%
<b>Industri Pengolahan</b>									
Baki Debet	76,232	-0.37%	79,091	3.75%	79,206	0.15%	83,487	5.40%	
NPL	2,968	7.60%	3,174	6.93%	3,456	8.90%	3,590	3.88%	4.30%
<b>Perdagangan Besar dan Eceran</b>									
Baki Debet	399,019	0.80%	419,701	5.18%	423,225	0.84%	428,300	1.20%	
NPL	17,073	12.88%	17,391	1.86%	17,930	3.10%	17,323	-3.38%	4.04%
<b>Total Baki Debet</b>	<b>738,000</b>	<b>-0.24%</b>	<b>774,581</b>	<b>4.96%</b>	<b>781,906</b>	<b>0.95%</b>	<b>804,076</b>	<b>2.84%</b>	
<b>Total NPL</b>	<b>32,765</b>	<b>9.98%</b>	<b>33,500</b>	<b>2.24%</b>	<b>34,134</b>	<b>1.89%</b>	<b>33,696</b>	<b>-1.28%</b>	<b>4.19%</b>

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, November 2016

Penyebaran penyaluran UMKM masih terpusat di pulau Jawa dan Sumatera, di mana lima provinsi dengan penyaluran terbesar (DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara) mengambil porsi sebesar 58,27%, meningkat dibandingkan porsi triwulan sebelumnya (58,16%). Adapun masing-masing porsi penyaluran dari kelima provinsi tersebut yaitu DKI Jakarta (14,72%), Jawa Timur (13,44%), Jawa Barat (13,27%), Jawa Tengah (10,97%), dan Sumatera Utara (5,86%).

Hal tersebut berbeda jika dibandingkan penyebaran di Indonesia bagian timur dan tengah, di mana lima provinsi dengan penyaluran terbesar (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, Maluku, dan Papua) mengambil porsi sebesar 22,65%. Rendahnya penyaluran kredit UMKM di wilayah Indonesia bagian timur dan tengah disebabkan infrastruktur belum mendukung dan biaya relatif tinggi karena faktor geografis Indonesia.

**Grafik I - 21** Penyebaran UMKM Berdasarkan Wilayah


Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, November 2016

Berdasarkan kelompok bank, sebagian besar kredit UMKM disalurkan oleh kelompok BUMN (55,92%), diikuti oleh kelompok BUSN (34,60%), kelompok BPD (7,67%) serta kelompok KCBA dan bank campuran sebesar 1,81%. Apabila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, penyaluran kredit UMKM pada kelompok BUMN dan BPD mengalami peningkatan, sementara pada kelompok BUSN dan Bank Asing (KCBA dan Campuran) mengalami penurunan.

**Tabel I - 5** Porsi UMKM Berdasarkan Kelompok Bank (dalam miliar rupiah)

Kelompok Bank	Baki Debet September 2016	Persentase Triwulan III 2016	Baki Debet November 2016	Persentase Triwulan IV 2016
BUMN	432,150	55.27%	449,627	55.92%
BPD	56,730	7.26%	61,688	7.67%
BUSN	278,726	35.65%	278,223	34.60%
KCBA dan Campuran	14,301	1.83%	14,538	1.81%
<b>Total UMKM</b>	<b>781,906</b>	<b>100%</b>	<b>804,076</b>	<b>100%</b>

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI), November 2016

## 1.2.4 Penguatan Sektor Riil Melalui Penyaluran Kredit Produktif

Sektor lapangan usaha yang menjadi perhatian dan fokus terhadap sektor ekonomi prioritas pemerintah adalah pertanian, perikanan, pertambangan, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, serta industri pengolahan. Keenam sektor tersebut merupakan sektor yang krusial

**Tabel I - 6** PDB Sektor Ekonomi Prioritas

Sektor Ekonomi Prioritas	2016			Δ		Persentase
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	qtq	yoy	
Perdagangan Besar dan Eceran	303.402	315.018	319.375	1.38%	4.04%	13.15%
Industri Pengolahan	489.54	507.495	511.165	0.72%	4.57%	21.05%
Pertanian, Kehutanan, Perburuan	235.318	268.98	283.007	5.21%	2.43%	11.65%
Konstruksi	223.019	226.482	236.374	4.37%	5.69%	9.73%
Pertambangan dan Penggalian	188.993	185.213	190.173	2.68%	1.93%	7.83%
Perikanan	52.608	52.986	54.445	2.75%	5.47%	2.24%
Sektor Lainnya	769.76	797.034	834.183	4.66%	7.11%	34.35%
<b>Total</b>	<b>2.262.640</b>	<b>2.353.208</b>	<b>2.428.722</b>	<b>3.21%</b>	<b>5.02%</b>	<b>100%</b>

Sumber: BPS

bagi perekonomian Indonesia karena mampu menyerap tenaga kerja yang cukup besar serta menjadi kontributor yang cukup signifikan bagi pertumbuhan ekonomi bila diukur berdasarkan PDB per sektor ekonomi.

Dari keenam sektor tersebut, sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan besar dan

eceran merupakan sektor ekonomi lapangan usaha yang paling banyak menerima kredit perbankan dengan porsi masing-masing sebesar 17,63% dan 19,38%. Sementara untuk sektor non lapangan usaha, porsi kredit perbankan terbesar disalurkan pada sektor rumah tangga sebesar 22,53%.

**Tabel I - 7** Konsentrasi Kredit Perbankan Menurut Sektor Ekonomi (%)

No.	Sektor Ekonomi	Triwulan III 2016 Kredit (dalam triliun rupiah)	Triwulan IV 2016 Kredit (dalam triliun rupiah)	Δ Kredit			Porsi
				qtq	ytd	yoy	
				<b>Lapangan Usaha</b>			
1	Pertanian, Perburuan dan Kehutanan	272,95	279,21	2,29%	9,51%	16,67%	6,52%
2	Perikanan	9,39	9,38	-0,05%	6,09%	9,23%	0,22%
3	Pertambangan dan Penggalian	116,09	127,51	9,84%	-5,74%	-3,44%	2,98%
4	Industri Pengolahan	743,52	755,54	1,62%	-0,59%	3,97%	17,63%
5	Listrik, Gas, dan Air	121,52	133,33	9,71%	34,07%	40,17%	3,11%
6	Konstruksi	205,04	210,06	2,44%	21,47%	21,42%	4,90%
7	Perdagangan Besar dan Eceran	831,02	830,28	-0,09%	4,77%	7,97%	19,38%
8	Penyediaan Akomodasi dan PMM	92,39	92,90	0,55%	8,19%	11,51%	2,17%
9	Transportasi	168,31	165,34	-1,77%	-6,88%	-4,40%	3,86%
10	Perantara Keuangan	176,86	181,06	2,38%	9,95%	12,12%	4,23%
11	Real Estate	200,84	203,18	1,17%	9,97%	13,40%	4,74%
12	Administrasi Pemerintahan	14,54	14,76	1,54%	14,33%	18,38%	0,34%
13	Jasa Pendidikan	8,48	8,47	-0,11%	4,22%	6,83%	0,20%
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	16,18	17,17	6,10%	-20,11%	12,18%	0,40%
15	Jasa Kemasyarakatan	56,89	57,25	0,62%	-1,28%	1,61%	1,34%
16	Jasa Perorangan	2,58	2,64	2,01%	-2,64%	-1,66%	0,06%
17	Badan Internasional	0,10	0,24	41,78%	118,05%	191,35%	0,01%
18	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	10,14	10,79	6,35%	-9,82%	-2,48%	0,25%
<b>Bukan Lapangan Usaha</b>							
19	Rumah Tangga	955,44	965,37	1,04%	5,36%	6,20%	22,53%
20	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	210,09	220,47	4,94%	16,34%	12,96%	5,15%
<b>Total</b>		<b>4.212,38</b>	<b>4.284,94</b>	<b>1,72%</b>	<b>5,59%</b>	<b>8,46%</b>	<b>100%</b>

Sumber: Diolah dari Statistik Perbankan Indonesia, November 2016

Hal tersebut mengindikasikan belum maksimalnya penyaluran kredit kepada sektor ekonomi lain yang memiliki porsi PDB cukup besar seperti sektor pertanian, konstruksi, pertambangan, dan perikanan karena porsi kredit perbankan yang diterima masih di bawah 10%. Di sisi lain, besarnya porsi kredit pada sektor rumah tangga menunjukkan tingginya permintaan dari masyarakat terutama pada subsektor rumah tangga untuk kepemilikan rumah tinggal dan kredit kendaraan bermotor.

Penyaluran kredit yang pada awal tahun mengalami pertumbuhan negatif (*qtq*), mulai bergerak naik menjelang akhir tahun meskipun masih melambat, diantaranya pada sektor pertanian, pertambangan, dan industri pengolahan yang mengalami pertumbuhan di triwulan IV-2016.

Pertumbuhan cukup signifikan terjadi pada sektor pertambangan yang tumbuh 9,84%. Hal tersebut dipengaruhi neraca ekspor impor pertambangan yang tumbuh positif, dipicu kenaikan harga beberapa komoditas tambang. Menurunnya persediaan batubara di Tiongkok serta meningkatnya permintaan untuk kebutuhan infrastruktur berdampak pada kenaikan harga logam dunia secara keseluruhan.

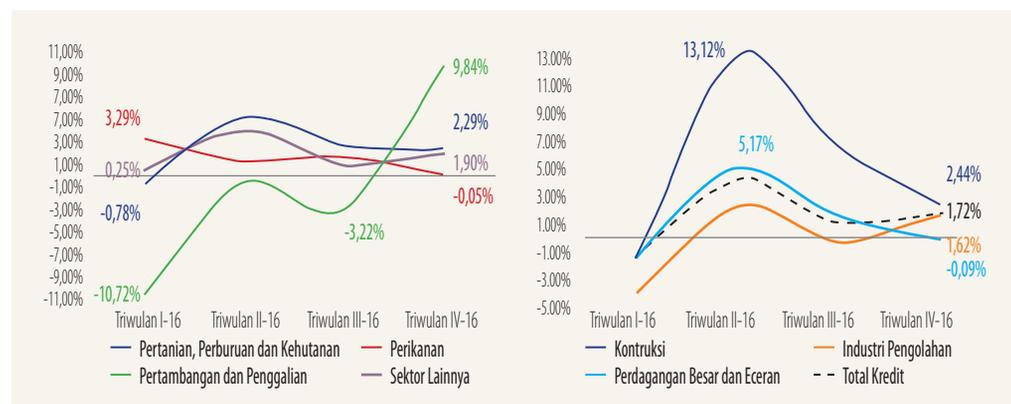
Sementara itu, sektor prioritas yang mengalami perlambatan pertumbuhan kredit antara lain terjadi pada sektor perikanan, konstruksi, serta perdagangan besar dan eceran. Sektor konstruksi

mengalami kontraksi yang cukup signifikan dari 13,12% (*qtq*) pada triwulan sebelumnya menjadi 2,44% (*qtq*) pada triwulan IV-2016. Perlambatan ini terjadi akibat terbatasnya minat swasta untuk melakukan ekspansi dan menurunnya konsumsi belanja pemerintah. Hal tersebut tercermin dari meningkatnya volume impor bahan bangunan yang diiringi pelemahan investasi pada barang modal.

Sektor perdagangan besar dan eceran yang merupakan sektor ekonomi dengan penyaluran kredit tertinggi, juga mengalami penurunan signifikan dari pertumbuhan triwulan sebelumnya yaitu sebesar 5,17% (*qtq*) mengalami penurunan sebesar 0,09% (*qtq*). Hal ini dipengaruhi menurunnya permintaan komoditas perdagangan pasca klimaks permintaan yang terjadi di tengah tahun pada hari raya Idul Fitri.

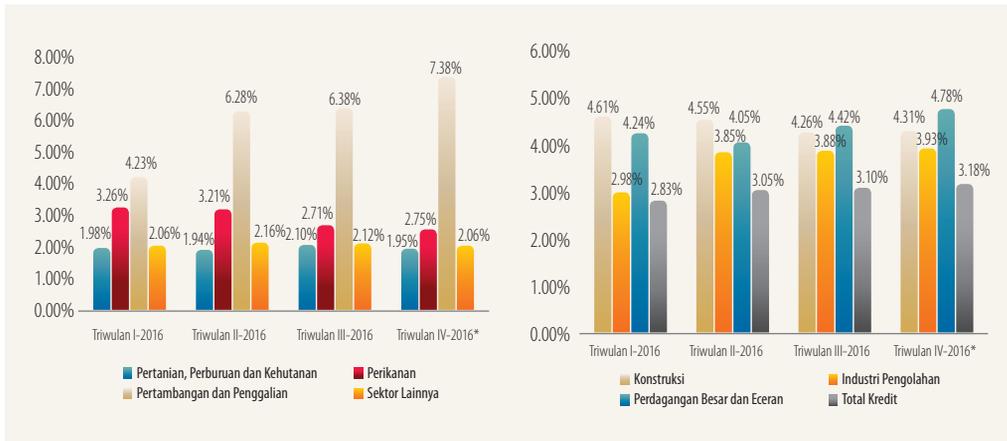
Kualitas kredit yang kurang baik menjadi penyebab perbankan cenderung berhati-hati dalam menyalurkan kredit. NPL *gross* perbankan terus meningkat sepanjang tahun dan berada pada posisi 3,18% pada akhir triwulan IV-2016. Selain itu, terdapat beberapa sektor prioritas yang memiliki NPL *gross* di atas rata-rata industri, yaitu sektor pertambangan, konstruksi, industri pengolahan, serta perdagangan besar dan eceran. Oleh karena itu, dalam mendukung sektor prioritas, perbankan tetap perlu memperhatikan risiko yang dihadapi pada setiap industri.

**Grafik I - 22** Pertumbuhan Kredit Perbankan (*qtq*)



Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, November 2016

**Grafik I - 23** NPL Gross Sektor Ekonomi



Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, November 2016

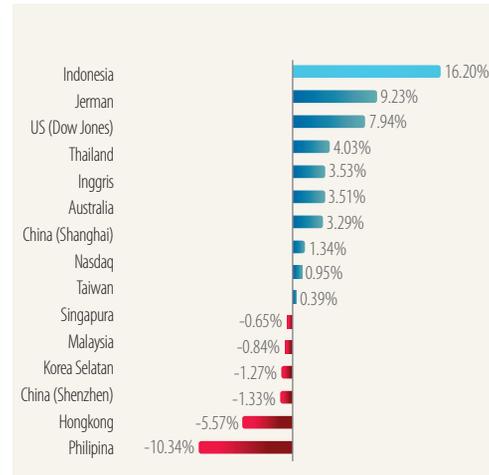
### 1.3 PERKEMBANGAN INDUSTRI PASAR MODAL

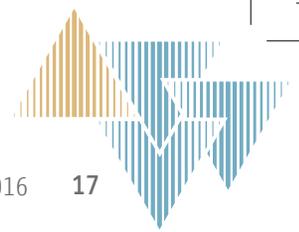
#### 1.3.1 Perkembangan Perdagangan Efek

Selain dipengaruhi kondisi global, kinerja Pasar Modal Indonesia selama triwulan IV-2016 juga dipengaruhi faktor domestik, di antaranya apresiasi terhadap pelaksanaan *tax amnesty*, *BI-7 Day Repo Rate* yang dipertahankan di level 4,75%, dengan suku bunga *Deposit Facility* tetap 4,00% dan *Lending Facility* tetap 5,50% yang berlaku efektif sejak 16 Desember 2016, inflasi Desember 2016 sebesar 0,42% terendah sejak 2010. Beberapa kondisi pendukung lainnya adalah neraca perdagangan Indonesia pada akhir Desember naik USD4,9 miliar menjadi USD116,4 miliar atau meningkat 4,39% dibandingkan periode sebelumnya serta melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS menjadi Rp13.470/USD.

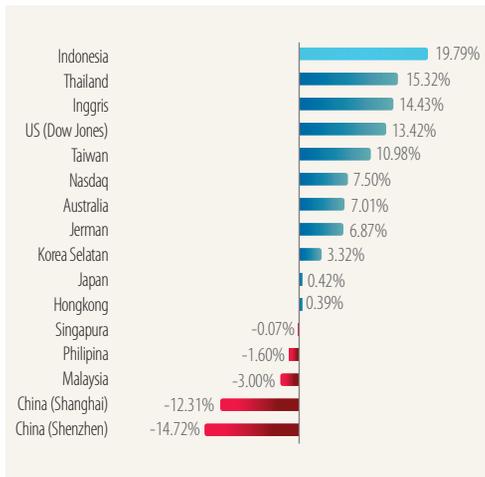
Faktor-faktor tersebut membuat kinerja indeks saham dan obligasi mengalami penurunan. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada penutupan akhir triwulan IV-2016 berada pada posisi 5.296,71 atau mengalami penurunan sebesar -1,27% jika dibandingkan dengan posisi akhir triwulan III-2016.

**Grafik I - 24** Kinerja Indeks di Beberapa Bursa Utama (qtq)





**Grafik I - 25** Kinerja Indeks di Beberapa Bursa Utama (ytd)

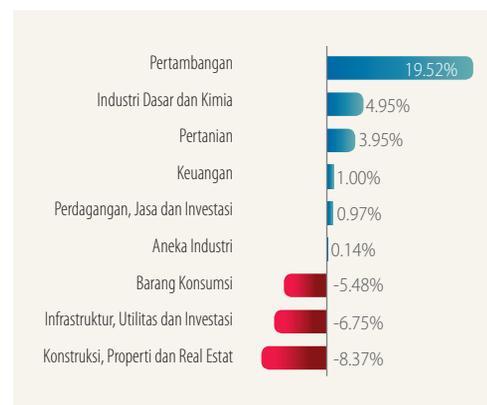


Nilai kapitalisasi pasar saham mengalami penurunan sebesar -0,79% dibandingkan periode sebelumnya menjadi Rp5.753,61 triliun. Rata-rata nilai dan frekuensi serta volume perdagangan harian mengalami peningkatan masing-masing sebesar 40,46%, dan 11,06%, serta 85,23%. Peningkatan nilai transaksi tersebut dikarenakan terjadi peningkatan transaksi oleh investor domestik. Secara regional, IHSG menempati posisi kedua setelah Thailand dengan pertumbuhan sebesar 15,32% (ytd).

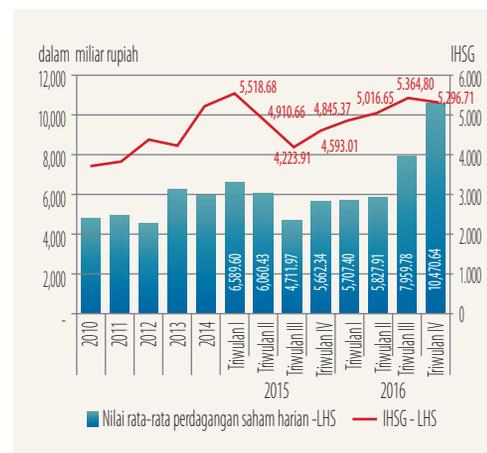
Kinerja indeks sektoral pada triwulan IV-2016 bervariasi jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Kenaikan tertinggi terdapat pada indeks sektor pertambangan sebesar 19,52%. Peningkatan indeks pada sektor ini dipengaruhi oleh peningkatan harga komoditas yang naik selama triwulan IV-2016, diantaranya emas, batubara dan minyak bumi. Sementara itu, penurunan terbesar terdapat pada indeks

properti sebesar -8,37%. Penurunan tersebut dikarenakan masih belum pulihnya daya beli masyarakat yang dipengaruhi oleh perlambatan perekonomian global meskipun Bank Indonesia telah menurunkan rasio pinjaman terhadap aset, *loan to value* (LTV) dan *loan to financing* (LTF), dan *tier* untuk pembelian rumah ke dua dan selanjutnya.

**Grafik I - 26** Perkembangan Indeks Industri Indonesia (qtq)



**Grafik I - 27** Perkembangan IHSG dan Nilai Rata-rata Perdagangan Saham Harian

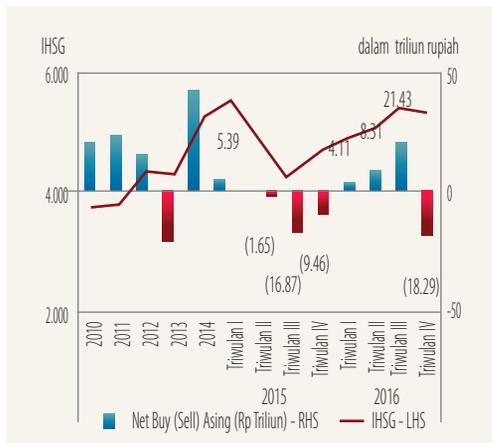


**Tabel I - 8** Perkembangan Perdagangan Saham Oleh Pemodal Asing dan Domestik

Indikator (Rata-rata harian)	2015	2016				
	Triwulan IV	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
Nilai Perdagangan Saham Harian (dalam miliar rupiah)	5,484.16	5,707.40	5,827.91	7,959.78	10,470.64	
Investor Asing (dalam miliar rupiah)						
Beli	1,740.80	2,682.89	2,528.81	3,451.13	2,596.91	
Jual	2,550.93	2,615.57	2,387.30	3,087.85	2,860.15	
Investor Domestik (dalam miliar rupiah)						
Beli	3,087.71	3,024.52	3,299.11	4,508.65	7,900.73	
Jual	2,933.23	3,091.84	3,440.61	4,871.92	7,610.49	
Frekuensi Perdagangan Saham Harian	230,188	236,976	242,989	282,768	294,098	

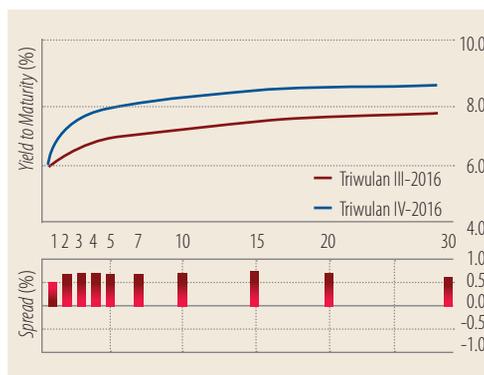
Selama triwulan IV-2016 transaksi investor asing membukukan *net sell* sejumlah Rp18,29 triliun namun, sepanjang 2016 masih membukukan *net buy* sebesar Rp16,17 triliun.

**Grafik I - 28** Perkembangan IHSG dan Net Asing



Periode	IHSG	Net Sell/Buy (Rp Triliun)
2015	Triwulan I	5,518.68
	Triwulan II	4,910.66
	Triwulan III	4,223.91
	Triwulan IV	4,593.01
<b>Total</b>		<b>-22.59</b>
2016	Triwulan I	4,845.37
	Triwulan II	5,016.65
	Triwulan III	5,364.80
	Triwulan IV	5,296.71
<b>Total</b>		<b>16,17</b>

**Grafik I - 29** Perkembangan Imbal Hasil Surat Berharga Negara

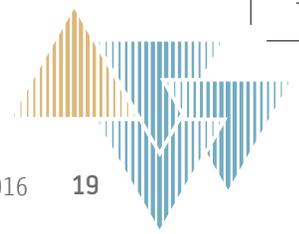


Secara umum kinerja pasar obligasi mengalami penurunan dibanding periode sebelumnya. Hal ini terlihat dari *yield* obligasi Pemerintah menunjukkan *trend* kenaikan dengan rata-rata *yield* untuk seluruh tenor naik sebesar 97,60 bps. Rata-rata *yield* tenor pendek, menengah, dan panjang mengalami peningkatan masing-masing sebesar 92,20 bps, 96,50 bps, dan 98,70 bps.

**Tabel I - 9** Perkembangan Transaksi Perdagangan Surat Hutang (laporan CTP PLTE)

Jenis Transaksi	Triwulan III-2016			Triwulan IV-2016		
	Volume (dalam triliun rupiah)	Nilai (dalam triliun rupiah)	Frekuensi (Kali)	Volume (dalam triliun rupiah)	Nilai (dalam triliun rupiah)	Frekuensi (Kali)
Obligasi:						
- Korporasi	59,57	59,80	6.230	60,59	60,86	5.992
- SUN	885,87	938,43	46.694	981,54	997,86	48.893
Total	945,45	998,23	52.924	1.042,13	1.058,72	54.885
Repo	86,40	86,92	290	58,15	55,01	242

Selama periode laporan, terkait dengan volume, nilai dan frekuensi perdagangan masing-masing mengalami peningkatan sebesar 10,80%, 6,33% dan 4,71% menjadi Rp981,54 triliun, Rp997,86 triliun dan 48.893 kali. Terkait dengan obligasi korporasi, volume dan nilai transaksi juga mengalami peningkatan masing-masing sebesar 1,71% dan 1,77% menjadi Rp60,59 triliun dan Rp60,86 triliun. Di sisi lain, frekuensi perdagangan obligasi korporasi mengalami penurunan sebesar 3,82% menjadi 5.992 kali.



### 1.3.2 Perkembangan Perusahaan Efek

**Tabel I - 10** Jumlah Perusahaan Efek

No	Jenis Izin Usaha	Jumlah
1	Perantara Pedagang Efek	36
2	Penjamin Emisi Efek *)	3
3	Perantara Pedagang Efek + Penjamin Emisi Efek	88
4	Perantara Pedagang Efek + Manajer Investasi	2
5	Penjamin Emisi Efek + Manajer Investasi	-
6	Perantara Pedagang Efek + Penjamin Emisi Efek + Manajer Investasi	3
<b>Total</b>		<b>132</b>

\*) Khusus izin Penjamin Emisi Efek yang tidak melakukan aktivitas sebagai Perantara Pedagang Efek

Pada periode laporan terdapat tiga pencabutan Perusahaan Efek (PE), sehingga jumlah PE yang terdaftar di OJK menjadi 132 PE. Terkait dengan kegiatan PE di berbagai lokasi selain Kantor Pusat, OJK mencatat pelaporan pembukaan 28 lokasi kantor cabang dan penutupan enam lokasi kantor cabang (termasuk satu kantor cabang di Singapura)

**Tabel I - 11** Jumlah Lokasi Kegiatan PE Selain Kantor Pusat

Periode	2016	2016
	s.d. Triwulan III	s.d. Triwulan IV
Jumlah lokasi selain Kantor Pusat	641	663

Terkait izin Wakil Perusahaan Efek (WPE), sampai dengan periode laporan, OJK menerbitkan izin orang perorangan sebanyak 501 izin dengan rincian 459 izin Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) dan sebanyak 42 Izin Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) sehingga jumlah pemegang izin adalah 8.965 WPPE dan 2.018 WPEE.

**Tabel I - 12** Proses Izin Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek

Jenis Izin	Triwulan III 2016		Triwulan IV 2016		Izin Total s/d Triwulan IV	Total Pemegang Izin
	Dokumen yg Masuk	Pemberian Izin	Dokumen yg Masuk	Pemberian Izin		
WPPE	152	152	237	151	459	8.965
WPEE	14	14	14	14	42	2.018
<b>Total</b>	<b>166</b>	<b>166</b>	<b>251</b>	<b>165</b>	<b>501</b>	<b>10.983</b>

Sesuai amanat POJK Nomor 27/POJK.04/2014 tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) dan Wakil Perantara Pedagang Efek (WPEE) maka pemegang izin WPEE dan WPPE wajib memperpanjang izin setiap dua tahun dan dapat dilakukan paling cepat 90 hari sebelum masa izin habis. Pada periode laporan, OJK menerima 3.616 dokumen perpanjangan izin dengan rincian 3.124 dokumen perpanjangan izin WPPE dan 492 dokumen perpanjangan izin WPEE serta menerbitkan 4.024 perpanjangan izin WPPE dan 492 perpanjangan izin WPEE.

**Tabel I - 13** Proses Perpanjangan Izin Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) dan Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE)

Jenis Izin	Triwulan III 2016		Triwulan IV 2016		Izin Total s/d Triwulan IV
	Dokumen yang Masuk	Pemberian Izin	Dokumen yang Masuk	Pemberian Izin	
WPPE	1.063	131	3.124	4.024	4.155
WPEE	95	66	492	492	658
<b>Total</b>	<b>1.158</b>	<b>197</b>	<b>3.616</b>	<b>4.516</b>	<b>4.713</b>

### 1.3.3 Perkembangan Pengelolaan Investasi

Sepanjang triwulan IV-2016, kinerja Reksa Dana menunjukkan tren positif tercermin dari pertumbuhan Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana pada triwulan IV-2016 sebesar Rp22,03 triliun (6,95%) menjadi Rp338,75 triliun.

Pada triwulan IV-2016, NAB Reksa Dana Saham menunjukkan kenaikan jumlah NAB terbesar yaitu Rp11,21 triliun (11,00%) diikuti oleh Reksa Dana Terproteksi sebesar Rp9,52 triliun (12,63%), Reksa Dana Syariah sebesar Rp2,83 triliun (23,41%), Reksa Dana Pendapatan Tetap sebesar Rp0,89 triliun (1,30%), *Exchange Traded Fund* (ETF) sebesar Rp0,57 triliun (10,38%), dan Reksa Dana Indeks sebesar Rp0,09 triliun (17,65%). Di sisi lain, Reksa Dana Pasar Uang mengalami penurunan sebesar Rp1,97 triliun (-6,46%) dan Reksa Dana Campuran sebesar Rp1,11 triliun (-5,01%).

**Tabel I - 14** Perkembangan NAB per Jenis Reksa Dana

NAB Per Jenis Reksa Dana	2016 (dalam triliun rupiah)			
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
RD Pasar Uang	33,61	26,96	30,51	28,54
RD Pendapatan Tetap	55,18	62,94	68,67	69,56
RD Saham	109,31	112,41	101,89	113,10
RD Campuran	19,87	21,15	22,16	21,05
RD Terproteksi	61,35	70,57	75,40	84,92
RD Indeks	0,89	0,86	0,51	0,60
ETF	3,67	4,65	5,49	6,06
RD Syariah*	9,43	9,90	12,09	14,91
<b>Total</b>	<b>293,31</b>	<b>309,44</b>	<b>316,72</b>	<b>338,75</b>

\*) termasuk ETF indeks

Dana kelolaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) mengalami penurunan sebesar 8,79% menjadi Rp17,64 triliun meskipun jumlah kontrak RDPT justru mengalami kenaikan menjadi 73 RDPT dari sebelumnya 69 RDPT.

**Tabel I - 15** Perkembangan Reksa Dana dan Produk Investasi Lainnya

Jenis Investasi		2015		2016		
		Triwulan IV	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Reksa Dana	Jumlah	1.091	1.150	1.226	1.347	1.425
	Total NAB	271,97	293,31	309,44	316,72	338,75
RDPT	Jumlah	69	67	63	69	73
	Total NAB	19,77	19,49	20,47	19,19	17,64
EBA	Jumlah	7	7	7	7	7
	Nilai Sekuritisasi	2,59	2,38	2,13	1,96	1,79
EBA-SP	Jumlah	1	1	1	2	3
	Nilai Sekuritisasi	0,20	0,20	0,20	0,70	1,70
DIRE	Jumlah	1	1	1	2	2
	Total Nilai	0,53	0,53	0,56	0,56	0,56
KPD	Jumlah	281	279	279	317	372
	Total Nilai	130,36	138,36	144,59	165,62	164,01

\*) Dalam Rp triliun

Selama periode laporan, OJK menerbitkan satu izin baru untuk Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset-Surat Partisipasi (EBA-SP) sehingga KIK EBA berjumlah tujuh KIK dengan dana kelolaan sebesar Rp1,79 triliun atau menurun sebesar 8,67% dibandingkan dengan

triwulan sebelumnya dikarenakan adanya hutang (KPR) yang menjadi sekuritisasi dalam KIK EBA telah jatuh tempo. Adapun selama periode laporan, OJK tidak menerbitkan surat izin baru untuk Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Real Estate (DIRE) dan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (EBA), sehingga KIK DIRE tetap berjumlah dua KIK dengan dana kelolaan tetap sebesar Rp0,56 triliun. Pada triwulan IV-2016, Nilai Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) turun -0,97% menjadi Rp164,01 triliun, meskipun jumlah kontrak juga KPD mengalami kenaikan sebesar 17,35% menjadi 372 KPD.

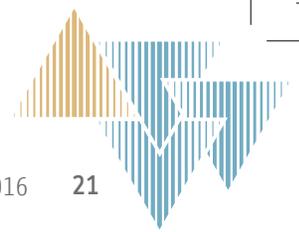
Sampai dengan triwulan IV-2016 telah diterbitkan 437 Surat Efektif pernyataan pendaftaran Reksa Dana yang unit penyertaannya ditawarkan melalui penawaran umum.

**Tabel I - 16** Jenis Reksa Dana Yang Mendapat Surat Efektif

Jenis Reksa Dana	Jumlah Surat Efektif
Reksa Dana Saham	46
Reksa Dana Campuran	27
Reksa Dana Pendapatan Tetap	57
Reksa Dana Pasar Uang	27
Reksa Dana Terproteksi	230
Reksa Dana Indeks	3
Reksa Dana ETF-Saham	1
Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap	9
Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Luar Negeri	3
Reksa Dana Syariah Campuran	2
Reksa Dana Syariah Saham	15
Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk	5
Reksa Dana Syariah Terproteksi	8
Reksa Dana Syariah Pasar Uang	4
<b>Total</b>	<b>437</b>

OJK juga menerbitkan 103 surat pembubaran Reksa Dana yang terdiri dari 100 Reksa Dana Konvensional dan tiga Reksa Dana Syariah. Adapun rincian pembubaran Reksa Dana tersebut terdiri dari :

- 62 Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan Manajer Investasi (MI) dan Bank Kustodian (BK).
- Tiga Reksa Dana memiliki NAB kurang dari Rp25 miliar dalam 90 hari.
- 14 Reksa Dana tidak terpenuhinya minimum dana kelolaan;
- Enam Reksa Dana Saham terdiri dari tiga Reksa



- Dana dibubarkan karena tidak terpenuhi dana kelolaan, satu Reksa Dana memiliki NAB kurang dari Rp25 miliar dalam 90 hari berturut-turut, dan dua Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK;
- Dua Reksa Dana Pendapatan Tetap terdiri dari satu Reksa Dana memiliki NAB kurang dari Rp25 miliar dalam 90 hari berturut-turut dan satu Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK;
  - 12 Reksa Dana Pasar Uang terdiri dari tujuh Reksa Dana dibubarkan karena memiliki NAB kurang dari Rp25 miliar dalam 90 hari berturut-turut, empat Reksa Dana tidak dapat memenuhi minimum dana kelolaan, dan satu

- Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK;
- Satu Reksa Dana Campuran dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK;
  - Satu Reksa Dana Syariah Pasar Uang dibubarkan karena tidak dapat memenuhi minimum dana kelolaan;
  - Satu Reksa Dana Syariah Campuran dibubarkan karena memiliki NAB kurang dari Rp25 miliar dalam 90 hari berturut-turut; dan
  - Satu Reksa Dana Syariah Terproteksi dibubarkan karena tidak dapat memenuhi minimum dana kelolaan.

Selama periode triwulan IV-2016, OJK memberikan satu izin MI, dua Surat Tanda Terdaftar APERD, dan satu izin PI institusi. Sehingga jumlah MI, APERD dan PI institusi masing-masing menjadi 85 MI, 32 APERD, dan 3 PI institusi. Adapun pelaku individu industri Pengelolaan Investasi mengalami peningkatan pada WMI dan WAPERD masing-masing sebesar 2,83% dan 2,76% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Selain itu, selama periode ini OJK tidak menerbitkan izin kepada PI individu.

**Tabel I - 17** Perkembangan Pelaku di Industri Pengelolaan Investasi yang Memperoleh Izin

INDIVIDU	2015	2016			
	Triwulan IV	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Wakil Manajer Investasi (WMI)	2.811	2.864	2.932	2.959	3.043
Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD)	19.788	20.094	20.912	21.672	22.271
Penasehat Investasi (PI)	4	3	3	4	4
<b>INSTITUSI</b>					
Manajer Investasi (MI)	83	84	84	84	85
Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)	26	28	30	30	32
Penasehat Investasi (PI)	2	2	2	2	3

### 1.3.4 Perkembangan Emiten dan Perusahaan Publik

Selama triwulan I-IV 2016, jumlah Penawaran Umum mengalami peningkatan sebesar 30% dibanding triwulan I-IV 2015. Berikut

**Tabel I - 18** Perkembangan Penawaran Umum (Emisi)

Jenis Penawaran Efek	Triwulan I – IV 2015		Triwulan I - IV 2016		Triwulan IV 2016	
	Jumlah Emisi	Nilai Emisi (Dalam miliar rupiah)	Jumlah Emisi	Nilai Emisi (Dalam miliar rupiah)	Jumlah Emisi	Nilai Emisi (Dalam miliar rupiah)
Penawaran Umum Saham (IPO)	19	13.126	14	12.074	2	1.404
Penawaran Umum Terbatas (PUT/Rights Issue)	23	70.058	34	68.663	13	23.183
Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang	52	61.708	74	114.381	24	32.907
a. Obligasi/ Sukuk + Subordinasi	6	3.650	15	13.690	8	6.750
b. PUB Obligasi/ Sukuk Tahap I	18	24.879	28	43.495	8	14.800
c. PUB Obligasi/ Sukuk Tahap II dst	28	33.179	31	57.196	8	11.357
Total Emisi	94	144.892	122	194.514	39	57.494

perkembangan umum emisi dapat dijabarkan sebagai berikut :

**Tabel I - 19** Tabel Perkembangan Nilai Emisi Berdasarkan Sektor Industri pada Triwulan IV

No	Sektor Industri	Penawaran Umum Perdana	Penawaran Umum Terbatas	Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang
1	Perbankan	-	2.082	11.325
2	Perdagangan	185	-	900
3	Perhubungan dan Telekomunikasi	-	3.865	3.800
4	Real Estate dan Konstruksi	-	10.561	-
5	Media Massa, Teknologi Informasi, Pariwisata dan Perusahaan Jasa Lainnya	1.219	2.800	-
6	Asuransi dan Pembiayaan	-	-	13.632
7	Agrobisnis	-	-	1.000
8	Industri Logam	-	2.681	500
9	Industri Dasar	-	626	-
10	Barang Konsumsi	-	568	-
11	Industri Kimia	-	-	500
12	Pertambangan dan Kehutanan	-	-	1.250
<b>Total</b>		<b>1.404</b>	<b>23.183</b>	<b>32.907</b>

(dalam miliar rupiah)

#### A. Penawaran Umum Perdana Saham

Selama triwulan IV-2016, terdapat empat perusahaan yang mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, dimana sebanyak dua Perusahaan dengan nilai Rp1,40 triliun telah mendapat surat efektif dan masih dalam proses.

**Tabel I - 20** Perusahaan Yang Melakukan Penawaran Umum Perdana Saham

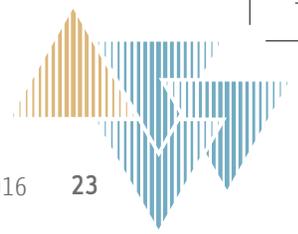
No.	Emiten/Perusahaan Publik	Sektor	Tanggal Efektif	Nilai Emisi (dalam jutaan rupiah)
1	PT Prodia Widyahusada Tbk	Media Massa, Teknologi Informasi, Pariwisata, dan Perusahaan Jasa Lainnya	29-Nov-2016	1.218.750
2	PT Bintang Oto Global Tbk	Perdagangan	8-Des-2016	185.400
<b>TOTAL</b>				<b>1.404.150</b>

#### B. Penawaran Umum Terbatas (*Right Issue*)

Pada triwulan IV-2016 terdapat 16 perusahaan yang menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Terbatas dan 13 perusahaan telah mendapatkan Pernyataan Efektif. Nilai emisi Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau *right issue* dari perusahaan tersebut sebesar Rp23,18 triliun.

**Tabel I - 21** Perusahaan Yang Melakukan Penawaran Umum Terbatas

No.	Emiten/Perusahaan Publik	Sektor	Tanggal Efektif	Nilai Emisi (dalam jutaan rupiah)
1	PT Alam Karya Unggul Tbk	Industri Dasar	31-Okt-2016	626.049
2	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	Industri Logam	10-Nov-2016	2.681.750
3	PT Sekar Bumi Tbk.	Barang Konsumsi	28-Des-2016	568.420
4	PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk.	Media Massa, Teknologi Informasi, Pariwisata, dan Perusahaan Jasa Lainnya	26-Okt-2016	1.499.024
5	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Real Estate dan Konstruksi	4-Nov-2016	6.149.183
6	PT Bank Mayapada Internasional Tbk	Perbankan	8-Nov-2016	1.002.315
7	PT Bank Artha Graha Internasional Tbk	Perbankan	23-Nov-2016	300.579
8	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	Perhubungan dan Telekomunikasi	18-Nov-2016	1.785.698
9	PT Siloam International Hospitals Tbk	Media Massa, Teknologi Informasi, Pariwisata, dan Perusahaan Jasa Lainnya	22-Nov-2016	1.300.613
10	PT BPD Banten Tbk	Perbankan	24-Nov-2016	329.157
11	PT PP (Persero) Tbk.	Real Estate dan Konstruksi	24-Nov-2016	4.411.748
12	PT BRI Agroniaga Tbk	Perbankan	25-Nov-2016	449.979
13	PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk.	Perhubungan dan Telekomunikasi	20-Des-2016	2.078.898
<b>TOTAL</b>				<b>23.183.411</b>



**C. Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang**

Pada triwulan IV-2016 terdapat 16 perusahaan yang melakukan Penawaran Umum Obligasi, Penawaran Umum Sukuk,

Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi (PUB Obligasi) Tahap I dan delapan Perusahaan yang melakukan PUB Obligasi Tahap II dan seterusnya. Total nilai emisi Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang tersebut sebesar Rp32,9 triliun.

**Tabel I - 22** Perusahaan yang telah Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Utang

Penawaran Umum Obligasi dan/atau Sukuk					
No	Emiten/Perusahaan Publik	Sektor	Jenis Obligasi	Tanggal Efektif	Nilai Emisi (dalam rupiah)
1	PT Impack Pratama Industri Tbk.	Industri Logam	Obligasi	24-Nov-2016	500.000.000.000
2	PT Chandra Asri Petrochemical Tbk	Industri Kimia	Obligasi	15-Des-2016	500.000.000.000
3	PT Fast Food Indonesia Tbk.	Perdagangan	Obligasi	24-Okt-2016	200.000.000.000
4	PT Bank BRI Syariah	Perbankan	Sukuk	8-Nov-2016	1.000.000.000.000
5	PT Angkasa Pura I	Perhubungan dan Telekomunikasi	Obligasi	10-Nov-2016	2.500.000.000.000
			Sukuk	10-Nov-2016	500.000.000.000
6	PT Sinar Mas Multifinance	Asuransi dan Pembiayaan	Obligasi	1-Des-2016	500.000.000.000
7	PT Bank KEB Hana Indonesia	Perbankan	Obligasi	15-Des-2016	244.000.000.000
			Obligasi USD	15-Des-2016	635.597.500.000
8	PT Bank Kesejahteraan Ekonomi	Perbankan	Obligasi	16-Des-2016	170.000.000.000
<b>Total</b>					<b>6.749.597.500.000</b>

**Tabel I - 23** Perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Utang

PUB Obligasi Tahap I					
No	Emiten/Perusahaan Publik	Sektor	Jenis PUB	Tanggal Efektif	Nilai Emisi (dalam rupiah)
1	PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	Agrobisnis	PUB Tahap I	22-Nov-2016	1.000.000.000.000
2	PT BFI Finance Indonesia Tbk	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Tahap I	20-Okt-2016	1.000.000.000.000
3	PT Bank CIMB Niaga Tbk	Perbankan	PUB Tahap I	26-Okt-2016	1.000.000.000.000
4	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Tahap I	9-Nov-2016	5.000.000.000.000
5	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia Tbk	Perhubungan dan Telekomunikasi	PUB Tahap I	17-Nov-2016	800.000.000.000
6	PT Bank UOB Indonesia	Perbankan	PUB Tahap I	17-Nov-2016	1.100.000.000.000
7	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Perbankan	PUB Tahap I	22-Nov-2016	4.600.000.000.000
8	PT Bima Multi Finance	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Tahap I	15-Des-2016	300.000.000.000
<b>Total</b>					<b>14.800.000.000.000</b>

**Tabel I - 24** Perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Utang

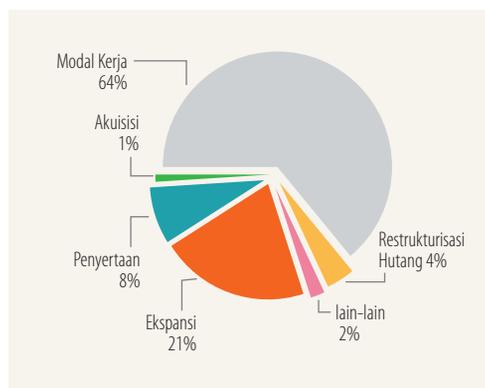
PUB Obligasi Tahap II dst						
No	Emiten/Perusahaan Publik	Sektor	Jenis PUB	Tanggal Efektif	Masa Penawaran	Nilai Emisi (dalam rupiah)
1	PT Medco Energi Internasional Tbk	Pertambangan dan Kehutanan	PUB Obligasi II Tahap III	28 Juni 2016	15-16 Desember 2016	1.250.000.000.000
2	PT Astra Sedaya Finance	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi III Tahap II	3 Mei 2016	12-13 Oktober 2016	1.700.000.000.000
3	PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk.	Perdagangan	PUB Obligasi I Tahap II	30 Juni 2016	11-Okt-16	700.000.000.000
4	PT Bank Pan Indonesia Tbk	Perbankan	PUB Obligasi II Tahap II	17 Juni 2016	21-24 Oktober 2016	2.125.000.000.000
5	PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi I Tahap II	12 Desember 2014	27,28 dan 31 Oktober 2016	1.500.000.000.000

6	PT Maybank Indonesia Finance	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi I Tahap III	04 November 2015	28-31 Oktober 2016	1.100.000.000.000
7	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	Perbankan	PUB Obligasi I Tahap II	29 Juni 2016	28-31 Oktober 2016	450.000.000.000
8	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi III Tahap III	30 Mei 2016	15-17 Nov 2016	2.532.000.000.000
<b>Total</b>						<b>11.357.000.000.000</b>

**D. Rencana Penggunaan Dana**

Dari seluruh Penawaran Umum, persentase terbesar penggunaan dana untuk modal kerja yaitu sebanyak 64% atau sekitar Rp35,70 triliun. Rincian porsi penggunaan dana lainnya adalah 21% atau sekitar Rp11,56 triliun untuk ekspansi, 8% atau sekitar Rp4,32 triliun untuk penyertaan, 1% atau sekitar Rp743 miliar untuk akuisisi pada perusahaan lain maupun pada anak perusahaan dan 4% atau sekitar Rp2,57 triliun untuk restrukturisasi.

**Grafik I - 30** Rencana Penggunaan Dana



**Tabel I - 25** Rencana Penggunaan Dana Atas EPP yang Melakukan Aksi Korporasi Berdasarkan Sektor Industri (dalam jutaan rupiah)

No	Sektor Industri	Ekspansi	Penyertaan	Akuisisi	Modal Kerja	Restrukturisasi Hutang	Lain-Lain
1	Perbankan	14.846	-	-	13.247.258	87.788	-
2	Perdagangan	197.050	79.986	-	349.588	-	443.744
3	Real Estate dan Konstruksi	4.756.471	2.006.650	-	849.421	-	-
4	Asuransi dan Pembiayaan	-	-	-	10.391.400	-	-
5	Media Massa, Teknologi Informasi, Pariwisata dan Perusahaan Jasa Lainnya	984.504	1.324.774	-	804.417	427.099	-
6	Perhubungan dan Telekomunikasi	-	-	-	-	-	-
7	Sekuritas dan Investasi	4.994.050	-	-	8.379.164	224.660	197.360
8	Industri Logam	-	-	-	296.040	493.400	272.660
9	Aneka Industri Lainnya	117.000	630.170	-	1.223.270	104.500	-
10	Industri Dasar	-	-	475.000	147.067	-	-
11	Agrobisnis	-	275.000	268.000	11.835	-	-
<b>Total</b>		<b>11.561.000</b>	<b>4.316.579</b>	<b>743.000</b>	<b>35.699.460</b>	<b>2.572.337</b>	<b>913.764</b>

\*Data berdasarkan penggunaan dana setelah dikurangi oleh biaya Emisi

**1.3.5 Perkembangan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal**

**A. Lembaga Penunjang Pasar Modal Serta Pemingkat Efek**

Lembaga Penunjang Pasar Modal merupakan Lembaga yang memberikan jasa pada satu pihak atau lebih sesuai izin kegiatan usahanya di Pasar Modal, terdiri dari

Biro Administrasi Efek (BAE), Bank Kustodian, Wali Amanat, Pemingkat Efek, dan Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM).

Selama triwulan IV-2016, OJK menerbitkan empat Surat Keputusan Pemberian Izin ASPM. OJK juga mengeluarkan satu Surat Keputusan Pembatalan Persetujuan Sebagai Bank Kustodian Atas Nama ABN AMRO Bank N.V. Indonesia. Jumlah Lembaga Penunjang

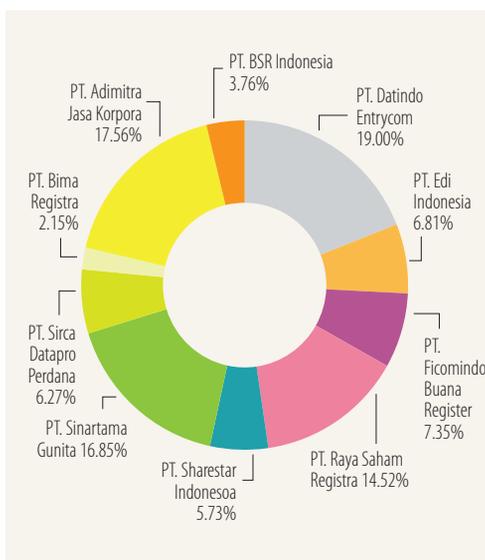
Pasar Modal yang tercatat di OJK adalah sebagai berikut:

**Tabel I - 26** Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal

Lembaga Penunjang	2016		Jenis
	Triwulan III	Triwulan IV	
Biro Administrasi Efek	10	10	Surat Perizinan
Bank Kustodian	22	21	Surat Persetujuan
Wali Amanat	12	12	Surat Tanda Terdaftar
Pemeringkat Efek	2	2	Surat Perizinan
Ahli Syariah Pasar Modal	28	32	Surat Perizinan

**B. Biro Administrasi Efek (BAE)**

**Grafik I - 31** Market Share BAE Berdasarkan Jumlah Klien Sampai Triwulan IV 2016



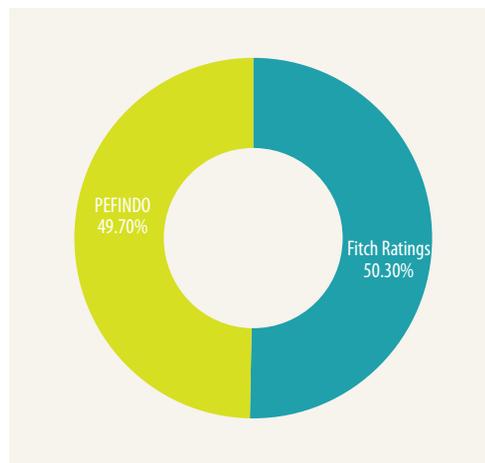
Berdasarkan jumlah klien yang dimiliki oleh BAE, pangsa pasar BAE didominasi oleh PT. Datindo Entrycom yang mencapai 19,00%, PT. Adimitra Jasa Korpora sebanyak 17,56%, PT. Sinartama Gunita sebanyak 16,85% dari keseluruhan klien yang menggunakan jasa BAE. Sementara, BAE dengan jumlah klien paling sedikit adalah PT Bima Registra sebanyak 2,15%, dan PT BSR Indonesia sebanyak 3,76% dan PT Sharestar Indonesia sebanyak 5,73%.

**C. Pemeringkat Efek**

Selama periode laporan, OJK mencatat bahwa total perusahaan yang diperingkat

oleh dua Pemeringkat Efek sebanyak 169 Perusahaan dengan jumlah pangsa pasar perusahaan yang diperingkat oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia dan PT Fitch Ratings Indonesia masing-masing sebanyak 84 Perusahaan dan 85 Perusahaan.

**Grafik I - 32** Market Share Company Rating Triwulan IV 2016



Berikut data lengkap komposisi peringkat perusahaan yang masuk kategori *Investment Grade* dan *Non Investment Grade*:

**Tabel I - 27** Komposisi Peringkat Perusahaan yang Masuk Kategori *Investment Grade* Dan *Non Investment Grade*

Pemeringkat Efek	<i>Investment Grade</i> (Perusahaan)		<i>Non Investment Grade</i> (Perusahaan)	
	Triwulan III-2016	Triwulan IV-2016	Triwulan III-2016	Triwulan IV-2016
PT Pemeringkat Efek Indonesia	58	78	3	6
PT Fitch Ratings Indonesia	82	84	1	1
<b>Total</b>	<b>140</b>	<b>162</b>	<b>4</b>	<b>7</b>

**D. Profesi Penunjang Pasar Modal**

Selama periode pelaporan, OJK menerbitkan sembilan Surat Tanda Terdaftar (STTD) untuk Akuntan, lima STTD untuk Konsultan Hukum, sembilan STTD untuk Penilai, empat STTD untuk Notaris dan lima STTD untuk Penilai Pemerintah. Selain menerbitkan STTD, OJK

juga menetapkan 119 Keputusan Dewan Komisiner terkait pembatalan STTD yang terdiri dari tiga pembatalan STTD Akuntan, 10 pembatalan STTD Konsultan Hukum dan 106 pembatalan STTD Notaris.

**Tabel I - 28** Perkembangan Profesi Penunjang Pasar Modal

Profesi	Aktif	
	Triwulan III-2016	Triwulan IV-2016
Akuntan	599	605
Konsultan Hukum	727	722
Penilai	190	199
Notaris	1494	1393
Penilai Pemerintah	246	251

Untuk meningkatkan profesionalisme Profesi Penunjang Pasar Modal, OJK bekerjasama dengan asosiasi menyelenggarakan lima Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL). Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

- a. Akuntan  
FAPM-IAPI menyelenggarakan PPL sebanyak dua kali pada triwulan IV-2016 dengan materi sebagai berikut:

**Tabel I - 29** Kegiatan Pendidikan Terkait Akuntan

No.	Judul Kegiatan
1	Overview Penerapan Peraturan Nomor VIII.G.17 dan Pemeriksaan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) pada Perusahaan Efek
2	Sharing Professions: Penerapan Tingkat Diskonto Pada Penilaian Aset dan Penilaian Bisnis oleh Penilai

- b. Konsultan Hukum  
HKHPM menyelenggarakan PPL sebanyak dua kali pada triwulan IV-2016 dengan materi, sebagai berikut:

**Tabel I - 30** Kegiatan Pendidikan Terkait Konsultan Hukum

No.	Judul Kegiatan
1	Peran Konsultan Hukum Dalam Industri Perbankan
2	Kedudukan UU No. 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan & Peran Konsultan Hukum

- c. Penilai  
FPPM-MAPPI telah menyelenggarakan satu kali Pendidikan Profesi Lanjutan Penilai Pasar Modal dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel I - 31** Kegiatan Pendidikan Terkait Penilai

No.	Judul Kegiatan
1	Review Proyeksi dalam Penilaian Properti dan Penilaian Bisnis

## 1.4 PERKEMBANGAN INDUSTRI KEUANGAN NON BANK

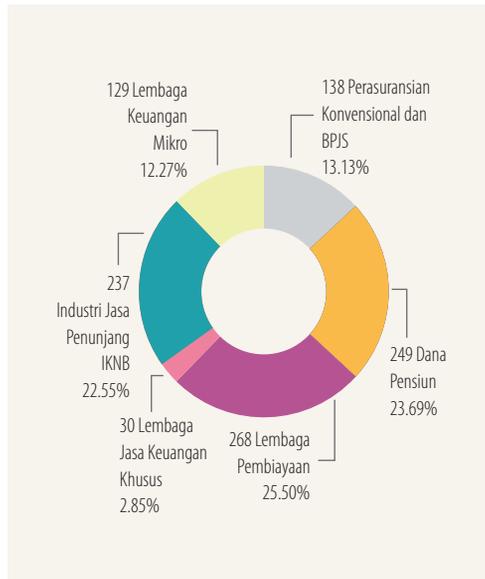
Pada periode laporan kinerja Industri Keuangan Non Bank (IKNB) selama triwulan IV-2016 bergerak positif tercermin dari total aset IKNB yang naik 3,02% menjadi Rp1.861,63 triliun. Peningkatan aset terbesar adalah pada industri Asuransi Konvensional dan BPJS, Lembaga Pembiayaan, serta Lembaga Jasa Keuangan Khusus.

**Tabel I - 32** Total Aset IKNB (dalam Triliun Rupiah)

No	Industri	Triwulan IV 2015	Triwulan I 2016	Triwulan II 2016	Triwulan III 2016	Triwulan IV 2016
1	Asuransi Konvensional dan BPJS	803,72	842,29	872,02	910,03	932,08
2	Dana Pensiun	206,59	220,13	227,01	235,51	238,30
3	Lembaga Pembiayaan	472,94	472,52	487,30	487,99	509,22
4	Lembaga Jasa Keuangan Khusus	147,29	153,75	161,77	166,41	174,50
5	Industri Jasa Penunjang IKNB *)	6,04	6,81	6,81	6,81	7,25
6	Lembaga Keuangan Mikro		0,22	0,26	0,27	0,28
	<b>Total Aset</b>	<b>1.636,57</b>	<b>1.695,71</b>	<b>1.755,17</b>	<b>1.807,02</b>	<b>1.861,63</b>

\*) Aset Industri Jasa Penunjang IKNB adalah per Semester I 2016

Berdasarkan jumlah Pelaku, industri Lembaga Pembiayaan memiliki jumlah pelaku yang terbesar yaitu sebanyak 268, diikuti oleh Dana Pensiun, Industri Jasa Penunjang IKNB, Asuransi Konvensional dan BPJS, Lembaga Keuangan Mikro, serta Lembaga Jasa Keuangan Khusus.

**Grafik I - 33** Komposisi Jumlah Pelaku IKNB Triwulan IV-2016


### 1.4.1 Perkembangan Perasuransian Konvensional dan BPJS

Sampai akhir periode laporan, aset industri Asuransi dan BPJS tumbuh 2,2% menjadi Rp932,08 triliun. Peningkatan aset seiring terjadi peningkatan nilai investasi sebesar 3,6% menjadi Rp780,42 triliun. Kenaikan nilai investasi tersebut didominasi oleh kenaikan investasi pada asuransi jiwa dan BPJS yaitu sebesar Rp25,3 triliun. Peningkatan aset dan investasi industri Asuransi dan BPJS juga didukung oleh peningkatan kinerja industri yaitu dari sisi pendapatan premi dan klaim bruto yang masing-masing meningkat sebesar 40,1% dan 35,3% menjadi Rp340,68 triliun dan Rp207,93 triliun. Komposisi pendapatan premi masih didominasi Asuransi Jiwa sebesar 40,4%, diikuti

**Tabel I - 33** Indikator Perusahaan Perasuransian Konvensional dan BPJS (dalam Triliun Rupiah)

No.	Jenis Indikator	Triwulan IV 2015	Triwulan I 2016	Triwulan II 2016	Triwulan III 2016	Triwulan IV 2016
1	Total Aset					
	Asuransi Jiwa	329,68	347,86	363,16	385,24	382,62
	Asuransi Umum dan Reasuransi	132,56	137,67	139,41	136,70	139,47
	Asuransi Wajib	107,86	114,14	115,93	117,55	120,01
	BPJS	233,61	242,60	253,52	272,60	289,98
	<b>Jumlah</b>	<b>803,72</b>	<b>842,29</b>	<b>872,02</b>	<b>912,09</b>	<b>932,08</b>
2	Total Investasi					
	Asuransi Jiwa	283,20	297,60	313,02	334,44	343,27
	Asuransi Umum dan Reasuransi	66,15	69,00	68,16	69,13	69,71
	Asuransi Wajib	76,62	89,21	88,36	92,84	94,28
	BPJS	215,33	227,74	235,83	256,70	273,16
	<b>Jumlah</b>	<b>641,29</b>	<b>683,55</b>	<b>705,36</b>	<b>753,12</b>	<b>780,42</b>
3	Total Pendapatan Premi					
	Asuransi Jiwa	102,42	27,47	61,17	95,71	137,73
	Asuransi Umum dan Reasuransi	68,02	18,20	38,02	54,04	74,93
	Asuransi Wajib	11,02	2,85	5,77	8,69	11,73
	BPJS	90,03	25,03	55,25	84,69	116,28
	<b>Jumlah</b>	<b>261,09</b>	<b>73,54</b>	<b>160,21</b>	<b>243,12</b>	<b>340,68</b>
4	Total Klaim Bruto					
	Asuransi Jiwa	66,02	17,07	36,26	58,65	78,61
	Asuransi Umum dan Reasuransi	32,51	8,21	16,67	23,96	32,61
	Asuransi Wajib	6,36	2,07	4,56	7,18	9,91
	BPJS	74,99	18,24	41,77	63,87	86,80
	<b>Jumlah</b>	<b>179,88</b>	<b>45,58</b>	<b>99,26</b>	<b>153,67</b>	<b>207,93</b>
5	Total Liabilitas					
	Asuransi Jiwa	258,04	270,41	287,27	305,01	317,15
	Asuransi Umum dan Reasuransi	82,54	84,88	86,72	84,43	85,86
	Asuransi Wajib	89,54	92,21	93,56	95,16	97,96
	BPJS	30,03	32,52	33,33	36,33	40,56
	<b>Jumlah</b>	<b>460,15</b>	<b>480,02</b>	<b>500,87</b>	<b>520,93</b>	<b>541,53</b>

oleh BPJS sebesar 34,1%, Asuransi Umum dan Reasuransi sebesar 22,0%, serta Asuransi Wajib sebesar 3,4%.

Sampai akhir periode laporan, terdapat penambahan dua perusahaan perasuransian, sehingga jumlah perusahaan asuransi, BPJS, dan reasuransi berjumlah terdaftar 138 perusahaan. Adapun rincian jumlah perusahaan perasuransian sampai dengan triwulan IV-2016 sebagai berikut:

No	Perusahaan Perasuransian	Triwulan IV 2015	Triwulan I 2016	Triwulan II 2016	Triwulan III 2016	Triwulan IV 2016
1	Asuransi Jiwa					
	a. BUMN	1	1	1	1	1
	b. Swasta Nasional	27	27	27	27	23
	c. Patungan	22	22	22	22	28
	<b>Sub Total</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>52</b>
2	Asuransi Kerugian					
	a. BUMN	3	3	3	3	2
	b. Swasta Nasional	58	58	58	58	53
	c. Patungan	15	15	15	15	21
	<b>Sub Total</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>76</b>
3	Reasuransi	6	6	6	5	5
4	BPJS	2	2	2	2	2
5	Penyelenggara Asuransi Wajib	3	3	3	3	3
	<b>Total Asuransi dan Reasuransi</b>	<b>137</b>	<b>137</b>	<b>137</b>	<b>136</b>	<b>138</b>

Uraian	Triwulan IV 2015	Triwulan I 2016	Triwulan II 2016	Triwulan III 2016	Triwulan IV 2016
GDP (miliar Rupiah)	11.312.665	11.540.789	11.540.789	11.540.789	11.540.789
Premi Bruto (miliar Rupiah)	258.585	273.412	291.127	303.494	332.217
Jumlah Penduduk (juta)	255	257	257	257	257
Penetrasi	2,29%	2,37%	2,52%	2,63%	2,84%
Densitas (ribu Rupiah)	1.014,06	1.063,86	1.132,79	1.180,91	1.274,05

Catatan:

- 1) Angka Premi Bruto merupakan premi bulan November 2016 yang disetahunkan
- 2) Angka GDP merupakan angka sementara dari Indikator Ekonomi BPS per 31 Desember 2015.
- 3) Penetrasi: Premi Bruto/GDP
- 4) Densitas: Premi Bruto/Jumlah penduduk

Densitas asuransi yang menggambarkan rata-rata pengeluaran tiap penduduk untuk pembayaran premi asuransi pada triwulan IV-2016 sebesar Rp1.274,05.

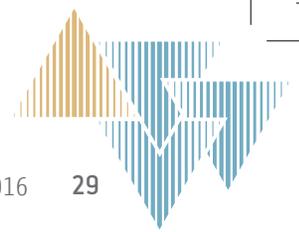
**Tabel I - 36** Risk Based Capital (RBC) Industri Asuransi

Uraian	Triwulan IV 2015	Triwulan I 2016	Triwulan II 2016	Triwulan III 2016	Triwulan IV 2016
Asuransi Jiwa	534,8%	538,7%	527,6%	528,8%	432,4%
Asuransi Umum dan Reasuransi	282,7%	253,5%	265,1%	268,6%	266,7%

Rata-rata RBC industri asuransi jiwa pada periode IV-2016 adalah sebesar 432,4% atau turun -96,4% dibanding periode sebelumnya. Sementara itu, RBC Asuransi Umum sebesar 266,7% atau turun -1,9% dibanding periode sebelumnya. Namun demikian, RBC kedua jenis industri asuransi tersebut masih memenuhi batas ketentuan RBC minimal yaitu 120%.

#### 1.4.2 Perkembangan Industri Dana Pensiun

Perkembangan industri Dana Pensiun selama periode laporan mengalami pertumbuhan yang tercermin dari indikator pertumbuhan aset dan investasi dana pensiun. Sampai akhir periode laporan, terjadi pertumbuhan nilai aset dan nilai investasi Dana Pensiun yang naik masing-masing sebesar 1,19% menjadi Rp238,30 triliun dan 0,87% menjadi Rp228,77 triliun.



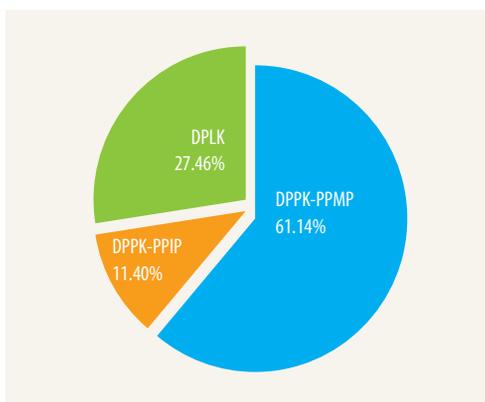
**Tabel I - 37** Distribusi Aset Industri Dana Pensiun  
(dalam Triliun Rupiah)

Jenis Program	Triwulan IV 2015	Triwulan I 2016	Triwulan II 2016	Triwulan III 2016	Triwulan IV 2016
Dana Pensiun Pemberi Kerja - Program Pensiun Manfaat Pasti (DPPK - PPMP)	136,45	142,54	144,72	148,31	147,81
<i>Growth</i>	6,11%	4,46%	1,53%	2,48%	-0,34%
Dana Pensiun Pemberi Kerja - Program Pensiun Iuran Pasti (DPPK - PPIP)	22,12	23,36	25,55	26,56	26,65
<i>Growth</i>	6,12%	5,62%	9,39%	3,96%	0,933%
Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)	48,03	54,23	56,74	60,64	63,84
<i>Growth</i>	10,97%	12,92%	4,63%	6,87%	5,829%
<b>TOTAL ASET (triliun rupiah)</b>	<b>206,59</b>	<b>220,13</b>	<b>227,01</b>	<b>235,51</b>	<b>238,30</b>
<i>Growth</i>	<b>7,20%</b>	<b>6,55%</b>	<b>3,13%</b>	<b>3,74%</b>	<b>1,19%</b>

**Tabel I - 38** Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun  
(dalam Triliun Rupiah)

Jenis Program	Triwulan IV 2015	Triwulan I 2016	Triwulan II 2016	Triwulan III 2016	Triwulan IV 2016
Dana Pensiun Pemberi Kerja - Program Pensiun Manfaat Pasti (DPPK - PPMP)	130,02	135,60	136,82	141,07	139,87
<i>Growth</i>	6,34%	4,29%	0,90%	3,10%	-0,85%
Dana Pensiun Pemberi Kerja - Program Pensiun Iuran Pasti (DPPK - PPIP)	21,69	22,87	24,95	25,93	26,07
<i>Growth</i>	6,30%	5,44%	9,11%	3,93%	0,54%
Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)	47,36	53,14	55,66	59,81	62,83
<i>Growth</i>	11,12%	12,22%	4,73%	7,45%	5,06%
<b>TOTAL INVESTASI (triliun rupiah)</b>	<b>199,06</b>	<b>211,61</b>	<b>217,43</b>	<b>226,80</b>	<b>228,77</b>
<i>Growth</i>	<b>7,44%</b>	<b>6,30%</b>	<b>2,75%</b>	<b>4,31%</b>	<b>0,87%</b>

**Grafik I - 34** Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun Per Triwulan IV 2016



**Tabel I - 39** Portofolio Investasi Dana Pensiun  
(dalam triliun Rupiah)

No.	Jenis Aset Investasi	Triwulan IV 2015	Triwulan I 2016	Triwulan II 2016	Triwulan III 2016	Triwulan IV 2016
1	Surat Berharga Pemerintah	35,60	43,98	48,11	52,91	54,33
2	Tabungan	0,15	0,17	0,24	0,26	0,19
3	Deposito On Call	1,55	1,75	1,25	1,45	1,09

4	Deposito Berjangka	59,60	59,54	54,73	56,91	57,35
5	Sertifikat Deposito	0,03	0,03	0,72	0,85	1,07
6	Sertifikat Bank Indonesia					0,44
7	Saham	27,17	28,43	29,18	29,98	28,71
8	Obligasi	42,92	44,54	47,44	49,08	48,39
9	Sukuk	1,78	1,75	2,25	1,84	1,95
10	Unit Penyertaan Reksadana	13,01	13,41	14,24	13,87	13,94
11	Medium Term Notes (MTN)					0,07
12	Efek Beragun Aset dari KIK EBA	0,20	0,19	0,18	0,51	0,50
13	Unit Penyertaan berbentuk KIK	0,15	0,16	0,14	0,14	0,14
14	Kontrak Opsi Saham					-
15	REPO					-
16	Penempatan Langsung pada Saham	6,65	6,86	7,69	7,58	7,47
17	Tanah	3,34	3,40	3,37	3,35	4,42
18	Bangunan	1,55	1,62	2,03	2,11	1,99
19	Tanah dan Bangunan	5,36	5,79	5,87	5,96	6,70
	<b>TOTAL</b>	<b>192,60</b>	<b>206,39</b>	<b>213,57</b>	<b>224,61</b>	<b>228,77</b>

Di antara jenis investasi yang diperkenankan, terdapat empat jenis investasi yang mendominasi yaitu deposito berjangka, surat berharga pemerintah, obligasi dan saham. Jumlah Dana Pensiun sampai dengan periode laporan adalah 249 pelaku dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel I - 40** Jumlah Dana Pensiun

Jenis Dana Pensiun	2015	2016			
	Triwulan IV	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
DPPK PPMP	190	188	186	184	180
DPPK PPIP	45	45	44	43	44
DPLK	25	25	25	25	25
<b>Jumlah</b>	<b>260</b>	<b>258</b>	<b>255</b>	<b>252</b>	<b>249</b>

Selama periode pelaporan terdapat pembubaran tiga DPPK-PPMP Sementara itu, terdapat satu DPPK-PPMP yang melakukan perubahan program pensiun yaitu DPPK Rumah Sakit Islam Jakarta.

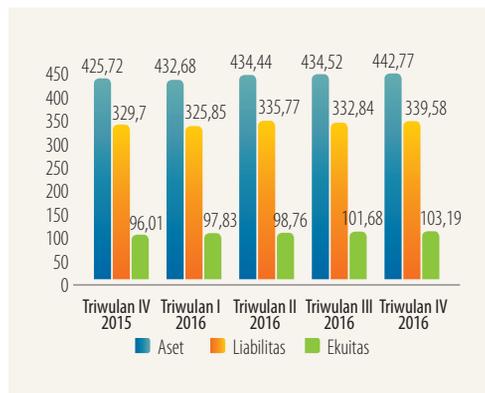
### 1.4.3 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan

Perusahaan Pembiayaan merupakan badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa. Perkembangan industri perusahaan pembiayaan untuk periode triwulan IV-2016 sebagai berikut:

#### A. Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Pembiayaan

Sampai dengan periode laporan, total aset, liabilitas dan ekuitas perusahaan Pembiayaan naik masing-masing sebesar 1,90%, 2,02% dan 1,49% dibandingkan triwulan sebelumnya.

**Grafik I - 35** Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas Perusahaan Pembiayaan (dalam triliun rupiah)



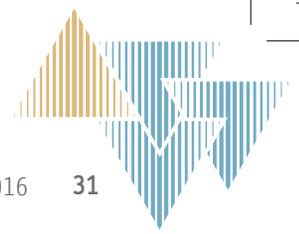
Catatan: Data sudah termasuk Pembiayaan Syariah

#### B. Jumlah dan Pangsa Pasar Perusahaan Pembiayaan

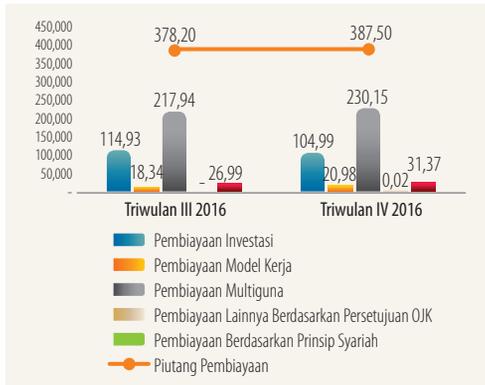
Selama periode laporan, terdapat satu pencabutan izin usaha bagi perusahaan pembiayaan, sehingga jumlah perusahaan pembiayaan menjadi 200 perusahaan. Berdasarkan total aset, 72 perusahaan pembiayaan menguasai aset sebesar 91% dan 128 perusahaan pembiayaan lainnya hanya menguasai aset industri sebesar 9%.

#### C. Piutang Perusahaan Pembiayaan

Kinerja kegiatan industri Perusahaan Pembiayaan dalam melakukan penyaluran piutang mengalami peningkatan sebesar Rp9,31 triliun atau naik 2,46% dibandingkan triwulan sebelumnya dengan komposisi piutang pembiayaan didominasi oleh Pembiayaan Multiguna dan Pembiayaan Investasi dengan proporsi masing-masing sebesar 59,39% dan 27,09%. Kenaikan piutang pembiayaan terbesar berasal dari jenis Pembiayaan Multiguna yang tumbuh 5,61% menjadi Rp230,15 triliun. Sementara itu, bila dilihat berdasarkan sektor ekonomi, Sektor Ekonomi Lapangan Usaha mendominasi piutang dengan proporsi sebesar 60,25% (Rp241,13 triliun).



**Grafik I - 36** Piutang Perusahaan Pembiayaan (dalam Triliun Rupiah)



Catatan: Data sudah termasuk Pembiayaan Syariah

**Tabel I - 41** Piutang Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan sektor Ekonomi (dalam triliun Rupiah)

Sektor Ekonomi	Triwulan III 2016	Triwulan IV 2016
A. Sektor Ekonomi Lapangan Usaha	231,87	241,13
1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	15,29	19,40
2. Pertambangan dan Penggalian	15,71	19,04
3. Industri Pengolahan	31,06	30,43
4. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	27,60	22,02
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah	0,28	0,30
6. Konstruksi	10,12	10,39
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	38,13	40,04
8. Transportasi dan Pergudangan	19,32	22,09
9. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	3,31	5,13
10. Informasi dan Komunikasi	3,43	3,31
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,62	2,63
12. Real Estat	1,34	1,52
13. Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis	0,72	1,27
14. Jasa Persewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	21,83	23,38
15. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,41	3,26
16. Jasa Pendidikan	3,22	3,10
17. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,64	6,67
18. Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	0,31	0,40
19. Kegiatan Jasa Lainnya	15,95	17,15
20. Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan Sendiri untuk Memenuhi Kebutuhan	11,55	9,59
21. Kegiatan Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	0,01	0,01
B. Sektor Ekonomi Bukan Lapangan Usaha	159,55	159,11
1. Rumah Tangga	51,42	53,31
2. Bukan Lapangan Usaha Lainnya	108,13	105,79
<b>Jumlah</b>	<b>391,42</b>	<b>400,24</b>

**D. Indikator Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan**

**Tabel I - 42** Indikator Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan

Uraian	Triwulan III 2016	Triwulan IV 2016
FAR (%)	87,04%	87,52%
NPF (%)	3,38%	3,26%
Gearing Ratio (kali)	3,01	3,03

Seiring dengan pertumbuhan piutang pembiayaan, rasio FAR (*Financing to Asset Ratio*) masih terjaga pada rasio 87,52% atau masih dalam batas ketentuan yaitu minimum 40%. Di sisi lain, kualitas piutang pembiayaan (NPF) berada level 3,26% atau terjadi penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Sementara itu, *Gearing Ratio* pada periode laporan tercatat 3,03 kali atau masih memenuhi ketentuan (maksimal 10 kali).

**Tabel I - 43** NPF Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi

Sektor Ekonomi	Triwulan IV 2016
A. Sektor Ekonomi Lapangan Usaha	3,85%
1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,50%
2. Pertambangan dan Penggalian	7,26%
3. Industri Pengolahan	2,00%
4. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	0,03%
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah	2,81%
6. Konstruksi	3,09%
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	2,02%
8. Transportasi Dan Pergudangan	16,97%
9. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	9,03%
10. Informasi dan Komunikasi	1,83%
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	0,98%
12. Real Estat	3,75%
13. Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis	1,18%
14. Jasa Persewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	2,20%
15. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,77%
16. Jasa Pendidikan	1,32%
17. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,58%
18. Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	1,34%
19. Kegiatan Jasa Lainnya	2,15%
20. Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan Sendiri untuk Memenuhi Kebutuhan	2,10%

21. Kegiatan Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	1,47%
B. Sektor Ekonomi Bukan Lapangan Usaha	2,37%
1. Rumah Tangga	1,75%
2. Bukan Lapangan Usaha Lainnya	2,68%
<b>Jumlah</b>	<b>3,26%</b>

**E. Laba (Rugi) Perusahaan Pembiayaan**

Seiring dengan peningkatan jumlah piutang pembiayaan, maka berdampak pada laba bersih industri perusahaan pembiayaan yang pada periode laporan mengalami kenaikan sebesar 33,24% atau naik Rp2,99 triliun menjadi Rp11,98 triliun.

**F. Jenis Valuta Pinjaman**

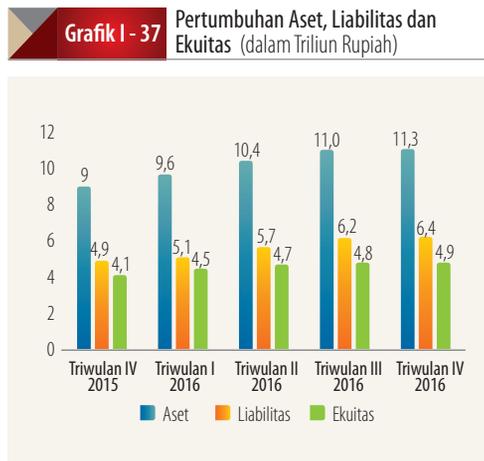
Dari jumlah pinjaman sebesar Rp242,95 triliun yang diterima industri pembiayaan, 53,90% berdenominasi Rupiah, diikuti US Dolar 33,27%, dan Yen Jepang 12,83%. Untuk melindungi perusahaan dari fluktuasi nilai tukar valas, maka seluruh pinjaman berdenominasi mata uang asing tersebut telah dilakukan lindung nilai (*hedging*).

**1.4.4 Perkembangan Industri Perusahaan Modal Ventura**

Perkembangan industri perusahaan modal ventura untuk periode triwulan IV-2016 sebagai berikut:

**A. Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Modal Ventura**

Total aset dan liabilitas Perusahaan Modal Ventura naik masing-masing sebesar 2,87% dan 3,05% menjadi Rp11,28 triliun dan Rp6,36 triliun, bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Sementara itu ekuitas Perusahaan Modal Ventura juga naik 2,64% menjadi Rp4,93 triliun bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.



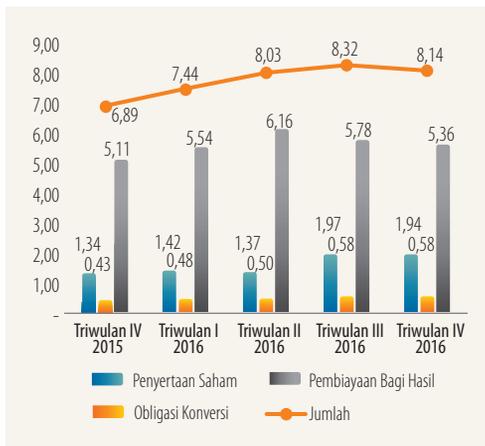
**B. Jumlah Perusahaan Modal Ventura**

Selama periode pelaporan tidak terdapat pencabutan maupun penerbitan izin usaha bagi Perusahaan Modal Ventura. Pada triwulan IV-2016 jumlah Perusahaan Modal Ventura tetap sebanyak 62 perusahaan.

**C. Pembiayaan/Penyertaan Perusahaan Modal Ventura**

Perusahaan modal ventura mengalami pertumbuhan aset, namun demikian, kegiatan industri Perusahaan Modal Ventura dalam bentuk pembiayaan/penyertaan malah menurun. Total pembiayaan/penyertaan tercatat turun 2,18% menjadi Rp8,14 triliun bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, Proporsi pembiayaan/penyertaan terbesar berasal dari pembiayaan bagi hasil dengan proporsi sebesar 69,1% dengan nilai pembiayaan sebesar Rp5,63 triliun. Pembiayaan/penyertaan pada sektor perdagangan, restoran, dan hotel mendominasi keseluruhan total pembiayaan/penyertaan dengan total Rp2,77 triliun atau dengan proporsi 33,30%.

**Grafik I - 38** Pertumbuhan Pembiayaan/Penyertaan Modal (dalam Triliun Rupiah)



**Tabel I - 44** Pembiayaan/Penyertaan Berdasarkan sektor Ekonomi (triliun Rupiah)

Sektor Ekonomi	Triwulan IV 2015	Triwulan I 2016	Triwulan II 2016	Triwulan III 2016	Triwulan IV 2016
1. Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	487	566	640	619	658
2. Pertambangan	540	559	509	525	581
3. Perindustrian	345	408	484	470	490
4. Konstruksi	464	570	563	559	505
5. Perdagangan, Restoran, dan Hotel	1.894	2.197	2.656	2.724	2.772
6. Pengangkutan, Pergudangan, dan Komunikasi	333	312	306	334	286
7. Jasa Pendukung Bisnis	346	319	388	426	319
8. Jasa Sosial dan Masyarakat	1.007	951	959	994	999
9. Lain-Lain	1.598	1.695	1.683	1.834	1.715
<b>JUMLAH</b>	<b>7.013</b>	<b>7.578</b>	<b>8.190</b>	<b>8.485</b>	<b>8.325</b>

Catatan : Data Pembiayaan sebelum dikurangi pencadangan

**D. Rasio Keuangan**

Kinerja Perusahaan Modal Ventura diukur dengan rasio keuangan yang terdiri dari Beban Operasi terhadap Pendapatan Operasi (BOPO), rasio Investasi terhadap Total Aset (IFAR), *Return on Asset* (ROA), dan *Return on Equity* (ROE). Rasio keuangan tersebut masing-masing adalah 97,26%, 72,15%, 1,88%, dan 4,31%.

- a) Kenaikan BOPO 95,65% menjadi 97,26% disebabkan naiknya pendapatan

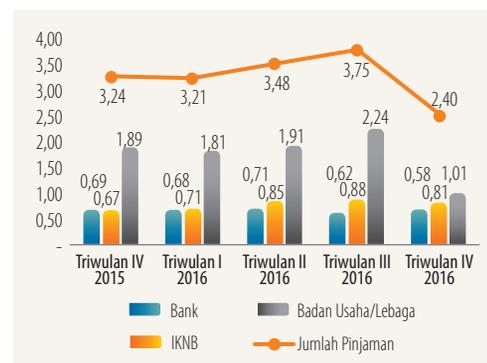
operasional sebesar 40,44% menjadi Rp1,24 triliun. Sedangkan beban operasional juga naik sebesar 42,80% menjadi Rp1,21 triliun.

- b) Terjadi penurunan IFAR dari 75,87% menjadi 72,15%. Hal ini disebabkan penurunan jumlah pembiayaan/penyertaan sebesar 2,18% atau dari Rp8,32triliun menjadi Rp8,14triliun.
- c) ROA mengalami penurunan dari 1,89% pada triwulan III-2016 menjadi 1,88% pada Triwulan IV-2016.
- d) ROE mengalami penurunan dari 4,32% pada triwulan III-2016 menjadi 4,31% pada Triwulan IV-2016.

**E. Sumber Pendanaan**

Selain menggunakan modal sendiri, untuk membiayai kegiatan usahanya, Perusahaan Modal Ventura menerima pinjaman jangka panjang yang berasal dari bank atau badan usaha lainnya dengan total pinjaman pada triwulan IV-2016 adalah sebesar Rp2,40 triliun atau turun 35,99% dibandingkan triwulan sebelumnya.

**Grafik I - 39** Sumber Pendanaan Perusahaan Modal Ventura (dalam Triliun Rupiah)

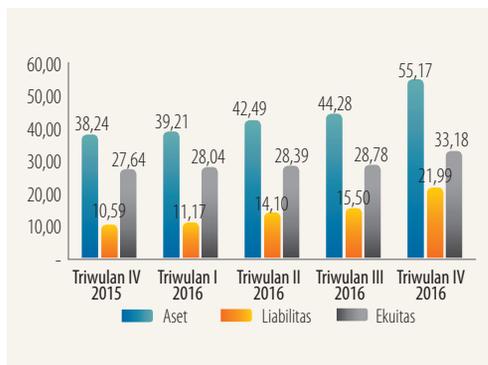


**1.4.5 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur**

Terdapat dua perusahaan yang termasuk Pembiayaan Infrastruktur yaitu Indonesia Infrastructure Finance (IIF) dan Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan total aset Rp55,17 triliun dan total liabilitas Rp21,99 triliun. Total

aset mengalami kenaikan sebesar 24,59% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Peningkatan aset tersebut seiring dengan kenaikan jumlah pinjaman yang diberikan (pembiayaan) sebesar 38,94% menjadi Rp37,47 triliun dengan kenaikan pinjaman terbesar adalah pada infrastruktur jalan yang naik sebesar 65,85% menjadi Rp7,26 triliun serta infrastruktur transportasi yang naik 105,36% menjadi Rp5,34 triliun. Peningkatan tersebut seiring dengan program pemerintah dalam mendukung percepatan pertumbuhan pembangunan pada sektor infrastruktur.

**Grafik I - 40** Tren Aset, Liabilitas dan Ekuitas (dalam Triliun Rupiah)



**Tabel I - 45** Pembiayaan Berdasarkan Jenis Infrastruktur (triliun Rupiah)

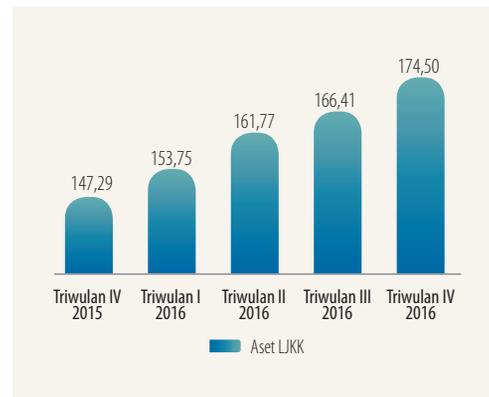
Jenis Infrastruktur	Triwulan IV 2015	Triwulan I 2016	Triwulan II 2016	Triwulan III 2016	Triwulan IV 2016
Air Minum	0,26	0,16	0,19	0,23	0,31
Jalan	2,81	3,06	3,3	4,38	7,26
Ketenagalistrikan	11,03	10,92	11,52	11,42	12,97
Lainnya	4,82	4,88	5,15	5,88	6,93
Minyak & Gas Bumi	1,75	1,71	1,85	1,77	3,14
Telekomunikasi	1,34	1,33	1,46	0,70	1,53
Transportasi	1,18	1,13	1,54	2,60	5,34
<b>Total</b>	<b>23,19</b>	<b>23,19</b>	<b>25,02</b>	<b>26,98</b>	<b>37,47</b>

#### 1.4.6 Perkembangan Industri Jasa Keuangan Khusus

Lembaga Jasa Keuangan Khusus (LJKK) meliputi Perusahaan Penjaminan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), PT Pegadaian (Persero),

dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero). Total Aset LJKK naik 4,86% menjadi Rp174,50 triliun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

**Grafik I - 41** Pertumbuhan Aset LJK (dalam Triliun Rupiah)



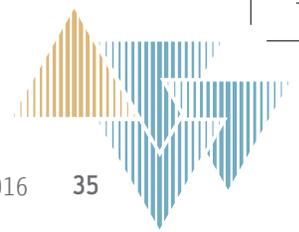
#### A. Perusahaan Penjaminan

Perusahaan Penjaminan didirikan untuk mendorong program pemerintah melalui peningkatan kemampuan akses UMKM melalui penjaminan kredit. Pada periode laporan, tercatat total aset perusahaan penjaminan naik 8% menjadi Rp15,38 triliun.

**Grafik I - 42** Pertumbuhan Aset Perusahaan Penjaminan (dalam Triliun Rupiah)



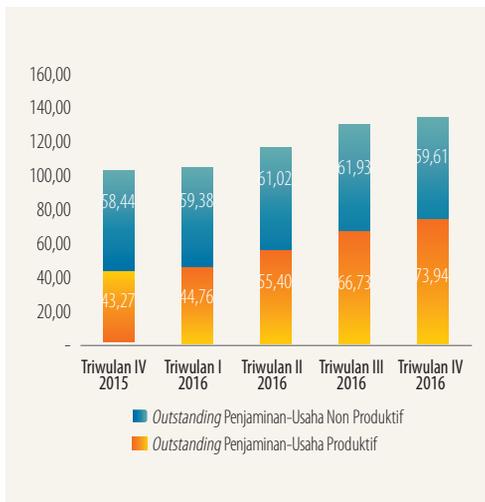
*Outstanding* penjaminan selama triwulan IV-2016 naik 3,80% menjadi Rp133,55 triliun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Peningkatan tersebut didorong oleh nilai *outstanding* penjaminan usaha produktif yang meningkat sebesar 10,81% walaupun untuk penjaminan usaha non-produktif turun sebesar 3,74% dibandingkan



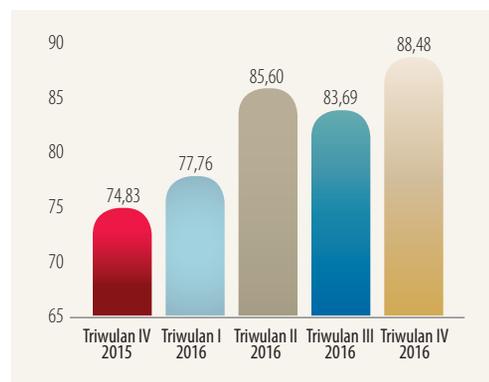
dengan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan *outstanding* penjaminan tersebut seiring dengan misi pemerintah untuk mendorong peningkatan kemampuan akses UMKM melalui penjaminan kredit.

Sampai dengan periode laporan, LPEI mencatat total pembiayaan sebesar Rp88,48 triliun atau naik 5,72%. Dari total pembiayaan tersebut, komposisi pembiayaan melalui sistem konvensional sebesar Rp75,18 triliun dan melalui sistem syariah sebesar Rp13,31 triliun.

**Grafik I - 43** Outstanding Penjaminan (dalam Triliun Rupiah)



**Grafik I - 45** Pertumbuhan Nilai Pembiayaan Ekspor Indonesia (dalam Triliun Rupiah)



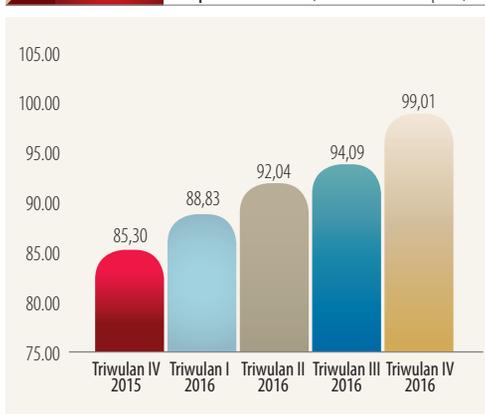
**B. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia**

Pendirian Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ekspor nasional. Total aset LPEI naik 5,23% menjadi Rp99,01 triliun.

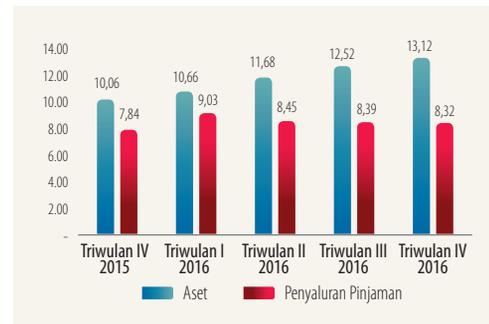
**C. Sarana Multigriya Finansial (SMF)**

Selama periode pelaporan, total aset PT. SMF (Persero) naik 4,78% menjadi Rp13,12 triliun. Meskipun demikian, nilai pinjaman yang disalurkan mengalami penurunan 0,82% dari triwulan sebelumnya menjadi Rp8,32 triliun.

**Grafik I - 44** Pertumbuhan Aset Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (dalam Triliun Rupiah)



**Grafik I - 46** Aset dan Outstanding Penyaluran Pinjaman PT SMF (Persero) (dalam Triliun Rupiah)

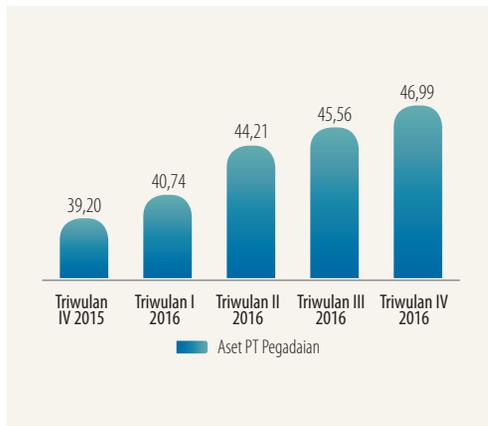


**D. Pegadaian**

PT. Pegadaian (Persero) bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya golongan menengah ke bawah

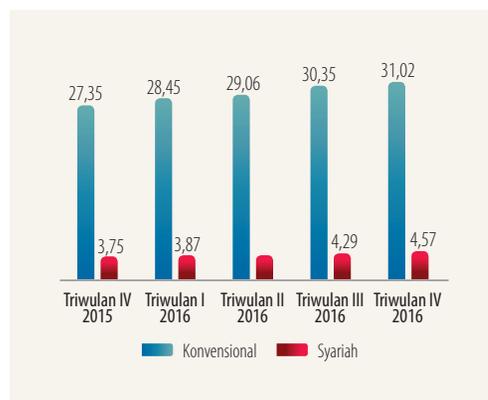
melalui penyaluran pinjaman kepada usaha skala mikro, kecil, dan menengah atas dasar hukum gadai dan fidusia. Pada periode laporan, total aset PT Pegadaian (Persero) tercatat naik 3,14% menjadi Rp46,99 triliun.

**Grafik I - 47** Pertumbuhan Aset PT Pegadaian (dalam Triliun Rupiah)



*Outstanding* pinjaman yang disalurkan pada triwulan IV-2016 sebesar Rp35,60 triliun, atau naik sebesar 2,76% dibandingkan triwulan sebelumnya. Kenaikan tersebut terjadi baik pada pinjaman konvensional maupun syariah. *Outstanding* konvensional naik sebesar 2,20%. Sementara itu, untuk *outstanding* syariah naik sebesar 6,67%.

**Grafik I - 48** *Outstanding* Pinjaman PT Pegadaian (Persero) (dalam Triliun Rupiah)



#### 1.4.7 Perkembangan Industri Jasa Penunjang IKNB

Industri Jasa Penunjang IKNB adalah industri yang mendukung kegiatan usaha perasuransian antara lain jasa keperantaraan dalam penutupan

asuransi, keperantaraan dalam penempatan reasuransi, serta penilaian klaim dan/atau jasa konsultasi atas objek asuransi.

Total aset meningkat dibandingkan periode sebelumnya, dengan peningkatan sebesar Rp0,44 triliun atau naik 6,46%. Di sisi lain, total pendapatan jasa keperantaraan turun sebesar Rp0,08 triliun dibandingkan semester II-2015.

**Tabel I - 46** Indikator Keuangan Industri Jasa Penunjang IKNB (dalam Triliun Rupiah)

No.	Jenis Indikator	Triwulan IV 2015	Triwulan I 2016	Triwulan II 2016	Triwulan III 2016	Triwulan IV 2016
1.	Total Aset	6,04	6,81	6,81	7,25	7,25
2.	Total Liabilitas	4,25	4,84	4,84	5,12	5,12
3.	Total Modal Sendiri	1,80	1,97	1,97	2,13	2,13
4.	Total Pendapatan Jasa Keperantaraan	1,01	1,14	1,14	1,06	1,06
5.	Total Laba Rugi	0,34	0,24	0,24	0,26	0,26

Selama periode pelaporan, terdapat pemberian izin kepada satu perusahaan Pialang asuransi dan satu perusahaan jasa penilai kerugian, sehingga sampai dengan periode laporan Jumlah Perusahaan Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Penilai Kerugian sampai akhir periode pelaporan adalah 237 perusahaan.

**Tabel I - 47** Jumlah Perusahaan Jasa Penunjang IKNB

No.	Jenis Perusahaan	Triwulan IV 2015	Triwulan I 2016	Triwulan II 2016	Triwulan III 2016	Triwulan IV 2016
1.	Pialang Asuransi	166	169	169	168	169
2.	Pialang Reasuransi	37	38	38	40	40
3.	Perusahaan Agen Asuransi	- *	- *	- *	- *	- *
4.	Jasa Penilai Kerugian	28	28	27	27	28
5.	Konsultan Aktuaria	- *	- *	- *	- *	- *
	<b>Jumlah</b>	<b>231</b>	<b>235</b>	<b>234</b>	<b>235</b>	<b>237</b>

\*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, sejak Januari 2015, OJK sudah tidak mengawasi perusahaan agen asuransi dan konsultan aktuaria.

#### 1.4.8. Perkembangan Industri Lembaga Keuangan Mikro

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) merupakan lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha. Jumlah Lembaga Keuangan Mikro yang telah mendapatkan izin usaha sampai akhir periode triwulan IV-2016 adalah sebanyak 129 LKM dengan total aset sebesar Rp283,84 miliar.

**Tabel I - 48** Jumlah Lembaga Keuangan Mikro

No.	Jenis Badan Usaha	Triwulan IV 2015	Triwulan I 2016	Triwulan II 2016	Triwulan III 2016	Triwulan IV 2016
1.	Konvensional	15	31	67	76	116
	Koperasi	15	19	51	59	99
	PT	-	12	16	17	17
2.	Syariah	5	11	12	13	13
	Koperasi	5	11	12	13	13
	PT	0	0	0	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>20</b>	<b>42</b>	<b>79</b>	<b>89</b>	<b>129</b>

**Tabel I - 49** Indikator Keuangan Lembaga Keuangan Mikro (dalam Miliar Rupiah)

No.	Jenis Indikator	Triwulan IV 2015	Triwulan I 2016	Triwulan II 2016	Triwulan III 2016	Triwulan IV 2016
1.	Aset	45,46	220,14	255,38	275,00	283,84
2.	Liabilitas	36,41	142,32	164,61	173,64	176,94
3.	Dana Syirkah Temporer	2,6	18,13	18,13	18,54	18,54
4.	Ekuitas	6,45	59,69	72,64	82,82	88,35
5.	Penempatan Dana	13,47	35,31	41,33	46,78	48,40
6.	Pinjaman Yang Diberikan	23,30	142,75	168,59	180,92	186,75
7.	Simpanan/Tabungan	31,78	123,70	142,49	148,87	151,38
8.	Pinjaman Yang Diterima	3,54	10,23	12,49	14,65	14,80
9.	Laba/Rugi	0,33	(21,50)	(29,07)	(29,15)	(29,10)

### 1.5 PERKEMBANGAN PROGRAM FLAGSHIP OJK

#### 1.5.1 Layanan Keuangan Tanpa Kantor (LAKU PANDAI)

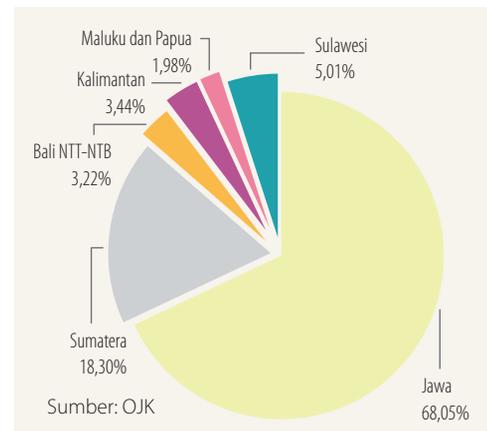
Selama periode laporan, OJK mencatat bahwa jumlah agen mencapai 276.369 agen (265.180 agen perorangan dan 11.189 outlet badan hukum). Terdapat 20 bank yang menjadi penyelenggara Laku Pandai, dengan rincian 18 BUK (termasuk tujuh BPD) dan dua BUS. Jumlah dana dan nasabah yang berhasil dihimpun masing-masing sebesar Rp216,5 miliar dan 3.700.215 nasabah. Dari 276.369 Agen Laku Pandai tersebut, sebesar 68,05% tersebar di wilayah pulau Jawa, 18,30% di pulau Sumatera, 5,01% di pulau Sulawesi, 3,44% di pulau Kalimantan, 1,98% di pulau Maluku dan Papua, dan sisanya 3,22% berada di pulau NTB-NTT-Bali.

**Tabel I - 50** Realisasi Laku Pandai Triwulan IV-2016

Agen Laku Pandai	
Perorangan	Outlet Badan Hukum
265.180	11.189
Nasabah Laku Pandai	
Jumlah Rekening	Outstanding Tabungan BSA
3.700.215	Rp216,5milyar

Sumber: OJK

**Grafik I - 49** Wilayah Penyebaran Agen Laku Pandai Triwulan IV-2016



Cakupan layanan terkait tabungan dengan karakteristik BSA, antara lain meliputi pembukaan rekening, penyetoran dan penarikan tunai, pemindahbukuan, serta pembayaran tagihan.

### 1.5.2 Jangkau, Sinergi, dan *Guideline* (JARING)

Sejak 2015, OJK bekerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk meluncurkan program Jangkau, Sinergi, dan *Guideline* (JARING). Program ini bertujuan menjawab kebutuhan *stakeholders* terhadap informasi tentang *database* Kelautan dan Perikanan, skim pembiayaan, pemetaan risiko bisnis dan dukungan regulasi dari otoritas terkait. Selama periode laporan, penyaluran kredit program JARING tumbuh 4,21% (*qtq*) menjadi Rp24,2 triliun. Pertumbuhan ini meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 2,13% (*qtq*). Selain itu, kualitas kredit program JARING yang disalurkan juga meningkat, terlihat dari NPL yang turun dari 2,20% menjadi 1,85%. Peningkatan kualitas kredit terjadi pada hampir seluruh kegiatan usaha program JARING kecuali pada kegiatan usaha penangkapan dengan NPL yang meningkat menjadi 3,05% dari sebelumnya 2,77%. Adapun penurunan NPL terbesar terjadi pada kegiatan usaha budidaya yaitu pembenihan biota air tawar dan air payau serta budidaya biota air tawar.

**Tabel I - 51** NPL Kegiatan Usaha Kredit Maritim (%)

Kegiatan Usaha	Triwulan I 2016	Triwulan II 2016	Triwulan III 2016	Triwulan IV 2016
Penangkapan	2,76	2,55	2,77	3,05
Budidaya	3,40	3,37	2,63	1,96
Jasa Sarana Produksi	5,82	6,76	2,68	2,21
Industri Pengolahan	0,34	1,59	1,58	0,84
Perdagangan	2,07	2,03	2,11	1,93
<b>NPL JARING</b>	<b>2,09</b>	<b>2,38</b>	<b>2,20</b>	<b>1,85</b>

Sumber: OJK, Desember 2016

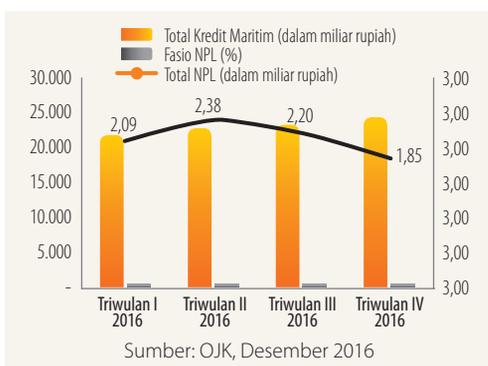
### 1.5.3 Simpanan Pelajar (SIMPEL)

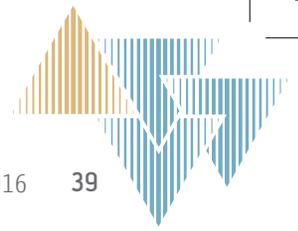
SimPel/SimPel iB adalah tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik untuk mendorong budaya menabung sejak dini. Sampai akhir periode laporan, terdapat 202 Bank yang menjadi peserta dalam program SimPel/SimPel iB dengan Jumlah rekening dan volume SimPel/SimPel iB masing-masing mencapai 2.506.605 dan Rp812,31 Miliar. Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang sudah terjalin antara Bank dan sekolah sebanyak 29.384 PKS. Selain itu, pada periode laporan, telah dilakukan aktivasi SimPel/SimPel iB dan *launching* Laku Pandai oleh Bank NTT.

### 1.5.4 Reksadana Penyertaan Terbatas (RDPT) Sektor Riil

Reksadana Penyertaan Terbatas (RDPT) Sektor Riil merupakan produk Reksa Dana yang diciptakan untuk mendukung pembangunan ekonomi melalui pengembangan sektor riil. Terdapat 69 RDPT sektor riil yang dikelola 21 MI senilai total Rp19,9 triliun. RDPT ini berinvestasi pada perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor pertanian, infrastruktur, telekomunikasi, properti, pemberdayaan UMKM, dan sektor usaha riil lainnya.

**Grafik I - 50** Kredit & NPL Sektor Maritim terkait JARING





### **1.5.5 Efek Beragun Aset – Surat Partisipasi (EBA SP)**

EBA-SP adalah program pembiayaan perumahan melalui penerbitan Efek Beragun Aset. Pada akhir periode laporan, OJK bersama IJK telah menerbitkan EBA-SP dengan nilai sebesar Rp1,7 Triliun.

### **1.5.6 Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)**

Sebagai bentuk implementasi amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani serta sebagai upaya untuk meminimalisir dampak negatif perubahan iklim dan gangguan serangan organisme pengganggu tanam yang menyebabkan gagal panen pertanian, OJK berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian dan lembaga terkait melaksanakan program perlindungan dan pemberdayaan petani melalui Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Luasan lahan yang terdaftar mengikuti program ini sampai dengan triwulan IV-2016 adalah 466.765,97 (ha).

### **1.5.7 Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)**

Program asuransi kepada Peternak sapi merupakan program asuransi yang memberikan ganti rugi kepada para peternak sapi apabila terjadi kematian pada sapi ternak. Sampai akhir periode laporan, jumlah ternak sapi yang

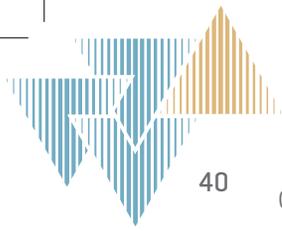
diikutsertakan dalam program ini mencapai 12.576 ekor sapi. Selain itu, realisasi premi yang sudah dikumpulkan untuk AUTS adalah sebesar Rp2,5 miliar.

### **1.5.8 Asuransi Nelayan**

Program Asuransi Nelayan ini merupakan salah satu upaya untuk memberikan perlindungan kepada nelayan dari risiko atau musibah saat melaut dengan premi yang terkangkau. Program ini juga diharapkan dapat memacu para nelayan untuk lebih mandiri. Sampai akhir periode laporan, capaian Asuransi Nelayan mencapai 409.116 orang nelayan dan total premi mencapai Rp71,59 miliar.

### **1.5.9 Asuransi Kerangka Kapal**

Asuransi penyingkiran kerangka kapal dilatarbelakangi adanya ketentuan Pasal 203 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 119 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian dan Pasal 18 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2013 tentang Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air, yang mengatur bahwa pemilik kapal wajib mengasuransikan kapalnya dengan asuransi penyingkiran kerangka kapal dan/atau perlindungan dan ganti rugi. Sampai akhir periode laporan, jumlah kapal yang dilindungi asuransi adalah 3.409.





## Tinjauan Operasional Sektor Jasa Keuangan



37 POJK yang mengatur Pengawasan Terintegrasi, Perbankan, PM, dan IKNB

Penerbitan POJK terkait dengan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi



Sistem Perizinan Registrasi Terintegrasi (SPRINT)- Penjualan Reksa Dana melalui Bank selaku APERD (Agen Penjual Efek Reksa Dana) dan Pendaftaran Akuntan Publik

Penerapan Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu



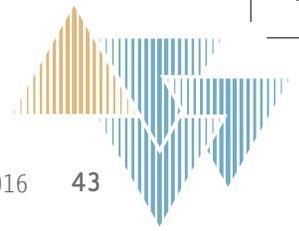
Kampanye Ayo Menabung

Pelaksanaan Survei Literasi dan Inklusi Keuangan kepada 9.680 responden di 34 provinsi yang tersebar di 64 kota/kabupaten di Indonesia



Penguatan 14 TPKAD di provinsi, kabupaten, dan kota

Pembentukan 38 Tim Kerja Satgas Waspada Investasi Daerah baik di tingkat provinsi/kabupaten maupun kota



## Tinjauan Operasional Sektor Jasa Keuangan

II

### 2.1 AKTIVITAS PENGATURAN

#### 2.1.1 Pengaturan Bank

Selama periode laporan, OJK menerbitkan tujuh POJK dan satu SEOJK terkait pengaturan Perbankan yang dijabarkan sebagai berikut :

1) **POJK Nomor 37/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis BPR dan BPRS**

Penerbitan peraturan ini bertujuan sebagai salah satu upaya dalam menerapkan prinsip tata kelola yang baik bagi BPR dan BPRS. BPR dan BPRS perlu menyusun dan menetapkan sasaran strategis dan nilai-nilai perusahaan yang dijabarkan lebih lanjut dalam rencana bisnis. Adapun pokok-pokok pengaturan yang diatur antara lain: (i) BPR dan BPRS wajib menyusun Rencana Bisnis secara realistis setiap tahun; (ii) Rencana strategis jangka panjang disusun dan ditetapkan selama lima tahun; dan (iii) Direksi wajib mengkomunikasikan Rencana Bisnis kepada pemegang saham BPR dan BPRS, dan seluruh jenjang organisasi pada BPR dan BPRS.

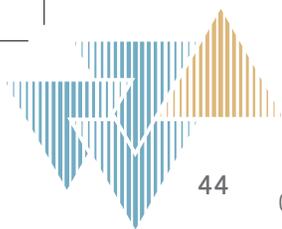
2) **POJK Nomor 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam**

**Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum**

Penerbitan peraturan ini bertujuan menerapkan manajemen risiko yang efektif dalam pengelolaan dan penggunaan teknologi informasi oleh Bank Umum. Adapun pokok peraturan yang diatur antara lain: (i) Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif dalam penggunaan Teknologi Informasi (TI) (ii) Penerapan manajemen risiko harus dilakukan secara terintegrasi dalam setiap tahapan penggunaan TI sejak proses perencanaan, pengadaan, pengembangan, operasional, pemeliharaan hingga penghentian dan penghapusan sumber data TI (iii) Penerapan manajemen risiko dalam penggunaan TI oleh bank wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha bank.

3) **POJK Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum**

Penerbitan peraturan bertujuan untuk meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan para *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri



perbankan. Adapun pokok pengaturan yang diatur antara lain: (i) Bank wajib melakukan penilaian sendiri atas penerapan tata kelola paling sedikit dua kali setahun; (ii) Bank wajib menyusun laporan pelaksanaan tata kelola pada setiap akhir tahun buku dan disampaikan kepada OJK; dan (iii) OJK berwenang meminta penyesuaian struktur organisasi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri untuk memastikan penerapan tata kelola dengan baik.

**4) POJK Nomor 56/POJK.03/2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum**

Peraturan ini bertujuan sebagai landasan hukum penataan struktur kepemilikan saham bank melalui penerapan batas maksimum kepemilikan saham sehingga dapat mengurangi dominasi kepemilikan yang dapat berdampak negatif terhadap operasional bank. Pokok peraturan yang diatur antara lain: (i) Batas maksimum kepemilikan saham; (ii) Batas maksimum kepemilikan saham tidak berlaku bagi pemerintah pusat dan lembaga yang memiliki fungsi melakukan penyelamatan bank serta (iii) Pemegang saham yang memiliki saham bank melebihi batas maksimum kepemilikan, wajib menyesuaikan dengan batas maksimum kepemilikan saham.

**5) POJK Nomor 57/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Umum yang melakukan Layanan Nasabah Prima**

Penerbitan peraturan ini bertujuan untuk memitigasi risiko yang diakibatkan oleh praktik penyediaan layanan perbankan kepada suatu segmen nasabah dengan keistimewaan tertentu. Adapun pokok peraturan yang diatur antara lain: (i) Bank yang akan melakukan Layanan Nasabah Prima (LNP) dan memenuhi kriteria sebagai aktivitas baru, wajib memperoleh persetujuan dari OJK dan (ii) Bank yang akan

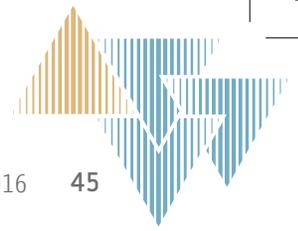
melakukan LNP yang memenuhi kriteria sebagai aktivitas baru wajib menyampaikan laporan rencana penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru dan laporan realisasi penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru mengacu pada POJK mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum dan POJK mengenai produk dan aktivitas bank umum syariah dan unit usaha syariah.

**6) POJK Nomor 62/POJK.03/2016 tentang Transformasi Lembaga Keuangan Mikro Konvensional Menjadi Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah**

Penerbitan peraturan ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan sistem keuangan inklusif nasional melalui pemanfaatan keberadaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) konvensional maupun syariah. Adapun pokok pengaturan yang diatur adalah: (i) Persyaratan transformasi Lembaga Keuangan Mikro Konvensional (LKMK) menjadi BPR atau Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) menjadi BPRS, yakni memiliki ekuitas paling sedikit lima kali dari persyaratan modal disetor minimum BPR atau BPRS dan jumlah DPK dalam bentuk simpanan yang dihimpun dalam satu tahun terakhir paling sedikit 25 kali dari persyaratan modal disetor minimum BPR atau BPRS dan (ii) LKMK Transformasi atau LKMS Transformasi harus memiliki modal inti paling sedikit Rp6 miliar dan rasio KPMM paling rendah sebesar 12% dari ATMR.

**7) POJK Nomor 75/POJK.03/2016 tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah**

Penerbitan peraturan ini bertujuan untuk melaksanakan pengendalian dan pengamanan Teknologi Informasi untuk meminimalisasi segala potensi risiko yang muncul pada BPR dan BPRS. Adapun pokok-pokok pengaturannya antara lain: (i) BPR



dan BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50 miliar wajib menyelenggarakan Teknologi Informasi yang paling sedikit berupa Aplikasi Inti Perbankan dan Pusat Data bagi BPR atau BPRS atau Aplikasi Inti Perbankan, Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana bagi BPR atau BPRS; (ii) BPR dan BPRS wajib menempatkan Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana di wilayah Indonesia serta (iii) BPR dan BPRS wajib menetapkan wewenang dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan Sumber Daya Manusia terkait penyelenggaraan teknologi informasi, serta memiliki kebijakan dan prosedur penyelenggaraan Teknologi Informasi.

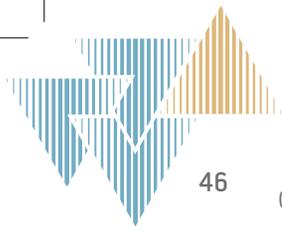
**8) SEOJK Nomor 52/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis BPR, dan SEOJK Nomor 53/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis BPRS.**

Peraturan ini merupakan peraturan pelaksana dari POJK 37/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat.

## 2.12 Pengaturan Pasar Modal

Selama periode laporan, OJK menerbitkan 20 POJK dan satu SEOJK terkait pengaturan Pasar Modal, sebagai berikut :

1. POJK 58/POJK.04/2016 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Bursa Efek  
Penerbitan peraturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik dan memperkuat struktur organisasi yang tangguh pada *Self Regulatory Organization/SRO* (Bursa Efek) untuk mendorong adanya kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas yang tinggi dalam jajaran manajemen SRO dalam rangka mewujudkan SRO yang memiliki daya saing yang kuat dalam berkompetisi di pasar global.
2. POJK 59/POJK.04/2016 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan  
Penerbitan peraturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik dan memperkuat struktur organisasi yang tangguh pada *Self Regulatory Organization/SRO* (Lembaga Kliring dan Penjaminan) untuk mendorong adanya kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas yang tinggi dalam jajaran manajemen SRO dalam rangka mewujudkan SRO yang memiliki daya saing yang kuat dalam berkompetisi di Pasar Global.
3. POJK 60/POJK.04/2016 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian  
Penerbitan peraturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik dan memperkuat struktur organisasi yang tangguh pada *Self Regulatory Organization/SRO* (Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian) untuk mendorong adanya kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas yang tinggi dalam jajaran manajemen SRO dalam rangka mewujudkan SRO yang memiliki daya saing yang kuat dalam berkompetisi di pasar global.
4. POJK 74/POJK.04/2016 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka  
Penerbitan peraturan tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi Perusahaan Terbuka yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha dengan kondisi dan persyaratan tertentu. Adapun pokok pengaturan yang diatur antara lain: (i) Rancangan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha wajib disetujui oleh masing-masing dewan komisaris perusahaan dan (ii) mengatur mengenai informasi yang wajib dimuat dalam Rancangan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha.
5. Selain melakukan penyusunan atau penyempurnaan peraturan bidang Pasar Modal, OJK telah melakukan konversi



- 16 Peraturan Bapepam dan LK menjadi Peraturan OJK yaitu:
- a. POJK 39/POJK.04/2016 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Reksa Dana Berbentuk Perseroan
  - b. POJK 40/POJK.04/2016 tentang Pedoman Anggaran Dasar Reksa Dana Berbentuk Perseroan
  - c. POJK 41/POJK.04/2016 tentang Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Perseroan
  - d. POJK 42/POJK.04/2016 tentang Laporan Bursa Efek
  - e. POJK 43/POJK.04/2016 tentang Laporan Lembaga Kliring dan Penjaminan
  - f. POJK 44/POJK.04/2016 tentang Laporan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
  - g. POJK 45/POJK.04/2016 tentang Pengawasan terhadap Wakil dan Pegawai Perusahaan Efek
  - h. POJK 46/POJK.04/2016 tentang Tata cara Pembuatan Peraturan oleh Bursa Efek
  - i. POJK 47/POJK.04/2016 tentang Tata cara Pembuatan Peraturan oleh Lembaga Kliring dan Penyimpanan
  - j. POJK 48/POJK.04/2016 tentang Tata cara Pembuatan Peraturan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
  - k. POJK 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal
  - l. POJK 50/POJK.04/2016 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal
  - m. POJK 51/POJK.04/2016 tentang Tata Cara untuk Meminta Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Pernyataan Pendaftaran
  - n. POJK 52/POJK.04/2016 tentang Prosedur Penangguhan Penawaran Umum
  - o. POJK 53/POJK.04/2016 tentang Pemeliharaan Dokumen oleh Biro Administrasi Efek dan Emiten yang Menyelenggarakan Administrasi Efek Sendiri
  - p. POJK 54/POJK.04/2016 tentang Laporan Berkala Kegiatan Penilai
6. SEOJK Nomor 45/SEOJK.04/2016 Persyaratan Penyelenggaraan Program Pendidikan Lanjutan Bagi Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek
- Penerbitan peraturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan dan menjaga kualitas pemegang izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek. Rancangan Surat Edaran ini dilatarbelakangi oleh adanya restrukturisasi Wakil Perusahaan Efek dan sebagai tindak lanjut dari Peraturan OJK Nomor 27/POJK.04/2014 tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek.

### 2.1.3 Pengaturan IKNB

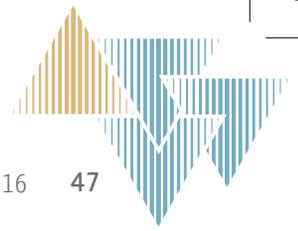
Selama periode laporan, OJK menerbitkan 10 POJK dan tiga SEOJK terkait pengaturan IKNB, sebagai berikut :

- 1) POJK nomor 35/POJK.05/2016 tentang Tata Penetapan Perintah tertulis pada Perusahaan Perasuransian

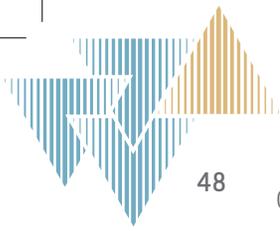
Penerbitan peraturan tersebut bertujuan untuk mengatur tata cara penetapan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan/atau pihak tertentu. Penerbitan peraturan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen, masyarakat, dan sektor jasa keuangan. Adapun pokok-pokok yang diatur antara lain: (i) Kewenangan OJK untuk menetapkan perintah tertulis kepada perusahaan perasuransian, pengendali, pengelola statuter, dan/atau pihak tertentu; dan (ii) Kewajiban perusahaan perasuransian, pengendali, pengelola statuter, dan/atau pihak tertentu untuk mematuhi perintah tertulis

- 2) POJK nomor 36/POJK.05/2016 tentang Perubahan atas POJK nomor 1/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara (SBN)

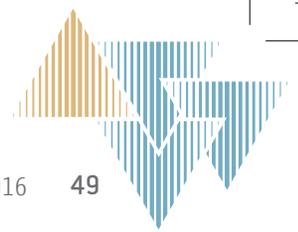
Penerbitan peraturan tersebut bertujuan untuk mengatur perluasan pilihan



- instrumen investasi SBN kepada Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank. Adapun pokok-pokok pengaturan antara lain: (i) Perluasan investasi ke obligasi/sukuk serta (ii) Batas minimum penempatan investasi ke obligasi/sukuk
- 3) POJK nomor 63/POJK.05/2016 tentang Perubahan atas POJK nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank  
Penerbitan peraturan bertujuan sebagai landasan hukum bagi OJK untuk melakukan pengawasan di bidang pengawasan Industri Keuangan Non-Bank. Adapun pokok-pokok materi pengaturannya antara lain (i) Perluasan obyek yang diawasi (Lembaga Penjamin); (ii) Perubahan frekuensi pemeriksaan bagian Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi dan (iii) Penerapan tata cara penerapan sanksi untuk setiap sektor jasa keuangan.
- 4) POJK nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah  
Penerbitan peraturan bertujuan mengatur mengenai tata cara perizinan bagi perusahaan perasuransian dan kelembagaan perasuransian. Pokok-pokok materi pengaturan antara lain: (i) Bentuk badan hukum, kepemilikan, nama perusahaan, dan permodalan; (ii) Pemegang saham pengendali dan pengendali; serta (iii) Susunan Organisasi.
- 5) POJK nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi  
Penerbitan peraturan bertujuan mengatur mengenai tata cara perizinan bagi perusahaan jasa penunjang bagi perasuransian seperti Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Reasuransi.  
Pokok-pokok yang diatur antara lain: (i) Bentuk Badan Hukum, Kepemilikan, Nama Perusahaan, Dan Permodalan; (ii) Perizinan usaha serta (iii) Pelaporan.
- 6) POJK nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah  
Penerbitan peraturan bertujuan mengatur mengenai kerja sama Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah dengan pihak lain, penutupan objek asuransi, standar perilaku usaha, jangka waktu penyerahan premi atau kontribusi dalam hal premi atau kontribusi dibayarkan melalui Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah, serta penanganan klaim dan keluhan melalui proses yang cepat, sederhana, mudah diakses, dan adil. Adapun pokok-pokok materi pengaturan yang diatur antara lain: (i) Penerapan prinsip syariah dalam penyelenggaraan usaha asuransi umum syariah, usaha asuransi jiwa syariah, dan usaha reasuransi syariah; (ii) Pengalihan sebagian portofolio pertanggungan; dan (iii) Kerja sama perusahaan dalam rangka memperoleh bisnis dan kerja sama dalam melaksanakan sebagian fungsi dalam penyelenggaraan usahanya: antara lain mengatur tentang alih daya larangan pengalihan daya.
- 7) POJK nomor 70/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi  
Peraturan ini bertujuan untuk mengatur mengenai kerja sama Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi dengan pihak lain. Peraturan ini juga mengatur tentang penutupan objek



- asuransi, standar perilaku usaha, jangka waktu penyerahan premi atau kontribusi yang dibayarkan melalui Perusahaan Pialang Asuransi atau Perusahaan Pialang Reasuransi, serta penanganan klaim dan keluhan melalui proses yang cepat, sederhana, mudah diakses, dan adil. Adapun pokok-pokok materi pengaturan yang diatur antara lain: (i) Ruang lingkup usaha Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi dan Penilai Kerugian Asuransi; (ii) Standar perilaku usaha; serta (iii) Rekening premi dan rekening operasional.
- 8) POJK nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi  
Penerbitan peraturan ini bertujuan untuk mengatur kewajiban pemisahan aset dan liabilitas, perubahan jenis risiko untuk perhitungan modal minimum berbasis risiko, penetapan target tingkat solvabilitas internal, penambahan jenis investasi dan bukan investasi yang diperkenankan, perubahan batasan investasi, penambahan sanksi denda administratif, dan penandatanganan laporan aktuaris perusahaan asuransi umum. Adapun pokok-pokok peraturan yang diatur antara lain: (i) Tingkat solvabilitas; (ii) Cadangan teknis dan (iii) Kecukupan investasi.
- 9) POJK nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah  
POJK ini mengatur perubahan jenis risiko dan perhitungan tingkat solvabilitas, penetapan target tingkat solvabilitas internal, penambahan jenis investasi dan bukan investasi yang diperkenankan, perubahan batasan investasi, penambahan sanksi denda administratif, dan penandatanganan laporan aktuaris perusahaan asuransi umum syariah. Adapun pokok-pokok materi pengaturan yang diatur antara lain: (i) Tingkat solvabilitas dana tabarru' dan dana tanahud; (ii) Tingkat solvabilitas dana perusahaan dan (iii) Kecukupan investasi.
- 10) POJK nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.  
Penerbitan peraturan ini bertujuan mengatur perusahaan perasuransian untuk memiliki Direksi Kepatuhan, pengaturan terkait *cooling off* bagi mantan Direksi yang ingin menjadi Komisaris Independen, pengaturan mengenai rangkap jabatan bagi Dewan Komisaris serta keanggotaan pihak lain dalam eksternal audit. Adapun pokok-pokok materi pengaturan yang diatur antara lain: (i) Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik; (ii) Rapat Umum Pemegang Saham serta (iii) Direksi.
- 11) SEOJK nomor 44/SEOJK.05/2016 tentang Kriteria Penunjukan, Penetapan Penggunaan, Dan Pengakhiran Pengelola Statuter Bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah  
SEOJK ini merupakan peraturan pelaksana dari POJK nomor 41/POJK.05/2015 yang berisikan tentang petunjuk dan kriteria penunjukan, penetapan, pengakhiran, dan penggantian penggunaan pengelola statuter bagi perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah. Pokok pengaturan yang diatur dalam SE ini antara lain: (i) Kriteria penunjukan dan penetapan penggunaan pengelola statuter dan (ii) Pihak yang ditunjuk sebagai pengelola statuter.
- 12) SEOJK nomor 47/SEOJK.05/2016 tentang Besaran Uang Muka (*Down Payment*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor bagi Perusahaan Pembiayaan  
Peraturan ini merupakan peraturan pelaksanaan dari POJK nomor 29/POJK.05/2014 yang mengatur mengenai batasan minimal besaran uang muka pembiayaan kendaraan bermotor beserta tata cara perhitungan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh Perusahaan



Pembiayaan. Adapun pokok-pokok materi pengaturan yang diatur antara lain: (i) Besaran Uang Muka (*Down Payment*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bagi Perusahaan Pembiayaan dan (ii) Jangka Waktu Pemberlakuan Besaran Uang Muka (*Down Payment*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor.

- 13) SEOJK nomor 48/SEOJK.05/2016 tentang Besaran Uang Muka (*Down Payment/Urbun*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor untuk Pembiayaan Syariah

Surat Edaran ini mengatur mengenai batasan minimal besaran uang muka pembiayaan kendaraan bermotor beserta tata cara perhitungan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah. Pokok-pokok materi pengaturan antara lain: (i) Besaran Uang Muka (*Down Payment/Urbun*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bagi Perusahaan Syariah; (ii) Jangka Waktu Pemberlakuan Besaran Uang Muka (*Down Payment/Urbun*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor dan (iii) Tata Cara Perhitungan Besaran Uang Muka (*Down Payment/Urbun*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor.

## 2.2 AKTIVITAS PENGAWASAN

### 2.2.1 Pengawasan Terintegrasi

Selama periode laporan, OJK melakukan Pengkinian *Know Your Financial Conglomerate* (KYFC) oleh 23 Grup Konglomerasi Keuangan (KK) serta telah disusun *Integrated Risk Rating* (IRR) dan *Integrated Supervisory Plan* (ISP) oleh enam Grup KK. Selain itu OJK juga melakukan sosialisasi pengawasan terintegrasi kepada Tenaga Ahli (TA) Komisi XI DPR.

### 2.2.2 Pengawasan Perbankan

#### A. Pemeriksaan Umum dan Pemeriksaan Khusus

Selama 2016, OJK melakukan pemeriksaan terhadap 1.992 bank yang terdiri dari 1.974 kantor pusat dan 558 kantor cabang. Dari 1.992 bank tersebut, 1.837 adalah kantor BPR dan BPRS dan 155 adalah kantor bank umum dan unit usaha syariah.

OJK juga melakukan pemeriksaan khusus di mana pemeriksaan tersebut dilakukan secara insidental dan berkaitan dengan aspek tertentu dari bank. Selama periode laporan, pemeriksaan khusus sebanyak 197 subjek terhadap BUK dan BPR terkait dengan pemeriksaan suku bunga, setoran modal, aktivitas operasional, aktivitas treasuri, *joint audit*, GCG, penetapan pencabutan, teknologi dan informasi, *fraud*, serta pemeriksaan kesiapan rencana bank devisa.

**Tabel II - 1** Pemeriksaan Khusus Bank

Subjek Pemeriksaan	Triwulan IV-2016
Suku Bunga	2
Setoran Modal	54
Aktivitas Operasional	88
Teknologi dan Informasi	9
Aktivitas Treasuri	3
<i>Joint Audit</i>	3
GCG	2
<i>Fraud</i>	4
Penetapan Pencabutan	2
Pemeriksaan Kesiapan Rencana Bank Devisa	1
Lainnya	29
<b>TOTAL</b>	<b>197</b>

#### B. Perizinan Produk dan Aktivitas Bank

Terkait dengan perizinan produk dan aktivitas bank, OJK menerbitkan 48 perizinan yang sebagian besar terkait dengan Reksa Dana dan *bancassurance*.

**Tabel II - 2** Produk dan Aktivitas Baru Perbankan Triwulan IV-2016

Produk/Aktivitas Baru	Triwulan IV-2016
Reksa Dana	17
Bancassurance	13
E-banking	3
Money Remittance	1
Surat berharga (Obligasi/MTN/Sukuk)	1
Pendanaan	1
Structured Product	1
Bank Devisa	1
Aktivitas Call Center	1
Cash Management	1
Lainnya	8
<b>TOTAL</b>	<b>48</b>

Sumber: OJK

### C. Penegakan Kepatuhan Bank

- 1) Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Existing*)  
 Dalam rangka melindungi industri bank dari pihak-pihak yang diindikasikan tidak memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan, secara berkesinambungan telah dilakukan penilaian kembali atas kemampuan dan kepatutan terhadap Direksi, Komisaris, Pemegang Saham Pengendali (PSP), dan Pejabat Eksekutif. Selama periode laporan, tidak terdapat tambahan pengurus/pengelola dan pegawai bank yang telah menjalani proses *Fit and Proper Test Existing*. Sementara itu, terkait untuk *database track record* (TR), selama periode laporan terdapat 137 pelaku dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel II - 3** Jumlah Track Record

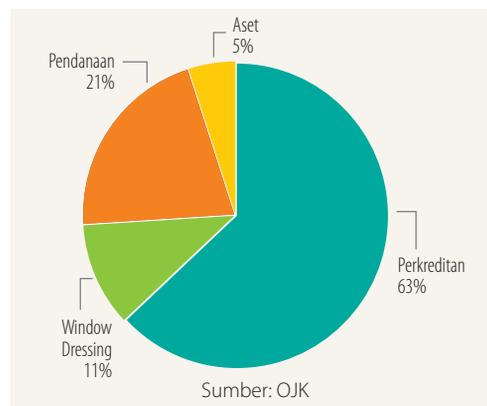
Objek Track Record	Jumlah Input TR
Dewan Komisaris	8
Direksi	68
Pejabat Eksekutif	23
Non Pejabat Eksekutif	38
<b>TOTAL</b>	<b>137</b>

Sumber: OJK

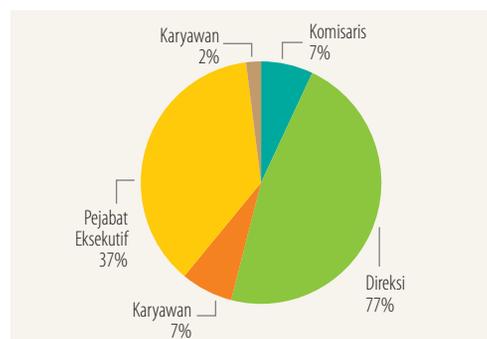
- 2) Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan

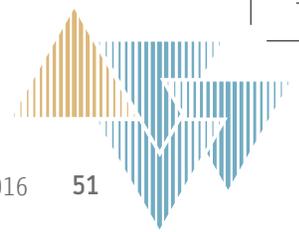
Selama triwulan IV-2016, OJK menindaklanjuti 10 Penyimpangan Ketentuan Perbankan (PKP) yang pada enam kantor bank. Selanjutnya, terdapat investigasi pada 11 PKP pada empat kantor bank yang sebagian merupakan *carry over* PKP dari triwulan sebelumnya. OJK juga menangani dugaan tindak pidana kredit sebesar 63%, diikuti 21% terkait penyalahgunaan dana, 11% terkait *window dressing* dan 5% terkait pengadaan aset. Adapun pelaku dugaan tipibank didominasi oleh Direksi yang mencapai 20 orang atau sekitar 47% dan Pejabat Eksekutif yang mencapai 16 orang atau sekitar 37%, selanjutnya diikuti oleh komisaris dan karyawan bank masing-masing sebanyak tiga orang, dan pemegang saham sebanyak satu orang.

**Grafik II - 1** Sebaran Jenis Dugaan Tipibank Pada Triwulan IV-2016



**Grafik II - 2** Pelaku *Fraud* yang diduga Tipibank Pada Triwulan IV-2016





3) Pemberian Keterangan Ahli atau Saksi Selama periode laporan, OJK menindaklanjuti 215 permintaan pemberian keterangan ahli dan/atau saksi kepada Kepolisian atau Kejaksaan, di mana 171 pemberian keterangan diserahkan kepada Kepolisian dengan masing-masing sembilan keterangan saksi dan 162 keterangan ahli; serta 44 keterangan lainnya yang diberikan kepada kejaksaan. Keterangan ahli yang diberikan terkait kasus-kasus yang pernah ditangani OJK maupun terhadap kasus-kasus yang dilaporkan oleh pihak bank atau pihak lainnya kepada Kepolisian atau Kejaksaan.

**Tabel II - 4** Pemberian Keterangan Ahli/Saksi Tahun 2016

No.	Klasifikasi	Permintaan		
		Total	Saksi	Ahli
1.	Kepolisian	171	9	162
2.	Kejaksaan	44	6	38
<b>TOTAL</b>		<b>215</b>	<b>15</b>	<b>200</b>
			<b>215</b>	

Sumber: OJK

#### D. Kelembagaan Bank Umum

1) Perizinan  
 Pada periode laporan, OJK menyelesaikan 131 perizinan perubahan jaringan kantor bank umum yang terdiri dari perubahan nama, pembukaan kantor, penutupan kantor, pemindahan alamat kantor, dan perubahan status.

Selain itu, terjadi perubahan nama pada dua bank yaitu PT Bank Ekonomi Raharja menjadi PT HSBC Indonesia dan PT Bank Windu Kentjana Internasional Tbk menjadi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Sementara itu, perubahan perizinan lainnya didominasi oleh pemindahan alamat bank umum (31,30% - 41 perizinan), diikuti dengan perubahan status kantor (29,77% - 39 perizinan), penutupan kantor (21,37% - 28 perizinan), dan pembukaan kantor (15,27% - 20 perizinan).

**Tabel II - 5** Perizinan Perubahan Jaringan Kantor Bank Umum Konvensional

NO.	JENIS KEGIATAN	Triwulan II-2016	Triwulan III-2016
1	Pembukaan Bank Umum		
a.	Kantor Wilayah (Kanwil)	3	1
b.	Kantor Cabang (KC)	2	7
c.	Kantor Cabang Pembantu (KCP)	8	7
d.	Kantor Fungsional (KF)	5	4
e.	Kantor Perwakilan Bank Umum di Luar Negeri	-	1
2	Penutupan Bank Umum		
a.	Izin Usaha	-	-
b.	Kantor Perwakilan	-	-
c.	Kantor Cabang (KC)	5	3
d.	Kantor Cabang Pembantu (KCP)	40	23
e.	Kantor Fungsional (KF)	4	2
3	Pemindahan Alamat Bank Umum		
a.	Kantor Pusat (KP)	1	-
b.	Kantor Wilayah (Kanwil)	4	1
c.	Kantor Cabang (KC)	4	8
d.	Kantor Cabang Pembantu (KCP)	27	31
e.	Kantor Fungsional (KF)	-	1
f.	Kantor Perwakilan Bank	-	-
4	Perubahan Status Bank Umum		
a.	Peningkatan Status		
	- KCP menjadi KC	22	11
	- KK menjadi KCP	13	16
	- KF menjadi KCP	-	-
	- KK menjadi KC	-	-
b.	Penurunan Status Bank Umum		
	- KP menjadi KC	-	-
	- KC menjadi KCP	4	10
	- KCP ke KF/KK	2	-
5	Perubahan Penggunaan Izin Usaha (Perubahan Nama)	1	2
6	Perubahan Badan Hukum	-	-
7	Merger Bank Umum	-	2
8	Izin bank Devisa	-	1
9	Pembukaan Kantor Perwakilan Bank Luar Negeri di Indonesia	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>145</b>	<b>131</b>

Sumber: LKPBU, Desember 2016

\*)Ket: Hanya mencakup perubahan perizinan jaringan kantor di wilayah Jabodetabek

#### 2) Jaringan Kantor

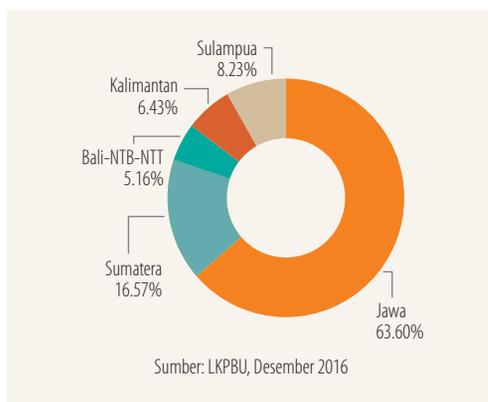
OJK mencatat bawah jaringan kantor BUK mengalami peningkatan sebanyak 2.085 jaringan kantor menjadi 135.819 jaringan kantor. Peningkatan terbesar terjadi pada ATM/ADM sebanyak 2.039. Sedangkan untuk KCP dalam negeri mengalami pengurangan terbesar sebanyak 60 kantor.

**Tabel II - 6** Jaringan Kantor Bank Umum Konvensional

STATUS KANTOR	Triwulan III-2016	Triwulan IV-2016
Kantor Pusat Operasional	52	52
Kantor Pusat Non Operasional	55	55
Kantor Cabang Bank Asing	10	10
Kantor Wilayah Bank Umum (Konvensional+Syariah)	161	165
Kantor Cabang (Dalam Negeri)	2,868	2,876
Kantor Cabang (Luar Negeri)	-	-
Kantor Cabang Pembantu Bank Asing	33	33
Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri)	16,956	16,896
Kantor Cabang Pembantu (Luar Negeri)	-	-
Kantor Kas	10,660	10,714
Kantor Fungsional (Konvensional+Syariah)	1,672	1,639
Payment Point	1,660	1,719
Kas Keliling/Kas Mobil/Kas Terapung	1,475	1,489
Kantor di bawah KCP KCBA yang Tidak Termasuk 11,12,13,14 *)	24	24
Kantor Perwakilan Bank Umum di Luar negeri	2	2
ATM/ADM	98,106	100,145
<b>TOTAL</b>	<b>133,734</b>	<b>135,819</b>

Sumber: LKPBU, Desember 2016

Berdasarkan pembagian wilayah, sebaran jaringan kantor BUK sebagian besar berada di pulau Jawa dengan jumlah sebanyak 86.381 jaringan kantor (63,60%), diikuti pulau Sumatera 22.511 (16,57%), Sulampua 11.181 (8,32%), Kalimantan 8.731 (6,43%), dan Bali-NTB-NTT 7.015 (5,16%).

**Grafik II - 3** Penyebaran Jaringan Kantor BUK di Indonesia Triwulan IV-20163) Uji Kemampuan dan Kepatutan (*New Entry*)

Pada periode laporan, terdapat 49 pemohon FPT *New Entry* yang lulus mengikuti proses wawancara, terdiri dari 21 anggota Dewan Komisaris dan 28 anggota Direksi. Dari 49 yang lulus proses wawancara tersebut, 52 peserta mendapatkan Surat Keputusan Lulus, mencakup *carry over* dari triwulan sebelumnya.

**Tabel II - 7** FPT Calon Pengurus dan PSP Bank Umum Selama Triwulan IV-2016

New Entry	Wawancara		Surat Keputusan (SK) FPT		Jumlah Tidak ditindak-lanjuti	Triwulan IV - 2016
	Lulus	Tidak Lulus	Lulus	Tidak Lulus		
PSP/PSPT	0	0	0	0	1	1
Dewan Komisaris	21	1	22	1	6	51
Direksi	28	1	30	0	9	68
Total	49	2	52	1	16	120

Sumber: OJK

## E. Kelembagaan BPR

## 1) Perizinan

Selama periode laporan, terdapat enam permohonan perizinan pendirian dan dua permohonan *merger* BPR yang telah diselesaikan. Selain itu, terdapat satu pencabutan izin usaha terhadap PT BPR Multi Artha Mas Sejahtera.

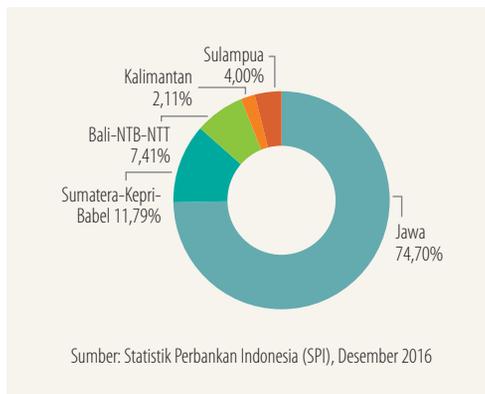
**Tabel II - 8** Perizinan BPR

Perizinan BPR	Triwulan III-2016	Triwulan IV-2016
Pendirian BPR	3	6
Merger BPR	-	2
Konsolidasi BPR	-	-
BPR dalam Pengawasan Khusus	11	10
Pencabutan Izin Usaha	2	1
Konversi Syariah	-	-
<b>Total</b>	<b>16</b>	<b>19</b>

Sumber: SIMWAS BPR, Desember 2016

- 2) Jaringan Kantor  
 Selama triwulan IV-2016, OJK mencatat bahwa terdapat penambahan tiga BPR menjadi 1.633 BPR. Jumlah jaringan kantor dari 1.633 BPR tersebut berkurang 11 kantor menjadi 6.075 jaringan kantor. Penyebaran jaringan kantor pada lima wilayah di Indonesia masih belum merata, terpusat di wilayah Jawa (74,70% atau 4.538 kantor), diikuti wilayah Sumatera (11,79% atau 716 kantor), wilayah Bali-NTB-NTT (7,41% atau 450 kantor), wilayah Sulampua (4% atau 243 kantor), dan wilayah Kalimantan (2,11% atau 128 kantor).

**Grafik II - 4** Penyebaran Jaringan Kantor BPR Triwulan IV-2016



- 3) Uji Kemampuan dan Kepatutan (*New Entry*)  
 Pada triwulan IV-2016, telah dilakukan *FPT New Entry* kepada 152 calon pengurus dan PSP BPR dengan hasil 122 calon Pengurus/PSP BPR yang mendapatkan persetujuan untuk menjadi Direksi, Komisaris dan PSP, serta 30 calon yang ditolak.

**Tabel II - 9** Daftar Hasil *Fit and Proper Test New Entry* BPR

New Entry	2016					
	Triwulan III			Triwulan IV		
	Lulus	Tidak Lulus	Total	Lulus	Tidak Lulus	Total
Direksi	70	34	104	49	21	70
Komisaris	53	16	69	60	9	69
PSP	5	0	5	13	0	13
<b>Jumlah</b>	<b>128</b>	<b>50</b>	<b>178</b>	<b>122</b>	<b>30</b>	<b>152</b>

Sumber: SIMWAS BPR

## 2.2.3 Pengawasan Pasar Modal

### A. Pengawasan Lembaga dan Transaksi Efek

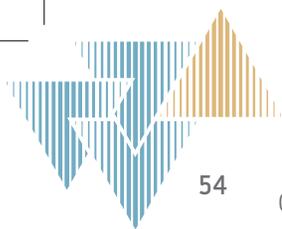
#### 1) Pengawasan Transaksi Saham

Sampai akhir periode laporan, OJK melakukan *monitoring* terhadap 122 saham atas hasil pantauan laporan harian, mingguan, dan bulanan perdagangan yang diindikasikan tidak wajar, di mana sebanyak delapan saham dalam tahap penelaahan dan 85 saham di-*discard*, serta 29 saham dalam tahap *monitoring*. OJK juga melakukan penelaahan terhadap perdagangan delapan saham sebagai tindak lanjut dari hasil kegiatan *monitoring unusual market activity* di mana aktivitas perdagangan atas saham tersebut diindikasikan tidak wajar, dari delapan saham tersebut satu saham sedang dilakukan penelaahan dan tujuh saham ditingkatkan ke pemeriksaan teknis.

Selain itu, terkait dengan pemeriksaan teknis, OJK memeriksa tujuh saham sebagai tindak lanjut dari proses penelaahan untuk membuktikan adanya indikasi transaksi semu, manipulasi perdagangan dan/atau perdagangan orang dalam, di mana satu saham dalam tahap pemeriksaan, dan enam lainnya selesai diperiksa dan sedang dilimpahkan.

#### 2) Pengawasan Transaksi Surat Utang dan Efek Lainnya.

Terkait dengan pengawasan transaksi Surat Utang dan Efek Lainnya, OJK melakukan penelaahan atas laporan dari Penerima Laporan Transaksi Efek (PLTE) bulan Oktober dan November berupa keterlambatan pelaporan transaksi Efek masing-masing oleh 18 dan 22 partisipan dengan total frekuensi keterlambatan masing-masing sebanyak 84 dan 160 kali. OJK juga melakukan *review alert* pada bulan Oktober, November, dan Desember yang menghasilkan 4.961



*alert* obligasi pemerintah, 1.989 *alert* obligasi korporasi dan 192 *alert* waran. Selama periode laporan, OJK menerima permohonan pembatalan pelaporan transaksi obligasi pada sistem PLTE oleh enam Partisipan yang terdiri dari lima pelaporan. Dari lima laporan tersebut empat pelaporan disetujui permohonan pembatalannya.

3) Pengawasan *Self Regulatory Organization*, Lembaga Penilai harga Efek dan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal

Terkait dengan pengawasan terhadap *Self Regulatory Organization* (SRO), Lembaga Penilai Harga Efek (LPHE) dan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP), OJK telah melakukan beberapa kegiatan pengawasan antara lain: (i) Menyetujui revisi RKAT PT BEI, PT KPEI, PT KSEI tahun 2016; (ii) Tanggapan terhadap realisasi anggaran PT BEI, PT KPEI, PT KSEI Triwulan III-2016; (iii) Penyampaian surat tanggapan atas penyampaian Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) PT BEI, PT KPEI, PT KSEI dan PT P3IEI tahun 2017 serta (iv) Penyampaian surat tanggapan kepada KSEI atas penggunaan data kependudukan dan Kementerian Dalam Negeri.

4) Pengawasan Perusahaan Efek

Terkait dengan perizinan, OJK menyetujui 32 perubahan susunan Direksi, 13 perubahan susunan Komisaris, dan tiga proses persetujuan perubahan pemegang saham. OJK juga menyetujui dua permintaan peningkatan modal disetor yang diajukan oleh Perusahaan Efek. Selama periode laporan, OJK melakukan analisis dan pemantauan atas laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) terhadap 132 Perusahaan Efek, di mana rata-rata total MKBD meningkat 1,91% menjadi Rp18,8 triliun. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan nilai aset lancar industri yang

lebih besar daripada kenaikan liabilitas industri.

OJK juga melakukan analisis dan pemantauan atas 23 Perusahaan Efek yang melakukan Penjaminan Emisi Efek terhadap 18 Emiten. Selanjutnya, OJK memantau Laporan Kegiatan Perantara Pedagang Efek (LKPPE) untuk periode September 2016 sampai dengan LKPPE periode November 2016, di mana sembilan Perusahaan Efek belum menyampaikan LKPPE dan satu Perusahaan Efek terlambat menyampaikan LKPPE periode bulan November 2016.

5) Pemeriksaan Kepatuhan Lembaga Efek

Sampai akhir periode laporan, OJK melakukan pemeriksaan terhadap tiga *Self Regulatory Organization* (SRO) yaitu PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Pemeriksaan BEI difokuskan pada aspek perdagangan Efek, pengembangan dan perencanaan strategis serta organisasi. Sementara itu, pemeriksaan terhadap KPEI difokuskan pada operasional informasi teknologi, pengadaan, dan keamanan informasi. Laporan Hasil Pemeriksaan BEI dan KPEI telah diselesaikan. Sementara itu, Laporan Hasil Pemeriksaan KSEI dalam proses penyusunan.

6) Pemeriksaan Kepatuhan Perusahaan Efek

OJK melakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap 44 Perusahaan Efek yang terdiri dari 34 kantor pusat Perusahaan Efek dan 10 kantor cabang Perusahaan Efek. Dari hasil pemeriksaan terhadap Perusahaan Efek, 39 Perusahaan Efek diminta untuk melakukan langkah-langkah perbaikan guna pemenuhan perundang-undangan Pasar Modal yang berlaku, empat Perusahaan Efek direkomendasikan untuk pencabutan

izin Perusahaan Efek, dan satu Perusahaan Efek direkomendasikan untuk penghentian sementara kegiatan usaha (suspensi).

7) Pemeriksaan Teknis

Sampai dengan triwulan IV-2016, OJK menerima 11 pengaduan yang terkait dengan Pasar Modal, di mana empat diantaranya telah selesai dilakukan penelaahan, sedangkan tujuh pengaduan lainnya sedang dalam proses penanganan.

**B. Pengawasan terhadap Pengelolaan Investasi**

OJK melakukan pemeriksaan kepatuhan pelaku industri pengelolaan investasi terhadap 25 kantor pusat Manajer Investasi (MI), tiga kantor cabang MI, 45 kantor cabang APERD, tiga Bank Kustodian dan tiga KIK EBA. Sampai dengan triwulan IV-2016, sebanyak 15 MI telah selesai Laporan Hasil Pemeriksaannya (LHP), empat MI dalam proses finalisasi LHP, dan enam MI masih dalam tahap proses permintaan konfirmasi ke MI.

Pemeriksaan kepatuhan terhadap APERD, sebanyak 42 APERD telah selesai LHP-nya dan tiga APERD dalam proses finalisasi LHP. Untuk pemeriksaan kepatuhan terhadap BK, sebanyak dua BK telah selesai LHP-nya dan satu BK dalam proses finalisasi. Terkait pemeriksaan terhadap tiga KIK EBA, seluruhnya telah selesai LHP-nya. OJK juga melakukan pengawasan melalui *E-monitoring*. Selama periode laporan OJK melakukan pembenahan dan pengembangan sistem *E-monitoring* yang ada, sehingga sistem *E-Monitoring* dapat dijadikan sebagai alat yang andal dan terpercaya dalam melakukan pemantauan.

**C. Pengawasan terhadap Emiten dan Perusahaan Publik**

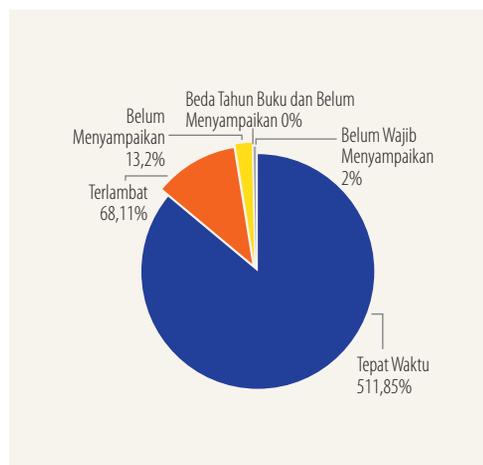
Selama periode laporan, OJK melakukan pengawasan atas berbagai aksi korporasi yang dilakukan oleh Emiten dan Perusahaan Publik, yaitu sebagai berikut:

**Tabel II - 10** Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik

No	Aksi Korporasi	Triwulan IV
1.	Transaksi Afiliasi	63
2.	Transaksi Afiliasi Bersamaan dengan Transaksi Material	-
3.	Transaksi Material Tidak Memerlukan RUPS	3
4.	Transaksi Material yang Harus Terlebih Dahulu Mendapat Persetujuan RUPS	2
5.	Transaksi Perubahan Kegiatan Usaha Utama	-
6.	Pembagian Saham Bonus	-
7.	Pembagian Dividen Berupa Kas	2
8.	Pembagian Dividen Saham	-
9.	Laporan <i>Buyback</i> Saham	1
10.	Laporan <i>Buyback</i> Saham dalam Kondisi Pasar yang Berpotensi Krisis	4
11.	Pembelian Kembali Obligasi	-
12.	Penelaahan terhadap Program <i>ESOP/MSOP</i>	3
13.	Penelaahan atas Rencana Penggabungan Usaha	2
14.	Penelaahan atas Penawaran <i>Tender</i>	-
15.	Penelaahan atas Penawaran <i>Tender</i> Sukarela	-
16.	Penelaahan atas Rencana Penambahan Modal Tanpa HMETD	3
17.	Penelaahan <i>Go Private</i>	-

OJK juga melakukan pemantauan atas penyampaian laporan berkala sebagai berikut:

**Grafik II - 5** Penyampaian LKT 2015



**Grafik II - 6** Penyampaian LT 2015

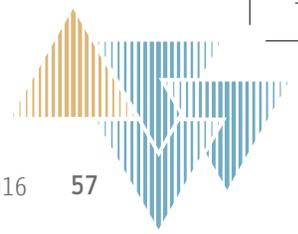


**Grafik II - 7** Penyampaian LKTT 2016



OJK melakukan pemantauan atas kesesuaian dengan ketentuan Pasar Modal terhadap 248 laporan keterbukaan atas informasi atau fakta material, 11 laporan hasil pemeringkatan efek, 62 hasil RUPS, serta 20 laporan penjatahan Penawaran Umum. Selain itu, OJK juga melakukan rekapitulasi terhadap laporan hutang valas yang disampaikan setiap bulan oleh Emiten dan Perusahaan Publik, dengan jumlah total laporan pada triwulan IV-2016 sebanyak 508 laporan dengan tujuan untuk melihat *exposure* hutang valas terhadap Emiten dan Perusahaan Publik. Selama periode laporan, OJK juga melakukan Pemeriksaan Teknis terhadap 17 Emiten dan Perusahaan Publik yaitu:

- a. Dua Emiten dan Perusahaan Publik untuk memastikan pemenuhan Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu;
- b. Satu Emiten dan Perusahaan Publik untuk memastikan pemenuhan Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan Pemahaman Proses Bisnis Perusahaan;
- c. Dua Emiten dan Perusahaan Publik untuk memastikan pemenuhan Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan;
- d. Satu Emiten dan Perusahaan Publik untuk memastikan pemenuhan Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama;
- e. Satu Emiten dan Perusahaan Publik untuk memastikan pemenuhan Peraturan Nomor X.K.6 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik;
- f. Satu Emiten dan Perusahaan Publik untuk memastikan pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Peraturan Nomor X.K.6 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik, dan Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu;
- g. Satu Emiten dan Perusahaan Publik untuk memastikan adanya dugaan pelanggaran tentang Kelangsungan



- Usaha (*going concern*) dan Peraturan Nomor X.K.2 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik;
- h. Satu Emiten dan Perusahaan Publik untuk memastikan adanya dugaan pelanggaran tentang Kelangsungan Usaha (*going concern*), Peraturan Nomor X.K.6 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik, dan Peraturan Nomor X.K.2 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik;
  - i. Satu Emiten dan Perusahaan Publik untuk memastikan adanya dugaan pelanggaran Peraturan Nomor X.K.2 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik;
  - j. Tiga Emiten dan Perusahaan Publik untuk memastikan adanya dugaan pelanggaran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum; dan
  - k. Tiga Emiten untuk memastikan pemenuhan peraturan terkait Tata Kelola Perusahaan yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik, Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi Dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik, Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik, Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, dan Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

#### D. Pengawasan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

Selama periode laporan, OJK melakukan penelaahan atas 65 laporan perubahan data dan informasi Profesi Penunjang Pasar Modal, yang terdiri dari 32 laporan dari Akuntan, sembilan laporan dari Konsultan Hukum, 21 laporan dari Penilai dan tiga laporan dari Notaris. OJK juga melakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap tiga Biro Administrasi Efek, lima Bank Kustodian dan tiga Wali Amanat dan telah LHP terhadap tiga Biro Administrasi Efek, lima Bank Kustodian dan tiga Wali Amanat.

OJK melakukan *Monitoring on-site* terhadap satu Biro Administrasi Efek dan dua Bank Kustodian dan telah menyelesaikan Laporan Hasil *Monitoring*. OJK juga melakukan penelaahan atas 42 permohonan izin sebagai Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) dan telah mengeluarkan empat Surat Keputusan Izin ASPM.

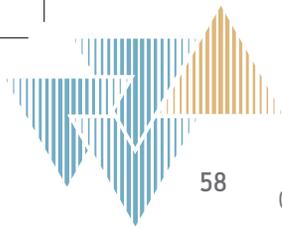
#### E. Penegakan Hukum Industri Pasar Modal

##### 1) Pemeriksaan Pasar Modal

Salah satu tugas OJK adalah mengawasi kegiatan di Pasar Modal, baik melalui upaya preventif maupun represif dalam bentuk penegakan hukum. Efektivitas penegakan hukum akan mempengaruhi kredibilitas OJK. Dari sisi industri, penegakan hukum yang efektif merupakan faktor krusial dalam membentuk tingkat kepercayaan serta kepastian hukum di sektor jasa keuangan.

Sampai dengan triwulan IV-2016, OJK telah melakukan pemeriksaan Pasar Modal sebanyak 67 pemeriksaan yang terdiri dari 20 pemeriksaan terkait Emiten dan Perusahaan Publik, 41 pemeriksaan terkait Transaksi dan Lembaga Efek, dan enam pemeriksaan terkait Pengelolaan Investasi.

##### 2) Penetapan Sanksi dan Penanganan Keberatan Pada Industri Pasar Modal



1. Penetapan Sanksi Administratif  
Selama periode laporan, OJK menetapkan 207 sanksi Administratif kepada para pelaku industri Pasar Modal, di mana 27 Sanksi administratif berupa Peringatan Tertulis, 175 Sanksi Administratif berupa Denda, dua Sanksi Administratif berupa Pembekuan, dan tiga Sanksi Administratif berupa Pencabutan Izin Perorangan. Sanksi Administratif berupa Denda dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 157 sanksi dikenakan kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD), Perusahaan Efek, Partisipan *Centralized Trading Platform* Penerima Laporan Transaksi Efek (CTP PLTE), Biro Administrasi Efek (BAE), Emiten dan Perusahaan Publik, Penilai, Akuntan Publik, dan Konsultan Hukum karena keterlambatan penyampaian laporan dengan total nilai Denda Rp2.499.400.000,-.
- 18 sanksi dikenakan kepada Perusahaan Efek, Penilai, dan Akuntan Publik karena kasus pelanggaran ketentuan di bidang Pasar Modal selain keterlambatan penyampaian laporan, dokumen selain laporan, dan pengumuman dengan total nilai denda Rp194.800.000,-.

Sebagai upaya penagihan atas Sanksi Administratif berupa Denda, OJK telah menetapkan 16 Surat Teguran Pertama dan delapan Surat Teguran Kedua karena keterlambatan pembayaran Sanksi Administratif berupa Denda dimaksud. Selanjutnya, terdapat enam piutang macet atas Sanksi Administratif Berupa Denda yang telah dan/atau dalam proses pelimpahan ke Panitia Urusan Piutang Negara. OJK juga memproses pengenaan sanksi administratif karena keterlambatan penyampaian laporan, dokumen selain laporan, dan pengumuman sebanyak 24 rekomendasi sanksi administratif serta

lima kasus pelanggaran ketentuan di sektor Pasar Modal selain keterlambatan penyampaian laporan, dokumen selain laporan, dan pengumuman.

- 3) Penanganan Keberatan Atas Sanksi Administratif

Terkait dengan penanganan keberatan atas Sanksi Administratif, OJK menindaklanjuti 39 Permohonan Keberatan, di mana 12 permohonan telah dikeluarkan surat tanggapan dan 27 permohonan masih dalam proses.

## 2.2.4 Pengawasan IKNB

### A. Pengawasan Asuransi dan BPJS Kesehatan

Selama periode laporan, terkait dengan pengawasan asuransi dan BPJS Kesehatan, OJK melakukan analisis terhadap 20 laporan yang seluruhnya merupakan laporan keuangan terdiri dari 10 laporan keuangan perusahaan asuransi umum, enam laporan keuangan perusahaan asuransi jiwa, dan empat laporan perusahaan reasuransi. OJK juga melakukan pemeriksaan terhadap delapan perusahaan asuransi umum, satu perusahaan asuransi sosial, dan 11 perusahaan asuransi jiwa. OJK juga menerbitkan 35 Laporan Hasil Pemeriksaan yang terdiri dari 19 Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara (LHPS) dan 16 Laporan Hasil Pemeriksaan Final (LHPF). Selanjutnya, OJK juga menerbitkan 15 surat tanggapan atas pelaksanaan rekomendasi.

Terkait dengan pencairan/penambahan dana jaminan, OJK memproses 34 permohonan pencairan/penggantian dana jaminan serta dua permohonan data dana jaminan dan pencairan dana jaminan dari perusahaan pailit. Selain itu, OJK mengenakan sanksi peringatan pertama kepada 46 perusahaan asuransi, sanksi peringatan kedua kepada lima perusahaan asuransi, sanksi peringatan ketiga kepada tiga perusahaan asuransi.



OJK menindaklanjuti pengaduan-pengaduan yang berkaitan dengan klaim asuransi sebanyak 59 tindak lanjut berupa surat kepada perusahaan asuransi dan pihak pelapor. OJK juga menyelesaikan 26 permohonan terkait tingkat kesehatan. Selanjutnya, OJK menyetujui enam permohonan pengesahan cadangan premi yang diajukan oleh perusahaan.

#### B. Pengawasan Dana Pensiun dan BPJS Ketenagakerjaan

Terkait dengan pengawasan Dana Pensiun, OJK melakukan pemeriksaan langsung terhadap 32 Dana Pensiun serta melakukan pemantauan tindak lanjut secara langsung terhadap 27 Dana Pensiun. Selain itu, OJK juga menerbitkan 32 Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara dan 35 Laporan Hasil Pemeriksaan Final Dana Pensiun (11 Laporan Hasil Pemeriksaan Final Dana Pensiun tahun 2015 dan 24 Laporan Hasil Pemeriksaan Final Dana Pensiun tahun 2016) serta satu Laporan Hasil Pemeriksaan Final BPJS Ketenagakerjaan. Terkait dengan laporan berkala, OJK menerima sebanyak 210 Laporan Semester II- 2015, 105 Laporan Aktuaris, 246 Laporan Teknis Tahun 2015, 273 Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2015, 112 Daftar Investasi Bulanan, 57 Laporan Investasi *Unaudited* tahun 2015, 182 Laporan Investasi *Audited* Tahun 2015, 57 Laporan Investasi *Unaudited* Tahun 2015, 541 Laporan Keuangan Bulanan, dan 10 Pengumuman Laporan Keuangan.

Terkait dengan pengawasan BPJS Ketenagakerjaan, OJK melakukan pengawasantidaklangsungdanpengawasan langsung (pemeriksaan). Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui kegiatan analisis terhadap laporan berkala yang disampaikan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Sementara itu, pengawasan langsung dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan di kantor BPJS Ketenagakerjaan dan/ atau pihak terkait lainnya. Selama periode laporan, OJK menerima laporan berkala dari

BPJS Ketenagakerjaan sebanyak sembilan laporan berkala dengan rincian tiga laporan pengelolaan program dan enam laporan keuangan periode September, Oktober dan November 2016 untuk Badan dan Dana Jaminan Sosial.

#### C. Pengawasan Lembaga Pembiayaan

Terkait dengan Lembaga Pembiayaan, OJK melakukan pengawasan *off-site* dilakukan dengan cara menganalisis laporan bulanan perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan perusahaan infrastruktur. Selama periode laporan, OJK menerima Laporan periode sebagai berikut:

**Tabel II - 11** Penyampaian Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan (LBPP), Perusahaan Modal Ventura (LBPMV) dan Perusahaan Infrastruktur (LBPI)

September-16	Terlambat	Tidak Terlambat	Total
LBPP	10	188	198
LBPMV	7	55	62
LBPI	0	2	2
Oktober-16	Terlambat	Tidak Terlambat	Total
LBPP	6	192	198
LBPMV	11	51	62
LBPI	0	2	2
November-16	Terlambat	Tidak Terlambat	Total
LBPP	14	184	198
LBPMV	7	55	62
LBPI	0	2	2

Selain pemeriksaan tidak langsung, OJK juga melakukan pemeriksaan langsung terhadap 44 Perusahaan Pembiayaan dan 16 Perusahaan Modal Ventura. Dari hasil pemeriksaan tersebut, OJK menyusun hasil pemeriksaan dengan detail sebagai berikut:

**Tabel II - 12** Hasil Pemeriksaan Langsung

Proses penyusunan LHPLS dan LHPL yang telah dikirimkan	20
Proses penyusunan LHPLF dan LHPL yang telah dikirimkan	15

Terkait dengan penerapan *Risk Based Supervision* (RBS), OJK melakukan pemeriksaan langsung dengan menerapkan RBS terhadap enam Perusahaan Pembiayaan. OJK juga mewajibkan perusahaan untuk menyampaikan laporan *self assessment*

atas tingkat risiko dengan batas waktu 29 Februari 2016. Sampai batas waktu tersebut, masih terdapat 18 Perusahaan Pembiayaan yang belum menyampaikan laporan *self assessment* atas tingkat risiko. Terhadap 18 perusahaan tersebut telah dikenakan Sanksi Administratif berupa Peringatan Tertulis I. Selain itu, OJK telah mengenakan 838 sanksi administratif kepada lembaga pembiayaan dan saat ini masih terdapat 218 sanksi administratif yang masih dalam *monitoring* dengan detail sebagai berikut:

**Tabel II - 13** Detail Sanksi Administratif Lembaga IKNB

	SA I	SA II	SA III	PKU	TOTAL
<b>Perusahaan Pembiayaan</b>					
Total Sanksi PP (1/1 s.d 31/12)					
Sanksi diterbitkan	456	149	57	2	664
Sanksi dalam <i>monitoring</i>	92	55	24	1	172
<b>Perusahaan Modal Ventura</b>					
Total Sanksi PMV (1/1 s.d 31/12)					
Sanksi diterbitkan	129	29	16	0	174
Sanksi dalam <i>monitoring</i>	31	7	8	0	46
Total Sanksi PP dan PMV (1/1 s.d 30/6)					
Sanksi diterbitkan	588	178	73	2	838
Sanksi dalam <i>monitoring</i>	123	62	32	1	218

#### D. Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro

Selama periode laporan, OJK memberikan izin usaha kepada 40 LKM, di mana izin usaha penuh sebanyak tiga LKM dan izin usaha bersyarat sebanyak 37 LKM. Seluruh LKM tersebut menjalankan usaha secara konvensional. Berikut rincian 40 LKM yang telah mendapatkan izin usaha sebagai berikut:

- LKM yang mendapatkan izin usaha bersyarat

**Tabel II - 14** LKM yang Mendapatkan Izin Usaha Bersyarat

No.	Nama LKM
1	Koperasi LKM Tani Sukses Mandiri
2	Koperasi LKMA Sidodadi Makmur
3	Koperasi LKMA Gapoktan Sari Makmur
4	Koperasi LKMA Gapoktan Tani Maju

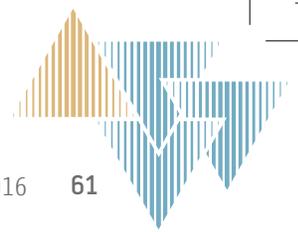
No.	Nama LKM
5	Koperasi LKMA Gapoktan Tani Mugi Rahayu
6	Koperasi LKMA Gapoktan Sumber Makmur Sri Rejeki
7	Koperasi LKMA Gapoktan Lestari Raharjo
8	Koperasi LKM Gapoktan Tani Maju
9	Koperasi LKMA Subur Lestari
10	Koperasi LKMA Tarub Raharjo
11	Koperasi LKMA Tri Asri
12	Koperasi LKMA Gapoktan Manunggal, Desa Notogiwang Kec. Panninggaran
13	Koperasi LKM Gapoktan Demang Tani
14	Koperasi LKMA Sumber Urip
15	Koperasi LKMA Sumber Rejeki
16	Koperasi LKMA Sari Tani
17	Koperasi LKMA Sentana Jaya
18	Koperasi LKMA Gapoktan Lumbung Pangan
19	Koperasi LKM Sumber Makmur
20	Koperasi LKM Gapoktan Sekar Harum Karanggayam
21	Koperasi LKMA Karya Makmur
22	Koperasi LKMA Gapoktan Adi Jaya Makmur Desa Sidomukti Kec. Karanganyar
23	Koperasi LKMA Cakra Tani
24	Koperasi LKMA Kola Jaya
25	Koperasi LKMA Gapoktan Manunggal Tani Kamulyan
26	Koperasi LKMA Salingka Permai Indah
27	Koperasi LKM Kurnia Tani Cendana
28	Koperasi LKMA Gapoktan Suka Maju
29	Koperasi LKMA Biofera Sumedang
30	Koperasi LKMA Silaing Atas
31	Koperasi LKMA Melati
32	Koperasi LKMA Usaha Bersama
33	Koperasi LKMA Gapoktan Rukun Makmur
34	Koperasi LKMA Alam Sungai Liku
35	Koperasi LKMA Tunas Mekar Sejahtera
36	Koperasi LKMA Saiyo Sakato
37	Koperasi LKMA Gapoktan Samo Saiyo

**Tabel II - 15** LKM yang Mendapatkan Izin Usaha Penuh

No.	Nama LKM
1	Koperasi LKM Pundi Mataram Pati
2	Koperasi LKMA Gapoktan Sri Rejeki
3	Koperasi LKMA Gapoktan Agung Rejeki

#### E. Pengawasan Lembaga Keuangan Khusus

Selama triwulan IV-2016, OJK menerima laporan bulanan untuk periode bulan Oktober, November, dan Desember 2016 yang kemudian ditindaklanjuti melalui kegiatan pengawasan tidak langsung berupa analisis atas laporan bulanan tersebut yang mencakup 21 Perusahaan



Penjaminan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, PT Pegadaian (Persero), PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), PT Danareksa (Persero), dan PT PNM (Persero). OJK juga telah melakukan pemeriksaan langsung terhadap lima LJKK.

**F. Pengawasan Perusahaan Jasa Penunjang IKNB**

Terkait dengan pengawasan terhadap perusahaan Jasa Penunjang IKNB, OJK melakukan analisis atas laporan keuangan dan laporan operasional Perusahaan Penunjang IKNB berdasarkan penyampaian laporan keuangan semesteran, melakukan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan khusus serta mengenakan sanksi atas pelanggaran ketentuan yang dilakukan perusahaan jasa penunjang.

Selama periode laporan, OJK telah menyelesaikan pemeriksaan langsung terhadap satu perusahaan pialang asuransi, sehingga telah diselesaikan pemeriksaan langsung terhadap 36 perusahaan penunjang IKNB.

**G. Pelayanan Kelembagaan dan Produk IKNB**

Selama periode laporan, OJK menerima 1.214 permohonan sehingga sampai dengan akhir 2016, OJK memproses 6.045 permohonan/pelaporan di mana 5.478 permohonan/pelaporan telah diselesaikan dan 567 permohonan telah ditanggapi dan masih dalam proses analisis.

**Tabel II - 16** Progress Pelayanan Kelembagaan dan Produk IKNB

Kegiatan	Permohonan			Selesai	Telah Diproses dan Ditanggapi*)	Proses Analisis
	s/d Triwulan -III 2016	Triwulan IV-2016	Total			
Izin usaha	16	5	21	16	5	-
Pencabutan Izin Usaha	17	6	23	19	3	1
Perubahan AD/Perubahan Kepemilikan/Perubahan Nama/Perubahan PDP	449	69	518	339	165	14
Kantor Cabang	819	214	1.033	964	40	29

Kantor Pemasaran dan Kantor Selain Kantor Cabang	268	116	384	360	21	3
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan	852	201	1.053	883	58	112
Kepengurusan Lainnya**)	996	220	1.216	1.211	5	-
Produk	1.414	383	1.797	1.686	107	4
<b>Jumlah</b>	<b>4.831</b>	<b>1.214</b>	<b>6.045</b>	<b>5.478</b>	<b>404</b>	<b>163</b>

\*) Telah dilakukan analisis untuk permohonan terkait dan permohonan telah ditanggapi, saat ini menunggu kelengkapan dokumen dari pemohon.

\*\*\*) Kepengurusan lainnya meliputi kegiatan perubahan susunan direksi dan dewan komisaris perusahaan, laporan syarat keberlanjutan, dan laporan rekomendasi penggunaan tenaga kerja asing

1) Pemberian Izin Usaha

Sampai dengan triwulan IV-2016, terdapat 21 permohonan pemberian izin usaha IKNB, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel II - 17** Rincian Pemberian Izin Usaha

IKNB	Permohonan		Selesai			Telah Diproses dan Ditanggapi*)	Proses Analisis
	s/d Triwulan -III 2016	Triwulan IV-2016	Total	Izin	Batal		
Asuransi	5	1	6	4	2	-	-
Dana Pensiun	-	-	-	-	-	-	-
LP & LJK Khusus**)	11	4	15	8***)	2	5	-
<b>Total</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>21</b>	<b>12</b>	<b>4***)</b>	<b>5</b>	<b>-</b>

\*) Telah dilakukan analisis untuk permohonan terkait dan permohonan telah ditanggapi, saat ini menunggu kelengkapan dokumen dari pemohon.

\*\*\*) Permohonan izin usaha yang dibatalkan yaitu PT Asuransi Jiwa Millenium, PT Jiwa BTPN, PT RSI Bancorp Asia dan PT Mahaya Bahana Ventura.

\*\*\*\*) Termasuk 2 pendaftaran perusahaan pergadaian sebagaimana amanat Pasal 5 POJK 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian

Adapun lima perusahaan yang telah diberikan izin usaha yaitu:

1. PT Pacific Life Insurance,
2. PT Bumiputera Life Insurance,
3. PT HBD Gadai Nusantara,
4. PT Asuransi Ciputra Indonesia,
5. PT Asuransi Jiwa Millenium,

Selain itu, dua perusahaan pergadaian yang diberikan tanda pendaftaran yaitu:

1. Koperasi Simpan Pinjam Mandiri Sejahtera Abadi
2. Koperasi Serba Usaha Dana Usaha

Dengan demikian, sampai dengan triwulan IV-2016, OJK telah memproses 10 pemberian izin usaha dan dua pernyataan pendaftaran Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) bidang IKNB, sebagai berikut:

**Tabel II - 18** Rincian Pemberian Izin Usaha Bidang IKNB

No.	Nama Perusahaan
1.	PT Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat
2.	PT Penjaminan Kredit Daerah Sulawesi Selatan
3.	PT Group Lease Finance Indonesia
4.	PT Tez Capital and Finance
5.	PT Capital Global Ventura
6.	PT Pacific Life Insurance
7.	PT Bumiputera Life Insurance
8.	PT HBD Gadai Nusantara
9.	PT Asuransi Ciputra Indonesia
10.	PT Asuransi Jiwa Millenium
11.	Koperasi Simpan Pinjam Mandiri Sejahtera Abadi <sup>*)</sup>
12.	Koperasi Serba Usaha Dana Usaha <sup>*)</sup>

<sup>\*)</sup> Pendaftaran perusahaan pergadaian

- 2) Pencabutan Izin Usaha  
Terkait dengan pencabutan izin usaha, OJK menerima enam permohonan pencabutan izin usaha dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel II - 19** Rincian Pencabutan Izin Usaha

IKNB	Permohonan			Selesai	Telah Diproses dan Ditanggapi <sup>*)</sup>	Proses Analisis
	s/d Triwulan -III 2016	Triwulan IV-2016	Total			
Asuransi	2	1	3	2	1	-
Dana Pensiun	9	4	13	12	1	-
LP & LJK Khusus	6	1	7	5	1	1
<b>Total</b>	<b>17</b>	<b>6</b>	<b>23</b>	<b>19</b>	<b>3</b>	<b>1</b>

<sup>\*)</sup> Telah dilakukan analisis untuk permohonan terkait dan permohonan telah ditanggapi, saat ini menunggu kelengkapan dokumen dari pemohon.

Selama periode laporan, terdapat pencabutan izin enam perusahaan yaitu PT CIMB Sun Life, Dana Pensiun East Jakarta Industrial Park, Dana Pensiun Purbaya, Dana Pensiun Bina Abadi Sejahtera, Dana Pensiun Karyawan Mobil Oil Indonesia Inc., dan PT Pratama Sedaya Finance. Dengan demikian, sampai akhir 2016 terdapat 19 permohonan ditetapkan keputusan pencabutan izin usahanya oleh OJK, yaitu :

**Tabel II - 20** Penyelesaian Pencabutan Izin Usaha

No.	Nama Perusahaan
1.	Dana Pensiun PT Maskapai Reasuransi Indonesia
2.	Koperasi Pembiayaan Indonesia
3.	PT Kencana Internusa Artha Finance (merger)
4.	Dana Pensiun Electrolux Indonesia
5.	Dana Pensiun Widatra Bhakti
6.	PT Eterindo Pacific Finance
7.	Dana Pensiun Karyawan Koperasi
8.	Dana Pensiun Elnusa
9.	Dana Pensiun Indokemika Jayatama
10.	Dana Pensiun Gunung Mulia
11.	PT Dharmatama Megah Finance
12.	Dana Pensiun Direksi dan Karyawan Asuransi Parolamas
13.	PT Asuransi Jiwa Bakrie
14.	Dana Pensiun East Jakarta Industrial Park
15.	Dana Pensiun Purbaya
16.	Dana Pensiun Bina Abadi Sejahtera
17.	Dana Pensiun Karyawan Mobil Oil Indonesia Inc.
18.	PT CIMB Sun Life
19.	PT Pratama Sedaya Finance

- 3) Perubahan Kepemilikan Perusahaan/ Perubahan Anggaran Dasar/Perubahan Pemegang Saham/Perubahan Peraturan Dana Pensiun serta Merger dan Akuisisi  
Selama triwulan IV-2016, OJK menerima 69 permohonan terkait perubahan kepemilikan perusahaan sehingga sampai dengan triwulan-IV 2016, OJK menerima sebanyak 518 permohonan dengan rincian sebagai berikut:



**Tabel II - 21 Rincian Permohonan Terkait Kepemilikan**

IKNB	Permohonan			Selesai	Telah Diproses dan Ditanggapi*)	Proses Analisis
	s/d Triwulan -III 2016	Triwulan IV-2016	Total			
Asuransi	64	5	69	63	3	3
Dana Pensiun	60	17	77	48	28	1
LP & LJK Khusus	291	38	329	201	121	7
Merger Akuisisi – Asuransi	8	2	10	7	1	2
Merger Akuisisi – LP dan LJKK	26	7	33	20	12	1
<b>Total</b>	<b>449</b>	<b>69</b>	<b>518</b>	<b>339</b>	<b>165</b>	<b>14</b>

\*) Telah dilakukan analisis untuk permohonan terkait dan permohonan telah ditanggapi, saat ini menunggu kelengkapan dokumen dari pemohon.

Dari 339 yang ditetapkan, terdapat dua perusahaan yang melaporkan perubahan nama dan telah ditetapkan keputusannya oleh OJK, sehingga terdapat 11 perubahan nama perusahaan sebagai berikut:

**Tabel II - 22 Rincian Perusahaan yang Melakukan Perubahan Nama**

No.	Nama Perusahaan
1.	PT Bill Finance Centre menjadi PT Maybank Indonesia Finance
2.	PT Swadharma Surya Finance menjadi PT Swadharma Nusantara Pembiayaan
3.	PT Asuransi Dayin Mitra menjadi PT Asuransi Dayin Mitra Tbk
4.	PT Asuransi Sompoo Japan Niponkoa Indonesia menjadi PT Sompoo Insurance Indonesia
5.	PT Victoria Insurance menjadi PT Victoria Insurance Tbk
6.	PT ACE Life Assurance menjadi PT Chubb Life Insurance Indonesia
7.	PT ACE Jaya Proteksi menjadi PT Chubb General Insurance Indonesia
8.	PT Asuransi Mitra Maparya Tbk menjadi PT Asuransi Kresna Mitra Tbk
9.	PT Suwadana Mitra Binaan Bali Sari Rejeki Venture Capital menjadi PT Suwadana Venture Capital
10.	PT BTMU-BRI Finance menjadi PT BRI Multifinance Indonesia
11.	PT Bumiputera Life Insurance menjadi PT Asuransi Jiwa Bumiputera

- 4) Kantor Cabang, Kantor Pemasaran dan Kantor Selain Kantor Cabang  
Sampai dengan triwulan IV-2016, OJK telah menerima 1.033 pelaporan pembukaan

kantor cabang perusahaan asuransi, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan khusus, di mana 964 diantaranya telah selesai diproses. Selain itu, OJK juga menerima 384 pelaporan pembukaan kantor pemasaran perusahaan asuransi dan kantor selain kantor cabang perusahaan pembiayaan di mana 360 pelaporan telah diselesaikan

**Tabel II - 23 Rincian Permohonan terkait Jaringan Kantor**

IKNB	Permohonan			Selesai	Telah Diproses dan Ditanggapi*)	Proses Analisis
	s/d Triwulan -III 2016	Triwulan IV-2016	Total			
<b>Asuransi</b>						
· Pembukaan Kantor Cabang	24	10	34	32	1	1
· Penutupan Kantor Cabang	4	26	30	30	-	-
· Pencatatan Perubahan Alamat	30	22	52	43	-	9
<b>LP &amp; LJK Khusus</b>						
· Pembukaan Kantor Cabang	217	59	276	260	12	4
· Penutupan Kantor Cabang	102	15	117	109	6	2
· Pencatatan Perubahan Alamat	442	82	524	490	21	13
<b>Total KC</b>	<b>819</b>	<b>214</b>	<b>1.033</b>	<b>964</b>	<b>40</b>	<b>29</b>
· KP Perusahaan Asuransi	175	77	252	237	15	-
· KSKC LP dan LJK Khusus	93	39	132	123	6	3
<b>Total KP dan KSKC</b>	<b>268</b>	<b>116</b>	<b>384</b>	<b>360</b>	<b>21</b>	<b>3</b>

\*) Telah dilakukan analisis untuk permohonan terkait dan permohonan telah ditanggapi, saat ini menunggu kelengkapan dokumen dari pemohon.

- 5) Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama IKNB  
Selama triwulan IV-2016, OJK menerima 201 permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama IKNB sehingga sampai akhir 2016 terdapat 1.053 permohonan. Dari jumlah tersebut sebanyak 882 permohonan telah selesai dilaksanakan dan 170 permohonan masih dalam proses penjadwalan dan kelengkapan dokumen.

**Tabel II - 24** Rincian Permohonan *Fit and Proper Test* Pihak Utama IKNB berdasarkan Sektor

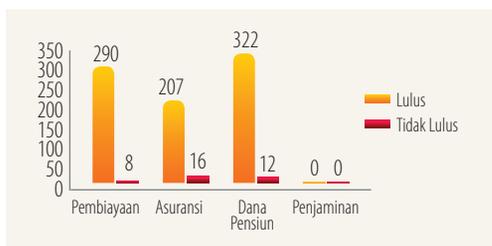
IKNB	Permohonan			Selesai	Telah Diproses dan Ditanggapi <sup>*)</sup>	Dalam Proses Analisis
	s/d Triwulan III-2016	Triwulan IV-2016	Total			
Asuransi	262	57	319	298	21	-
Dana Pensiun	228	40	268	231	37	-
Perusahaan Pembiayaan dan LJKK	362	104	466	354	-	112
<b>Jumlah</b>	<b>852</b>	<b>201</b>	<b>1.053</b>	<b>883</b>	<b>58</b>	<b>112</b>

\*) Telah dilakukan analisis untuk permohonan terkait dan permohonan telah ditanggapi, saat ini menunggu kelengkapan dokumen dari pemohon.

Dari 883 permohonan, OJK telah menetapkan keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebanyak 853, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel II - 25** Rincian Permohonan berdasarkan Jenis Perusahaan

Jenis Pihak Utama	Perusahaan Asuransi	Dana Pensiun	Perusahaan Pembiayaan	Perusahaan Penjaminan	Total
Direksi/Pengurus	114	108	148	-	370
Komisaris/Dewan Pengawas	62	115	91	-	268
Komisaris Independen	54	-	58	-	112
Badan Perwakilan Anggota	5	-	-	-	5
Pemegang Saham Pengendali	15	-	19	-	34
Tenaga Ahli	13	-	-	-	13
Tenaga Kerja Asing	16	-	16	-	32
Aktuaris	19	-	-	-	19
<b>Jumlah</b>	<b>298</b>	<b>223</b>	<b>332</b>	<b>-</b>	<b>853</b>

**Grafik II - 8** Tingkat Kelulusan Pihak Utama IKNB pada Penilaian Kemampuan dan Kepatutan per Triwulan IV 2016

OJK juga memproses pelaporan yang berkaitan dengan kepengurusan perusahaan, yaitu perubahan susunan direksi dan dewan komisaris perusahaan, pelaporan syarat keberlanjutan, dan pelaporan rencana rekomendasi penggunaan tenaga kerja asing.

**Tabel II - 26** Rincian Permohonan Kepengurusan Perusahaan

IKNB	Permohonan			Selesai	Telah Diproses dan Ditanggapi <sup>*)</sup>	Dalam Proses Analisis
	s/d Triwulan III-2016	Triwulan IV-2016	Total			
Asuransi	294	86	380	380	-	-
Dana Pensiun	509	72	581	576	5	-
Perusahaan Pembiayaan dan LJKK	193	62	255	255	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>996</b>	<b>220</b>	<b>1.216</b>	<b>1.211</b>	<b>5</b>	<b>-</b>

\*) Telah dilakukan analisis untuk permohonan terkait dan permohonan telah ditanggapi, saat ini menunggu kelengkapan dokumen dari pemohon.

#### 6) Perizinan Produk Asuransi

Selama periode laporan, OJK menerima 83 permohonan terkait produk asuransi, dengan detail sebagai berikut:

**Tabel II - 27** Rincian Permohonan Produk Asuransi

Uraian	Permohonan			Selesai	Telah Diproses dan Ditanggapi <sup>*)</sup>	Dalam Proses Analisis
	s/d Triwulan III-2016	Triwulan IV-2016	Total			
Pencatatan Nama Lain	34	10	44	43	1	-
Pencatatan Perubahan Produk	305	155	460	428	29	3
Pencatatan Produk Baru	36	29	65	57	8	-
Persetujuan Bancassurance	398	52	450	450	-	-
Persetujuan Perubahan Produk	103	20	123	114	9	-
Persetujuan Produk Baru	538	117	655	594	60	1
<b>Grand Total</b>	<b>1.414</b>	<b>383</b>	<b>1.797</b>	<b>1.686</b>	<b>107</b>	<b>4</b>

\*) Telah dilakukan analisis untuk permohonan terkait dan permohonan telah ditanggapi, saat ini menunggu kelengkapan dokumen dari pemohon.

## H. Pelayanan Kelembagaan Jasa Penunjang IKNB

Selama periode laporan, OJK menerima 189 permohonan terkait dengan kelembagaan Jasa Penunjang IKNB dengan detail sebagai berikut:

**Tabel II - 28** Rekapitulasi Kegiatan Pelayanan di Direktorat Jasa Penunjang IKNB selama Triwulan IV tahun 2016

No	Jenis Layanan	Permohonan Triwulan IV 2016	Outstanding Triwulan III 2016	Status		
				Selesai	Proses*	Batal
1	Pemberian Izin Usaha	2	5	2	4	1
2	Perubahan Kepemilikan	2	33	7	28	-
3	Penambahan Modal	4	5	1	8	-
4	Perubahan Pengurus	10	25	7	28	-
5	Perubahan Alamat	5	11	6	10	-
6	Pembukaan Kantor Cabang	2	-	1	1	-
7	Perubahan Nama	-	2	-	2	-
8	Pendaftaran Tenaga Ahli	10	15	18	7	-
9	Rekomendasi Tenaga Kerja Asing	2	-	2	-	-
10	Pendaftaran Profesi	189	58	195	52	-

\* Dalam proses meliputi permintaan kelengkapan dokumen, menunggu penjadwalan fit and proper test atau masih proses analisis.

Berikut detail pendaftaran Profesi selama periode laporan:

**Tabel II - 29** Pendaftaran Profesi (sejak Agustus 2016)

Jenis Profesi	Permohonan	Selesai	Dalam Proses
Akuntan Publik	216	176	40
Konsultan Aktuaria	23	14	9
Penilai	8	5	3
<b>Jumlah</b>	<b>2478</b>	<b>195</b>	<b>52</b>

Selain itu, pengujian kemampuan dan kepatutan dilakukan dengan tahap pengajuan, analisis pendahuluan, konfirmasi kepada beberapa pihak, wawancara, dan penyampaian surat keputusan hasil pengujian kemampuan dan kepatutan. Penetapan hasil Pengujian Kemampuan dan Kepatutan terlampir sebagaimana pada tabel berikut:

**Tabel II - 30** Jumlah Penetapan Hasil Pengujian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) selama Triwulan IV 2016

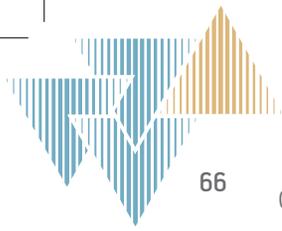
Jabatan	Lulus	Tidak Lulus	Jumlah
Pemegang Saham Pengendali	9	-	9
Komisaris	8	-	8
Direksi	13	2	15
Tenaga Ahli	1	-	1
<b>Jumlah</b>	<b>31</b>	<b>2</b>	<b>33</b>

OJK telah memberikan izin usaha terhadap satu Perusahaan Pialang Asuransi dan satu Jasa Penilai Kerugian. Dengan demikian jumlah Perusahaan Penunjang Usaha Perasuransian adalah 237 perusahaan.

## 2.3 AKTIFITAS PENGEMBANGAN

### 2.3.1 Pengembangan Pengawasan Terintegrasi

Sampai akhir periode laporan, terdapat 102 grup Konglomerasi Keuangan (KK) yang 44 diantaranya merupakan KK lintas sektoral yang berada di bawah satuan kerja pengawasan terintegrasi, di mana 12 grup merupakan jenis KK vertikal, 22 KK horizontal dan 10 KK campuran (*mixed group*). Total aset dari 44 Grup KK pada triwulan IV-2016 sebesar Rp5.478,8 triliun. Dengan demikian, persentase perbandingan



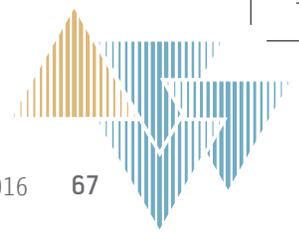
## **Perkembangan FSAP di Indonesia**

*Financial Sector Assessment Program* (FSAP) merupakan *joint program* yang dikembangkan oleh International Monetary Funds (IMF) dan World Bank sejak tahun 1999 sebagai mekanisme untuk menilai stabilitas dan pengembangan sistem keuangan suatu negara secara komprehensif dan keterkaitannya dengan negara lain dalam rangka menjaga stabilitas keuangan global. Dibangun sebagai *lesson learned* dari krisis keuangan yang diakibatkan oleh *contagion effect* antar negara, FSAP membantu mengidentifikasi kerentanan utama sektor jasa keuangan yang berpotensi menyebabkan krisis, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan memitigasi risiko secara lebih baik dan mendukung stabilitas sistem keuangan. FSAP bermanfaat pula dalam menganalisis isu-isu yang terkait dengan pengembangan sistem keuangan sehingga Industri Jasa Keuangan dapat optimal dalam menopang pertumbuhan ekonomi.

FSAP pertama di Indonesia dilaksanakan tahun 2009/2010 dan tahun 2016/2017 merupakan pelaksanaan FSAP yang kedua bagi Indonesia. Sejalan hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS), yang tergabung dalam Komite Stabilitas

Sistem Keuangan membentuk Tim Kerja Nasional FSAP. Tim FSAP terdiri dari IMF dan World Bank yang melakukan asesmen ke Indonesia dalam dua *mission*, yaitu *Mission I* pada 19 September – 4 Oktober 2016 dan *Main Mission* pada 1 - 15 Februari 2017 yang didahului *scoping mission* untuk membahas ruang lingkup FSAP Indonesia 2016/2017. Berdasarkan hasil *scoping mission* Tim FSAP, penilaian FSAP disepakati untuk difokuskan pada 7 *workstreams* (WS)/gugus tugas, yaitu WS1. *Risk Analysis & Stress Testing*, WS2. *Macroprudential Policy*, WS3. *Liquidity Management*, WS4. *Microprudential Oversight*, WS5. *Financial Safety Nets, Crisis Management and Resolution*, WS6. *Financial Deepening*, WS7. *Financial Inclusion*.

*Mission I* FSAP telah terlaksana dan Tim Asesor menyimpulkan bahwa sektor keuangan Indonesia mengalami kemajuan substansial dibandingkan dengan kondisi sektor keuangan pada 2009-2010 terutama terkait pengembangan kelembagaan utama (pendirian OJK, pengawasan konglomerasi keuangan), penyelesaian UU dan peraturan baru serta implementasi sistem pengawasan berbasis risiko. Apresiasi khusus diberikan terhadap penilaian aspek tata kelola dan manajemen risiko. Asesor menilai perangkat ketentuan sudah memadai seperti penambahan parameter dalam penilaian

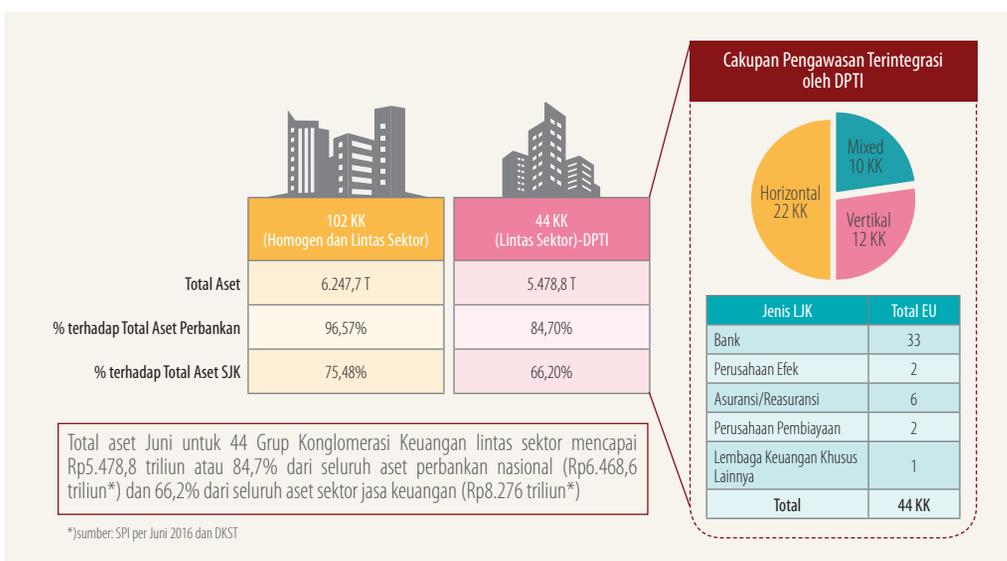


Workstreams (WS)	Cakupan	Asesor	Koordinator
WS1. <i>Risk Analysis &amp; Stress Testing</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peta risiko global dan domestik yang tercermin pada <i>macroeconomic scenario, shock extreme</i>, dan bersifat realistis</li> <li>Penilaian <i>Solvency</i> dan <i>Liquidity Stress Test</i> Bank – <i>Top Down</i> dan <i>Bottom Up</i></li> <li>Penilaian atas dampak kontagion serta vulnerabilitas sektor korporasi</li> </ul>	 IMF	Bank Indonesia Otoritas Jasa Keuangan
WS2. <i>Macroprudential Oversight</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asesmen atas kerangka makroprudensial yang meliputi:</li> <li>Mengidentifikasi dan memonitor risiko sistemik (<i>cyclical</i> dan <i>structural</i>)</li> <li>Kapasitas pengambilan kebijakan yang tepat waktu</li> <li>Pengalaman dalam memanfaatkan instrumen makroprudensial</li> </ul>	 IMF	Bank Indonesia
WS3. <i>Liquidity Management</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asesmen atas manajemen likuiditas yang meliputi:</li> <li>Kerangka Moneter dan likuiditas Bank Indonesia</li> <li>Manajemen likuiditas pada Pasar Uang Antar Bank dan Pasar Valas</li> </ul>	 IMF	Bank Indonesia
WS4. <i>Microprudential Oversight</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asesmen pengawasan dengan fokus pada Perbankan dan Konglomerasi</li> <li>Tingkat Integrasi atas pengawasan di OJK</li> <li>Evaluasi ketentuan Perbankan dan pengawasan atas sektor tertentu (BCP)</li> <li>Asesmen efektifitas pengaturan dan pengawas pada industri asuransi</li> </ul>	  IMF WORLD BANK	Otoritas Jasa Keuangan
WS5. <i>Financial Safety Net, Crisis Management &amp; Resolution</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asesmen pengawasan dengan fokus pada Perbankan dan Konglomerasi</li> <li>Tingkat Integrasi atas pengawasan di OJK</li> <li>Evaluasi ketentuan Perbankan dan pengawasan atas sektor tertentu (BCP)</li> <li>Asesmen efektifitas pengaturan dan pengawas pada industri asuransi</li> </ul>	  IMF WORLD BANK	Kementerian Keuangan
WS6. <i>Financial Deepenig</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asesmen atas pengembangan pasar modal dengan fokus pembiayaan jangka panjang dan infrastruktur yang mengacu pada <i>IOSCO self assessment</i></li> <li>Efisiensi dan promosi pendalaman pasar keuangan yang meliputi ketentuan terkait efisiensi intermediasi perbankan serta aspek <i>insolvency</i> perbankan berdasarkan prinsip ICR</li> </ul>	 WORLD BANK	Otoritas Jasa Keuangan
WS7. <i>Financial Inclusion</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asesmen atas kebijakan dan peran inovasi jasa keuangan yang meliputi:</li> <li>Pendataan perkembangan kebijakan <i>financial inclusion</i> serta dampaknya</li> <li>Analisa mendalam atas perkembangan industri, kebijakan ketentuan dan pengawasan atas inovasi mekanisme pembayaran, produk &amp; program G2 P</li> </ul>	 WORLD BANK	Bank Indonesia

tingkat kesehatan serta peningkatan kemampuan melakukan *judgement* oleh pengawas lembaga jasa keuangan. Asesor juga memberikan beberapa masukan untuk perbaikan sektor keuangan Indonesia antara lain mengenai pengawasan konglomerasi keuangan dan penggolongan kolektibilitas portofolio kredit perbankan. Beberapa *preliminary broad issues* yang disampaikan oleh Asesor pada *Mission I* diantaranya terkait beberapa *objectives* yang berpotensi menimbulkan ketegangan/tekanan; adanya tugas yang *overlapping* dan koordinasi lintas lembaga; adanya *gap* pada perlindungan

hukum terhadap staf dan lembaga; dan keterbatasan SDM pada otoritas dan industri. Sebagai tindak lanjut *Mission I*, direncanakan *Main Mission* akan berlangsung pada 30 Januari 2017 - 15 Februari 2017. Hasil FSAP diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pengembangan sistem keuangan Indonesia ke depan dan bermanfaat untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya krisis keuangan di kemudian hari. Komitmen yang tinggi dan koordinasi yang efektif antara lembaga-lembaga yang tergabung dalam KSSK sangat penting dalam mendukung kesuksesan program FSAP di Indonesia.

**Grafik II - 9** Konglomerasi Keuangan



terhadap total aset industri perbankan dan industri jasa keuangan masing-masing sebesar 84,70% dan 66,20%.

OJK juga menyusun bahan *user requirement* (usreq) *Financial Conglomerate Ratios* (FICOR)<sup>1</sup>. Selanjutnya pengembangan (*enhancement*) modul FICOR akan dilaksanakan pada tahun 2017.

### 2.3.2 Pengembangan Industri Perbankan

#### A. Pengembangan Bank Umum

Pada periode laporan, OJK menyusun dua pedoman pengawasan yaitu Pedoman Pemeriksaan Berdasarkan Risiko untuk Permodalan dan Pedoman Pemeriksaan Berdasarkan Risiko untuk Rentabilitas dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Pengawas. OJK juga menyusun

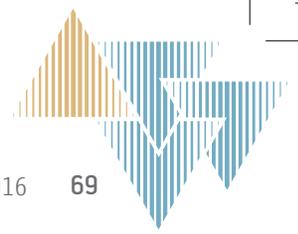
<sup>1</sup> *Financial Conglomerate Ratios* (FICOR) adalah suatu kumpulan data keuangan dan rasio-rasio untuk membantu pengawas terintegrasi dalam melakukan penilaian atas kondisi suatu konglomerasi keuangan berdasarkan data dan informasi keuangan konglomerasi keuangan, rasio komparatif dan *trend analysis*. Sumber data FICOR adalah data keuangan yang ada pada 3 (tiga) sektor pengawasan. Dalam modul FICOR tersebut terdapat rasio-rasio keuangan untuk beberapa risiko yang nantinya dapat dijadikan indikator awal oleh pengawas terintegrasi dalam melakukan penilaian terhadap konglomerasi keuangan yang diawasi.

tiga *Standard Operating Procedure* (SOP) untuk Pedoman Penetapan Bank sebagai Penyalur KUR, Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan *Liquidity Coverage Ratio* (LCR), dan Permohonan Perizinan Terintegrasi untuk *Bancassurance*.

Selain itu, OJK juga menyusun pedoman terkait konversi peraturan pedoman internal yang saat ini masih berbentuk Peraturan Dewan Gubernur (PDG) dan Surat Edaran Intern Bank Indonesia menjadi Peraturan Dewan Komisiner (PDK) dan Surat Edaran Dewan Komisiner (SE DK) Otoritas Jasa Keuangan. Pedoman tersebut antara lain mengatur: (i) Perubahan aturan acuan Surat Edaran dan (ii) Perubahan frasa “Bank Indonesia” menjadi “Otoritas Jasa Keuangan”, dengan tetap memperhatikan konteks substansi yang diatur.

#### B. Pengembangan BPR/BPRS

Terkait dengan pengawasan terhadap BPR dan BPRS, OJK telah menerbitkan tiga Surat Edaran yaitu Pedoman Pengawasan BPR Berdasarkan Risiko Untuk Tahapan Pemahaman terhadap BPR (*Know Your BPR/KYBPR*), Pedoman Pelaksanaan Forum Panel Pengawasan BPR Berdasarkan Risiko dan Pedoman Pengawasan BPR Berdasarkan Risiko.



### 2.3.3 Pengembangan Industri Pasar Modal

#### A. Kajian Pasar Modal

1. Kajian tentang Peningkatan Persyaratan Modal Perusahaan Efek  
Penyusunan kajian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya persyaratan modal penguatan Perusahaan Efek dengan melakukan analisis Modal Disetor dan MKBD terhadap Nilai Transaksi.
2. Kajian tentang Pengendalian Internal Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.  
Kajian ini bertujuan sebagai dasar kebutuhan atas pengaturan pengendalian internal BE, LKP, dan LPP yang sesuai dengan tuntutan saat ini guna mendukung kebutuhan pengawasan dan kepatuhan oleh OJK sehingga pada akhirnya akan berimplikasi positif bagi operasional BE, LKP, dan LPP sendiri.
3. Kajian Relaksasi Kewajiban Pasca IPO untuk Emiten UKM.  
Penyusunan kajian ini bertujuan untuk mengkaji kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh Emiten menengah-kecil agar memenuhi kebutuhan pasar yang dinamis dan atau standar internasional, dan memberikan kemudahan bagi Perusahaan kecil dan menengah untuk mencari pendanaan di Pasar Modal
4. Kajian Penugasan Konsultan Hukum di Pasar Modal.  
Kajian ini bertujuan untuk memetakan kegiatan di Pasar Modal Indonesia yang melibatkan penugasan kepada Konsultan Hukum, memetakan kesesuaian antara hasil penugasan Konsultan Hukum dengan standar yang berlaku, memetakan bentuk kegiatan Pasar Modal di luar negeri yang mensyaratkan penugasan kepada Konsultan Hukum dan risiko yang mungkin terjadi.
5. Kajian Re-Asurans Laporan Keuangan dan Penarikan Diri dari Penugasan oleh Akuntan Publik.

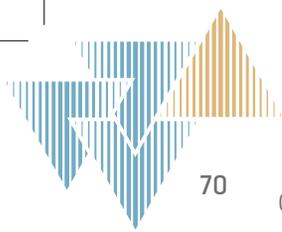
Penyusunan kajian ini bertujuan menganalisis jasa asurans ulang dan penarikan diri dari sudut pandang Undang-undang Akuntan Publik, Kode Etik dan Standar Audit; mengidentifikasi kondisi-kondisi yang dimungkinkan melakukan jasa asurans ulang dan penarikan diri dari penugasan oleh Akuntan Publik yang dimungkinkan diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan mempelajari standar dan pengaturan jasa asurans ulang dan penarikan diri dari penugasan oleh Akuntan Publik di negara lain.

6. Kajian kewenangan Otoritas Jasa Keuangan untuk mengeluarkan peraturan yang diperkenankan dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).  
Penyusunan kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kewenangan OJK untuk menerbitkan peraturan yang dimungkinkan dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), mempelajari pengaturan oleh *regulatory body* di negara lain terkait SPAP dan Jasa Akuntan Publik; dan menganalisis kemungkinan pengaturan yang sebaiknya dilakukan OJK.
7. Kajian *Self Assessment* Penerapan Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik.  
Penyusunan kajian ini bermaksud untuk memetakan aspek dan kriteria yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik.

#### B. Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Terpadu (SEPMT)

Sejak 2015, OJK menginisiasi penyelenggaraan Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal yang lebih terpadu dan efektif dalam rangka mempromosikan dan meningkatkan upaya pendalaman Pasar Modal dengan melibatkan kantor OJK daerah dan kantor perwakilan BEI di daerah serta para pemangku kepentingan terkait.

Selama 2016, kegiatan SEPMT disertai pula dengan simulasi dan kompetisi permainan kartu investasi Pasar Modal (*StockLab*). *StockLab*



adalah sebuah alat peraga edukasi yang berbentuk kartu permainan investasi Pasar Modal dan alat peraga yang bersifat *fun*. *StockLab* diluncurkan pada 23 Agustus 2016 dalam rangkaian peringatan HUT Pasar Modal Indonesia yang ke-39.

Tujuan *StockLab* adalah untuk mengedukasi masyarakat mengenai investasi di Pasar Modal melalui cara yang lebih menyenangkan. Dalam permainan ini terdapat puluhan istilah instrumen investasi Pasar Modal yang dikemas dengan lebih sederhana dan tidak serumit kelihatannya.

Melalui permainan ini, diharapkan mampu meningkatkan *awareness* masyarakat tentang Pasar Modal sehingga berdampak pada peningkatan jumlah investor dan utilitas produk investasi di Pasar Modal. Selama periode laporan, telah dilakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Terpadu di Pontianak  
Rangkaian kegiatan yang diselenggarakan pada sosialisasi ini antara lain yaitu Media *Gathering* Wartawan Lokal, *Talkshow* di PON TV, Seminar Pasar Modal, *Training Of Trainers* (ToT) *StockLab*, Seminar Pasar Modal, dan Pendalaman Materi Pasar Modal. Berdasarkan hasil survei dari 381 responden, sebanyak 96% responden paham terhadap produk dan layanan Pasar Modal. Selain itu, sebanyak 351 responden atau sebesar 92.1% responden tertarik untuk berinvestasi di Pasar Modal.
2. Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Terpadu tahun 2016 di Kendari  
Rangkaian kegiatan yang diselenggarakan pada sosialisasi ini antara lain *Workshop* Wartawan, *ToT StockLab* kepada Wartawan, Media *Gathering*, *Talkshow* Prov. Sultra, Seminar Pasar Modal, Seminar Pasar Modal, Pendalaman

Materi Pasar Modal, *ToT StockLab*, dan Seminar Pasar Modal Berdasarkan hasil survei dari 479 responden, 95.2% yang semakin paham terhadap produk dan layanan Pasar Modal. Selain itu, sebanyak 441 responden atau sebesar 92.1% responden yang tertarik untuk berinvestasi di Pasar Modal.

### 3. Sosialisasi *StockLab* dan Pendalaman Pasar Modal

Penyelenggaraan Sosialisasi *StockLab* triwulan-IV di luar SEPMT sebanyak 17 kali penyelenggaraan di berbagai Kota/ Daerah. (Tambahkan informasi total jumlah peserta)

## C. Penguatan Infrastruktur Pasar Modal

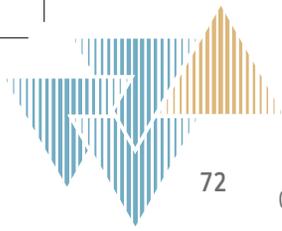
1. Penerapan Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST)  
Merupakan sistem yang mengintegrasikan seluruh proses bisnis reksadana yang otomatis, *on-line*, dan terpadu serta meningkatkan efisiensi dalam transaksi produk pengelolaan investasi termasuk didalamnya terdapat sentralisasi data investor dan pelaporan. Melalui integrasi ini, proses transaksi Reksa Dana lebih cepat dan efisien dikarenakan tidak adanya *paper work load* dan pelaksanaan *monitoring* menjadi lebih efisien secara waktu dan tidak menunggu adanya laporan oleh pelaku.
2. Perluasan *Single Investor Identification* (SID) Investor Surat Berharga Negara  
Dalam rangka konsolidasi data kepemilikan dan penyelesaian transaksi serta penguatan pengawasan transaksi di pasar sekunder SBN, OJK menerbitkan persetujuan kepada KSEI sebagai *Generator* SID SBN. Implementasi SID untuk *settlement* transaksi SBN tersebut, memudahkan investor dalam mengkonsolidasi portofolio yang dimilikinya.

### ***Sistem Perizinan Registrasi Terintegrasi (SPRINT) – Penjualan Reksa Dana Melalui Bank Selaku APERD (Agen Penjual Efek Reksa Dana) dan Pendaftaran Akuntan Publik***



Salah satu langkah kongkret OJK dalam melakukan reformasi secara struktural terhadap proses perizinan adalah dengan membangun SPRINT sebagai *virtual single window* bagi Industri Jasa Keuangan dalam melakukan proses perizinan. OJK meluncurkan Sistem Informasi Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT) Penjualan Reksa Dana Melalui Bank Selaku APERD (Agen Penjual Efek Reksa Dana) dan Pendaftaran Akuntan Publik sebagai upaya mempercepat dan menyederhanakan proses perizinan. Melalui SPRINT, proses perijinan penjualan

Reksa Dana melalui bank selaku APERD dipersingkat dari 105 hari menjadi 19 hari kerja saja. Proses pendaftaran Akuntan Publik juga dipermudah dengan yang sebelumnya diajukan ke masing-masing kompartemen di OJK dengan waktu pemrosesan yang berbeda-beda, namun dengan SPRINT bisa diselesaikan dalam waktu 20 hari kerja. Melalui sistem ini, selain mengurangi risiko perbedaan kebijakan yang dikeluarkan oleh masing-masing bidang pengawasan, juga mengurangi duplikasi dokumen permohonan yang harus diajukan oleh pemohon.



### 2.3.4 Pengembangan IKNB

- **Program 1000 Aktuaris**

Program ini bertujuan mempercepat jumlah aktuaris sehingga kebutuhan profesi aktuaris untuk IKNB dapat terpenuhi. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam program ini adalah sosialisasi dan promosi, perkuliahan singkat sertifikasi aktuaris yang bekerjasama dengan Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI), serta pendidikan dan pelatihan aktuarial keahlian khusus asuransi umum. Pada periode laporan, OJK melaksanakan seminar mengenai Program 1000 Aktuaris ke Universitas Hasanuddin Makassar dengan mengundang narasumber dari Persatuan Aktuaris Indonesia dan Tim *Risk Management, Economic Sustainability & Actuarial Science Development in Indonesia* (READI).

- **ASEAN Insurance Regulators Meeting (AIRM)**

ASEAN Insurance Regulators Meeting (AIRM) merupakan pertemuan tahunan para regulator pengawas industri asuransi di ASEAN. Penyelenggaraan AIRM dilaksanakan bersamaan dengan pertemuan ASEAN Insurance Council (AIC) yang merupakan pertemuan para asosiasi industri asuransi ASEAN. Berdasarkan pertemuan AIRM ke-18 disepakati bahwa Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan kegiatan AIRM ke-19 dan AIC ke-42, sekaligus menjadi *Chair* pada pertemuan AIRM ke-19. Kepanitiaan AIRM ke-19 terdiri dari tiga lembaga, yaitu OJK, ASEAN Insurance Council (AIC), dan ASEAN Secretariat. OJK bertanggung jawab atas penyelenggaraan AIRM, AIC

bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan yang berada di bawah AIC, sedangkan ASEAN Secretariat bertanggung jawab atas materi pertemuan dalam AIRM.

Selama periode laporan, telah dilaksanakan ASEAN Council of Bureaux Meeting. Adapun rangkaian kegiatan AIRM ke-19, yaitu ASEAN Insurance Training and Research Institute (AITRI) Board Meeting. Selain itu, pada waktu yang bersamaan terdapat kegiatan lain yang perlu dihadiri oleh delegasi AIRM, yaitu ASEAN Cross-Sectoral Coordination Committee (ACSCC) Meeting on Disaster Risk Financing and Insurance (DRFI).

- **Risk Management, Economic Sustainability & Actuarial Science Development in Indonesia (READI)**

Proyek READI bertujuan membangun Indonesia sebagai pusat regional ilmu aktuarial dan manajemen risiko, dengan meningkatkan jumlah dan kualitas lulusan ilmu aktuarial Indonesia yang tersedia untuk bisnis Indonesia, universitas dan lembaga pemerintah, serta memperkuat profesi aktuarial di Indonesia. Melalui proyek ini, OJK memiliki kesempatan untuk meningkatkan jumlah lulusan ilmu pengetahuan aktuarial dan memenuhi kebutuhan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank terutama industri asuransi dalam hal aktuaris.

Selama periode laporan, OJK melakukan beberapa kegiatan terkait READI, antara lain: menyampaikan analisis dan tanggapan dari Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia mengenai penugasan tenaga asing dan menghadiri rapat pembahasan lanjutan mengenai Proyek READI.

## 2.4 STABILITAS SISTEM KEUANGAN

Stabilitas sektor jasa keuangan domestik pada triwulan IV-2016 sempat mengalami tekanan. Namun, tekanan tersebut berada pada level yang manageable dan mereda pada akhir tahun. Kegiatan intermediasi Lembaga Jasa Keuangan (LJK) mulai menunjukkan perbaikan pada paruh akhir 2016, sejalan dengan perkembangan positif pada indikator ekonomi dan sektor riil. Pemanfaatan Pasar Modal oleh LJK meningkat signifikan pada 2016, dengan mayoritas pembiayaan untuk modal kerja.

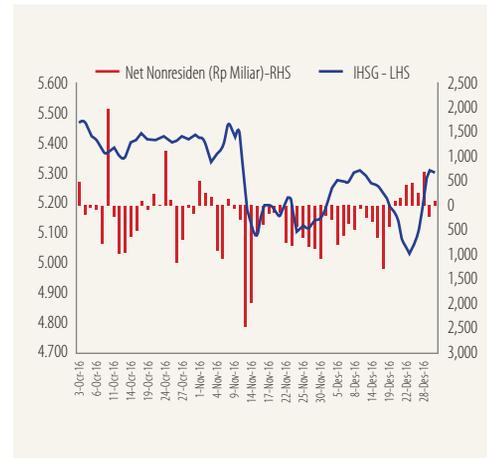
### 2.4.1 Pasar Keuangan dan Lembaga Jasa Keuangan

Di tengah meningkatnya risiko ketidakpastian global, stabilitas sektor jasa keuangan domestik sempat tertekan dan terpantau mereda di akhir 2016. OJK memandang tekanan di sektor jasa keuangan domestik pada periode laporan masih *manageable* dan dalam kondisi normal sejalan dengan terjaganya stabilitas makroekonomi dan sentimen positif domestik. Sentimen positif domestik berasal dari perbaikan perekonomian domestik dan pencapaian program *tax amnesty*. Hal ini berpengaruh positif terhadap perbaikan indikator kesehatan lembaga jasa keuangan yang terpantau masih memadai untuk meredam berbagai potensi risiko yang mungkin terjadi.

Sejalan dengan tekanan yang terjadi pasar keuangan global, IHSG juga mengalami tekanan, sehingga mengalami penurunan sebesar 1,27% (*qta*), yang diikuti oleh *net sell* Investor nonresiden di pasar saham domestik sebesar Rp18,3 triliun (triwulan III: *net buy* Rp21,4 triliun). *Net sell* tertinggi terjadi pada November 2016 pasca pemilihan presiden AS sebesar Rp12,4 triliun, namun terpantau mereda pada Desember 2016. Secara keseluruhan, sepanjang 2016 (*ytd*) pasar saham masih mencatatkan *net buy* sebesar Rp16,2 triliun.

Sejalan dengan pelemahan pasar keuangan domestik, pasar surat utang juga turut

**Grafik II - 10** IHSG dan Arus Modal Nonresiden di Pasar Saham



mengalami tekanan. Tercermin dari imbal hasil (*yield*) Surat Berharga Negara (SBN) meningkat cukup signifikan dibandingkan pada triwulan sebelumnya. *Yield* SBN secara keseluruhan mengalami kenaikan rata-rata sebesar 95 *bps*. Penurunan kinerja pasar SBN diikuti pula oleh aksi jual yang dilakukan investor nonresiden. Selain itu, aktivitas investor nonresiden mencatatkan *net sell* sebesar Rp19,2 triliun (triwulan III-2016: *net buy* Rp41,0 triliun).

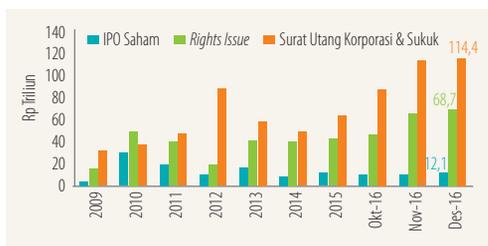
Seiring dengan *outflow* dari pasar keuangan domestik, nilai tukar Rupiah juga melemah 3,03% *qta* ke level Rp13.470,- per USD sejalan dengan semakin solidnya pemulihan ekonomi AS dan menguatnya ekspektasi pengetatan kebijakan moneter AS.

Di sisi lain, kegiatan intermediasi Lembaga Jasa Keuangan menunjukkan perbaikan pada November 2016, tercermin dari sebagian indikator ekonomi dan sektor riil yang bergerak positif seperti pertumbuhan kredit perbankan. Sejalan dengan kondisi tersebut piutang perusahaan pembiayaan juga menunjukkan perbaikan yang semakin solid. Perkembangan tersebut sejalan dengan meningkatnya pendanaan yang diterima oleh perusahaan pembiayaan.

Perkembangan positif juga terjadi pada pemanfaatan Pasar Modal sebagai sumber

pendanaan dunia usaha. Pendanaan dari Pasar Modal terpantau melonjak signifikan di akhir 2016. Meningkatnya penghimpunan dana melalui obligasi korporasi turut dipengaruhi oleh tren menurunnya *yield* obligasi korporasi. Dari total penghimpunan dana di Pasar Modal, penggunaannya terutama untuk pembiayaan modal kerja. Pemanfaatan Pasar Modal sebagai sumber pendanaan lembaga jasa keuangan akan mendukung upaya ekspansi kredit/ pembiayaan LJK, sehingga dapat mendorong kegiatan ekonomi masyarakat dan menjaga momentum perbaikan.

**Grafik II - 11** Penghimpunan Dana di Pasar Modal



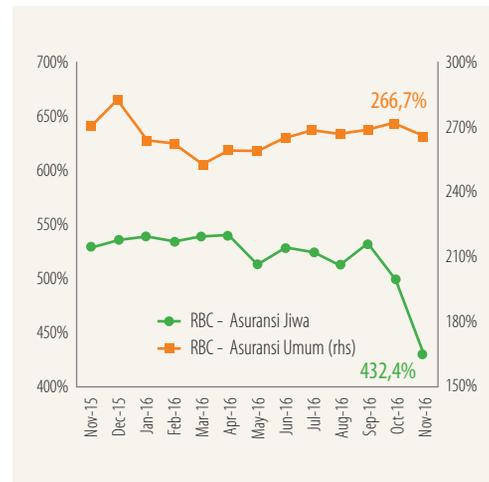
Permodalan lembaga jasa keuangan terjaga pada level yang memadai tercermin dari ketahanan permodalan perbankan berada pada level yang tinggi yaitu CAR berada pada level 23,04%.

**Grafik II - 12** Capital Adequacy Ratio (CAR) Perbankan



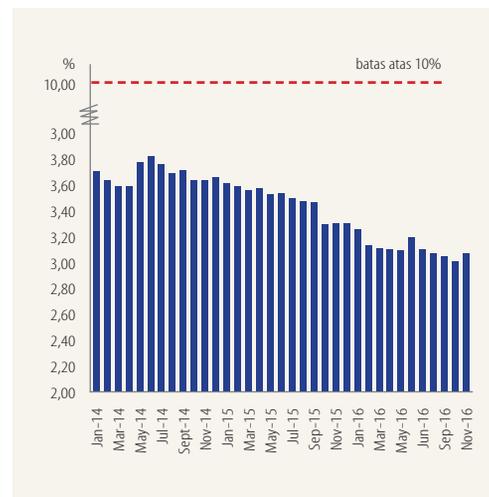
*Risk-Based Capital* (RBC) untuk asuransi jiwa dan asuransi umum relatif stabil, masing-masing tercatat sebesar 432,4% dan 266,7%, (jauh di atas batas minimum 120%)

**Grafik II - 13** Risk-Based Capital (RBC) Perasuransian

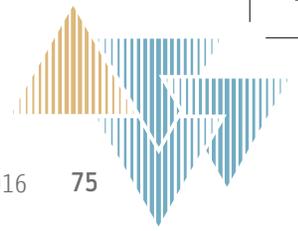


Perusahaan pembiayaan juga masih memiliki ruang untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan tercermin dari *gearing ratio* sebesar 3,03 kali. Seiring ekspansi piutang pembiayaan, *gearing ratio* diekspektasikan meningkat namun masih di bawah batas maksimum (10 kali).

**Grafik II - 14** Gearing Ratio Perusahaan Pembiayaan



Sejalan dengan ekspansi kredit perbankan, likuiditas perbankan menurun, namun rasio ketahanan likuiditas masih jauh di atas *threshold*. Kondisi tersebut diperkirakan dapat



meningkatkan penyaluran kredit sampai akhir 2016. Di sisi lain, komponen alat likuid yang menurun adalah SBN, sejalan pencairan alat likuid oleh perbankan untuk ekspansi kredit. Sementara alat likuid berupa giro, GWM, kas, dan SSB valas meningkat. Merespons perkembangan tersebut, OJK memberikan perhatian pada upaya menjaga pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada level yang wajar sehingga kebutuhan ekspansi kredit jangka pendek masih dapat dibiayai oleh alat likuid perbankan.

Risiko kredit lembaga jasa keuangan terpantau masih *manageable* dan berada di bawah *threshold*. Hal ini tercermin dari, rasio NPL *gross* dan NPL *net* perbankan tercatat pada level masing-masing 3,12% dan 1,38%. Sementara itu, rasio NPF perusahaan pembiayaan terpantau pada level 3,26%. Ke depan, risiko kredit diperkirakan akan semakin menurun sejalan dengan meningkatnya kegiatan ekonomi dan intermediasi keuangan.

Di tengah pelemahan nilai tukar Rupiah di November 2016, risiko pasar menunjukkan ketahanan yang memadai. Posisi Devisa Neto (PDN) perbankan masih terjaga jauh di bawah *threshold*. Rasio PDN per November 2016 berada pada level 1,66% (September: 2,31%). Eksposur Utang Luar Negeri perusahaan pembiayaan menurun menjadi Rp90,2 triliun. Ekspansi piutang pembiayaan lebih banyak dibiayai dari sumber pendanaan dalam negeri. Perusahaan pembiayaan umumnya telah memitigasi risiko nilai tukar melalui *natural hedge* dan *cross-currency swap*. Sementara itu, risiko pasar industri perasuransian dan dana pensiun terpantau meningkat sejalan dengan meningkatnya volatilitas pasar keuangan domestik.

## 2.4.2 Respons Kebijakan

OJK memberikan perhatian pada upaya mendorong akselerasi intermediasi keuangan, serta mendukung langkah-langkah kebijakan akomodatif yang telah diambil oleh Pemerintah maupun Bank Indonesia. Ke depan, intermediasi diperkirakan akan meningkat sejalan dengan pelonggaran kebijakan oleh otoritas terkait serta semakin solidnya pemulihan ekonomi domestik. Pertumbuhan kredit perbankan hingga akhir tahun 2016 diperkirakan akan tumbuh pada kisaran 6-8% dan akan meningkat pada tahun 2017.

Permodalan lembaga jasa keuangan dalam kondisi solid dan berada pada tingkat yang memadai. OJK mengarahkan agar permodalan lembaga jasa keuangan tersebut dapat dimanfaatkan untuk lebih mendukung penguatan fungsi intermediasi dan mengurangi potensi kenaikan risiko kredit. OJK juga memastikan bahwa lembaga jasa keuangan telah melakukan langkah-langkah mitigasi yang mencukupi dalam mengantisipasi faktor-faktor risiko yang ada.

Program *tax amnesty* yang digulirkan oleh Pemerintah akan turut mendukung pertumbuhan intermediasi lembaga jasa keuangan dan penguatan pasar keuangan domestik, baik dari uang tebusan maupun dana repatriasi. OJK telah mengeluarkan dua peraturan yang mengatur pelonggaran sejumlah ketentuan di sektor perbankan dan pasar modal untuk mendukung program *tax amnesty*.

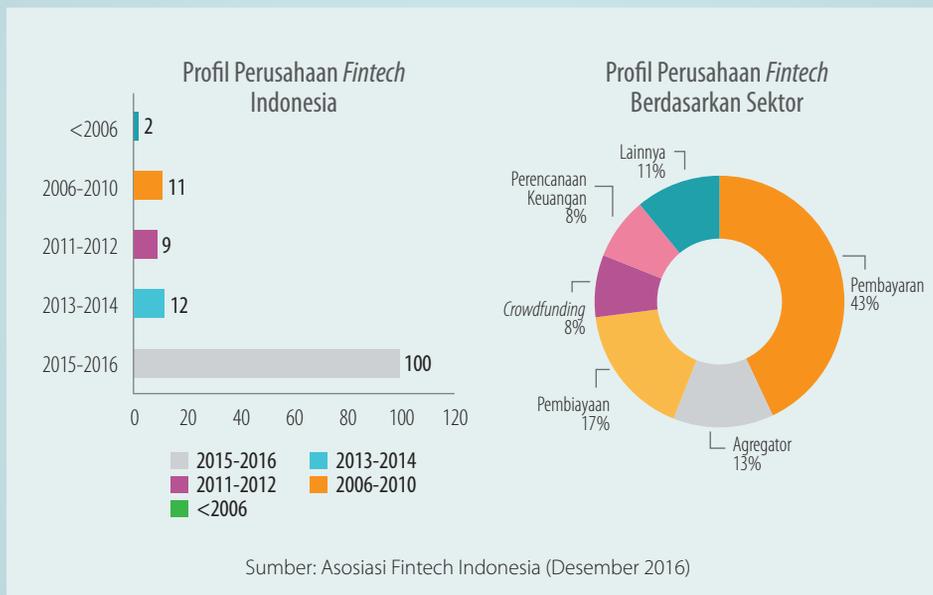
Ke depan, untuk memitigasi kemungkinan peningkatan risiko di sektor jasa keuangan, OJK akan terus mencermati perkembangan pasar keuangan dan lembaga jasa keuangan domestik, serta menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan. Koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait juga terus diperkuat dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan, serta untuk mengoptimalkan momentum berlanjutnya pemulihan domestik.

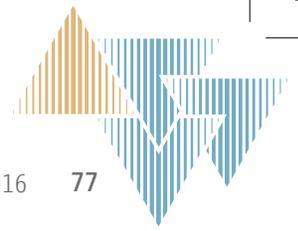
### Penerbitan POJK Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Industri *Financial Technology (Fintech)* berkembang dengan pesat terlihat dengan meningkatnya investasi dalam beberapa tahun terakhir yang dilakukan oleh perusahaan besar terhadap industri *fintech*. Di tingkat global, perkembangan *fintech* di tingkat global telah tumbuh dari 1.379 perusahaan pada triwulan 1-2016 menjadi mencapai sekitar 2.056 perusahaan pada triwulan IV-2016. Perusahaan *fintech* di tingkat global terdiri dari 16 kategori yang tersebar di 59 negara dengan total penyaluran dana

sebesar USD 58 miliar (Venture Scanner, Jan 2017). Seperti perkembangan di tingkat global, *fintech* di Indonesia terus mengalami perkembangan yang sangat pesat. Asosiasi *fintech* Indonesia mencatat pertumbuhan jumlah penyelenggara *fintech start-up* di 2016 meningkat tiga kali lipat dari 51 perusahaan pada triwulan I-2016 menjadi 135 perusahaan pada triwulan IV-2016. Jenis *fintech* di Indonesia didominasi oleh *fintech payment* dan *lending*.

**Grafik II - 15** Perkembangan dan Jenis *Fintech* di Indonesia





Untuk mendukung perkembangan *fintech* di Indonesia, OJK menerbitkan POJK tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) melalui POJK Nomor 77/POJK.01/2016. POJK tersebut memuat ketentuan terkait: (i) Penyelenggara yang meliputi aturan tentang badan hukum, kepemilikan, permodalan, kegiatan usaha, batasan pemberian pinjaman dana, skema pendaftaran dan perizinan, serta kualifikasi SDM, (ii) Pengguna, (iii) Perjanjian Para Pihak, (iv) Mitigasi Risiko, (v) Tata Kelola Sistem Informasi, (vi) Edukasi dan Perlindungan Pengguna, (vii) Tanda Tangan Elektronik, (viii) Prinsip dan Teknis Pengenalan Nasabah, (vi) Larangan, (x) Laporan Berkala, dan (xi) Sanksi. Aturan teknis dari POJK ini akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran OJK (SEOJK). Regulasi ini diharapkan mendukung pertumbuhan industri *fintech* P2P *lending* sebagai alternatif sumber pembiayaan baru bagi sebagian besar masyarakat Indonesia yang tidak atau belum dapat dilayani secara maksimal oleh industri jasa keuangan konvensional, seperti perbankan, pasar modal, perusahaan pembiayaan, dan modal ventura.

POJK ini sejalan dengan upaya yang dilakukan oleh Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) serta mendukung program Nawacita, Program Gerakan 1.000 *start-up*, dan Paket Kebijakan Ekonomi 14

yang dicanangkan oleh pemerintah. POJK ini juga menerapkan ketentuan mengenai pendaftaran dan perizinan agar sesuai dengan semangat *regulatory sandbox* di berbagai negara. Penyelenggara diwajibkan untuk melakukan pendaftaran sebelum mengajukan permohonan untuk memperoleh izin. Dalam masa pendaftaran ini, *fintech* telah dapat melakukan aktivitas secara penuh dengan mendapat pendampingan dari OJK yang secara terus menerus melakukan evaluasi. Paling lama satu tahun setelah terdaftar, *fintech* wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh izin kepada OJK.

Untuk melindungi kepentingan konsumen, POJK tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi ini mewajibkan penyelenggara antara lain menyediakan *escrow account* dan *virtual account* di perbankan, melakukan mitigasi risiko, serta menempatkan data *center* di dalam negeri. Guna melindungi kepentingan stabilitas sistem keuangan nasional, pemberian jumlah pinjaman dibatasi maksimal Rp2 miliar. Melalui peraturan ini, OJK juga memfasilitasi dukungan bagi perkembangan inovasi ekonomi digital di masa mendatang dengan menyiapkan infrastruktur berupa *fintech incubator center*.

## 2.5 EDUKASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

### 2.5.1 Inklusi Keuangan

#### PUSAT EDUKASI, LAYANAN KONSUMEN DAN AKSES KEUANGAN UMKM (PELAKU)

Sebagai bentuk implementasi pilar 2 SLNKI, OJK memperkuat infrastruktur yang mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan dengan meresmikan Pusat Edukasi, Layanan Konsumen dan Akses Keuangan UMKM (PELAKU). PELAKU merupakan gerai informasi yang ada di Kantor OJK di daerah sebagai sarana penyampaian informasi keuangan, dan penanganan pengaduan, serta peningkatan akses keuangan khususnya sektor UMKM.

Selama periode laporan, OJK melakukan *branding* PELAKU di tujuh Kantor OJK sebagai bentuk penguatan infrastruktur, yaitu: KOJK Tasikmalaya, KOJK Purwokerto, KOJK Tegal, KOJK Bengkulu, KOJK Lampung, KOJK Nusa Tenggara Timur dan KOJK Sulawesi Tenggara. Selain itu, OJK menyusun *user requirement* sistem PELAKU.

#### SIMPANAN PELAJAR (SimPEL/SimPEL IB)

SimPel/SimPel iB adalah tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini. Sampai akhir periode laporan, terdapat 202 Bank yang menjadi peserta dalam program SimPel/SimPel iB dengan Jumlah rekening dan volume SimPel/SimPel iB masing-masing mencapai 2.506.605 dan Rp812,31 Miliar. Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang sudah terjalin antara Bank dan sekolah sebanyak 29.384 PKS. Selain itu, pada periode laporan, telah dilakukan aktivasi SimPel/SimPel iB dan *launching* Laku Pandai oleh Bank NTT.

#### LAYANAN KEUANGAN MIKRO (LAKU MIKRO)

Layanan Keuangan Mikro (Laku Mikro)

merupakan layanan terpadu dengan proses yang sederhana, cepat, akses mudah, dan harga terjangkau yang terdiri atas layanan SiPINTAR, produk dan jasa keuangan mikro, dan layanan edukasi dan konsultasi kepada masyarakat. Layanan SiPINTAR adalah suatu layanan keuangan mikro terpadu yang terdiri atas produk simpanan, investasi, dan asuransi mikro. Pada periode laporan, OJK melaksanakan tiga *batch* kegiatan *capacity building* Laku Mikro di OJK Institute. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan agen sehingga penjualan Laku Mikro dapat lebih optimal.

#### STRATEGI NASIONAL KEUANGAN INKLUSIF (SNKI)

Dalam rangka memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan diperlukan adanya Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) di Indonesia. Strategi ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi kementerian/ lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan instansi terkait lainnya dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan melalui kegiatan masing-masing secara bersama dan terpadu. Implementasi SNKI yang terpadu diperlukan untuk mencapai target keuangan inklusif yaitu persentase jumlah penduduk dewasa yang memiliki akses layanan keuangan pada lembaga keuangan formal sebesar 75% pada akhir 2019.

Gambar II - 1 Peresmian Strategi Nasional Keuangan



Atas dasar pertimbangan tersebut, Presiden Joko Widodo pada 1 September 2016 menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) dan dilanjutkan dengan peluncuran SNKI di Istana Negara.

**Gambar II - 2** Peluncuran SNKI



SNKI terdiri dari 5 Pilar yaitu: (i) Edukasi Keuangan, (ii) Hak Properti Masyarakat; (iii) Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi Keuangan; (iv) Layanan Keuangan pada Sektor Pemerintah; dan (v) Perlindungan Konsumen. Kelima Pilar SNKI di atas ditopang oleh tiga fondasi yaitu kebijakan dan regulasi yang kondusif, infrastruktur dan teknologi informasi keuangan yang mendukung, organisasi dan mekanisme implementasi yang efektif.

**Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)**

OJK bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri serta institusi terkait membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dengan tujuan meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. Pada periode laporan, OJK mengukuhkan pengukuhan sebanyak empat belas TPAKD dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel II - 31** Pengukuhan TPAKD Triwulan IV-2016

No.	Tanggal	Lokasi
1	04 Oktober 2016	Provinsi Maluku
2	10 Oktober 2016	Provinsi Kepulauan Riau (Kepri)
3	13 Oktober 2016	Provinsi Riau
4	24 Oktober 2016	Kota Probolinggo
5	28 Oktober 2016	Kabupaten Kudus
6	03 November 2016	Kota Surakarta
7	17 November 2016	Kota Malang
8	21 November 2016	Kabupaten Jember
9	21 November 2016	Kabupaten Probolinggo
10	24 November 2016	Kabupaten Banyuwangi
11	08 Desember 2016	Provinsi Papua
12	15 Desember 2016	Kota Kediri
13	20 Desember 2016	Provinsi Sulawesi Utara
14	22 Desember 2016	Provinsi Nusa Tenggara Timur

OJK melakukan dua kali *Coaching Clinic* TPAKD di kota Solo dan Bandung. Kegiatan tersebut bertujuan untuk melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap program kerja TPAKD Provinsi/Kabupaten/Kota serta menyampaikan arah pengembangan (*roadmap*) TPAKD yang mampu mendukung SNKI.

**Kampanye “Ayo Menabung”**

Selama periode laporan, OJK melakukan inisiasi bulan inklusi keuangan sebagai upaya untuk mendorong percepatan inklusi keuangan nasional. Kegiatan tersebut difokuskan pada optimalisasi berbagai program inklusi keuangan dengan tujuan utama mewujudkan peningkatan budaya menabung pada masyarakat Indonesia. Pelaksanaan kampanye diikuti oleh 83 LJK dengan 633 kegiatan yang tersebar di 111 kota di Indonesia, serta menghasilkan pembukaan total 3.545.812 rekening baru pada berbagai jasa layanan keuangan. Sebagai puncak kegiatan inklusi keuangan, telah dilaksanakan kegiatan “Ayo Menabung” dalam rangka Peringatan Hari Menabung Sedunia yang dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia di Jakarta Convention Center (JCC). Kegiatan ini dihadiri oleh 2.000 undangan yang berasal dari komunitas ibu rumah tangga, profesi, UMKM, akademisi, pelajar dan perwakilan dari lembaga jasa keuangan.

OJK juga mendorong Gerakan Nasional Menabung (GNM) dengan cakupan yang lebih luas untuk peningkatan budaya menabung. Pelaksanaan GNM tersebut meliputi industri Perbankan (Menabung di SimPel/SimPel iB), Pasar Modal (Yuk Nabung Saham dan Ayo Investasi di Reksa Dana), Pergadaian (Ayo Menabung Emas) dan Dana Pensiun (Menabung untuk Masa Depan), serta kegiatan menabung/investasi lainnya.

### SURVEI NASIONAL LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN 2016

OJK melakukan survei nasional untuk mengukur tingkat literasi dan inklusi masyarakat Indonesia sesuai Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI). OJK melaksanakan Survei Nasional Literasi Keuangan (SNLK) pertama pada 2013 dengan hasil indeks literasi keuangan 21,84% dan indeks inklusi keuangan 59,74%.

Pada periode laporan, OJK melakukan survei nasional yang kedua kalinya sebagai upaya pengukuran efektivitas implementasi SNLKI yang telah berjalan selama tiga tahun, sekaligus pemetaan data literasi dan inklusi keuangan terkini. Survei dilakukan melalui wawancara langsung kepada 9.680 responden di 34 provinsi yang tersebar di 64 kota/kabupaten di Indonesia. Profil responden mempertimbangkan kesesuaian aspek gender, strata wilayah, umur, pengeluaran, pekerjaan, dan tingkat pendidikan. Hasil survei tersebut, diperoleh tingkat literasi keuangan sebesar 29,66% dan tingkat inklusi keuangan sebesar 67,82%.

OJK bersama IJK akan terus mendorong dan melaksanakan program literasi dan inklusi keuangan agar target indeks inklusi keuangan yang dicanangkan pemerintah melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) sebesar 75% pada tahun 2019 dapat tercapai. Selain itu, indeks literasi dan inklusi keuangan ini memiliki nilai strategis karena menentukan kebijakan

**Tabel II - 32** Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan 2016

	Indeks Literasi		Indeks Inklusi	
	Komposit	Syariah	Komposit	Syariah
Nasional	29,66%	8,11%	67,82%	11,06%
Perbankan	28,94%	6,63%	63,63%	9,61%
Perasuransian	15,76%	2,51%	12,08%	1,92%
Dana Pensiun	10,91%	0,00%	4,66%	0,00%
Lembaga Pembiayaan*	13,05%	0,19%	11,85%	0,24%
Pergadaian	17,82%	1,63%	10,49%	0,71%
Pasar Modal**	4,40%	0,02%	1,25%	0,01%
BPJS Kesehatan	28,29%	-	63,83%	-
BPJS Ketenagakerjaan	11,02%	-	5,05%	-

OJK terkait literasi dan inklusi keuangan, serta perlindungan konsumen. Selain itu, hasil survei tersebut juga dapat digunakan sebagai masukan kepada lembaga jasa keuangan dalam menyusun strategi edukasi dan literasi keuangan serta pengembangan produk dan layanan jasa keuangan.

### 2.5.2 Literasi dan Edukasi Keuangan

#### TRAINING OF TRAINERS (ToT) GURU

OJK menyelenggarakan dua kegiatan *ToT* Guru, yaitu bagi Guru SD di Wilayah Provinsi Bali dan bagi guru SMP dan SMA kelas X di Sorong selama triwulan IV-2016.

**Tabel II - 33** Training of Trainers (ToT) Guru

No.	Lokasi	Kegiatan	Jumlah Peserta	Peningkatan Pemahaman
1.	Provinsi Bali	<i>ToT</i> Guru SD	94 guru	29,12%
2.	Sorong	<i>ToT</i> Guru IPS SMP dan Guru Ekonomi SMA	60 guru IPS SMP 57 guru ekonomi SMA	33,07% 38,10%

Peserta melakukan simulasi atau praktik mengajar serta mempelajari penggunaan alat peraga/papan permainan "Sikapuangmu" yang bertujuan memperkenalkan konsep dasar keuangan dan industri jasa keuangan kepada para siswa. Selain itu, beberapa perwakilan guru diberikan kesempatan melakukan simulasi mengajar sesuai dengan topik yang dipilih

untuk melihat seberapa baik pemahaman mereka terhadap materi yang didapat selama mengikuti *ToT*.

**EDU-EXPO**

Selama periode pelaporan, OJK melakukan dua kegiatan edukasi dan pameran keuangan di Yogyakarta dan Lampung.

**Tabel II - 34** Pameran Edukasi Keuangan

No.	Lokasi	Tema	Jumlah Pengunjung	Jumlah Transaksi
1.	Yogyakarta	<i>Investment Day</i>	1.779 orang	Rp82.158.486,00
2.	Lampung	<i>Multifinance Day</i>	1.178 orang	Rp1.493.788.000,00

Pada kegiatan *Investment Day* dilaksanakan 10 *talkshow* dengan tema investasi, baik di sektor Pasar Modal, pegadaian, maupun dana pensiun. Pengunjung dapat menerima konsultasi maupun membeli produk investasi di 20 *booth* yang mengikuti pameran. Sementara itu, pameran keuangan *Multifinance Day* menyediakan 26 *booth* bagi pengunjung yang ingin memanfaatkan produk pembiayaan. Pengunjung dapat mengikuti *talkshow*, kuis, dan penyuluhan *safety riding* untuk lebih mengenal perusahaan pembiayaan dan produknya.

**KEGIATAN EDUKASI KEUANGAN DAN WASPADA INVESTASI ILEGAL**

Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat akan kegiatan investasi ilegal, OJK melakukan kegiatan edukasi keuangan di Balai Kota Cirebon dan Pendopo Indramayu. Kegiatan tersebut dihadiri 183 orang yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil dan Pemerintah Daerah setempat. Pada kegiatan tersebut peserta diberi edukasi khusus terkait Pengenalan Satgas Waspada Investasi dan ciri-ciri investasi ilegal, prosedur pengaduan investasi ilegal, ciri-ciri bentuk koperasi yang legal, dan ciri-ciri kegiatan *direct selling* dan *multi-level marketing* yang legal. Peningkatan pemahaman peserta mengenai materi yang disampaikan yaitu sebesar 15,96%.

**KUNJUNGAN MONITORING EVALUASI OUTREACH PROGRAM**

Selama 2016, OJK melaksanakan lima kegiatan *Outreach Program* (ORP) yang ditujukan kepada berbagai segmen komunitas, dengan tingkat *multiplier effect* yang beragam, sebagaimana gambar berikut:

**Grafik II - 16** Rekapitulasi Pelaksanaan Kegiatan ORP Selama 2016

	Malang	Padang	Kupang	Tegal	Pekalongan
 <b>Agen Edukasi Keuangan</b>	17 Tenaga Kesehatan (Bidan, DinKes dan Perangkat Desa)	10 Mahasiswa Fakultas Ekonomi	10 Mahasiswa Politeknik	22 Dosen dan Mahasiswa Politeknik	10 Tenaga Penyuluh KB
 <b>Komunitas/ Downliners</b>	116 Petani dan Ibu Rumah Tangga	81 Pengrajin Rotan dan UMKM	95 Perangkat dan masyarakat desa, jemaat gereja serta UMKM (Desa Kotabes dan Penfui Timur)	100 Nelayan dan Keluarga	100 Tenaga Penyuluh KB
	Agustus s.d. Oktober	Agustus s.d. Oktober	September s.d. November	Agustus s.d. Oktober	September s.d. November

Selanjutnya, OJK mengunjungi masing-masing lokasi kegiatan untuk memperoleh masukan sekaligus evaluasi kegiatan dan membandingkan data *monitoring* tiga bulan terkait perubahan perilaku keuangan dan penggunaan produk/jasa keuangan yang disampaikan oleh para agen dengan kondisi dan fakta di lapangan. Dari kunjungan tersebut dapat disimpulkan bahwa para agen sangat aktif dalam mengajak warga desa untuk menggunakan produk keuangan.

**EDUKASI KEUANGAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS**

OJK bekerjasama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni), KOMPAK, dan Mitra Netra menyelenggarakan kegiatan edukasi bagi penyandang disabilitas (tuna netra). Kegiatan tersebut dihadiri oleh 73 peserta penyandang disabilitas dan 19 pengurus pusat Pertuni. Pada kegiatan tersebut, OJK menerjemahkan buku Perencanaan Keuangan Keluarga ke dalam huruf Braille sebagai bekal materi bagi peserta. Pada kesempatan tersebut OJK juga melaksanakan kegiatan *pre-test* dan *post-test* untuk mengetahui peningkatan indeks literasi para peserta, di mana terdapat peningkatan pemahaman peserta yaitu nilai rata-rata *pre test* 62,37% dan *post test* 89,13% meningkat sebesar 26,76%.

**PENGEMBANGAN MOBILE APPLICATION DAN MINISITE SIKAPIUANGMU**

OJK terus melakukan penguatan infrastruktur

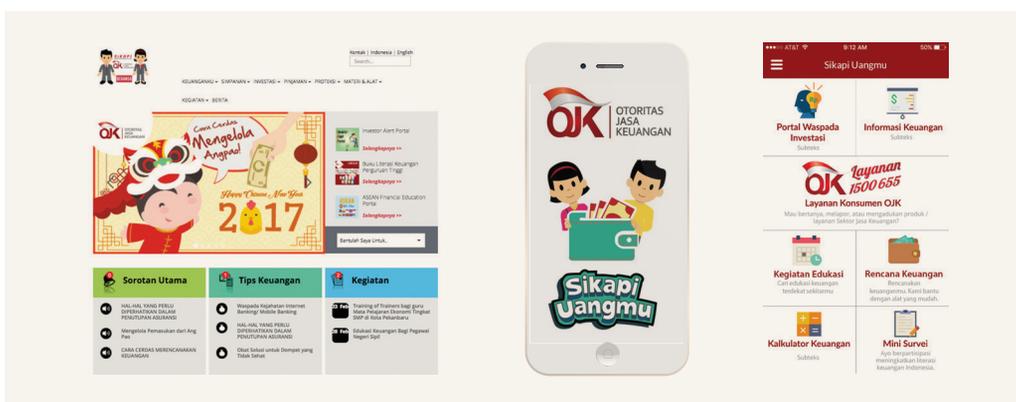
digital melalui penyempurnaan layanan pada *Minisite* dan Aplikasi *Mobile (mobile app)* "Sikapiuangmu" dalam rangka mendorong kemudahan akses informasi keuangan bagi konsumen dan masyarakat. Pengembangan saat ini berfokus pada beberapa fitur utama:

1. *Investor Alert Portal*  
Merupakan fitur yang berisi daftar investasi yang tidak terdaftar dan tidak di bawah pengawasan OJK, dengan tujuan mendorong *awareness* masyarakat dalam kegiatan investasi
2. Layanan Konsumen OJK  
Layanan mencakup tiga menu utama, yaitu Pertanyaan, Pelaporan, dan Pengaduan dan terintegrasi dengan sistem basis data layanan konsumen yang telah berjalan.
3. Kegiatan Edukasi, Informasi Keuangan, dan Kalkulator Keuangan.  
*Mobile app* "Sikapiuangmu" diperkaya dengan tujuh kalkulator keuangan baik konvensional maupun syariah antara lain simulasi untuk Periksa Dompot, Periksa Anggaran, dan Kartu Kredit.

**IKLAN LAYANAN MASYARAKAT**

Selama periode laporan, OJK melaksanakan berbagai kegiatan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) yang bersifat tematik dan didukung oleh beberapa KR/ KOJK. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mendukung kampanye nasional Literasi Keuangan guna meningkatkan utilitas dan pemahaman produk dan jasa keuangan.

**Gambar II - 3** Tampilan Terkini *Minisite* (kiri) dan *Mobile App* Sikapiuangmu OJK (kanan)



**Tabel II - 35** Iklan Layanan Masyarakat

Tema	Bentuk	Tanggal	Segmen Audience	Materi/Narasumber	Jumlah Pengunjung/ Pembaca Artikel
Hari Sumpah Pemuda	Artikel dan Display Ad	28 Oktober 2016	Masyarakat Umum, Mahasiswa	Banner dan artikel "OJK Dukung Bisnis Starup Pemuda"	669
Hari Pahlawan	Artikel dan Display Ad	10 November 2016	Masyarakat Umum, Guru	Banner dan artikel "Guru Pahlawan Literasi Keuangan"	291
Hari Ibu	Artikel dan Display Ad	22 Desember 2016	Masyarakat Umum, Perempuan	Banner Hari Ibu	-
Hari Raya Natal dan Tahun Baru	Artikel dan Display Ad	25 Desember 2016	Masyarakat Umum	Banner Ucapan Selamat Hari Raya Natal dan Tahun Baru	-
Tahun Baru	Artikel dan Display Ad	32 Desember 2016	Masyarakat Umum	Banner dan artikel "Kenali 3K untuk Resolusi Keuangan Anda: Keinginan, Kebutuhan, Kemampuan"	1016

### 2.5.3 Perlindungan Konsumen

#### Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi

Keberadaan Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi (*Financial Customer Care – FCC*) memberikan manfaat bagi konsumen sektor jasa keuangan dan masyarakat. Pada periode laporan, Layanan Konsumen OJK menerima 5.394 permohonan layanan yang terdiri dari 1.626 informasi, 3.767 pertanyaan dan satu pengaduan.

Terkait layanan informasi, didominasi dari sektor Perbankan sebesar 54,1%, diikuti sektor IKNB sebesar 26,8%, dan sektor Pasar Modal sebesar 3,3%, serta lain-lain sebesar 15,8%. Selanjutnya, secara substansi layanan informasi terbanyak pada sektor Perbankan adalah terkait Restrukturisasi Kredit/ Pembiayaan yaitu sebesar 21,8%, pada sektor IKNB adalah terkait kesulitan klaim sebesar 17,9%, dan pada sektor Pasar Modal terkait peraturan Pasar Modal sebesar 29,6%. Sampai dengan periode laporan, tingkat penyelesaian layanan informasi yang adalah sebesar 88,1%.

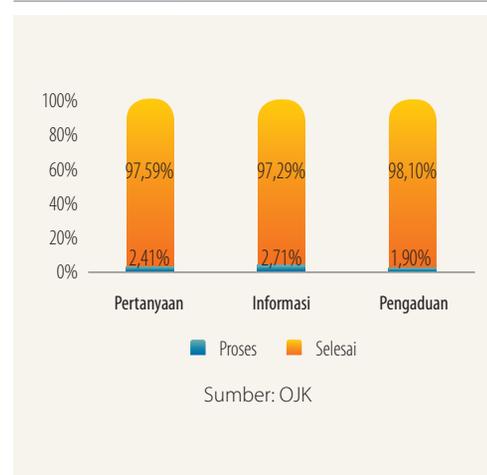
Terkait layanan pengaduan, hanya terdapat satu layanan yang masuk yaitu pengaduan pada sektor Perbankan mengenai permintaan pengembalian dana tabungan konsumen yang diduga telah dilakukan penarikan oleh oknum Bank.

Pada layanan pertanyaan, dari sektor Perbankan adalah sebesar 34,0%, sektor IKNB sebesar

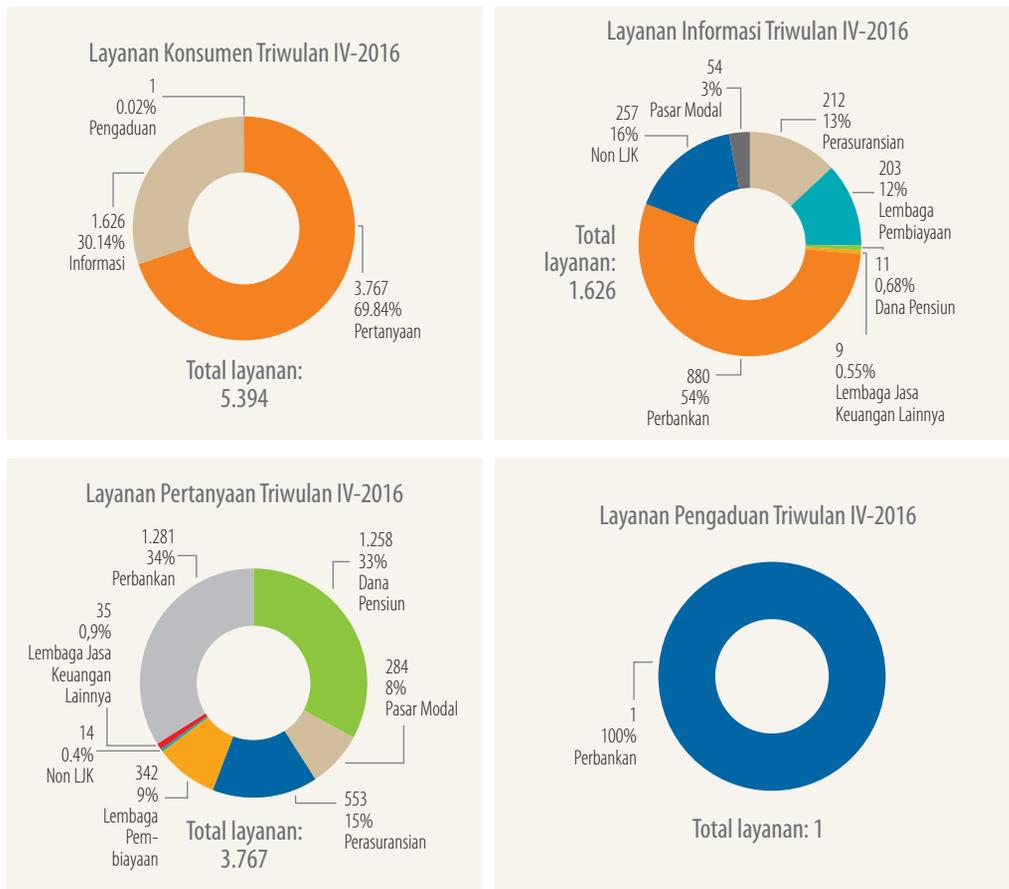
25,1%, dan sektor Pasar Modal sebesar 7,5%, serta kategori lain-lain, yaitu sebesar 33,4%. Pertanyaan terbanyak pada sektor Perbankan adalah terkait peraturan perbankan sebesar 12,8%, pada sektor IKNB adalah terkait Legalitas LJK dan Produk sebesar 26,5%, dan pada sektor Pasar Modal terkait Perizinan Profesi dan Jasa Penunjang sebesar 25,4%. Substansi pertanyaan terkait dengan sektor jasa keuangan yang paling banyak disampaikan adalah mengenai legalitas non LJK (39,9%) dan permintaan data untuk keperluan penelitian (4,1%).

Secara akumulatif periode laporan Januari 2013 sampai Desember 2016, tingkat penyelesaian layanan informasi adalah sebesar 97,29% (19.001 layanan), Layanan pertanyaan sebesar 97,59% (50.440 layanan), serta Layanan Pengaduan mencapai 98,10% (3.779 pengaduan).

**Grafik II - 17** Tingkat Penyelesaian Layanan Kumulatif



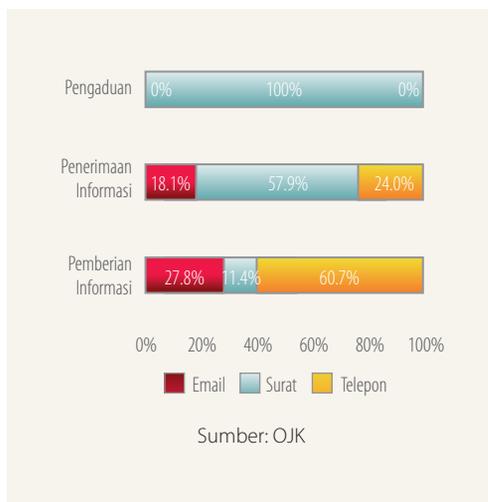
**Grafik II - 18** Layanan Per Sektor



Dalam rangka mempermudah masyarakat dalam mengakses Layanan Konsumen, OJK menyediakan berbagai kanal penerimaan layanan antara lain melalui media *email*, telepon maupun surat.

Berdasarkan Kanal Layanan, pada Layanan pertanyaan, Konsumen dan/atau masyarakat lebih banyak mempergunakan kanal telepon dibandingkan email dan surat, Pada layanan informasi terbanyak adalah melalui kanal surat. Sementara itu, untuk Layanan Pengaduan, kanal yang paling banyak digunakan adalah kanal surat.

**Grafik II - 19** Kanal Layanan



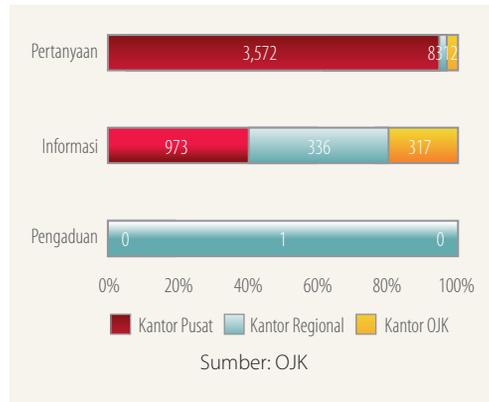
**Tabel II - 36** Penerimaan Layanan per *Business Unit*

Penginput	Total Layanan	Proses	Selesai
Kantor Pusat	4.545	547	3.998
Kantor Regional	420	83	337
Kantor OJK	429	99	330
<b>Total</b>	<b>5.394</b>	<b>729</b>	<b>4.665</b>

Sumber: OJK

Berdasarkan Penerimaan Layanan, satuan kerja di Kantor Pusat menerima Layanan Konsumen terbanyak yaitu sebesar 88,0% dari total penerimaan Layanan.

**Grafik II - 20** Perbandingan Penerimaan Layanan Berdasarkan Satuan Kerja



**Kegiatan Capacity Building anggota Working Group Internal Dispute Resolution (WG IDR) dan PUJK mengajar**

Sebagai bentuk pelaksanaan program *recycling*, OJK secara rutin melaksanakan kegiatan *capacity building* bagi seluruh anggota WG IDR yang terdiri dari 22 perbankan, 12 perusahaan asuransi dan 6 lembaga pembiayaan. Pada periode pelaporan, kegiatan *capacity building* dilaksanakan dengan agenda *sharing session* terkait perlindungan konsumen, aspek hukum tanda tangan digital, rencana revisi UU Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen dalam kegiatan transaksi elektronik sektor jasa keuangan serta materi *softskill* untuk anggota WG IDR. Selanjutnya, OJK melaksanakan kegiatan edukasi yang bertempat di Bandung dengan total peserta edukasi sebanyak 303 siswa-siswi.

**The International Financial Consumer Protection Organization (FinCoNet)**

The International Financial Consumer Protection Organization atau *FinCoNet* adalah organisasi internasional non profit yang terdiri dari lembaga otoritas yang memiliki tanggung jawab terkait perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. *FinCoNet* didirikan untuk memajukan

perlindungan konsumen melalui pengawasan *market conduct* yang efektif dan efisien. Pada periode laporan, OJK terpilih sebagai tuan rumah pelaksanaan *FinCoNet Annual General Meeting (AGM)* dan Seminar Internasional.

Acara AGM dihadiri oleh 35 delegasi yang berasal dari 19 anggota negara *FinCoNet*, 3 lembaga dan 1 negara *observer*. Sementara itu, Seminar Internasional dilaksanakan dengan tema "*Fast Innovation and Development of Fintech: Striking a Balance Between Financial Inclusion and Consumer Protection*" dengan total peserta sebanyak 230 peserta.

**Sosialisasi Internal Dispute Resolution (IDR)**

OJK bersama anggota WG IDR menyusun standarisasi pelaksanaan IDR (Standar IDR) yang diterapkan oleh seluruh PUJK, standar IDR ini disusun bertujuan memberikan acuan bagi seluruh PUJK dalam pelaksanaan IDR sehingga dalam penanganan dan penyelesaian pengaduan, konsumen akan mendapat pengalaman pelayanan dengan standar yang sama ketika berhubungan dengan PUJK dari berbagai sektor jasa keuangan. Standar ini akan menjadi acuan minimal bagi PUJK yang pengembangannya diserahkan kepada kesiapan dan kebijakan internal masing-masing PUJK, serta menyesuaikan dengan karakteristik masing-masing sektor jasa keuangan. Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan IDR, maka EPK melaksanakan sosialisasi standar IDR yang dihadiri ± 200 PUJK di Jakarta.

**2.5.4 Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan**

**Penetapan Badan Mediasi Pembiayaan, Pegadaian dan Ventura Indonesia (BMPPVI) ke Dalam Daftar LAPS**

Pada periode pelaporan, perusahaan modal ventura bergabung ke dalam BMPPI sehingga BMPPI memperluas ruang lingkup penyelesaian sengketa yang semula hanya untuk sektor pembiayaan dan pergadaian menjadi untuk

pembiayaan, pergadaian, dan modal ventura serta mengubah nama menjadi “Badan Mediasi, Pembiayaan, Pegadaian, dan Ventura Indonesia (BMPPVI)”. OJK melaksanakan penilaian terhadap BMPPVI. Berdasarkan hasil penilaian, OJK menetapkan BMPPVI ke dalam Daftar LAPS. Daftar LAPS yang baru tersebut telah diumumkan kepada masyarakat melalui tiga surat kabar berpedaran nasional.

**Monitoring Pemenuhan Prinsip Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan**

OJK melakukan dua jenis *monitoring* LAPS, yaitu (1) *monitoring* pelaporan LAPS, dan (2) *monitoring* penilaian penerapan prinsip-prinsip LAPS, yang mencakup prinsip aksesibilitas, independensi, keadilan, efisiensi dan efektifitas. Pada periode laporan, OJK melakukan *monitoring* penerapan prinsip-prinsip LAPS semester 2. *Monitoring* penerapan prinsip-prinsip LAPS dilakukan dengan menilai penerapan prinsip aksesibilitas, prinsip independensi, prinsip keadilan, serta prinsip efisiensi dan efektifitas pada masing-masing LAPS. Rincian hasil *monitoring* pemenuhan prinsip-prinsip LAPS 2016 adalah sebagai berikut:

**Tabel II - 37 Monitoring LAPS**

LAPS	Nilai Monitoring Pemenuhan Prinsip-Prinsip LAPS 2016	
	Semester 1	Semester 2
BMAI	75,19	89,20
BAPMI	82,66	88,43
BMDP	72,33	84,59
LAPSPI	85,01	89,46
BAMPPPI	81,14	85,37
BMPPVI	78,55	80,467
<b>Rata-rata</b>	<b>79,15</b>	<b>86,25</b>

**SIPEDULI Modul Pelaporan LAPS**

OJK membangun sistem pelaporan LAPS secara *on-line* untuk mempermudah penyampaian laporan sekaligus sebagai salah satu bentuk program manfaat balik OJK kepada industri sektor jasa keuangan. Selama periode laporan, OJK telah mencapai tahap akhir dalam pembangunan sistem pelaporan LAPS

dimaksud. Berdasarkan hasil *User Acceptance Test* (UAT) yang dilakukan sistem tersebut telah siap untuk digunakan oleh OJK dan LAPS untuk melaksanakan *monitoring* pelaporan LAPS. Modul Pelaporan LAPS telah dipasangkan pada Sistem Informasi Pelaporan Edukasi dan Perlindungan Konsumen (SIPEDULI) dan dapat diakses melalui [www.peduli.ojk.go.id](http://www.peduli.ojk.go.id).

Sistem pelaporan LAPS memuat informasi pokok LAPS, seperti nama, alamat, telepon, faksimili, *email*, *website*, jumlah anggota, jenis layanan, daftar nama pengurus, pegawai, pengawas, mediator dan adjudikator. Selain itu, sistem tersebut juga memuat mengenai laporan layanan LAPS yang mencakup nomor laporan, para pihak, jenis sengketa, domisili para pihak, nilai sengketa, waktu penyelesaian, hasil penyelesaian, dan *monitoring* pelaksanaan kesepakatan/putusan.

**Capacity Building Terkait Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan**

Pada periode laporan, OJK menyelenggarakan *capacity building* terkait lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan. *Capacity building* tersebut merupakan hasil kerja sama dengan lembaga internasional, yaitu *Australia Indonesia Partnership for Economic Governance* (AIPEG) dan World Bank. Tujuan *workshop* tersebut untuk memperkuat alternatif penyelesaian sengketa di LAPS di sektor jasa keuangan di Indonesia melalui pembelajaran dari implementasi alternatif penyelesaian sengketa di (FOS) *Financial Ombudsman Services* Australia, terutama mengenai *merger* LAPS di Australia sehingga menjadi 1 FOS.

**Sosialisasi LAPS di Sektor Jasa Keuangan di Yogyakarta**

Agar LAPS dapat dimanfaatkan oleh konsumen dan lembaga jasa keuangan secara optimal maka perlu dilakukan sosialisasi terkait eksistensi LAPS berikut tugas, fungsi, dan manfaat melakukan penyelesaian sengketa melalui LAPS. OJK bekerja sama dengan LAPS menyelenggarakan sosialisasi di Yogyakarta yang diikuti 130 orang.

### 2.5.5 Market Conduct

#### INVESTOR ALERT PORTAL (IAP)

OJK mengembangkan IAP secara berkala dalam rangka agar masyarakat berhati-hati dan tidak mudah tergiur dengan penawaran investasi yang belum jelas legalitasnya. Selama periode laporan, OJK menambahkan 73 entitas ke dalam daftar investasi yang patut diwaspadai masyarakat. IAP diharapkan menjadi rujukan masyarakat sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Selanjutnya, agar menjaga kesinambungan *update* data IAP, OJK mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk menyampaikan informasi terkait penawaran investasi yang mencurigakan melalui telepon 1500-655, *email* [konsumen@ojk.go.id](mailto:konsumen@ojk.go.id) atau [waspadainvestasi@ojk.go.id](mailto:waspadainvestasi@ojk.go.id).

#### PEMANTAUAN DAN ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN

Sepanjang periode laporan, OJK melaksanakan dua kegiatan operasi intelijen pasar tentang Dugaan Investasi Ilegal dan Kerawanan Penawaran Melalui Iklan. Kegiatan operasi intelijen pasar tentang dugaan investasi ilegal mengemukakan bahwa terdapat penawaran investasi menyerupai *multi level marketing* (MLM) yang memiliki *underlying* produk tertentu untuk dipasarkan, namun fokus bisnis lebih pada pengembangan jaringan, dengan menggunakan sistem umumnya *binary*, *trinary* atau matahari. Selain itu, OJK menemukan bahwa adanya komunitas di daerah yang tetap eksis membina anggota yang memang memiliki minat dalam pengembangan jaringan khususnya bisnis menyerupai MLM maupun *money game*, meskipun penawaran entitas dan produk datang silih berganti.

Sementara itu, kegiatan operasi intelijen pasar tentang Kerawanan Penawaran Melalui Iklan mengambil sampling iklan 3 industri meliputi perbankan, asuransi dan perusahaan pembiayaan. Tujuannya untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran aspek perlindungan konsumen terkait hasil *monitoring* penawaran

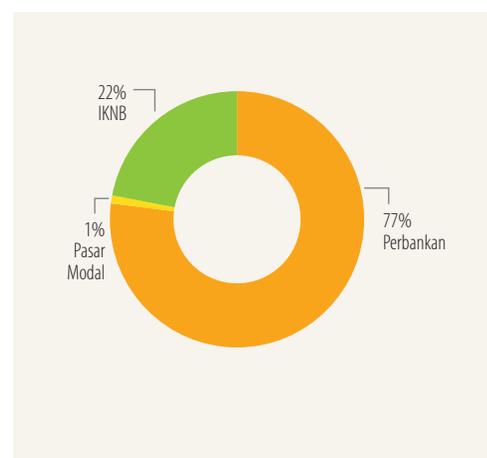
iklan melalui SIPMI (Sistem Informasi Pelaporan *Market Intelligence*) dan selanjutnya dikonfirmasi melalui kegiatan pengamatan lapangan melalui *mystery calling* dan *mystery shopping*.

Temuan kualitatif menunjukkan bahwa terdapat petugas *customer service* kurang mengetahui program yang ditawarkan melalui iklan (*lack of knowledge*) akibat tidak meratanya distribusi informasi terkait penawaran iklan. Hal ini merugikan konsumen karena harus menunggu lama dan menghabiskan biaya pulsa lebih banyak.

Secara statistik kuantitatif, iklan produk dan layanan di media cetak dominasi sektor perbankan dalam beriklan sejumlah 1.655 iklan produk dan layanan jasa keuangan dengan rincian sektor Perbankan sebesar 77% (1.269 iklan), disusul oleh sektor Industri Keuangan Non Bank (IKNB) sebesar 22% (365 iklan), dan Pasar Modal sebesar 1% (21 iklan).

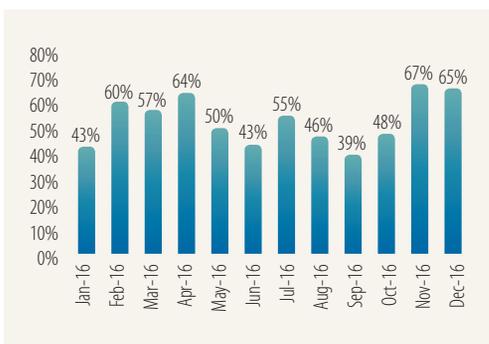
Dari seluruh iklan produk dan layanan PUJK yang ada, terdapat 864 iklan (52%) diduga melanggar ketentuan. Berikut ini grafik tren pelanggaran secara umum:

**Grafik II - 21 Akumulasi Iklan Berdasarkan Sektor**



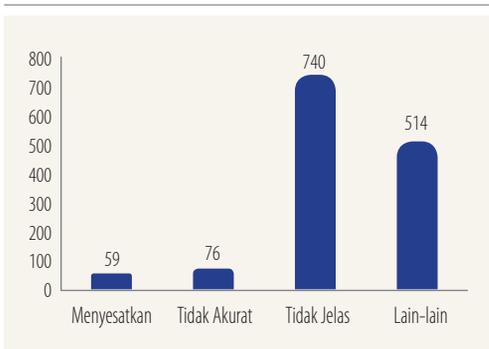
Jumlah iklan yang melanggar adalah sebanyak 1.389 iklan. Data tersebut

**Grafik II - 22** Tren Pelanggaran



menggambarkan bahwa setidaknya ada 525 (61%) iklan yang melanggar lebih dari satu kategori pelanggaran. Pelanggaran yang paling banyak terjadi adalah pada kategori “tidak jelas” yang disebabkan tidak jelasnya informasi maupun syarat dan ketentuan yang berlaku yang semestinya diketahui oleh konsumen dan masyarakat

**Grafik II - 23** Klasifikasi Dugaan Pelanggaran

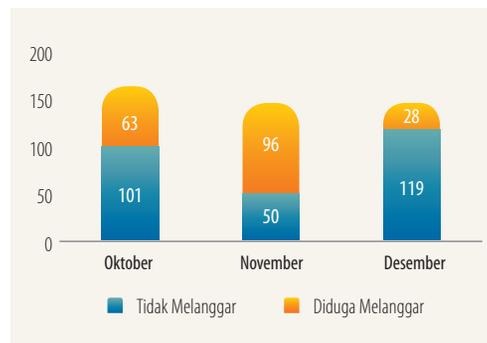


**MONITORING BERITA DAN IKLAN PUJK**

OJK melakukan pemantauan iklan melalui Sistem Informasi Pelaporan *Market Intelijen* (SIPMI) yang menghimpun iklan terkait produk dan/atau jasa keuangan di 45 media cetak yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Secara umum, kriteria yang digunakan dalam pemantauan iklan adalah jelas, jujur, akurat dan tidak menyesatkan. Di samping itu, terdapat ketentuan bahwa setiap iklan PUJK wajib mencantumkan PUJK tersebut merupakan PUJK yang diatur dan diawasi oleh OJK yang dikategorikan “lain-lain”.

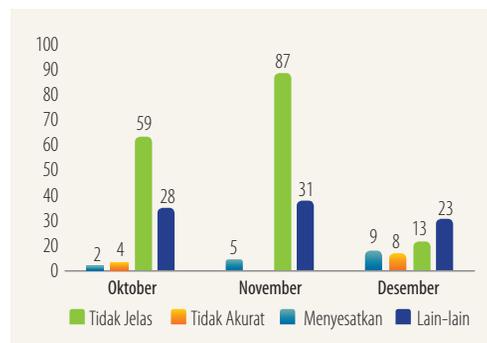
Pada periode laporan, terdapat 457 iklan berkaitan dengan produk dan/atau jasa keuangan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 187 iklan diduga melanggar ketentuan. Tren dugaan pelanggaran iklan dapat dilihat pada grafik berikut:

**Grafik II - 24** Tren Dugaan Pelanggaran Iklan Triwulan IV Tahun 2016



Dapat disimpulkan bahwa dugaan pelanggaran mengalami peningkatan pada bulan November dan menurun drastis di Bulan Desember. Hal ini diduga karena PUJK gencar melakukan pencapaian target menjelang tutup tahun, sehingga cenderung mengabaikan aspek perlindungan konsumen.

**Grafik II - 25** Tren Dugaan Pelanggaran Iklan per Kategori Pelanggaran Triwulan IV Tahun 2016



Dapat dilihat bahwa kategori yang paling banyak dilanggar adalah tidak jelas dan lain-lain. Masih banyak PUJK yang tidak memberikan informasi lengkap terhadap terkait penawaran yang dilakukan melalui iklan di media massa. Hal ini terjadi karena PUJK memang memiliki maksud menyembunyikan sebagian informasi atau atas dasar estetika. Namun, dapat diamati

dari pola dugaan pelanggaran bahwa iklan cenderung melakukan kesalahan yang sama secara berulang. Hal ini dapat mengindikasikan keterbatasan pemahaman PUJK terkait beleid yang mengatur iklan produk dan/atau layanan jasa keuangan.

Kategori lain-lain yang harus mencantumkan bahwa lembaga keuangan terkait terdaftar dan diawasi oleh OJK juga menjadi salah satu kategori dengan dugaan pelanggaran terbanyak. Sementara itu, dugaan pelanggaran kategori tidak akurat dan menyesatkan cenderung rendah. Hal ini diduga terjadi karena maraknya klaim produk dan atau layanan keuangan terbaik oleh PUJK serta persaingan yang semakin ketat. *Rating* dan penilaian sebagai yang terbaik mulai dilakukan oleh PUJK dengan mencantumkan referensi *valid* untuk menarik kepercayaan konsumen.

**KAJIAN MARKET CONDUCT**

OJK telah menyelesaikan penelitian tentang penilaian risiko *market conduct* untuk sektor perbankan, perasuransian, pembiayaan, dan Pasar Modal yang bekerja sama dengan akademisi. Adapun hasil penelitian ini untuk mengidentifikasi indikator-indikator risiko dan melakukan penilaian risiko *market conduct* untuk masing-masing PUJK.

Penyusunan penilaian risiko untuk masing-masing PUJK menggunakan pendekatan *Conduct Risk Matrix* (CRM), yang meliputi penilaian *inherent risk, processes, control assessment, governance* dan *culture*. Selanjutnya, penilaian ini digunakan untuk mengelompokkan PUJK berdasarkan tingkat risikonya. Sementara itu, indikator-indikator risiko yang digunakan antara lain jumlah dana kelolaan dan jasa kustodian, jumlah dan tipe nasabah, jumlah produk yang dimiliki oleh PUJK, jumlah rekening per produk, volume produk yang dijual dan tercatat, volume produk tidak tercatat.

**2.6 PENYIDIKAN SEKTOR JASA KEUANGAN**

Rangka mewujudkan kegiatan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK melakukan langkah-langkah yang berkesinambungan untuk memenuhi infrastruktur baik dari segi sumber daya manusia dan pendukung kebijakan di bidang tindak pidana di sektor jasa keuangan.

**2.6.1 Koordinasi dengan Instansi Terkait**

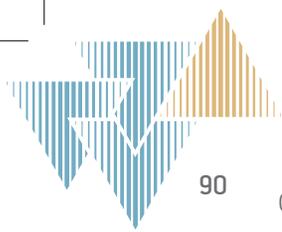
Untuk memperkuat langkah penyidikan dan dalam rangka membangun sistem peradilan pidana yang kredibel OJK telah menggelar koordinasi penandatanganan Nota Kesepakatan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang dalam penanganan perkara di sektor jasa keuangan. Dengan adanya pedoman tersebut dapat mewujudkan penegakan hukum yang efektif sehingga penindakan yang dilakukan menjadi terarah khususnya dalam membangun kestabilan sistem perekonomian.

**2.6.2 Penanganan Perkara**

Selama periode laporan, OJK menerima jumlah perkara dan/atau pengaduan sebagai berikut:

**Tabel II - 38** Perkara atau Pengaduan Berdasarkan Sektor

Sumber	Perkara			Total
	Perbankan	Pasar Modal	IKNB	
Intenal OJK (Pengawas OJK)	109	6	0	115
Eksternal	6	8	5	19
<b>Total</b>	<b>115</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>134</b>



Sampai akhir periode pelaporan, OJK menerbitkan 14 SPRINDIK yang terdiri dari 10 perkara perbankan dan empat perkara Pasar Modal. Dari 14 perkara tersebut, terdapat tujuh berkas yang dilimpahkan kepada Kejaksaan RI yang terdiri dari empat perkara BPR dan tiga perkara BPD. Modus dari jumlah kasus eksternal tersebut adalah pencatatan palsu, mengubah/mengaburkan/menghapus suatu pencatatan, transaksi tanpa merubah kepemilikan, penyajian informasi yang tidak benar, dan klaim asuransi yang melebihi nilai dari jumlah penilaian.

### 2.6.3 Sosialisasi Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan

Sampai periode pelaporan OJK melakukan sosialisasi tindak pidana di sektor jasa keuangan kepada 12 kepolisian di daerah, yaitu dengan Polda Riau, Polda Nusa Tenggara Timur, Polda Kalimantan Timur, Polda Jawa Timur, Polda Banten, Polda Maluku, Polda Bali, Polda Jawa Tengah, Polresta Malang, Polda Kalimantan Tengah, Polda Aceh dan Polda Sumatera Barat. Kegiatan tersebut bertujuan mendukung pelaksanaan fungsi penyidikan dan dalam rangka mendukung kegiatan penyelidikan dan penyidikan di bidang tindak pidana sektor jasa keuangan.

### 2.6.4 Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi (Satgas Waspada Investasi)

Sampai akhir periode laporan, total jumlah pengaduan yang masuk melalui *email* Satgas Waspada Investasi sejumlah 426 pengaduan yang terdiri atas 121 Entitas. Selanjutnya, telah dilakukan penanganan sejumlah 31 kasus dan telah ditindaklanjuti dengan tindakan

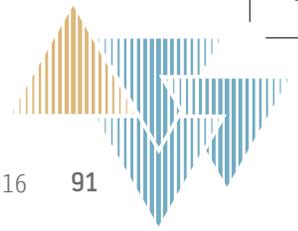
pembinaan oleh instansi terkait atau penegakan hukum oleh Kepolisian. Modus dari jumlah kasus tersebut diantaranya adalah penawaran surat pelunasan hutang debitur, penawaran investasi emas dan haji, penawaran investasi pemasangan iklan *online*, *direct selling* dan simpan pinjam dana dalam bentuk koperasi.

Selain itu, sampai dengan periode laporan, Satgas Waspada Investasi telah melakukan sosialisasi waspada investasi yang diduga ilegal kepada masyarakat di 11 daerah yakni Pekanbaru, Kupang, Balikpapan, Surabaya, Serang, Ambon, Semarang, Malang, Palangkaraya, Aceh dan Padang.

Selanjutnya, OJK juga melakukan siaran pers guna memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan kegiatan investasi ilegal yang merugikan masyarakat dan perkembangan penanganannya melalui media massa. Sampai dengan periode laporan, OJK telah melakukan sembilan siaran pers di berbagai media.

### 2.6.5 Tim Kerja Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi Daerah (Tim Kerja Satgas Waspada Investasi Daerah)

Selama periode laporan, OJK membentuk Tim Kerja Satgas Waspada Investasi Daerah yang bertujuan memberi rasa aman bagi masyarakat dalam melakukan investasi keuangan dan masyarakat dapat melakukan antisipasi lebih awal terhadap tawaran investasi yang diduga ilegal, serta dalam rangka pencegahan dan percepatan penanganan kasus investasi ilegal. Tim Kerja Satgas Waspada Investasi Daerah telah dibentuk di 38 Tim Kerja Satgas Waspada Investasi Daerah baik di tingkat Provinsi/ Kabupaten maupun Kota.



## 2.7 PENANGANAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

Beberapa kegiatan dilakukan oleh OJK untuk mendukung penanganan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme antara lain melalui harmonisasi pengaturan, pengembangan *risk based supervisory tools* dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Detail kegiatan dapat dijabarkan sebagai berikut:

### 2.7.1 Harmonisasi Pengaturan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan

OJK melakukan harmonisasi dan *legal drafting* atas rancangan peraturan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan.

### 2.7.2 Pengembangan *Risk Based Supervisory Tools* dalam Pengawasan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan

Selama periode laporan, OJK melakukan finalisasi atas konsep *RBS Tools*. Peraturan ini menjadi pedoman bagi pengawasan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, untuk memastikan bahwa pelaksanaan pengawasan dilakukan sesuai dengan penilaian risiko dari industri jasa keuangan, yang meliputi faktor risiko dari sisi kelembagaan Lembaga Jasa Keuangan, faktor risiko yang mencerminkan kinerja Lembaga Jasa Keuangan, dan faktor risiko yang menilai skala mitigasi risiko dari lingkungan pengendalian internal Lembaga Jasa Keuangan.

### 2.7.3 Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Pengembangan kapasitas sumber daya manusia terkait program APU PPT telah dilaksanakan dalam beberapa rangkaian kegiatan antara lain:

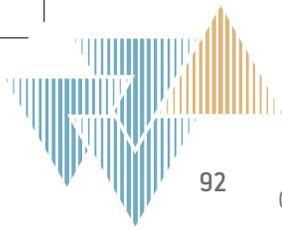
#### 1. Kegiatan *capacity building* bagi Pengawas

Pada periode laporan, OJK menyelenggarakan acara *In-House Training* (IHT) angkatan kedua terkait pengawasan program APU PPT bagi para pengawas OJK, serta acara *Sharing Session* Pemahaman Terhadap Risiko Pendanaan Terorisme dan Tipologi Terkait, *Issues* Terkini Program APU PPT dan *Regulatory Exchange Program* (REP) untuk Pengawas Sektor Jasa Keuangan. Kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka program peningkatan kualitas pengawasan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

#### 2. Kegiatan *capacity building* bagi para pelaku usaha di sektor jasa keuangan

Bekerjasama dengan Kantor OJK di daerah, telah dilakukan sosialisasi terkait penerapan program APU PPT kepada industri jasa keuangan di beberapa daerah antara lain Bengkulu, Padang, Batam, Lampung, Aceh, dan Palu.

Pada periode laporan, OJK menyelenggarakan *Training of Trainers* mengenai penerapan program APU PPT yang diikuti oleh pelaku usaha di sektor pasar modal. Kegiatan *Training of Trainers* dimaksud juga diselenggarakan bagi perwakilan pejabat Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang berasal dari seluruh Indonesia. Kegiatan tersebut merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan *recycling program* OJK yang bertujuan supaya peserta kegiatan mampu menyampaikan kembali materi dengan tepat kepada industrinya, serta dalam rangka penguatan penerapan program APU PPT dan persiapan dalam menghadapi *Mutual Evaluation Review* (MER) untuk menilai kepatuhan Indonesia terhadap pemenuhan Rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF).



## 2.8 HUBUNGAN KELEMBAGAAN

Sesuai dengan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, kedudukan OJK sebagai lembaga negara tidak sejajar dengan lembaga tinggi negara lain seperti Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pemeriksa Keuangan. Kedudukan OJK juga tidak sama dengan Kementerian, mengingat kedudukan OJK yang berada di luar pemerintahan. Adapun status dan kedudukan khusus tersebut diperlukan agar OJK dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang independen. Walau demikian, OJK tetap memiliki hubungan kerja dan koordinasi yang baik antar lembaga dengan DPR, BPK, Pemerintah, BI, LPS, serta pihak lainnya. Hubungan baik dan koordinasi antar lembaga tentunya tidak dapat dihindari demi tercapainya tujuan OJK secara optimal.

### 2.8.1 Kerjasama Domestik

Selama periode ini, OJK menjalin hubungan kelembagaan dengan menyelenggarakan 40 kegiatan kelembagaan bersama yang melibatkan beberapa lembaga negara. Kegiatan kelembagaan yang telah dilakukan mencakup antara lain *Focus Group Discussion* (FGD) mengenai program inklusi keuangan, Penguatan TPAKD dan Satgas Waspada Investasi, implementasi KUR, perkembangan perekonomian daerah, peningkatan UMKM, pendampingan kunjungan kerja DPR, dan sosialisasi mengenai peran, fungsi, dan kinerja OJK bekerja sama dengan lembaga lain.

### 2.8.2 Kerjasama Internasional

#### 1. Peningkatan Kerjasama Kelembagaan dengan Pengawas Industri Jasa Keuangan Asing

- a. Penyelenggaraan *Dialogue Meeting* dengan *Bank of Thailand*  
*Dialogue Meeting* merupakan kesempatan bagi para pemangku kepentingan untuk saling diskusi, menggali potensi ekonomi di Thailand

dan mengkaji peluang perbankan Indonesia dan Thailand. Kegiatan ini dihadiri oleh peserta dari Thailand: Kedutaan besar Kerajaan Thailand di Indonesia, Industri Sektor Swasta Thailand, BoT (*Bank of Thailand*). Komite ASEAN dan Thailand, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), Perhimpunan Bank Swasta Nasional (Perbanas), dan Bank BUKU 4

- b. Penyelenggaraan dialog tahunan OJK dengan *Jakarta Japan Club Financial Services Committee* (JJCFSC)

Dialog tahunan ini dilaksanakan sebagai sarana memperdalam pengetahuan pelaku industri Jepang di Indonesia atas regulasi serta inisiatif OJK agar dapat memberikan kontribusi yang lebih baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Adapun topik yang diangkat adalah "*Promoting Financial Inclusion Through Financial Technology*".

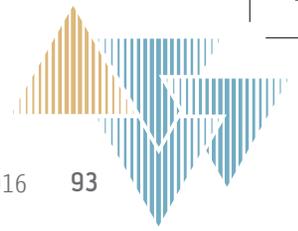
#### 2. Focus Grup Discussion "Menggali Potensi Sukuk Diaspora untuk Pembangunan Indonesia"

Kegiatan diskusi dilakukan membahas ini mengenai sukuk diaspora mengingat pemerintah sedang membutuhkan dana yang sangat besar untuk mempersiapkan infrastruktur yang dapat menggerakkan kegiatan ekonomi di masyarakat serta untuk memasyarakatkan sukuk sebagai alternatif investasi bagi diaspora Indonesia.

#### 3. Koordinasi Pembahasan OJK Pusat Keuangan Mikro dan Inklusi keuangan (OJK-PROKSI)

Selama periode laporan, OJK melakukan pembahasan mengenai perkembangan dan kendala-kendala yang dialami OJK Pusat Keuangan Mikro dan Inklusi keuangan (OJK-PROKSI) Adapun hal-hal yang telah disusun antara lain:

- a. Perlu adanya pembahasan legalisasi kelembagaan OJK-PROKSI;



- b. Menindaklanjuti pertemuan OJK-PROKSI dan intermediasi terkait rencana pelaksanaan program *capacity building* mengenai metode perhitungan Indeks Inklusi Keuangan,
- c. Menindaklanjuti pertemuan OJK dan IRTI-IDB terkait program *Islamic Microfinance for Poverty Alleviation and Capacity Transfer* (IMPACT) maka perlu diadakan pertemuan kembali dalam waktu dekat.

#### 4. Penyelenggaraan Seminar Nasional Masyarakat Ekonomi Syariah di Perbanas Institute.

OJK terus melakukan sosialisasi ke perguruan tinggi untuk memberikan pemahaman dan mendorong penguatan kompetensi SDM sejak dini dalam memasuki MEA. Terkait dengan hal tersebut, OJK menyelenggarakan Seminar Nasional Masyarakat Ekonomi Syariah yang diselenggarakan di Perbanas Institute untuk mencetak SDM unggul, berkarakter dan memiliki etos kerja tinggi. Selanjutnya, demi mendorong kelangsungan kegiatan tersebut OJK bekerjasama dengan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) sebagai salah satu *stakeholder* Ekonomi Syariah di Indonesia, melakukan *roadshow* terkait MEA ke beberapa universitas dengan mengusung tema "Strategi Penguatan Kompetensi SDM di Bidang Keuangan Syariah pada Era MEA".

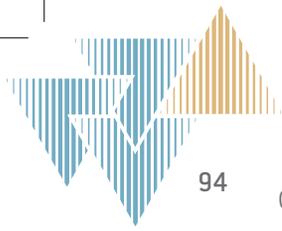
## 2.9 HUBUNGAN KOORDINASI KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER

Dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional, selama triwulan IV-2016, OJK melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait termasuk melalui wadah Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Terkait kegiatan KSSK selama triwulan IV-2016, telah dilaksanakan dua kali rapat KSSK dan tiga kali *Deputies Meeting*. Salah satu pembahasan rapat adalah mengenai rencana revisi Peraturan Dewan Komisiner (PDK) tentang Protokol Manajemen Krisis (PMK) OJK tahun 2017. Rapat tersebut bertujuan untuk membahas rencana penyesuaian PDK PMK OJK yang diselaraskan dengan Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK) 2017.

Dalam upaya mendukung penentuan status Tekanan Stabilitas Sistem Keuangan oleh rapat KSSK, rapat tersebut juga membahas mengenai usulan Sekretariat KSSK terkait penggunaan beberapa indikator utama untuk mengindikasikan terjadinya peningkatan tekanan SSK. Sebagian dari berbagai indikator PMK yang akan diusulkan menjadi indikator PMK bersama dalam KSSK, berasal dari OJK.

Sebagai tindak lanjut dari rapat pembahasan tersebut, Koordinator *surveillance* masing-masing satker di OJK akan melakukan koordinasi internal dalam rangka *me-review* indikator PMK sektoral.





## **Tinjauan Industri dan Operasional Sektor Jasa Keuangan Syariah**



5 POJK yang mengatur 3 Perbankan Syariah,  
1 Pasar Modal Syariah dan 1 IKNB Syariah



Kajian Pengembangan Pertanian Organik dengan  
Pembiayaan Syariah

Kajian Metodologi Pemeringkatan Sukuk

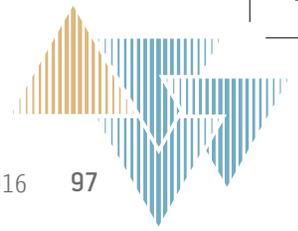
Kajian Pengembangan Sukuk Daerah

Kajian Materi Pasar Modal Syariah Dalam  
Kurikulum Pendidikan Tinggi



Keuangan Syariah Fair (KSF) dilaksanakan  
di Makassar

Seminar Nasional Riset Perbankan Syariah



## Tinjauan Industri dan Operasional Sektor Jasa Keuangan Syariah

III

### 3.1 TINJAUAN INDUSTRI KEUANGAN SYARIAH

#### 3.1.1 Perkembangan Perbankan Syariah

Pada triwulan IV-2016, total aset Badan Unit Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) mengalami peningkatan sebesar 2,28% atau Rp7,58 triliun dari triwulan sebelumnya menjadi sebesar Rp339,34 triliun. Total aset BUS dan UUS masing-masing meningkat Rp4,42 triliun dan Rp2,86 triliun. Pertumbuhan aset didukung oleh pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan pembiayaan masing-masing sebesar 2,64% dan 2,29% menjadi Rp270,48 triliun dan Rp240,38 triliun.

Secara umum kualitas pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah membaik, tercermin dari penurunan rasio NPF (*gross*) sebesar 2 *bps* menjadi 4,29%. Peningkatan jumlah pembiayaan pada triwulan IV-2016 juga mempengaruhi rentabilitas BUS dan UUS sehingga nilai rasio ROA mengalami peningkatan menjadi sebesar 1,13%. Peningkatan DPK dan pembiayaan pada triwulan IV-2016 menjadikan rasio *Financing to Deposit Ratio*

(FDR) BUS dan UUS turun menjadi 88,87% dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal ini mengindikasikan ekspansi pembiayaan bank yang besar diimbangi dengan sumber dana (*funding*) yang cukup sehingga bank memiliki kemampuan likuiditas semakin baik.

Permodalan BUS pada triwulan IV-2016 mengalami perbaikan terlihat dari peningkatan rasio CAR menjadi 15,78% karena adanya penambahan modal disetor pada triwulan IV-2016. Di sisi jaringan kantor, pada BUS dan UUS masih melanjutkan upaya efisiensi dengan memanfaatkan stimulus regulasi terkait pembukaan layanan syariah. Jumlah jaringan kantor BUS dan UUS pada triwulan IV-2016 berkurang sebanyak 34 kantor menjadi 2.176 kantor.

Pangsa pasar aset perbankan syariah terhadap aset perbankan nasional meningkat 0,03% menjadi 5,20%. Peningkatan pangsa pasar ini dilatarbelakangi pertumbuhan (*qtq*) aset Bank Syariah sebesar 2,28% yang lebih tinggi dari Bank Konvensional sebesar 1,80%. Proporsi aset BUS dan UUS masih didominasi total aset perbankan syariah (BUS+UUS+BPRS) dengan persentase sebesar 97,44%.

**Tabel III - 1** Indikator Perbankan Syariah

Indikator Utama	Triwulan	Triwulan	Triwulan	Triwulan	Triwulan	Pertumbuhan (q-t-q)	
	IV-2015	I-2016	II-2016	III-2016	IV-2016*	Nominal	%
<b>PANGSA PASAR TOTAL ASET BUS + UUS + BPRS</b>							
Total aset BUS + UUS (Rp. T)	296,26	297,77	306,22	331,76	339,34	7,58	2,28
Total aset BPRS (Rp. T)	7,74	7,95	8,12	8,60	8,90	0,30	3,44
Pangsa Pasar Aset Perbankan Syariah (BUS+UUS+BPRS) terhadap Total Perbankan Indonesia (BUS+BUK+BPRS+BPR)	4,87	4,87	4,85	5,17	5,20		0,03
<b>BUS + UUS</b>							
DPK (Rp. T)	231,18	232,66	241,34	263,52	270,48	6,96	2,64
- Giro	21,19	19,71	23,84	29,07	29,94	0,87	2,99
- Tabungan	68,65	68,07	70,24	78,35	80,20	1,84	2,35
- Deposito	141,33	144,88	147,25	156,10	160,34	4,24	2,72
Pembiayaan (Rp. T)	213,00	213,48	222,17	235,01	240,38	5,38	2,29
Jumlah NPF (Rp T)	9,25	10,44	11,23	10,14	10,31	0,17	1,71
CAR (%) – BUS	15,02	14,90	14,72	15,43	15,78		0,36
NPF Gross (%)	4,34	4,89	5,05	4,31	4,29		-0,02
ROA (%)	0,84	1,26	1,11	0,59	1,13		0,54
BOPO (%)	94,38	91,16	92,36	92,83	92,37		-0,45
FDR (%)	92,14	91,76	92,06	89,18	88,87		-0,31
<b>Jumlah Bank</b>							
- BUS	12	12	12	13	13	-	-
- UUS	22	22	22	21	21	-	-
Jumlah Kantor	2301	2230	2129	2210	2176	(34)	-1,54
<b>BPRS</b>							
DPK (Rp. T)	4,80	4,97	5,00	5,44	5,67	0,23	4,31
Pembiayaan (Rp. T)	5,77	5,97	6,46	6,45	6,59	0,14	2,22
Jumlah NPF (Rp T)	0,47	0,56	0,59	0,68	0,67	-0,01	-1,09
CAR (%)	21,47	22,15	20,22	20,72	20,78		0,05
NPF Gross (%)	8,20	9,18	9,18	10,47	10,13		-0,34
ROA (%)	2,20	2,52	2,18	2,45	2,34		-0,11
BOPO (%)	88,09	89,20	87,94	87,91	87,66		-0,24
FDR (%)	120,06	120,25	129,35	118,63	116,26		-2,37
<b>Jumlah Bank</b>	<b>163</b>	<b>165</b>	<b>165</b>	<b>164</b>	<b>164</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Jumlah Kantor</b>	<b>446</b>	<b>454</b>	<b>428</b>	<b>430</b>	<b>453</b>	<b>23</b>	<b>5,35</b>

Sumber : Data Statistik Perbankan Indonesia dan Sistem Informasi Perbankan Syariah, November 2016

### 3.1.2 Perkembangan Industri Pasar Modal Syariah

Selama triwulan IV-2016, Pasar Modal Syariah mengalami perkembangan terlihat dari peningkatan jumlah sukuk korporasi beredar baik dalam sisi jumlah maupun nilainya. Peningkatan juga terjadi pada jumlah serta NAB dari Reksa Dana Syariah beredar. Namun, dari sisi indeks ISSI dan JII, baik indeks dan kapitalisasi, mengalami penurunan mengikuti penurunan IHSG.

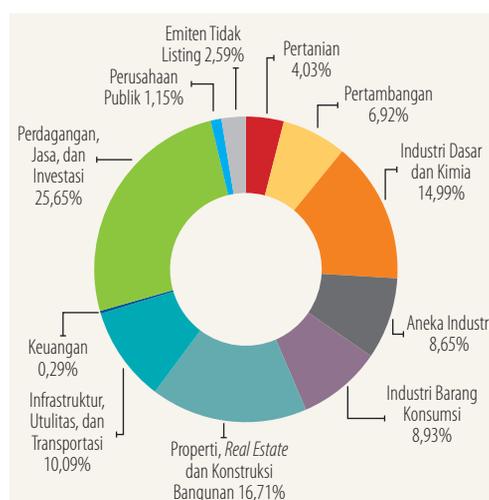
#### A. Perkembangan Saham Syariah

Sebagai salah satu upaya strategis pengembangan produk berbasis syariah di Pasar Modal, selama 2016 OJK menerbitkan Daftar Efek Syariah (DES) untuk periode I-2016 dan DES periode II-2016. Efek syariah yang termuat dalam DES periode I-2016 meliputi 321 Efek jenis Saham Emiten dan Perusahaan Publik serta Efek syariah lainnya dan DES periode II meliputi 345 Efek jenis Saham Emiten dan Perusahaan Publik serta Efek syariah lainnya.

Sejak diterbitkannya DES Periode II, terdapat penambahan dua saham yang masuk dalam DES yang diperoleh dari hasil penelaahan DES insidental bersamaan dengan efektifnya pernyataan pendaftaran Emiten yang melakukan penawaran umum perdana saham. Secara keseluruhan, saham yang termasuk dalam DES berjumlah 347 saham.

Mayoritas Saham Syariah bergerak dalam sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi (25,65%), sektor Properti, Real Estate & Konstruksi (16,71%), sektor Industri Dasar dan Kimia (14,99%), sektor Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi (10,09%) dan sektor-sektor lainnya masing-masing di bawah 10%.

**Grafik III - 1** Sektor Industri Saham Syariah di Indonesia



Sampai akhir 2016, ISSI ditutup pada level 172,08 menurun 6,61% dibandingkan akhir triwulan sebelumnya. Sementara itu, kapitalisasi pasar saham ISSI sebesar Rp3.170,06 triliun atau 55,04% dari total kapitalisasi pasar seluruh Saham. Kapitalisasi pasar Saham ISSI tersebut menurun 2,43% dibandingkan akhir periode triwulan sebelumnya.

**Tabel III - 2** Perkembangan Kapitalisasi Saham Syariah (dalam jutaan rupiah)

Tahun	Jakarta Islamic Index	Indeks Saham Syariah Indonesia	Indeks Harga Saham Gabungan	
2010	1.134.632,00	-	3.247.096,78	
2011	1.414.983,81	1.968.091,37	3.537.294,21	
2012	1.671.004,23	2.451.334,37	4.126.994,93	
2013	1.672.099,91	2.557.846,77	4.219.020,24	
2014	1.944.531,70	2.946.892,79	5.228.043,48	
2015	1.737.290,98	2.600.850,72	4.872.701,66	
2016	Triwulan I	1.879.354,35	2.796.012,59	5.143.453,35
	Triwulan II	1.964.048,11	3.029.643,77	5.187.528,91
	Triwulan III	2.188.117,33	3.249.148,53	5.799.220,96
	Triwulan IV	2.035.189,92	3.170.056,08	5.753.612,76

**Tabel III - 3** Perkembangan Indeks Saham Syariah

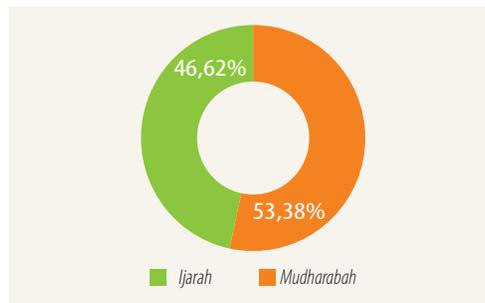
Tahun	Jakarta Islamic Index	Indeks Saham Syariah Indonesia	Indeks Harga Saham Gabungan	
2010	532,90	-	3.703,51	
2011	537,03	125,36	3.821,99	
2012	594,78	144,99	4.316,69	
2013	585,11	143,71	4.274,18	
2014	691,04	168,64	5.226,95	
2015	603,35	145,06	4.593,01	
2016	Triwulan I	652,68	155,91	4.845,37
	Triwulan II	694,34	165,94	5.016,65
	Triwulan III	739,69	176,93	5.364,80
	Triwulan IV	694,13	172,08	5.296,71

## B. Perkembangan Sukuk Korporasi

Selama triwulan IV-2016 terdapat penerbitan empat seri Sukuk Korporasi dengan total nilai sebesar Rp 1.500 miliar. Selain itu, terdapat satu seri Sukuk Korporasi yang jatuh tempo. Dengan demikian, jumlah *outstanding* Sukuk Korporasi menjadi sebanyak 53 seri atau meningkat sebesar 3,92% dibandingkan dengan periode sebelumnya. Nilai *outstanding* pada triwulan IV-2016 sebesar Rp 11,87 triliun atau meningkat sebesar 7,55% dibandingkan triwulan sebelumnya.

Sampai akhir triwulan IV-2016 Sukuk Korporasi menggunakan dua jenis akad yaitu akad *ijarah* dan *mudharabah*. Dari 53 Sukuk Korporasi yang *outstanding* saat ini, terdapat 35 sukuk korporasi (66,04%) yang menggunakan akad *ijarah* dan 18 sukuk korporasi (33,96%) menggunakan akad *mudharabah* dengan nilai mencapai Rp.5,53 triliun (46,62%) untuk *ijarah* dan Rp6,34 triliun (53,38%) untuk *mudharabah*.

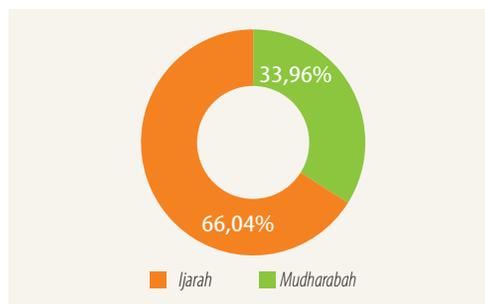
**Grafik III - 3** Perbandingan Jumlah Sukuk *Outstanding* Berdasarkan Jenis Akad



**Tabel III - 4** Perkembangan Emisi Sukuk Korporasi

Tahun	Emisi Sukuk		Sukuk <i>Outstanding</i>		
	Total Nilai (dalam miliar rupiah)	Total Jumlah	Total Nilai (dalam miliar rupiah)	Total Jumlah	
2010	7.815	47	6.121	32	
2011	7.915	48	5.876	31	
2012	9.790	54	6.883	32	
2013	11.994	64	7.553	36	
2014	12.956	71	7.105	35	
2015	16.114	87	9.902	47	
2016	Triwulan I	16.114	87	9.516	45
	Triwulan II	18.014	91	11.111	45
	Triwulan III	18.925	97	11.044	51
	Triwulan IV	20.425	102	11.878	53

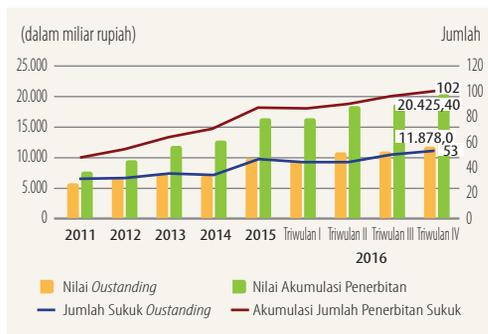
**Grafik III - 4** Perbandingan Nilai Sukuk *Outstanding* Berdasarkan Jenis Akad



**C. Perkembangan Reksa Dana Syariah**

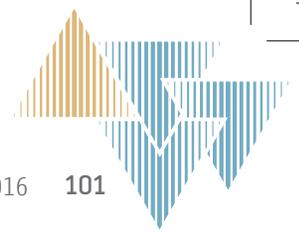
Selama triwulan IV-2016 terdapat 14 Reksa Dana Syariah efektif terbit, sehingga total Reksa Dana Syariah yang beredar sebanyak 136 dengan NAB sebesar Rp14,91 triliun atau meningkat 10,57% dari sisi jumlah dan meningkat 23,39% dari sisi NAB dibanding periode triwulan sebelumnya. Proporsi jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah terhadap total industri Reksa Dana masing-masing mencapai 9,54% dari total 1.425 Reksa Dana dan 4,40% dari total NAB Reksa Dana sebesar Rp338,75 triliun.

**Grafik III - 2** Perkembangan Penerbitan Sukuk Korporasi dan Sukuk Korporasi *Outstanding*

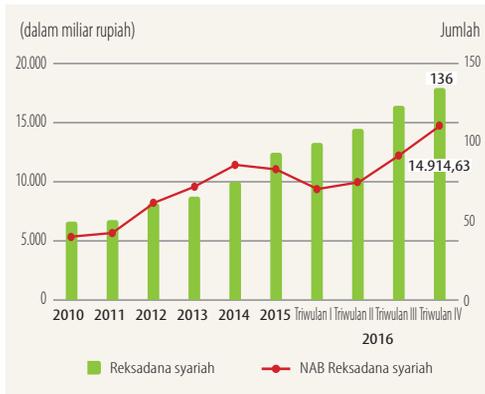


**Tabel III - 5** Perkembangan Reksa Dana Syariah

Tahun	Perbandingan Jumlah Reksa Dana				Perbandingan NAB (dalam miliar rupiah)			
	Reksa Dana Syariah	Reksa Dana Konvensional	Reksa Dana Total	%	Reksa Dana Syariah	Reksa Dana Konvensional	Reksa Dana Total	%
2010	48	564	612	7,84%	5.225,78	143.861,59	149.087,37	3,51%
2011	50	596	646	7,74%	5.564,79	162.672,10	168.236,89	3,31%
2012	58	696	754	7,69%	8.050,07	204.541,97	212.592,04	3,79%
2013	65	758	823	7,90%	9.432,19	183.112,33	192.544,52	4,90%
2014	74	820	894	8,31%	11.236,00	230.225,59	241.462,09	4,65%
2015	93	998	1.091	8,52%	11.019,43	260.949,57	271.969,00	4,05%
2016	Triwulan I	99	1.051	8,61%	9.433,71	283.879,95	293.313,66	3,22%
	Triwulan II	106	1.120	8,65%	9.901,24	299.540,37	309.441,60	3,20%
	Triwulan III	123	1.224	9,13%	12.087,00	304.629,57	316.716,57	3,82%
	Triwulan IV	136	1.289	9,54%	14.914,63	323.835,18	338.749,81	4,40%



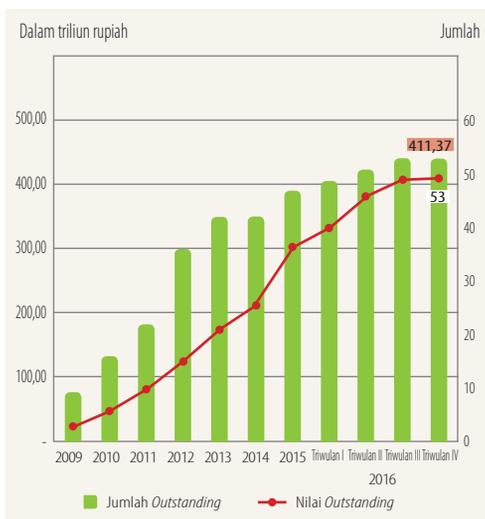
**Grafik III - 5** Perkembangan Jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah



**D. Perkembangan Surat Berharga Syariah Negara**

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara, adalah surat berharga yang diterbitkan oleh negara berdasarkan Prinsip Syariah, sebagai bukti atas penyertaan terhadap aset SBSN baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Sampai akhir triwulan IV-2016, jumlah keseluruhan SBSN *outstanding* sebanyak 53 seri dengan nilai sebesar Rp411,37 triliun.

**Grafik III - 6** Perkembangan Sukuk Negara *Outstanding*



**Tabel III - 6** Perkembangan Surat Berharga Syariah Negara *Outstanding*

Tahun	Nilai <i>Outstanding</i> (dalam triliun rupiah)	Total Jumlah <i>Outstanding</i>	
2010	44,34	16	
2011	77,73	22	
2012	124,44	36	
2013	169,29	42	
2014	206,10	42	
2015	296,07	47	
2016	Triwulan I	367,04	51
	Triwulan II	380,89	51
	Triwulan III	406,12	53
	Triwulan IV	411,37	53

**E. Perkembangan Jasa Syariah di Pasar Modal**

Sampai akhir periode pelaporan, terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam pelayanan jasa di Pasar Modal Syariah antara lain :

- a. 41 Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana Syariah.
- b. Sembilan Pihak yang memperoleh persetujuan dari OJK sebagai Pihak Penerbit DES yaitu: PT CIMB Principal Asset Management, PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, PT BNP Paribas Investment Partners, PT Schroders Investment Management Indonesia, PT Aberdeen Asset Management, PT Bahana TCW Investment Management, PT Mandiri Manajer Investasi, PT Maybank Asset Management dan PT Eastspring Investment Indonesia.
- c. Pihak yang terlibat dalam jasa pelayanan syariah meliputi 13 Bank Kustodian, 12 Perusahaan Efek, 12 Penjamin Emisi Efek, 4 Wali Amanat serta 32 pihak yang telah memperoleh izin Ahli Syariah Pasar Modal dari OJK, dan 29 orang-perseorangan yang menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah dan/atau anggota Tim Ahli Syariah di bidang Pasar Modal.

### 3.1.3 Perkembangan IKNB Syariah

Selama triwulan IV-2016, aset IKNB Syariah mengalami kenaikan sebesar 5,4% dengan Industri Lembaga Pembiayaan syariah mendominasi porsi aset sebesar 41,7%.

**Tabel III - 7** Aset IKNB Syariah  
(dalam triliun rupiah)

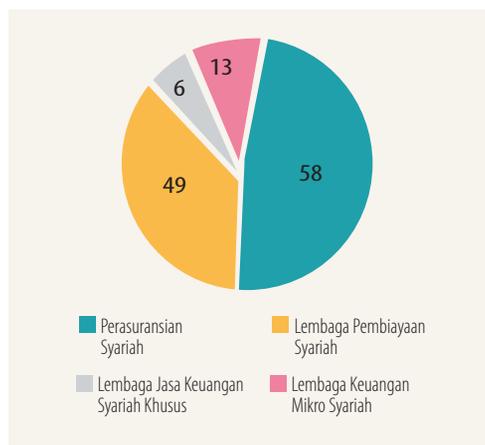
No.	Industri	Triwulan IV-2015	Triwulan I-2016	Triwulan II-2016	Triwulan III-2016	Triwulan IV-2016
1	Perasuransian Syariah	26,52	28,97	30,61	32,99	33,24
2	Lembaga Pembiayaan Syariah	22,83	25,91	30,12	33,90	36,94
3	Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus	15,5	16,47	17,25	17,18	18,43
4	Lembaga Keuangan Mikro Syariah	0,03	0,06	0,06	0,06	0,06
	<b>Total Aset</b>	<b>64,88</b>	<b>71,41</b>	<b>78,03</b>	<b>84,13</b>	<b>88,67</b>

Sampai akhir periode laporan, terdapat 58 perusahaan perasuransian syariah, 49 lembaga pembiayaan syariah, enam lembaga jasa keuangan syariah khusus, dan 13 lembaga keuangan mikro syariah. Selama periode laporan, jumlah entitas IKNB Syariah tidak mengalami perubahan.

**Tabel III - 8** Indikator Perusahaan Perasuransian Syariah  
(dalam triliun rupiah)

No	Jenis Indikator	Triwulan IV-2015	Triwulan I-2016	Triwulan II-2016	Triwulan III-2016	Triwulan IV-2016
1	<b>Total Aset</b>					
	Asuransi Jiwa Syariah	21,61	23,62	24,86	26,87	27,08
	Asuransi Umum Syariah	3,79	4,17	4,54	4,80	4,80
	Reasuransi Syariah	1,12	1,18	1,21	1,32	1,37
	<b>Jumlah</b>	<b>26,52</b>	<b>28,97</b>	<b>30,61</b>	<b>32,99</b>	<b>33,24</b>
2	<b>Total Investasi</b>					
	Asuransi Jiwa Syariah	19,58	21,23	22,46	24,49	24,56
	Asuransi Umum Syariah	2,54	2,69	2,97	3,18	3,16
	Reasuransi Syariah	0,95	0,98	0,97	1,04	1,08
	<b>Jumlah</b>	<b>23,07</b>	<b>24,90</b>	<b>26,40</b>	<b>28,71</b>	<b>28,81</b>
3	<b>Kontribusi Bruto</b>					
	Asuransi Jiwa Syariah	8,81	2,17	4,61	6,92	9,49
	Asuransi Umum Syariah	1,39	0,49	1,12	1,61	2,13
	Reasuransi Syariah	0,29	0,10	0,22	0,33	0,41
	<b>Jumlah</b>	<b>10,49</b>	<b>2,75</b>	<b>5,95</b>	<b>8,86</b>	<b>12,03</b>
4	<b>Klaim Bruto</b>					
	Asuransi Jiwa Syariah	2,60	0,69	1,54	2,46	3,32
	Asuransi Umum Syariah	0,53	0,15	0,36	0,54	0,76
	Reasuransi Syariah	0,22	0,06	0,16	0,20	0,25
	<b>Jumlah</b>	<b>3,34</b>	<b>0,90</b>	<b>2,07</b>	<b>3,20</b>	<b>4,34</b>
5	<b>Kewajiban</b>					
	Asuransi Jiwa Syariah	3,50	3,69	3,43	3,46	3,45
	Asuransi Umum Syariah	1,86	2,10	2,42	2,65	2,56
	Reasuransi Syariah	0,30	0,32	0,37	0,44	0,46
	<b>Jumlah</b>	<b>5,66</b>	<b>6,12</b>	<b>6,22</b>	<b>6,55</b>	<b>6,47</b>

**Grafik III - 7** Jumlah Pelaku IKNB Syariah  
Triwulan IV-2016



#### A. Industri Perasuransian Syariah

Pada triwulan IV-2016, Industri perasuransian syariah mengalami peningkatan nilai aset dan investasi masing-masing sebesar 0,8% dan 0,3% menjadi Rp33,24 triliun dan Rp28,81 triliun. Kontribusi bruto, dan klaim bruto juga mengalami peningkatan masing-masing sebesar 35,7% dan 35,6% menjadi Rp12,03 triliun dan Rp4,34 triliun. Di sisi lain, kewajiban mengalami penurunan sebesar 1,2% menjadi Rp6,47 triliun.

Pengelolaan perusahaan perasuransian syariah dilakukan dalam bentuk *full fledged* dan unit syariah. Sampai akhir periode laporan terdapat 58 perusahaan yang terdiri dari 10 perusahaan asuransi syariah, 45 perusahaan asuransi yang memiliki unit syariah, satu perusahaan reasuransi syariah, dan dua perusahaan reasuransi yang memiliki unit syariah.

### B. Industri Pembiayaan Syariah

Jumlah aset perusahaan pembiayaan syariah pada periode pelaporan mengalami kenaikan sebesar 9,10%.

**Tabel III - 9** Komponen Aset Perusahaan Pembiayaan Syariah (dalam miliar rupiah)

No	Komponen	Triwulan IV-2015	Triwulan I-2016	Triwulan II-2016	Triwulan III-2016	Triwulan IV-2016
1	Kas dan Setara Kas	482,83	488,85	589,90	608,15	643,08
2	Aset Tagihan Derivatif	-	-	-	-	16,77
3	Investasi Jangka Pendek Dalam Surat Berharga	-	-	-	0,00	-
4	Piutang Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah - Neto	20.233,70	23.233,78	26.716,28	29.890,29	33.073,30
5	Penyertaan Modal	-	-	-	-	-
6	Investasi Jangka Panjang Dalam Surat Berharga	-	0,50	-	-	-
7	Aset yang Disewaoperasikan -Neto	-	-	-	125,85	109,00
8	Aset Tetap dan Inventaris - Neto	86,12	83,00	132,00	166,61	151,85
9	Aset Pajak Tangguhan	-	-	-	24,48	19,30
10	Rupa-Rupa Aset	1.547,73	1.646,54	1.596,32	1.942,18	1.727,63
	Aset	22.350,38	25.452,67	29.034,49	32.757,56	35.740,95

Sampai akhir periode laporan, terdapat 41 perusahaan pembiayaan syariah, yang terdiri atas tiga perusahaan berbentuk *full fledged* dan 38 perusahaan berbentuk UUS. Pada perusahaan modal ventura syariah, terdapat empat perusahaan berbentuk *full fledged* dan tiga perusahaan berbentuk UUS dengan total aset sebesar Rp1.092,47 miliar. Selain itu, terdapat satu perusahaan pembiayaan infrastruktur unit syariah dengan aset sebesar Rp104,53 miliar.

### C. Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Jumlah perusahaan penjaminan syariah sebanyak empat perusahaan, terdiri atas dua *full fledged* dan dua UUS dengan total aset sebesar Rp742,29 miliar. Selain itu, aset kegiatan syariah pada PT Pegadaian (Persero) dan LPEI masing-masing sebesar Rp4,57 triliun dan Rp13,11 triliun. Jumlah Lembaga Keuangan Mikro Syariah adalah sebanyak 13 perusahaan berbentuk *full fledged* dengan total aset Rp63,45 miliar.

## 3.2 PENGATURAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH

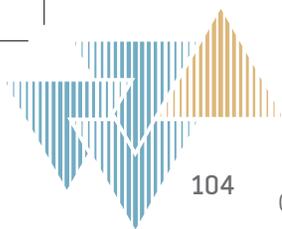
### 3.2.1 Pengaturan Perbankan Syariah

Sepanjang triwulan IV-2016, OJK menerbitkan tiga POJK dan dua SEOJK terkait pengaturan perbankan syariah yaitu:

#### 1. POJK Nomor 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah

Penerbitan POJK ini dimaksudkan untuk mendukung pertumbuhan perekonomian nasional melalui pelayanan bank syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional yang sehat dan kuat. Bentuk pelayanan jasa perbankan syariah bagi masyarakat antara lain perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah. Beberapa pokok pengaturan antara lain (1) Perubahan kegiatan usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah hanya dapat dilakukan dengan izin OJK; (2) BUK yang akan melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi BUS atau BPR yang akan melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi BPRS harus membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS); dan (3) BUK yang akan melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi BUS atau BPR yang akan melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi BPRS harus memenuhi ketentuan mengenai permodalan BUS atau ketentuan mengenai permodalan BPRS.

#### 2. POJK Nomor 65 /POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah



Penerbitan POJK ini dimaksud untuk memberikan panduan penerapan manajemen risiko bagi bank mengingat karakteristik produk dan jasa perbankan syariah memerlukan fungsi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang sesuai dengan kegiatan usaha perbankan syariah. Beberapa pokok pengaturan antara lain (1) Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif; (2) Penerapan Manajemen Risiko untuk BUS dilakukan secara individu maupun konsolidasi dengan Perusahaan Anak; dan (3) Penerapan Manajemen Risiko untuk UUS dilakukan terhadap seluruh kegiatan usaha UUS, yang merupakan satu kesatuan dengan penerapan Manajemen Risiko pada BUK;

### **3. POJK Nomor 66 /POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah**

POJK ini dimaksud untuk mewujudkan industri BPRS yang sehat, kuat, dan produktif, diperlukan penyesuaian terhadap struktur permodalan agar sejalan dengan praktik terbaik perbankan. Penyesuaian struktur permodalan BPRS dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan BPRS dalam menyediakan dana bagi sektor riil terutama bagi usaha mikro dan kecil. Beberapa pokok pengaturan antara lain:

- (1) BPRS wajib menyediakan modal minimum yang dihitung menggunakan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) paling rendah sebesar 12% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) sejak 1 Januari 2020; (2) BPRS wajib menyediakan modal inti paling rendah sebesar 8% dari ATMR sejak 1 Januari 2020; dan (3) Modal inti minimum BPRS ditetapkan sebesar Rp6 miliar dengan beberapa ketentuan.

### **4. SEOJK Nomor 46/SEOJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah**

SEOJK ini adalah ketentuan pelaksanaan dari POJK Nomor 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

### **5. SEOJK Nomor 53/SEOJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Pembiayaan Rakyat Syariah**

SEOJK ini adalah ketentuan pelaksanaan dari POJK Nomor 37/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

#### **3.2.2 Pengaturan Pasar Modal Syariah**

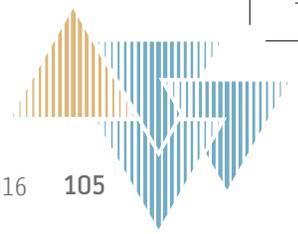
Sepanjang Triwulan IV-2016, OJK menerbitkan satu POJK mengenai Pasar Modal Syariah yaitu POJK Nomor 61/POJK.04/2016 tentang Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal Pada Manajer Investasi.

Penerbitan peraturan ini bertujuan untuk mendorong Manajer Investasi agar fokus mengembangkan produk investasi syariah dan memberikan kepastian hukum dalam rangka meningkatkan kepercayaan pasar (*market confidence*) terhadap produk investasi syariah. Pokok pengaturan ini antara lain: (i) Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal pada Manajer Investasi wajib dilakukan dengan cara pembentukan Manajer Investasi Syariah atau Unit Pengelolaan Investasi Syariah pada Manajer Investasi dan (ii) Manajer Investasi Syariah dan Manajer Investasi yang membentuk Unit Pengelolaan Investasi Syariah dapat menjadi Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah tanpa perlu mengajukan permohonan persetujuan sebagai Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah kepada OJK.

#### **3.2.3 Pengaturan IKNB Syariah**

Selama triwulan IV-2016, OJK menerbitkan POJK terkait dengan pengaturan IKNB Syariah yaitu POJK nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah.

Penerbitan peraturan ini dalam rangka penyempurnaan materi peraturan yang berlaku sebelumnya, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.



### 3.3 PENGAWASAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH

#### 3.3.1 Pengawasan Perbankan Syariah

Permodalan industri Perbankan Syariah (terutama untuk BUS) di triwulan IV-2016 meningkat cukup signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya dan berada di atas *threshold* (rasio KPMM minimum 14%) yakni 17,01%. Hal ini disebabkan adanya tambahan modal sebesar Rp1 triliun dalam bentuk sukuk *mudharabah* subordinasi. Sesuai *supervisory concern* dari OJK, sejumlah BUS melakukan revisi RBB 2017 yang memuat rencana peningkatan modal pada pertengahan 2017:-

Terkait kualitas pembiayaan pada BUS, kondisinya relatif baik, tercermin dari rasio NPF Gross BUS posisi triwulan IV-2016 sebesar 4,68% atau relatif turun dibandingkan triwulan sebelumnya. Penyebab penurunan NPF BUS antara lain sebagai dampak telah direalisasikannya beberapa *action plan* seperti perbaikan NPF BUS meliputi restrukturisasi pembiayaan, hapus buku, dan melakukan litigasi atau upaya hukum. Selain itu, sejumlah BUS semakin memperketat penerapan manajemen risiko kredit sehingga masing-masing bank cenderung selektif dalam penyaluran pembiayaan baru.

Tingkat efisiensi BUS perlu ditingkatkan sebab struktur dana masih didominasi oleh dana mahal (*deposito*), rendahnya *fee based income* karena produk yang ditawarkan masih terbatas dan jangkauan jaringan kantor bank yang belum optimal. Namun demikian, BUS telah melakukan berbagai upaya mengoptimalkan pendapatannya tercermin dari rasio BOPO triwulan IV-2016 yang menunjukkan penurunan dari triwulan sebelumnya menjadi sebesar 95,91%. Langkah strategis beberapa BUS antara lain melakukan pembenahan layanan dan produk, efisiensi dan produktifitas karyawan, optimalisasi kantor dengan mengurangi

jaringannya secara bertahap (*network reprofiling*) dan mempersiapkan layanan tanpa kantor.

Sebagai langkah *supervisory action*, OJK menetapkan risiko operasional sebagai bagian dari *primary supervisory concern* terutama terkait dengan kesiapan infrastruktur (khususnya IT) yang memadai, kecukupan kompetensi SDM dan pengendalian intern. Berdasarkan hasil penilaian, secara umum *rating* peringkat RBBR di perbankan syariah tergolong cukup dengan kecenderungan stabil. Adapun potensi risiko utama masih berasal dari risiko kredit. Berkenaan fokus *Supervisory Plan* 2017 yaitu mencakup risiko kredit, risiko operasional dan aspek permodalan.

#### Perizinan Bank Syariah

Selama Triwulan IV-2016, OJK telah memproses 42 perizinan *fit and proper* terhadap calon PSP dan Pengurus Bank Syariah, delapan perizinan *fit and proper* pengajuan calon Dewan Pengawas Syariah (DPS), dua permohonan produk baru, 47 permohonan jaringan kantor perbankan syariah, dan 16 permohonan perizinan lainnya dengan detail sebagai berikut :

#### 3.3.2 Pengawasan Pasar Modal Syariah

Dalam bidang pengawasan terkait dengan Pasar Modal Syariah, berdasarkan Peraturan Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah, OJK dapat memberikan persetujuan kepada Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah (DES). Atas persetujuan tersebut, Pihak Penerbit DES wajib menyampaikan laporan DES yang diterbitkannya kepada OJK. Sampai dengan akhir triwulan IV-2016, terdapat sembilan pihak yang memperoleh persetujuan dari OJK.

Terkait pengawasan terhadap Pihak Penerbit DES, telah dilakukan pengawasan berdasarkan laporan DES yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit DES secara periodik. Selama periode pelaporan seluruh Pihak Penerbit DES telah menyampaikan laporan perubahan DES sesuai dengan ketentuan.

**Tabel III - 10** Permohonan Perbankan Syariah

Jenis Proses Perizinan	Disetujui	Tolak	Dihentikan	Dibatalkan	Belum Memenuhi Persyaratan Administratif	Belum Memenuhi Ketentuan Yang Berlaku	Dalam Proses Penyelesaian	Total Permohonan Masuk	Total perizinan selesai
<b>Fit and Proper Test :</b>									
1. Pemegang Saham Pengendali (PSP)	0	0	0	0	0		1	1	0
2. Pengurus Bank Syariah (komisaris dan direksi)	9	1	0	1	7		15	33	18
3. Dewan Pengawas Syariah (DPS)	1	0	0	0	2		5	8	3
<b>Total Permohonan Proses FPT</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>9</b>		<b>21</b>	<b>42</b>	<b>21</b>
<b>Perizinan Produk Baru</b>									
Perizinan Produk Baru	1	0	0	0	1		3	5	2
<b>Total Permohonan Perizinan Produk Baru</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>		<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>
<b>Pengembangan Jaringan Kantor :</b>									
1. Pembukaan Kantor Baru	5	0	0	0	0		5	10	5
3. Penutupan Kantor	7	0	0	0	0		3	10	7
4. Pindahan Alamat Kantor	15	0	0	0	0		12	27	15
<b>Total Permohonan Pengembangan Jaringan Kantor</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>20</b>	<b>47</b>	<b>27</b>
<b>Perizinan Lainnya :</b>									
1. Izin Prinsip	0	0	0	0	0		4	4	0
2. Izin Usaha	2	0	0	0	0		1	3	2
3. Izin Prinsip Disetujui namun belum mengajukan Izin Usaha	0	0	0	0	0		0	0	0
4. Konversi	0	0	0	1	0		1	2	1
5. Pemisahan Spin off	0	0	0	0	0		0	0	0
6. Kantor Bank Asing	0	0	0	0	0		0	0	0
7. Merger & Akuisisi	0	0	0	0	1		5	6	1
8. Konsolidasi	0	0	0	0	0		0	0	0
9. Perubahan Nama	0	0	0	0	1		0	1	1
10. Penutupan/Pencabutan Izin Usaha bank	0	0	0	0	0		0	0	0
11. Kegiatan usaha dalam valas	0	0	0	0	0		0	0	0
<b>Total Proses Perizinan Lainnya</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		<b>11</b>	<b>16</b>	<b>5</b>

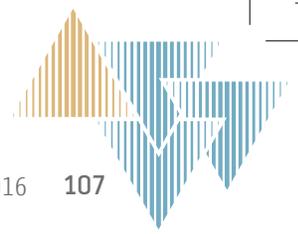
### 3.3.3 Pengawasan IKNB Syariah

Selama periode laporan, OJK melakukan pengawasan terhadap 55 perusahaan perasuransian syariah dan menerbitkan empat Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Sementara (LHPLS) serta tiga Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Final (LHPLF). OJK juga melakukan pemeriksaan *on-site* terhadap tiga Perusahaan Perasuransian syariah.

Terkait dengan pengawasan terhadap lembaga pembiayaan dan Industri Lembaga Jasa Keuangan Syariah Lainnya, OJK menerbitkan menerbitkan satu LHPLS perusahaan pembiayaan syariah, satu LHPLS perusahaan penjaminan syariah, satu LHPLF perusahaan modal ventura syariah dan satu

LHPLF perusahaan pembiayaan syariah, serta melakukan pemeriksaan *on-site* terhadap dua perusahaan pembiayaan syariah dan satu perusahaan penjaminan syariah.

Berkaitan dengan layanan kelembagaan, OJK memberikan izin pembukaan lima 5 kantor pemasaran Perusahaan Perasuransian, izin pembukaan 13 kantor cabang unit syariah dari perusahaan pembiayaan, pencatatan 35 produk asuransi jiwa, pencatatan enam produk asuransi umum syariah, persetujuan pemasaran *bancassurance* atas sembilan produk asuransi, pencatatan atas perubahan 32 produk asuransi jiwa syariah, penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap 14 calon pihak utama perusahaan perasuransian dan satu calon pihak utama perusahaan pembiayaan.



### 3.4 PENGEMBANGAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH

#### 3.4.1 Pengembangan Perbankan Syariah

Selama triwulan IV-2016, OJK telah melaksanakan beberapa kegiatan terkait dengan pengembangan Perbankan Syariah, di antaranya adalah sebagai berikut:

##### A. Kajian Pengembangan Pertanian Organik dengan Pembiayaan Syariah

Kajian ini dilakukan dengan tujuan mengidentifikasi *viability* dan *feasibility* perbankan syariah untuk masuk pada pembiayaan sektor pertanian organik serta menginisiasi dan membentuk model pembiayaan perbankan syariah terhadap sektor pertanian organik subsektor tanaman pangan khususnya padi. Penelitian tersebut dilakukan dengan tahapan metode survei sebagai berikut: *focus group discussion* (FGD), penjajakan cepat kondisi pedesaan (*rapid rural appraisal/ RRA*), *in-depth interview* dan *review data sekunder*. Penelitian dilakukan di empat lokasi dengan mempertimbangkan agroklimat masing-masing daerah. Berdasarkan penelitian tersebut, skema akad yang cocok adalah *mudarabah* dan perlu adanya pendampingan agar produktivitas pertanian meningkat dan proses pembiayaan berjalan dengan lancar.

Selain itu, telah diluncurkan buku panduan pembiayaan syariah dengan judul AKSI PRO SALAM (Akses Keuangan Syariah Indonesia untuk Pertanian Organik yang Selaras, Alami, dan Amanah). Tujuan buku panduan tersebut adalah memberikan acuan (*guideline*) dan informasi kepada industri perbankan syariah mengenai peluang bisnis sektor pertanian organik yang diharapkan akan meningkatkan porsi pembiayaan perbankan syariah ke sektor pertanian organik.

##### B. Seminar Nasional Riset Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan

Dalam rangka penyempurnaan hasil kajian dan untuk memperoleh tanggapan serta pandangan dari *stakeholder*, OJK menyelenggarakan Seminar Hasil Kajian Perbankan Syariah. Kegiatan pokok dalam seminar hasil kajian tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Sesi presentasi oleh peneliti yang telah ditunjuk dalam iB *Research Fellowship Program* 2016 sebagai berikut:
  - i. Kajian "Siklus Hidup Keluarga, Kebutuhan Nasabah dan Kepemilikan Aset Keuangan dalam Perspektif Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia"
  - ii. Kajian "*Switching Behavior* Calon Nasabah Bank Syariah Melalui *Mixed Methods Research*".
  - iii. Kajian "Penggunaan Data Alternatif untuk Meningkatkan Akurasi Model *Credit Scoring* bagi Debitur BPRS"
- b. Sesi presentasi kajian "Pengembangan Pertanian Organik dengan Pembiayaan Syariah" yang dilanjutkan dengan presentasi buku panduan Pengembangan Pertanian Organik dengan Pembiayaan Syariah.

Adapun kegiatan pengembangan perbankan syariah, kegiatan proses *review* kebijakan dan standar serta hubungan kerjasama dengan pihak internasional yang dilakukan pada triwulan IV-2016 antara lain:

1. Mengadakan kegiatan *Coaching Clinic* Pelaporan LSMK Bulanan BUS/UUS kepada empat Bank Umum Syariah (BUS) dan/atau Unit Usaha Syariah
2. Melakukan penyusunan Pedoman Pemeriksaan berdasarkan Risiko untuk Risiko Imbal Hasil dan Risiko Investasi.



### 3. Penyusunan Model *Outlook* Perbankan Syariah 2017

Penyusunan model *Outlook* perbankan syariah merupakan kegiatan untuk menyusun perkiraan mengenai kondisi dan perkembangan perbankan syariah di tahun yang akan datang dengan mengacu pada asumsi pertumbuhan ekonomi 2017 yang dirilis oleh beberapa lembaga atau institusi ternama. Model *outlook* tersebut disusun menjadi tiga skenario. Model tersebut akan digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pengembangan perbankan syariah. Proyeksi dilakukan terhadap pertumbuhan dana pihak ketiga, pembiayaan, aset, *non-performing loan* (NPL), dan *capital adequacy ratio* (CAR).

### 4. Kaji Ulang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) BPRS

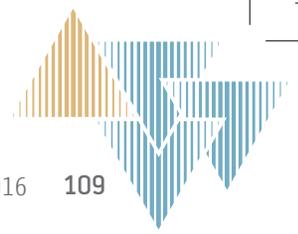
Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM perbankan syariah khususnya SDM BPRS, sesuai POJK No.3/POJK.03/2016 tentang BPRS dan POJK No.44/POJK.03/2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris BPR dan BPRS, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris BPRS diwajibkan untuk memiliki sertifikasi kompetensi kerja yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi. Uji kompetensi dalam rangka pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja tersebut harus mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang berlaku bagi BPRS.

SKKNI BPRS yang telah digunakan sejak 2008 sesuai ketentuan Menteri Ketenagakerjaan dalam jangka waktu lima tahun perlu dikaji ulang seiring dengan kebutuhan peningkatan kompetensi SDM BPRS dan perubahan beberapa ketentuan.

## C. Pengembangan Produk dan Edukasi Perbankan Syariah

Dalam rangka meningkatkan *awareness* dan pemahaman masyarakat terhadap keuangan syariah, selama triwulan IV-2016 telah dilakukan berbagai kegiatan antara lain :

1. Pelaksanaan Kampanye “Aku Cinta Keuangan Syariah” melalui “Keuangan Syariah Fair (KSF)” yang diselenggarakan secara terintegrasi bersama industri keuangan syariah. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan *outreach* nasabah baru Sektor Jasa Keuangan (SJK) Syariah yang dilaksanakan di Makassar diikuti oleh 14 BUS dan UUS dan 10 IKNB Syariah, 10 Pelaku Pasar Modal Syariah. Tingkat pemahaman pengunjung KSF Makassar terhadap produk perbankan syariah mencapai 82% dari 619 sampel responden.
2. Pelaksanaan Kampanye “Aku Cinta Keuangan Syariah” melalui *Expo iB Vaganza* di kota Samarinda bekerjasama dengan Forum iB Markom yang diikuti oleh 10 BUS dan UUS. Penyelenggaraan *Expo iB Vaganza* Samarinda menghasilkan transaksi perbankan syariah menghasilkan 7.939 rekening Dana Pihak Ketiga (DPK) dengan nominal Rp19 Miliar dan realisasi pembiayaan Rp57 Miliar.
3. Dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM pengajar/akademisi di bidang perbankan syariah dilaksanakan pelatihan dalam bentuk *Training of Trainers* (ToT), yaitu :
  - a. *Training of Trainers* Perbankan Syariah kepada dosen dan akademisi bekerjasama dengan IAIN Banjarmasin. Tingkat pemahaman peserta terhadap perbankan syariah sebesar 75,6%; dan



- b. *Workshop* Perbankan Syariah kepada Guru dan Tenaga Pengajar Tingkat SMA di Samarinda yang diikuti 93 orang peserta yang merupakan perwakilan dari berbagai Sekolah Menengah Atas dan Sederajat di wilayah kota Samarinda dengan tingkat pemahaman peserta terhadap perbankan syariah sebesar 82,15%.
4. Dalam hal pengembangan produk perbankan syariah, OJK menyelesaikan Kajian Standar Produk berbasis *Ijarah*, Modul Standar *Ijarah*, Modul *Ijarah* Multijasa dan IMBT, serta *review* kodifikasi produk dan hasil analisis.
5. Terkait hal pengembangan kompetensi SDM perbankan syariah, telah diselesaikan kajian standar kompetensi bankir. Dalam penyelesaian kajian juga dilengkapi dengan penyelenggaraan FGD eksternal yang di dalamnya melakukan diskusi awal *link and match* standar kompetensi dan standar kurikulum
6. Dalam rangka memperluas target sosialisasi dan edukasi perbankan syariah, telah dilaksanakan sosialisasi dan edukasi perbankan syariah berbasis masjid yang merupakan simpul dan pusat kegiatan sosial keagamaan umat melalui *Workshop* Nasional Perbankan Syariah untuk Da'i dan Pengurus Masjid bekerjasama dengan Dewan Masjid Indonesia (DMI).

### 3.4.2 Pengembangan Pasar Modal Syariah

1. Kajian Metodologi Pemeringkatan Sukuk.

Kajian Metodologi Pemeringkatan Sukuk disusun dengan tujuan untuk mengetahui urgensi perbedaan metodologi pemeringkatan antara sukuk dan obligasi, mengidentifikasi faktor-faktor yang perlu

diperhatikan dalam pemeringkatan sukuk, dan menganalisis metodologi yang tepat dalam pemeringkatan sukuk.

2. Kajian Pengembangan Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM).

Dalam rangka memastikan kompetensi dan profesionalisme Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) diperlukan kualifikasi minimum yang dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan dari penyusunan kajian ini adalah untuk mengetahui standar kompetensi yang harus dimiliki ASPM dan sebagai bahan referensi dalam menyusun modul sertifikasi Ahli Syariah Pasar Modal.

3. Kajian kontrak perwaliamanatan Sukuk.

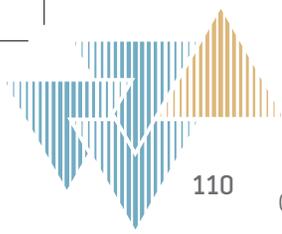
Kajian ini bertujuan meninjau kembali apakah landasan peraturan terkait kontrak perwaliamanatan (PWA) sudah cukup mengatur secara efektif penyusunan PWA Sukuk di Indonesia, khususnya ketentuan mengenai penyelesaian sukuk dalam hal terjadi default. Hal ini dilakukan untuk menjaga hak dan melindungi kepentingan *stakeholder* sukuk khususnya investor sukuk.

4. Kajian Materi Pasar Modal Syariah Dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi.

Kajian ini bertujuan untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang dapat langsung bekerja di sektor pasar modal syariah. Kajian ini menginisiasi program studi dan penyampaian materi pasar modal syariah dalam perguruan tinggi. Kajian ini juga bertujuan pada studi mengenai kompetensi yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang kompeten di industri pasar modal syariah.

5. Kajian Pengembangan Sukuk Daerah.

Kajian ini bertujuan untuk



mengidentifikasi kecukupan kerangka hukum bagi penerbitan sukuk daerah.

6. Kajian Pengembangan Likuiditas Sukuk di Pasar Sekunder.

Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hal-hal yang sudah, sedang, dan belum dilakukan dalam rangka meningkatkan likuiditas sukuk.

7. Kajian Tentang Transaksi Efek syariah (REPO Syariah)

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi pengembangan transaksi *repurchase agreement* (REPO) syariah di Indonesia, mengidentifikasi akad syariah yang dapat digunakan dalam transaksi REPO Syariah, dan

mengidentifikasi hal-hal yang perlu diatur dalam pengembangan transaksi REPO Syariah.

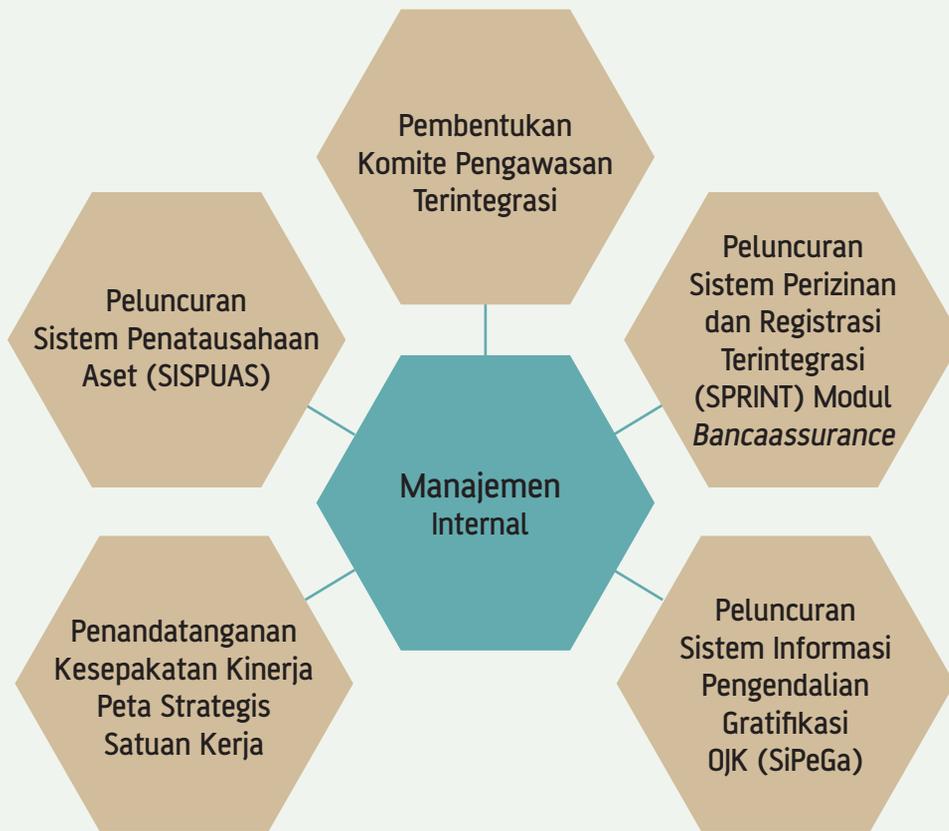
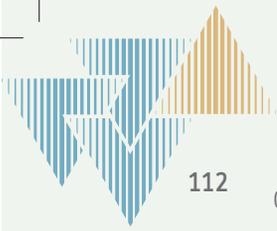
### 3.4.3 Pengembangan IKNB Syariah

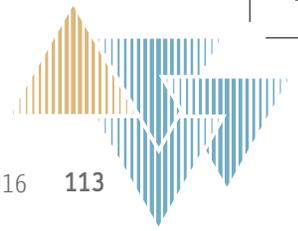
Selama triwulan IV-2016, dilakukan beberapa kegiatan untuk pengembangan IKNB syariah antara lain :

1. Sosialisasi Asuransi Syariah di Pekanbaru, dengan tema: "Mengenal Asuransi Syariah dan Asuransi Mikro Syariah".
2. Sosialisasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah bertempat di Yogyakarta.



# **Manajemen Strategis dan Tata Kelola Organisasi**





## Manajemen Strategis dan Tata Kelola Organisasi

### IV

#### 4.1 MANAJEMEN STRATEGI DAN KINERJA OJK

##### 4.1.1 Pelaksanaan Siklus Manajemen Strategi dan Kinerja

OJK memiliki sistem Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK) yang mengintegrasikan penyusunan dan penetapan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta penilaian kinerja OJK. Siklus MSAK OJK terdiri dari empat tahap dan pada periode laporan, siklus MSAK berada pada tahap keempat yaitu evaluasi kinerja pelaksanaan Peta Strategi 2016 dan tahap kedua untuk periode 2017 yaitu penyusunan dan penetapan RKA, serta penandatanganan kesepakatan kinerja. Pelaksanaan *Monitoring* kinerja pada periode laporan dilakukan melalui evaluasi kinerja triwulan III-2016 baik untuk level OJK maupun level Deputi Komisioner dan Kepala Departemen. Untuk mendukung proses *monitoring* kinerja, OJK mengintegrasikan Sistem Pengelolaan Kinerja (SIMPEL) dengan Sistem Informasi Manajemen

Risiko (SIMARIO). Selain itu, OJK juga telah mengintegrasikan SIMPEL dengan SIMFOSIA untuk modul Indikator Kinerja Utama (IKU) sampai Indikator Kinerja Individu (IKI).

Selama periode laporan, OJK melaksanakan survei kepuasan kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan KR/KOJK di daerah. Pelaksanaan survei ini dilakukan melalui *Focus Group Discussion* dan pengisian kuesioner yang difasilitasi lembaga survei independen. Jumlah responden yang berpartisipasi berjumlah 1.919 orang yang berasal dari 35 kota di Indonesia. OJK juga melakukan survei internal kepada Satker yang memberikan jasa pelayanan di OJK. Survei ini dilakukan untuk memberikan masukan atas perbaikan jasa pelayanan kepada Satker yang bertanggung jawab atas pelayanan tersebut. Survei ini diikuti oleh 1.816 pegawai. Nilai survei tersebut akan menjadi bagian nilai IKU. Untuk membantu proses survei internal, telah dikembangkan Sistem Aplikasi *Online* Survei Persepsi Kinerja Satuan Kerja (Satker) OJK (SPKSO).

### **Penandatanganan Kesepakatan Kinerja**

Selama periode laporan, OJK melakukan *cascading* Peta Strategi OJK *wide* ke level Satker baik pada level Deputy Komisioner maupun Kepala Departemen. Untuk memperkuat komitmen pimpinan Satker dalam pencapaian kinerja 2017, telah dilakukan penandatanganan Kesepakatan Kinerja Peta Strategis Satker.



**Perbankan**



**EPK**



**MS II**



**AIMRPK**



**PM**



**KR/KOJK**

Pada periode laporan, OJK melaksanakan Rapat Kerja Strategis (Rakerstra). Dalam Rakerstra dimaksud, Dewan Komisioner mengkomunikasikan Peta Strategi 2017 kepada seluruh pimpinan Satker baik yang ada di kantor pusat maupun di daerah.

Sebagai bentuk akuntabilitas lembaga, OJK menerbitkan Laporan Triwulan III-2016 sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban kegiatan OJK selama periode laporan serta telah menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja yang menginformasikan pencapaian OJK selama 2016. Laporan tersebut didistribusikan pada kegiatan *Financial Executive Gathering* pada awal 2017.

**Grafik IV - 1** Siklus Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK)  
[sesuai PDK No.1/PDK.01/2013]



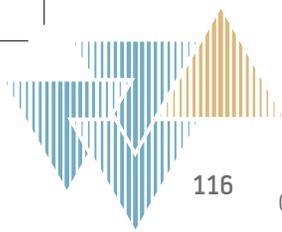
#### 4.1.2 Pelaksanaan Sasaran Strategis (IS) OJK

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, OJK memiliki *Strategy Map* 2016 yang di dalamnya terdapat tujuh Sasaran Strategis OJK yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Terwujudnya Sektor Jasa Keuangan (SJK) yang Tangguh, Kontributif dan Inklusif  
Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui indeks penetrasi SJK seperti target peningkatan kredit (Perbankan), pertumbuhan Emiten dan perusahaan publik (Pasar Modal) serta pertumbuhan premi asuransi, piutang pembiayaan, aset penjaminan dan aset dana pensiun (IKNB) serta melalui pengukuran indeks kesehatan SJK seperti rasio *Capital Adequacy Ratio* (Perbankan), Perusahaan Efek yang memenuhi persyaratan Modal Kerja Bersih Disesuaikan/MKBD (Pasar Modal), serta rasio tingkat kesehatan IKNB. Selain itu, Sasaran Strategis juga diukur melalui kenaikan Indeks Inklusi keuangan dan tingkat kepuasan *Stakeholder* terhadap kinerja OJK.

**Gambar IV - 1** Laporan Kinerja OJK 2016





2. Meningkatkan Pengaturan SJK yang Selaras dan Terintegrasi  
Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui persentase ketentuan SJK yang diselaraskan dan persentase peraturan OJK yang berstandar internasional.
3. Mengembangkan SJK yang Kontributif, Stabil dan Berdaya Saing Global  
Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui peningkatan pendalaman pasar keuangan melalui pengawasan terhadap pencapaian Kredit sesuai RBB dengan target 100% (Perbankan), persentase penambahan jumlah Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) yang melakukan pemasaran produk pengelola investasi (Pasar Modal), persentase peningkatan cakupan program asuransi mikro (IKNB). Sasaran Strategis ini juga diukur melalui kontribusi OJK dalam program prioritas pemerintah melalui persentase Bank Umum yang mencapai target kredit di sektor produktif, penambahan produk Reksa dana Penyertaan Terbatas (RDPT), dan persentase kenaikan lahan pertanian yang dilindungi asuransi pertanian. Selain itu, Sasaran Strategis ini juga diukur melalui peran KR/ KOJK terhadap peningkatan perekonomian dan pembangunan daerah serta ketahanan dan daya saing global sektor jasa keuangan.
4. Mengoptimalkan Pengawasan SJK yang Terintegrasi  
Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui persentase pelaksanaan pengawasan SJK yang terintegrasi, penanganan kasus dugaan tindak pidana SJK serta penerapan pelayanan perizinan prima dan terintegrasi.
5. Mengoptimalkan Edukasi dan Perlindungan Konsumen  
Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui penerapan tiga pilar SNLKI sesuai

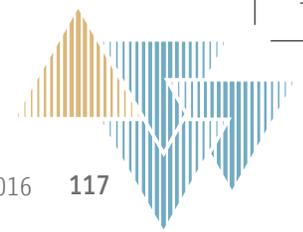
dengan rencana, pelaksanaan *thematic surveillance* terhadap produk dan layanan SJK sesuai rencana serta persentase tingkat penyelesaian pengaduan konsumen.

6. Meningkatkan *Surveillance* Sistem Keuangan  
Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui tingkat kualitas pelaksanaan *surveillance* dan manajemen krisis OJK untuk mendukung Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) serta persentase tindak lanjut hasil koordinasi dengan BI dan Kemenkeu.
7. Mendorong Terwujudnya SJK Syariah yang Sehat dan Bertumbuh  
Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui tingkat pelaksanaan program akselerasi pertumbuhan syariah dan tingkat kualitas pelaksanaan *Outreach* SJK yang terintegrasi.

#### 4.1.3 Pelaksanaan Inisiatif Strategis OJK

Sampai akhir triwulan IV-2016 persentase pencapaian pelaksanaan IS adalah sebesar 99,70% terhadap target Desember 2016. Untuk meningkatkan efektifitas dan *governance*, pengelolaan IS telah menggunakan Sistem Penilaian Kinerja (SIMPEL). Hasil pencapaian IS telah menjadi salah satu komponen penilaian kinerja Satker. Berikut merupakan capaian IS sampai dengan akhir 2016:

1. IS-1: Membangun Reputasi dan Kredibilitas Institusi melalui Implementasi Program *Recycling*  
Sampai dengan akhir 2016, beberapa kegiatan utama telah diselesaikan antara lain (1) Penetapan PDK dan SEDK mengenai Bantuan Operasionalisasi LAPS, (2) Pelaksanakan program sertifikasi/*capacity building* di SJK dengan pelaksanaan 26



- batch capacity building*, (3) Peningkatan perlindungan konsumen melalui sertifikasi ISO 9001:2015 untuk layanan pengaduan konsumen dan pembentukan 38 Satgas Waspada Investasi, (4) Peningkatan literasi dan inklusi keuangan melalui terbentuknya delapan gerai Pusat Edukasi, Layanan Konsumen dan Akses Keuangan UMKM (PELAKU), dan (5) Mempercepat akses keuangan daerah melalui pembentukan 45 TPAKD di daerah.
2. IS-2: Memperkuat Organisasi dalam rangka Mewujudkan Integrasi Pengaturan Sektor Jasa Keuangan (SJK)  
Sampai akhir 2016, beberapa kegiatan utama telah diselesaikan antara lain (1) Penyusunan kriteria konsep pengaturan terintegrasi sektor jasa keuangan, (2) Inventarisasi ketentuan yang berlaku untuk seluruh sektor jasa keuangan, (3) Pembentukan Komite Pengaturan Terintegrasi beserta tugas, fungsi, keanggotaan, dan mekanisme kerjanya dan (4) Peluncuran informasi terpadu ketentuan/peraturan yang ditujukan kepada pihak eksternal dalam dua versi, yakni versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
  3. IS-3: Menyusun dan Menyelaraskan Rancangan Undang-Undang Terkait OJK dan Aturan Pelaksanaannya  
Sampai akhir 2016, beberapa kegiatan utama telah diselesaikan antara lain (1) Penyusunan masukan terhadap RUU OJK dan RUU BI dengan memperhatikan UU No.9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK) dan (2) Tersedianya pokok-pokok pengaturan dalam peraturan pelaksanaan dari UU PPKSK dan pemantauan tindak lanjut penyusunan peraturan pelaksanaan dimaksud.
  4. IS-4: Mewujudkan Kantor Regional dan Kantor OJK sebagai Mitra Strategis Pemangku Kepentingan dalam Pengembangan Ekonomi Daerah  
Sampai akhir 2016, beberapa kegiatan utama telah diselesaikan antara lain (1) Program pengembangan *Leadership* pemimpin KR dan KOJK, (2) Penyediaan sarana/prasarana fisik untuk mendukung tugas dan fungsi Kantor Regional dan Kantor OJK, (3) Penguatan Kantor Regional dan Kantor OJK dalam pengawasan LJK (LKM), (4) Penguatan Fungsi Komunikasi Kantor Regional dan Kantor OJK di Daerah dan (5) Sosialisasi pola komunikasi terpadu di KR-KOJK dan contoh penerapannya di daerah.
  5. IS-5: Mewujudkan Pelayanan Prima dalam Fungsi Perizinan Terintegrasi Sektor Jasa Keuangan  
Sampai akhir 2016, beberapa kegiatan utama telah diselesaikan antara lain (1) Penyusunan *Roadmap* Implementasi Perizinan Terintegrasi, (2) Pengembangan Infrastruktur serta Aplikasi Sistem Informasi untuk mendukung Operasionalisasi Perizinan Solo di masing-masing Kompartemen, (3) *Go Live* Perizinan terintegrasi – *Bancassurance*, (4) *Go Live* Perizinan Terintegrasi - Pemasaran Reksadana oleh Bank selaku APERD, (5) *Go Live* Perizinan Terintegrasi – Pendaftaran Akuntan Publik
  6. IS-6: Mendorong Akselerasi Pertumbuhan Industri Jasa Keuangan Syariah di Indonesia  
Sampai akhir 2016, beberapa kegiatan utama telah diselesaikan antara lain (1) Usulan desain organisasi OJK terkait pengaturan, pengembangan, perizinan, dan pengawasan sektor jasa keuangan syariah, (2) Penerbitan POJK Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan prinsip Syariah yang telah efektif pada 26 Oktober 2016 dengan nomor POJK No.33/POJK.05/2016.
  7. IS-7: Mendorong Efisiensi dan Akselerasi Penerapan Sistem Anggaran Berbasis Kinerja (*Performance Based Budgeting*)  
Sampai akhir 2016, beberapa kegiatan utama sedang dalam proses penyelesaian antara lain (1) *Roadmap* Manajemen

Keberlangsungan Keuangan OJK, (2) Penyusunan revisi PDK MSAK, (3) Sistem Anggaran Berbasis Kinerja (*Performance Based Budgeting*).

8. IS-8: Mengembangkan Fungsi Penelitian dalam rangka mewujudkan *research-based policy*

Sampai akhir 2016, beberapa kegiatan utama yang telah diselesaikan antara lain (1) Menyusun program kerja penelitian untuk meningkatkan kontribusi dan kualitas penelitian sektoral dan lintas sektoral terhadap pengaturan, pengawasan, perizinan, literasi dan inklusi keuangan serta perlindungan konsumen SJK yang terintegrasi, dan (2) Pelaksanaan program pelatihan bagi para peneliti OJK.

## 4.2 AUDIT INTERNAL, MANAJEMEN RISIKO, DAN PENGENDALIAN KUALITAS

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki komitmen yang tinggi dalam mewujudkan kredibilitasnya di mata industri jasa keuangan. Wujud komitmen tersebut tercermin dalam upaya OJK untuk terus meningkatkan kualitas penerapan tata kelola yang baik. Implementasi *governance* OJK tidak hanya dalam menjalankan amanat UU nomor 21 tahun 2011 namun lebih dari itu, *good governance* merupakan sebuah kebutuhan agar OJK mampu mencapai tujuannya.

Dalam mendorong penegakan *governance*, OJK telah melaksanakan beberapa kegiatan penguatan pengendalian internal, dimulai dari penanganan dan pencegahan *fraud*, pengelolaan risiko, pengendalian kualitas bisnis proses, dan pelaksanaan audit internal yang berfungsi untuk memastikan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi OJK dan pengelolaan risiko atas proses bisnis yang dijalankan.

### Kegiatan Penguatan Kapasitas AIMRPK

Beberapa inisiatif yang dilakukan selama triwulan IV-2016 dalam rangka meningkatkan *governance* OJK antara lain:

- 1) Pelaksanaan *Combined Assurance* (CA)

OJK telah melaksanakan proses CA audit internal, yang meliputi: pengelolaan SDM, pengadaan barang dan jasa, penyusunan laporan keuangan, pengelolaan sistem informasi, perizinan terintegrasi, pengawasan sektoral, penyelesaian pengaduan konsumen, penanganan tuntutan pada OJK, penanganan pelanggaran, efektivitas tata kelola OJK, pengelolaan pungutan, penyidikan, penatausahaan aset, ketersediaan gedung dan sarana kantor serta perizinan sektoral.

- 2) Profil Risiko OJK

Profil Risiko OJK *Wide* semester II-2016 merupakan ikhtisar/himpunan seluruh potensi terjadinya suatu peristiwa/kejadian yang menimbulkan dampak bagi OJK. Selama semester II-2016, telah dilakukan penyusunan profil risiko OJK *Wide* semester II-2016 dengan memperhatikan dinamika konteks internal dan eksternal, melakukan analisis risiko Satker serta mengkomunikasikannya dengan Satker dan mengusulkan kepada komite manajemen risiko. Selama semester II-2016, terdapat 26 risiko utama yang harus diprioritaskan pengelolaannya.

OJK senantiasa berkomitmen untuk selalu meningkatkan penerapan manajemen risiko di seluruh lapisan pegawai dengan cara memperluas cakupan identifikasi risiko hingga ke KR/KOJK diseluruh Indonesia dalam bentuk *partnership program*. Program tersebut bertujuan untuk memfasilitasi *risk owner* mengelola risiko di tiap Satker. Sampai dengan triwulan IV-2016 *partnership program*, telah dilakukan di 18 KR/KOJK.

3) *Monitoring Grand Design* AIMRPK

Dalam proses pelaksanaan fungsi asurans yang selaras, sinergis dan berkesinambungan, diperlukan *design* kerangka tata kelola yang baik. *Design* tersebut berfungsi sebagai kompas pengatur arah strategi pelaksanaan asurans. Penentu arah dalam menjalankan peran asurans provider agar dapat mengelola dan memitigasi risiko organisasi secara efektif dan efisien dengan pendekatan *konsep three lines of defense, combined assurance* dan *maturity process*.

demi memperkuat *governance* sehingga kredibilitas OJK di mata industri jasa keuangan semakin baik. Selama 2016, dilakukan audit *surveillance* ISO 9001:2015. Hal ini bertujuan untuk mengevaluasi atas sertifikasi ISO 9001 yang telah dilakukan di 2015. Berdasarkan hasil audit tersebut yang dinyatakan lulus standar ISO 9001 adalah internal audit, manajemen risiko, pengendalian kualitas dan WBS.

5) Laporan Pendampingan *Quality Officer* (QO)

QO merupakan mitra kerja pengendalian kualitas dalam melaksanakan manajemen mutu di Satker. Tujuan dari pelaksanaan sistem pengendalian kualitas adalah untuk memberikan pemahaman dan konsultasi perihal laporan pengendalian kualitas dalam mendukung penyusunan laporan keuangan yang akuntabel dengan target predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sampai akhir periode laporan, pelaksanaan pendampingan QO telah dilakukan ke tiga KR/KOJK diantaranya adalah KOJK Nusa Tenggara Timur, KOJK Aceh dan KOJK Kalimantan Tengah. Adapun kegiatan pendampingan ini diharapkan mampu untuk mengoptimalkan manajemen mutu dalam tiap proses bisnis OJK.



Sampai dengan tahap pelaporan, AIMRPK telah melakukan *monitoring* dan proses penyusunan *Grand Design Group* Penanganan Anti-*fraud*.

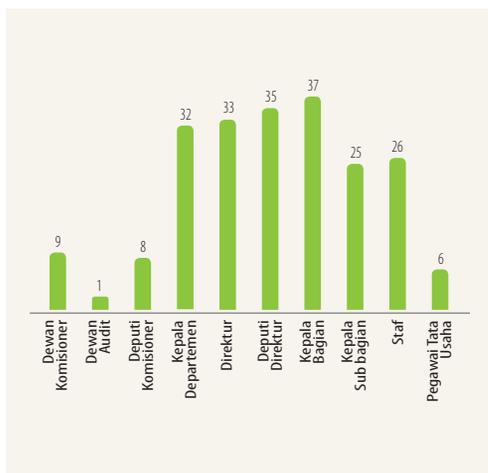
4) Audit *Surveillance* ISO 9001:2016

Sebagai Satker yang menjalankan fungsi asurans di OJK, kualitas *governance* OJK senantiasa diawasi oleh para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Oleh karena itu diperlukan Sistem Pengendalian Kualitas yang andal

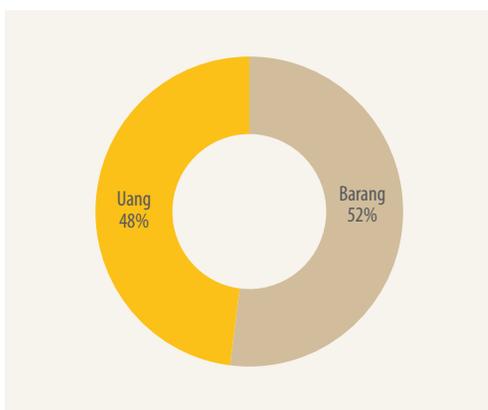
6) Penanganan Anti-*Fraud*

a. Pengendalian Gratifikasi  
 Dalam rangka membangun budaya anti gratifikasi, OJK mendorong (*enforcement*) seluruh jajaran dan pegawainya untuk melaporkan segala macam bentuk indikasi atau tindakan gratifikasi. Pada periode pelaporan, Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) OJK telah menerima laporan gratifikasi sebanyak 46 laporan. Hal ini menunjukkan bahwa Insan OJK semakin sadar untuk

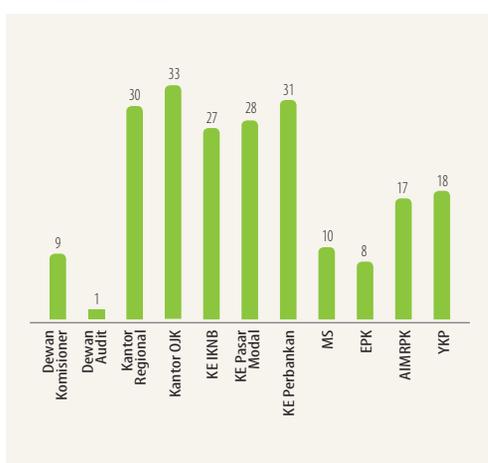
**Grafik IV - 3** Jumlah Laporan Gratifikasi Berdasarkan Jabatan



**Grafik IV - 4** Jumlah Laporan Gratifikasi Menurut Jenis Gratifikasi



**Grafik IV - 5** Jumlah Laporan Gratifikasi per Satker



senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Selain dari sisi pelaporan, UPG OJK terus membudayakan anti-gratifikasi melalui eksternalisasi mengenai Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) dan *Whistle Blowing System* (WBS) dalam bentuk sosialisasi ke beberapa Satker di OJK sebanyak 56 kali dan media lainnya seperti *email blast*, *screen saver* PC pegawai OJK, *banner*, *video*, dll.

b. *Whistle Blowing System*

Sampai akhir periode laporan, telah diterima sejumlah 149 laporan, dari jumlah tersebut 27 laporan dapat ditindaklanjuti

Untuk mengukur efektivitas pengelolaan WBS, OJK menetapkan *roadmap* dan *maturity level* OJK WBS. Berdasarkan asesmen konsultan, pada semester I - 2016 OJK WBS berada pada level maturitas 3 (*defined*) dan level maturitas WBS pada semester II yaitu 4 (*managed*), sehingga pengelolaan OJK WBS sesuai *roadmap* yang telah ditetapkan. Selain itu untuk memastikan pengelolaan OJK WBS sesuai standar kualitas, OJK WBS telah mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2016 sejak 2015.

c. Anti-Fraud

Selama 2016 OJK telah melakukan beberapa kegiatan audit investigasi terkait dugaan *fraud*. Sampai akhir periode laporan, OJK menetapkan Pedoman Investigasi untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan audit investigasi.

d. LHKPN  
 Sebagai panduan implementasi PDK No 12/PDK.02/2015 tanggal 15 Juli 2015 tentang Organisasi OJK dan PDK NO 4/PDK.02/2016 tentang Perubahan Atas PDKOJK Nomor 30/PDK.02/2013 tentang Kewajiban Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, OJK membuat pedoman Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara. Adapun tujuan dari pedoman ini yaitu membantu meningkatkan pemahaman tentang prosedur pelaporan LHKPN di OJK, membantu untuk mewujudkan Pejabat Penyelenggara Negara di OJK yang mentaati asas-asas umum penyelenggaraan yang bersih dan bebas dari KKN.

meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan di RDK, Dewan Komisiner menyelenggarakan forum *Board Seminar* (BS) yang membahas materi-materi yang akan diputuskan dalam RDK.

Selama periode triwulan IV-2016 OJK telah melaksanakan RDK 16 kali untuk membahas 47 topik dalam rangka pengambilan keputusan dan 12 laporan perkembangan industri perbankan, pasar modal dan industri keuangan non bank (laporan *market update*).

Pada periode ini beberapa POJK telah ditetapkan dalam RDK, di antaranya POJK tentang Dana Investasi Multi Aset Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagai respons OJK dalam mendukung kebijakan *tax amnesty*, POJK tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal Pada Manajer Investasi sebagai upaya mendorong pengembangan keuangan syariah di industri pasar modal, POJK tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat dan POJK tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebagai dukungan agar industri FinTech dapat bertumbuh dengan tetap memberikan perlindungan bagi para pihak yang terlibat di dalamnya.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pengambilan keputusan di RDK, Dewan Komisiner menyelenggarakan forum *Board*

### 4.3 RAPAT DEWAN KOMISIONER

Dalam rangka penetapan atau evaluasi atas kebijakan-kebijakan OJK yang bersifat strategis dan/atau menerima laporan atas kebijakan yang wajib diketahui, Dewan Komisiner menyelenggarakan Rapat Dewan Komisiner (RDK). Sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi di OJK, pelaksanaan RDK memiliki mekanisme terstruktur yang mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik melalui pengaturan tentang tata cara penyelenggaraan RDK OJK. Dalam rangka

**Grafik IV - 6** Gambaran Topik yang Dibahas dalam Rapat Dewan Komisiner



*Seminar* (BS) yang membahas materi-materi yang akan diputuskan dalam RDK. Khusus materi yang bersifat pengaturan, wajib terlebih dahulu dibahas dalam forum BS sebelum diputuskan dalam RDK.

Pada triwulan ini, forum BS diselenggarakan sebanyak 10 kali untuk membahas 28 topik yang sebagian besar mengenai ketentuan yang akan dikeluarkan oleh OJK (*rule making rule*).

Selain beberapa aturan yang akan dikeluarkan oleh OJK, forum BS juga menerima hasil kajian mengenai *progress* implementasi *roadmap* keuangan berkelanjutan.

## 4.4 KOMUNIKASI

### 4.4.1 Komunikasi Informasi OJK

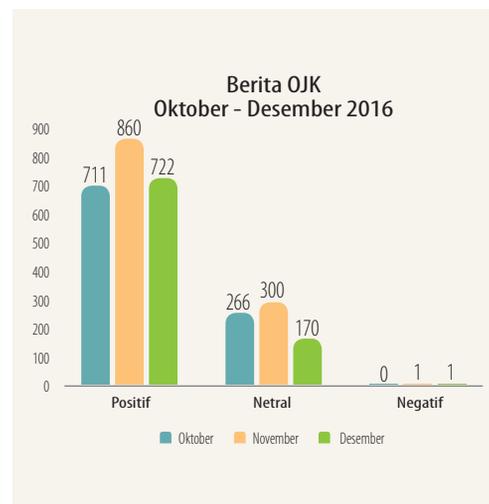
Selama periode laporan, OJK melakukan serangkaian kegiatan komunikasi yang terintegrasi dan berkesinambungan melalui berbagai media, baik cetak maupun elektronik dan digital, termasuk media milik OJK antara lain *website* OJK dan media jejaring sosial seperti *Twitter*, *Facebook*, dan *Youtube*.

*Website* OJK telah dikunjungi sebanyak 2.305.105 *pageviews*, jumlah *follower* akun *twitter* OJK

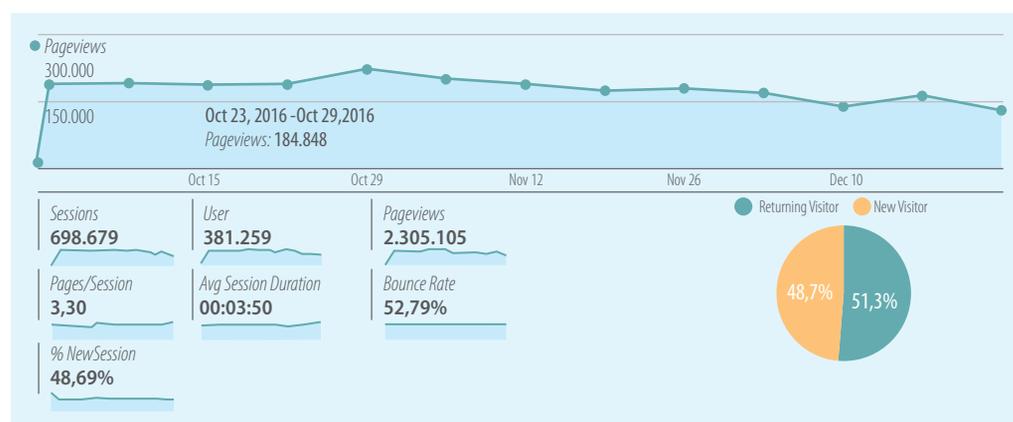
sebanyak 23.425 *followers* (naik 31,4%), serta 164.523 *views* pada *channel youtube* OJK (naik 24,6%).

Terkait pengelolaan opini publik, OJK memiliki program analisa kuantitatif dan kualitatif untuk setiap pemberitaan OJK di media. Analisa ini dilakukan melalui *monitoring* terhadap *tone* berita mengenai OJK dan industri keuangan secara umum, serta berita mengenai OJK pada 25 media cetak, 30 media *online*, 11 stasiun televisi nasional, TV daerah terpilih, dan media sosial (*Facebook*, *Twitter*, *Youtube*).

**Grafik IV - 8** Tone Pemberitaan Triwulan IV-2016



**Grafik IV - 7** Statistik Pengunjung *Website* OJK



Selama periode laporan, terdapat 3.031 pemberitaan terkait OJK, naik 27,8% dari triwulan sebelumnya yang sejumlah 2.371 berita. Dari jumlah tersebut, *tone* media sebagian besar bersifat positif, dengan proporsi positif sebesar 2.293 berita, netral 736 berita, dan dua berita negatif.

Terkait dengan relasi media, selama triwulan IV-2016, OJK menerbitkan 36 siaran pers. Penerbitan siaran pers bertujuan untuk mengumumkan program atau kegiatan OJK, peraturan terbaru OJK, atau isu lainnya terkait dengan pelaku Industri Jasa Keuangan yang memiliki nilai berita agar dapat dipublikasikan di media massa. Adapun judul siaran pers yang telah diterbitkan oleh OJK dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel IV - 1** Judul Siaran Pers Triwulan IV-2016

No	Judul Siaran Pers
1	OJK Menyelenggarakan Seminar Penerapan Manajemen Risiko Sektor Publik
2	Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kepulauan Maluku Melalui TPAKD dan Satgas Waspada Investasi
3	OJK Keluarkan Regulasi Mengenai Usaha Pergadaian
4	OJK Siapkan Aturan Pengembangan <i>Financial Technology</i>
5	Implementasikan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), OJK Dukung Kegiatan Inklusi Keuangan Industri Jasa Keuangan
6	Ketua DK OJK: Keuangan Syariah Solusi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
7	Likuiditas dan Permodalan Lembaga Jasa Keuangan Dalam Kondisi Baik
8	OJK Terus Dorong Inklusi Keuangan ke Pelosok Tanah Air
9	OJK Dukung Penerbitan Sukuk Diaspora
10	OJK Dorong Industri Manfaatkan Pembiayaan Pasar Modal
11	Pimpinan Humas Kementerian dan Lembaga Bahas Perkembangan Teknologi Digital
12	Perkuat Industri Perasuransian, OJK Ganti Pengurus AJB Bumiputera 1912
13	Muliaman D. Hadad Raih Penghargaan Monash University Australia
14	Presiden RI Kampanyekan Gerakan "Ayo Menabung"
15	OJK dan Satgas Waspada Investasi Ungkap Dua Kasus Investasi Ilegal dan Satu Penipuan Pelunasan Kredit
16	OJK Gandeng Temasek Singapura Kembangkan Kapasitas SDM
17	OJK Catat Likuiditas dan Permodalan Lembaga Jasa Keuangan Tetap Baik
18	Tekan Kasus Tindak Pidana Perbankan, OJK Luncurkan Buku "Pahami dan Hindari"
19	OJK dan Satgas Waspada Investasi Hetikan Kegiatan Pandawa Group Depok
20	OJK Siapkan Aturan Perlindungan Konsumen Terkait Fintech
21	Ketua Dewan Komisiner OJK Terpilih Sebagai Tokoh Humas
22	OJK Gelar <i>Risk and Governance Summit</i> (RGS) 2016 "Penguatan <i>Ethical Governance</i> untuk Menjamin <i>Sustainability</i> "

23	OJK Gelar ASEAN <i>Insurance Regulators Meeting</i> (AIRM) Ke-19 di Yogyakarta- Siapkan Arah Kebijakan Integrasi Industri Asuransi di ASEAN
24	OJK dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Dorong Pengembangan Usaha Mikro Unggulan dan Pertanian Organik- Bentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) Kabupaten Banyuwangi
25	Penuhi Panggilan OJK, Salman Nuryanto, Pendiri Pandawa Group Depok Hentikan Penghimpunan Dana Masyarakat
26	OJK Terbitkan Daftar Efek Syariah Terbaru
27	Pentingnya Menjaga Nilai Etik dalam Penerapan <i>Good Governance</i> - OJK Gelar <i>Risk And Governance Summit</i> (RGS) 2016
28	Kegiatan PT Cakra Buana Indonesia (PT CSI) Ilegal dan Direksi PT CSI Bertanggung Jawab Terhadap Dana Masyarakat
29	Dukung Pencapaian Program Pembangunan Berkelanjutan OJK Gelar Forum Internasional di Bali
30	Dorong Inklusi Keuangan di Sumatera Barat- OJK Gelar Acara "Elok Laku Pandai Manabuang"
31	OJK Raih Penghargaan Pengendalian Gratifikasi Terbaik KPK
32	Komite Basel Nilai Regulasi Sektor Perbankan Indonesia Capai Tingkat Optimal
33	OJK Dukung Peningkatan Kerjasama Indonesia dengan Iran Siapkan Pembaruan MoU Dengan <i>Central Bank of The Islamic Republic of Iran</i>
34	OJK Percepat Waktu Perizinan dan Registrasi Penjualan Reksadana Melalui Bank dan Pendaftaran Akuntan Publik
35	OJK Cabut Izin Usaha PT BPR Multi Artha Mas Sejahtera Bekasi
36	Peluncuran Sistem Informasi Ketentuan Perbankan <i>On-Line</i> (Sikepo)

Selain itu, OJK menyelenggarakan jumpa pers sebanyak 17 kali. Topik jumpa pers triwulan IV-2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel IV - 2** Jumpa Pers OJK selama Triwulan IV-2016

No	Nama Kegiatan
1	Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kepulauan Maluku Melalui TPAKD dan Satgas Waspada Investasi
2	OJK Keluarkan Regulasi Mengenai Usaha Pergadaian
3	OJK Siapkan Aturan Pengembangan <i>Financial Technology</i>
4	Implementasikan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), OJK Dukung Kegiatan Inklusi Keuangan Industri Jasa Keuangan
5	OJK Terus Dorong Inklusi Keuangan ke Pelosok Tanah Air
6	OJK Dorong Industri Manfaatkan Pembiayaan Pasar Modal
7	Presiden RI Gerakkan Kampanye "Ayo Menabung"
8	OJK Siapkan Aturan Perlindungan Konsumen Terkait <i>FinTech</i>
9	OJK Gelar " <i>Risk and Governance Summit</i> " RGS 2016 "Penguatan <i>Ethical Governance</i> untuk Menjamin <i>Sustainability</i> "
10	OJK Gelar ASEAN <i>Insurance Regulators Meeting</i> (AIRM) Ke-19 di Yogyakarta- Siapkan Arah Kebijakan Integrasi Industri Asuransi di ASEAN
11	OJK dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Dorong Pengembangan Usaha Mikro Unggulan dan Pertanian Organik- Bentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) Kabupaten Banyuwangi
12	Penuhi Panggilan OJK, Salman Nuryanto, Pendiri Pandawa Group Depok Hentikan Penghimpunan Dana Masyarakat
13	OJK Terbitkan Daftar Efek Syariah Terbaru

14	Pentingnya Menjaga Nilai Etik Dalam Penerapan <i>Good Governance</i> —OJK Gelar <i>Risk and Governance Summit (RGS)</i> 2016
15	Dukung Pencapaian Program Pembangunan Berkelanjutan OJK Gelar Forum Internasional di Bali
16	Dorong Inklusi Keuangan di Sumatera Barat- OJK Gelar Acara "Elok Laku Pandai Manabuang"
17	Konfrensi Pers Tutup Tahun

OJK mengadakan *media gathering* dan *focus group discussion (FGD)* sebagai sarana tatap muka dan diskusi antara jurnalis dengan OJK. Kegiatan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk menjalin hubungan baik, namun juga berfungsi sebagai sarana *agenda setting*. Pada kegiatan tersebut, OJK memberikan pendalaman materi mengenai isu-isu OJK yang perlu mendapatkan publisitas di masa yang akan datang.

Di samping kegiatan tersebut, OJK juga mengadakan kegiatan pelatihan jurnalistik kepada wartawan. Adapun materi pelatihan yang diberikan khususnya mengenai ekonomi, sistem keuangan Indonesia, sistem perbankan nasional, sistem pasar modal Indonesia, sistem keuangan non bank nasional, teknik penulisan artikel dan berita ekonomi, dan fungsi serta peran OJK.

Selama periode triwulan IV-2016, OJK telah menyelenggarakan satu pelatihan wartawan, dua *workshop*, dan satu *Focus Group Discussion*.

**Tabel IV-3** *Media Gathering, Focus Group Discussion, dan Pelatihan Jurnalistik Triwulan IV - 2016*

No	Nama Kegiatan
1	<i>Winner Camp</i>
2	<i>Workshop</i> Kehumasan
3	Pelatihan Wartawan Jakarta dengan tema "Keuangan Syariah"
4	FGD Redaktur terkait Perkembangan Program dan Kebijakan OJK

#### 4.4.2 Kunjungan Instansi

Sebagai salah satu upaya untuk melaksanakan program edukasi terhadap masyarakat mengenai peran dan fungsi OJK, telah diterima kunjungan masyarakat (instansi, lembaga pendidikan, dan sebagainya). Permintaan kunjungan dilakukan dengan mengirimkan surat permohonan kunjungan beserta waktu dan topik yang

diinginkan ke email [visitojk@ojk.go.id](mailto:visitojk@ojk.go.id). Hingga akhir triwulan IV-2016 berakhir, OJK menerima delapan kunjungan instansi dengan total 742 peserta sebagai berikut:

**Tabel IV-4** Kunjungan Instansi Triwulan IV - 2016

No.	Instansi	Peserta
1	<i>Moot Court Society</i> Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran	50
2	SMA Pax Patria	75
3	SMKN 1 Cianjur	175
4	Pascasarjana FE UII Yogyakarta	13
5	Himpunan Mahasiswa Akuntansi FEB Universitas Muhammadiyah Jakarta	130
6	IAIN Maulana Hasanuddin Banten	130
7	SMK Ulil Albab	94
8	Universitas Azzahra	75

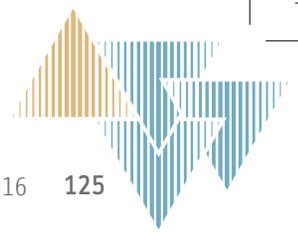
## 4.5 KEUANGAN

### 4.5.1 Anggaran dan Penggunaan

Pada triwulan IV-2016, DPR telah menetapkan Pagu Anggaran OJK Tahun 2017 sebesar Rp4.371,59 miliar melalui rapat dengar pendapat yang dilakukan pada akhir 2016. Sampai akhir periode pelaporan, pencapaian realisasi anggaran OJK 2016 adalah 99,86% atau sebesar Rp3.933,05 miliar. Realisasi tersebut meningkat sebesar 4,05% dari realisasi 2015 sebesar 95,81%. Peningkatan realisasi tersebut merupakan indikator bahwa OJK lebih optimal dalam menyusun anggaran dan melaksanakan program kerja. Dalam rangka mendukung kemandirian anggaran OJK yang berasal dari pungutan juga telah dibentuk tim gugus tugas penerapan budaya efisiensi di OJK.

**Grafik IV-9** Realisasi Anggaran





#### 4.5.2 Pengembangan Sistem Keuangan Internal

Sebagai tindak lanjut atas hasil pemeriksaan oleh BPK, berbagai upaya dilakukan untuk pengelolaan keuangan yang lebih baik yaitu penyempurnaan kebijakan, sistem informasi keuangan, dan peningkatan kompetensi pegawai. Pada triwulan IV-2016, telah diselesaikan kajian dan ketentuan pengelolaan keuangan internal terkait dengan pengelolaan dana pungutan, pelaksanaan anggaran, pedoman dan kebijakan akuntansi, pelaksanaan perpajakan, dan standar biaya.

Dalam rangka meningkatkan kualitas, akuntabilitas dan kelancaran pengelolaan keuangan internal, OJK menggunakan beberapa sistem informasi keuangan yaitu SIPO (Sistem Informasi Penerimaan OJK), SIPA (Sistem Penyusunan Anggaran), SISKA (Sistem Informasi Keuangan), SIVIRA (Sistem Informasi Revisi Anggaran), dan SAIKO (Sistem Akuntansi OJK). OJK juga melakukan pengembangan terhadap sistem informasi keuangan melalui penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK), penyusunan jadwal desain, dan kajian pengadaan Sistem Aplikasi Keuangan Terintegrasi (SAKTI) dengan platform SAP dan finalisasi *blueprint* Sistem Informasi Akuntansi OJK (SI - AUTO).

Tidak hanya terkait dengan penyempurnaan ketentuan dan sistem informasi keuangan, dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai terhadap pengelolaan keuangan, OJK juga melakukan sosialisasi ketentuan pengaturan pengelolaan keuangan serta pelaksanaan pendampingan dan bimbingan teknis kepada seluruh Pelaksana Pencairan Dana (PPD) Kantor Pusat, KR/KOJK.

### 4.6 SISTEM INFORMASI

#### 4.6.1 Penguatan Sistem Informasi untuk Mendukung Pelaksanaan Tugas Pokok

Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tujuan OJK khususnya dalam pengelolaan dan penyediaan sistem informasi selama triwulan IV-2016 OJK telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

##### a) Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT) Modul *Bancassurance*

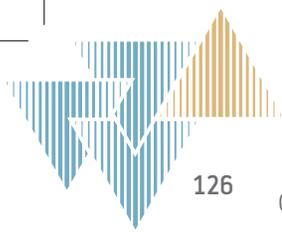
Pengembangan SPRINT modul *Bancassurance* merupakan sistem informasi untuk membantu perizinan interkoneksi antara bidang perbankan dengan bidang Industri Keuangan Non Bank (IKNB) yang memiliki frekuensi tinggi dan *high impact*. Sistem ini dikembangkan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi waktu proses perizinan dan mengurangi frekuensi korespondensi serta memudahkan pihak eksternal dalam memantau proses permohonan perizinan. Sampai akhir periode laporan, Sistem Perizinan Terintegrasi (*Bancassurance*) telah diimplementasikan kepada industri Bank dan Asuransi.

##### b) Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)

Pengembangan sistem ini bertujuan untuk mendukung pelayanan kepada Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dan publik dalam memantau informasi kredit yang dimiliki debitur serta untuk mendukung LJK dalam mengendalikan resiko kredit yang diberikan oleh debitur. Sistem ini terdiri dari *Client Application* dan *Web Application*. Sampai akhir periode laporan, telah dilakukan pengujian (*System Integration Testing*) atas sistem tersebut.

##### c) Sistem Penyampaian Informasi Nasabah Asing (SiPINA)

Dalam rangka memenuhi ketentuan *Foreign Account Tax Compliance Act* (FATCA) di mana Lembaga keuangan (*Foreign Financial Institution/FFI*) dan lembaga non keuangan (*Non Financial Foreign Entities/*



NFFE) di luar Amerika Serikat wajib untuk melaporkan data dan informasi nasabah yang terindikasi sebagai United State (US) *Person*. Untuk mendukung hal tersebut, OJK mengembangkan Sistem Penyampaian Informasi Nasabah Asing (SiPINA). Sampai akhir periode laporan, telah dilakukan implementasi pelaporan SiPINA bersama Industri Jasa Keuangan.

**d) Sistem Informasi Pengawasan Terintegrasi (SIPT)**

Pengembangan SIPT bertujuan untuk membantu pengawas terintegrasi dalam melakukan analisa, menentukan keputusan terkait konglomerasi keuangan, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan serta standarisasi pelaksanaan tugas pengawasan. Sampai akhir periode laporan, pengembangan SIPT telah diimplementasikan.

**e) E-Monitoring Pengelolaan Investasi**

Pengembangan *E-Monitoring* Pengelolaan Investasi bertujuan untuk mengakomodasi kebutuhan keterbukaan informasi kepada publik terkait Industri Pengelolaan Investasi dan sebagai referensi informasi bagi publik atau *stakeholder* di Industri Pengelolaan Investasi dalam memantau aktivitas Industri Pengelolaan Investasi. Pada triwulan IV-2016, *E-Monitoring* Pengelolaan Investasi telah diimplementasikan.

**f) Sistem Informasi Pelaporan Tax Amnesty (SITATY)**

Pembangunan sistem ini bertujuan untuk memfasilitasi Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang telah ditunjuk Pemerintah RI sebagai *gateway* dalam memenuhi kewajiban penyampaian laporan dana repatriasi dan laporan dana tebusan terkait *tax amnesty* secara *online*.

**g) Sistem Informasi Ketentuan Perbankan Online (SIKEPO)**

Pembangunan sistem ini bertujuan untuk kemudahan *stakeholder* internal dan eksternal dalam mengakses informasi ketentuan perbankan (bank umum konvensional) yang lengkap, akurat, terkini dan sistematis.

**h) Sistem Informasi Banking Surveillance Dashboard (BSD)**

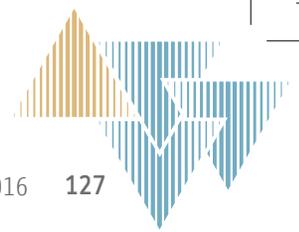
Pengembangan Sistem Informasi *Banking Surveillance Dashboard* bertujuan membantu dalam mendukung proses pengambilan keputusan dengan menyajikan data dan informasi secara agregat/makro terkait kondisi perbankan. Sistem ini bertujuan sebagai alat deteksi dini dalam mengidentifikasi risiko dan masalah potensial perbankan secara umum (*surveillance tools*) dan memberikan informasi kondisi perbankan terkini.

**i) Sistem Aplikasi Pembukaan Rahasia Nasabah Perbankan (SI AKRAB)**

Pengembangan SI AKRAB bertujuan untuk mempercepat penyelesaian izin tertulis pembukaan rahasia bank agar dapat diterbitkan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku. Pengembangan SI AKRAB telah selesai dilaksanakan dan saat ini sedang tahap implementasi dan persiapan pelatihan kepada pengguna.

**j) Sistem Informasi Pelaporan Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)**

Pengembangan sistem ini bertujuan sebagai media bagi Bank penyelenggara Laku Pandai untuk memenuhi kewajiban penyampaian laporan penyelenggara Laku Pandai setiap triwulan secara *online*. Melalui sistem ini, pemantauan perkembangan program Laku Pandai dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



#### 4.6.2 Penguatan Sistem Informasi untuk Meningkatkan Kapasitas Organisasi

##### a) Sistem Aplikasi *Online* Survei Persepsi Kinerja Satuan Kerja OJK (SPKSO)

Pembangunan Aplikasi Survei Persepsi Kinerja Satker OJK bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan survei dengan target responden adalah *stakeholder* internal OJK baik Kantor Pusat, Kantor Regional dan Kantor OJK. Hasil dari survei menjadi bahan masukan bagi OJK dalam melakukan perbaikan kinerja. Pengembangan SPKSO telah selesai dilaksanakan

##### b) Sistem Informasi Pengendalian Gratifikasi OJK (SiPeGa)

SiPeGa adalah aplikasi internal yang bertujuan sebagai sarana bagi pegawai OJK untuk melaporkan gratifikasi yang diterima oleh pegawai yang bersangkutan. Dengan adanya SiPeGa, sarana pelaporan Gratifikasi menjadi elektronik dan dapat dipantau melalui sistem oleh Satker Pemiliknya yaitu Grup Penanganan *Anti-Fraud* (GPAF). SiPeGa telah diimplementasikan dengan alamat akses <http://sipega.ojk.go.id>.

### 4.7 LOGISTIK

Pada triwulan IV-2016, OJK semakin fokus terhadap target percepatan penyediaan Gedung Kantor OJK yang mandiri, baik di pusat maupun di daerah.

#### 4.7.1 Penyiapan Gedung Kantor Pusat

Di Kantor Pusat, kepemilikan Gedung Kantor Pusat OJK Terpadu, dengan lokasi yang representatif telah tercapai pada akhir periode laporan. Hal ini ditandai dengan penempatan seluruh Satker di Kantor Pusat OJK Terpadu secara bertahap hingga triwulan I-2018.

#### 4.7.2 Penyiapan Gedung Kantor Regional/OJK

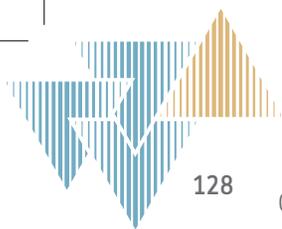
Di daerah, Kantor Regional dan Kantor OJK yang telah menempati gedung kantor sendiri baik secara sewa maupun pinjam pakai aset milik pemerintah provinsi hingga periode laporan adalah sebanyak 24 Kantor, yakni:

**Tabel IV-5 Kantor Regional dan Kantor OJK**

No.	Nama Kantor
1	Kantor Regional 2 Jawa Barat (Bandung)
2	Kantor Regional 3 Jawa Tengah & D.I.Y (Semarang),
3	Kantor OJK Tasikmalaya (Tasikmalaya),
4	Kantor OJK Prov. D.I.Y (Yogyakarta),
5	Kantor OJK Solo (Solo),
6	Kantor OJK Tegal (Tegal),
7	Kantor OJK Purwokerto (Purwokerto),
8	Kantor OJK Jember (Jember),
9	Kantor OJK Kediri (Kediri),
10	Kantor OJK Prov. Kepulauan Riau (Batam),
11	Kantor OJK Prov. N.A.D (Banda Aceh),
12	Kantor Regional 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua (Makassar),
13	Kantor OJK Prov. Sulawesi Tenggara (Kendari);
14	Kantor OJK Prov. Sulawesi Tengah (Palu),
15	Kantor OJK Prov. Maluku (Ambon),
16	Kantor OJK Prov. Papua (Jayapura),
17	Kantor Regional 7 Sumatera Bagian Selatan (Palembang),
18	Kantor OJK Provinsi Lampung (Bandar Lampung),
19	Kantor OJK Prov. Jambi (Jambi),
20	Kantor OJK Prov. Bengkulu (Bengkulu),
21	Kantor Regional 8 Bali & Nusa Tenggara (Denpasar),
22	Kantor OJK Prov. Nusa Tenggara Timur (Kupang),
23	Kantor Regional 9 Kalimantan (Banjarmasin),
24	Kantor OJK Provinsi Kalimantan Tengah (Palangkaraya).

#### 4.7.3 Pengembangan Pengaturan dan Sistem Logistik

OJK telah memiliki Sistem Pengelolaan Pengamanan sebagaimana ditetapkan melalui PDK mengenai pengelolaan pengamanan. Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan aset, OJK juga melakukan penyempurnaan terhadap aplikasi Sistem Penatausahaan Aset (SISPUAS) untuk dapat mendukung penyusunan Laporan Keuangan OJK dari sisi aset tetap dan persediaan.



## 4.8 SDM DAN TATA KELOLA ORGANISASI

### 4.8.1 Pengelolaan Sumber Daya Manusia

#### A. Kebijakan Sumber Daya Manusia

Pada triwulan IV-2016, OJK menerbitkan beberapa produk hukum yang mengatur pengelolaan Sumber Daya Manusia antara lain:

1. PDK Nomor 5/PDK.02/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/PDK.02/2015 tentang Sistem Remunerasi Pegawai Otoritas Jasa Keuangan.  
Perubahan PDK ini mengatur mengenai masa dinas bagi Pegawai atau hubungan kerja bagi Calon Pegawai yang berhak diberikan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan sesuai dengan perubahan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
2. PDK Nomor 6/PDK.02/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/PDK.02/2014 tentang Pengelolaan Tenaga Kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.  
Perubahan PDK ini mengatur penambahan ketentuan bahwa Tenaga Kerja PKWT diberikan fasilitas pemeliharaan kesehatan dalam pola *indemnity* dan/atau *managed care* atau pola fasilitas pemeliharaan kesehatan lainnya.
3. SEDK Nomor 20/SEDK.02/2016 tentang Perubahan Kedua atas Surat Edaran Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEDK.02/2015 tentang Pemberian Remunerasi Bagi Pegawai Otoritas Jasa Keuangan.

SEDK ini merupakan peraturan pelaksana dari PDK Nomor 5/PDK.02/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/PDK.02/2015 tentang Sistem Remunerasi Pegawai Otoritas Jasa Keuangan.

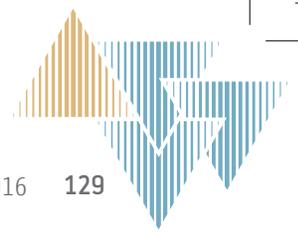
4. SEDK Nomor 21/SEDK.02/2016 tentang Perubahan Ketiga atas Surat Edaran Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEDK.02/2014 tentang Pengelolaan Tenaga Kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.  
SEDK ini merupakan peraturan pelaksana dari PDK Nomor 6/PDK.02/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/PDK.02/2014 tentang Pengelolaan Tenaga Kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
5. SEDK Nomor 24/SEDK.02/2016 tentang Pengelolaan, Pemanfaatan, dan Pertanggungjawaban Representasi Pegawai Otoritas Jasa Keuangan  
SEDK ini mengatur mengenai pedoman, pengelolaan, serta pertanggungjawaban dalam penggunaan anggaran representasi yang diberikan kepada Deputi Komisiner, Kepala Departemen, Direktur yang tidak berada di bawah Kepala Departemen dan Kepala Kantor Regional dan Kantor Otoritas Jasa Keuangan di daerah.

### 4.8.2 Pengembangan Organisasi

Selama periode laporan, OJK menghasilkan dua produk hukum yang mengatur pengembangan organisasi antara lain:

#### A. Logo Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan ini merupakan peraturan penyempurna dari ketentuan tentang Logo Otoritas Jasa Keuangan PDK tentang (pencabutan PDK Nomor 2/PDK.02/2013 tentang Logo Otoritas Jasa Keuangan)



dengan pokok peraturan antara lain: (1) Ketentuan umum tentang Standar Identitas Kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan, (2) Mengatur Penggunaan Logo OJK dalam tata naskah dinas, penampilan pegawai, pin Anggota Dewan Komisioner, penanda eksterior kantor, penanda interior kantor, penanda aset OJK, serta media komunikasi internal dan eksternal organisasi, (3) Menambahkan jenis huruf yang digunakan pada logo Otoritas Jasa Keuangan, (4) Mengatur ukuran perbandingan logo dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, dan (5) Menambahkan rumusan komposisi warna yang digunakan pada logo Otoritas Jasa Keuangan.

#### **B Pembentukan Komite Pengaturan Terintegrasi.**

Pembentukan Komite merupakan tindak lanjut dari program kerja Inisiatif Strategis 2 OJK yakni "Memperkuat organisasi dalam rangka mewujudkan integrasi pengaturan SJK" yang bertanggung jawab untuk proses dan pelaksanaan pengaturan terintegrasi sebelum dibentuknya Satker. Ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Komite Pengaturan Terintegrasi antara lain (1) Mengusulkan arah kebijakan pengaturan terintegrasi, (2) Rekomendasi dalam rangka memperkuat kualitas pengaturan dan konsep pengaturan terintegrasi, (3) Rekomendasi mengenai Satker pemrakarsa penyusunan pengaturan terintegrasi.

### **4.9 OJK INSTITUTE**

Sepanjang tahun 2016 program pengembangan SDM difokuskan untuk penguatan *service excellence* dalam mencapai sasaran program transformasi OJK 2014 – 2017, dengan tetap mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan anggaran dalam pelaksanaannya. Upaya mewujudkan sasaran tersebut dilaksanakan OJK *Institute* melalui berbagai program sebagaimana telah ditetapkan dalam

Sistem Pengembangan OJK yang meliputi: (1) Program Pengembangan Kepemimpinan; (2) Program Pengembangan Kompetensi; (3) Program Pendidikan Formal; (4) Program Pengenalan untuk Calon Pegawai; (5) Program Internalisasi Kultur; (6) Program Bimbingan; dan (7) Program Penugasan Pegawai. Sepanjang triwulan IV-2016, kegiatan yang telah dilaksanakan, adalah sebagai berikut:

#### **4.9.1 Program Pengembangan Kepemimpinan Berjenjang (PPKB)**

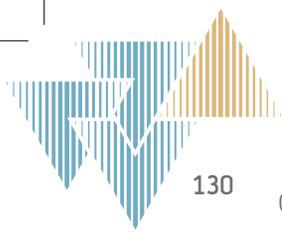
Program ini bertujuan mempersiapkan pegawai untuk menduduki jabatan dengan kompleksitas tugas dan tingkat pengambilan keputusan yang lebih tinggi ini. Selama triwulan IV-2016, PPKB dilaksanakan sebanyak satu kali yaitu PPKB Menengah 1 angkatan II untuk Kepala Bagian yang dilaksanakan di Jakarta dan diikuti oleh 41 peserta. OJK juga melaksanakan program kepemimpinan khusus Kepala Kantor Regional dan Kantor OJK yang diikuti oleh 34 orang peserta.

#### **4.9.2 Program Pengembangan Kompetensi**

Program Pengembangan Kompetensi (PPK) pegawai baik untuk kompetensi teknis (*hard skill*) maupun perilaku (*soft skill*), berdasarkan kebutuhannya dapat dikategorikan sebagai berikut:

- (1) PPK Luar Negeri (PPKLN)
- (2) PPK Dalam Negeri (PPKDN) :
  - a). PPKDN dalam bentuk *In-House Training* (IHT), dan
  - b). PPKDN dalam bentuk Non-IHT

Untuk PPKLN, sepanjang triwulan IV-2016 tercatat total 80 pegawai telah melaksanakan pengembangan di luar negeri, dengan rincian 41 pegawai untuk pengembangan teknis (*hard skill*) dan 39 pegawai mengikuti pengembangan kepemimpinan (*leadership*) serta delapan pegawai mengikuti kegiatan *secondment/*



*internship*. Untuk PPKDN dalam format IHT sepanjang triwulan IV-2016 terdapat sembilan program pengembangan teknis (*hard skill*) dengan peserta secara keseluruhan mencapai 350 pegawai. Sementara itu, untuk program pengembangan perilaku (*soft skill*) mencapai 15 program dengan total peserta sebanyak 1.240 pegawai.

Terkait PPKDN Non-IHT, sepanjang triwulan IV-2016 tercatat sebanyak 141 pegawai telah mengikuti pelatihan dengan rincian 128 pegawai telah melaksanakan program pengembangan teknis, dan 13 pegawai untuk program pengembangan perilaku.

#### 4.9.3 Program Pendidikan Formal

Program Pendidikan Formal (PPF) ini merupakan bentuk pengembangan pada jenjang pendidikan formal yang diberikan kepada pegawai OJK potensial yang telah memenuhi kriteria, baik untuk jenjang pendidikan Strata-2 maupun Strata-3. Sepanjang triwulan IV-2016, tercatat lima orang pegawai untuk PPF skim-1 (beasiswa penuh dari OJK), satu orang pegawai untuk PPF skim-2 (beasiswa dari pihak lain dengan *top up* fasilitas dari OJK), dan satu orang pegawai untuk PPF skim-3 (beasiswa penuh dari pihak lain).

#### 4.9.4 Program Asesmen

OJK melakukan asesmen untuk membangun profil pegawai yang akurat mengenai kompetensi dan potensi pegawai. Sepanjang periode laporan, asesmen pejabat OJK telah dilakukan untuk level Kepala Bagian dan Kepala Subbagian dengan total 665 peserta.

#### 4.9.5 Program Sertifikasi

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi insan OJK khususnya profesi pengawas SJK. Selama periode laporan, telah dilaksanakan program sertifikasi Pengawas

Sektor Jasa Keuangan (SJK) Level II sebanyak tiga Batch dengan total peserta sebanyak 103 orang dan sertifikasi Pengawas Sektor Jasa Keuangan (SJK) Level III sebanyak 1 Batch dengan total peserta sebanyak 35 orang.

#### 4.9.6 Program Pengembangan SDM Sektor Jasa Keuangan (SJK) – *Recycling*

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dari pelaku Industri SJK sehingga SDM SJK semakin profesional dan memberikan pemahaman kepada SJK mengenai tugas dan fungsi OJK. Pada periode laporan, OJK melaksanakan 11 kegiatan pengembangan SDM SJK yang berupa pelatihan, *workshop*, seminar dan sertifikasi yang diikuti oleh 1.562 peserta dari pelaku SJK.

#### 4.9.7 Program Kerja sama dengan Temasek Foundation Singapore

Program ini merupakan program kerjasama OJK dengan *Temasek Foundation* CSC Singapura yang bertujuan untuk mengembangkan kapasitas SDM pengajar dan fasilitator di lingkungan OJK. Pelaksanaan dari kegiatan tersebut berupa *Workshop* Penyusunan Kurikulum Program Pembelajaran (*Curriculum Design*) dilanjutkan dengan *Workshop* Konsultasi dan *Review* Desain Pembelajaran (*Review Curriculum Design*) yang bertujuan memberikan kesempatan untuk berkonsultasi dan meninjau desain pembelajaran yang pernah disusun dalam *workshop* sebelumnya.

#### 4.9.8 *Benchmarking* Perpustakaan dan Museum/Galeri

Tujuan dari kegiatan ini adalah mendapatkan referensi dalam menyusun *blueprint* perpustakaan dan museum OJK. *Benchmarking* dilaksanakan dengan beberapa institusi yaitu ke *Commissioner Nazionale per le Societa e la Borsa* (CONSOB - Otoritas Pengawas Bursa Keuangan Italia) dan *Banca D'Italia* (Bank Sentral Italia).



## 4.10 MANAJEMEN PERUBAHAN

Selama periode laporan fungsi kultur dan manajemen perubahan telah menjalankan sejumlah program dan kegiatan yang dikategorikan menjadi program budaya, *monitoring* dan pengembangan media komunikasi.

### 4.10.1 Program Budaya

Berbagai macam kegiatan program budaya dan perubahan dijalankan selama triwulan IV-2016 antara lain Lomba Budaya OJKWay 2016. Kegiatan ini merupakan kompetisi implementasi Program Budaya OJKWay sebagai salah satu bentuk *Monitoring*, evaluasi dan apresiasi program budaya yang dilakukan Satker selama satu tahun. Satker Kantor Pusat dan Kantor Regional/Kantor OJK dengan hasil nilai program budaya terbaik terpilih menjadi finalis lomba budaya OJKWay 2016. Sebagai puncak acara kegiatan program perubahan dan budaya, OJK menyelenggarakan kegiatan *Culture Fair* yang berfungsi sebagai media sosialisasi hasil pelaksanaan program kerja budaya kepada seluruh Insan OJK. Dalam kegiatan ini juga diumumkan juara Program Budaya OJKWay 2016, *Change Leader* Terbaik, *Change Partner* Terbaik dan *Change Agent* Terbaik di lingkungan OJK.

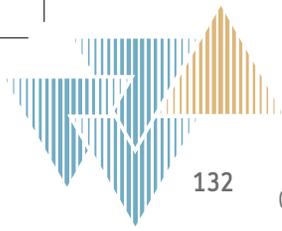
Selama 2016, OJK menyelenggarakan *Edu Fair* yang merupakan pameran pendidikan yang pertama kali dilakukan OJK dan bertujuan untuk memberikan wawasan dan sosialisasi terkait prosedur dan tips bagi Insan OJK untuk memperoleh beasiswa baik dari internal maupun dari lembaga pemberi beasiswa lainnya. Selain diisi dengan kegiatan *talkshow* dan pameran, juga dilakukan *test* TOEIC gratis bagi 200 Insan OJK dalam rangka mempersiapkan persyaratan ke jenjang pendidikan selanjutnya. OJK juga melakukan Seminar Nasional Manajemen Perubahan yang mengikutsertakan CEO dan pimpinan sektor jasa keuangan, media, serta

akademisi dengan topik "Kepemimpinan dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi". Di dalam Seminar Nasional diluncurkan pula *Indonesia Change Management Forum (ICMF)* yaitu forum komunikasi antar-*Change Management Office* Sektor Jasa Keuangan Indonesia.

Dalam rangka memformulasikan program budaya yang akan dilaksanakan pada tahun 2017, OJK menyelenggarakan *Change Partner Forum* II. Forum ini di-*design* sebagai forum evaluasi para *change partner* dalam pelaksanaan program budaya di Satker masing-masing. Forum ini juga dimanfaatkan sebagai ajang *brainstorming* untuk *Change Partner* bagaimana menjaga momentum dan mengelola partisipasi dan keterlibatan seluruh Insan OJK dalam kegiatan manajemen perubahan. Dalam rangka mewujudkan Insan OJK yang merepresentasikan lembaga (*brand ambassador*) secara komprehensif. OJK menyelenggarakan pemilihan Insan OJK Terbaik 2016. Penyelenggaraan Pemilihan Insan OJK Terbaik diawali dengan proses karantina di mana setiap peserta mempresentasikan hasil kinerja dan perilaku positif yang telah dilakukannya di bidang tugas masing-masing. Selanjutnya, dewan juri yang berasal dari pihak independen menentukan satu orang Insan OJK.

### 4.10.2 Monitoring Program Budaya

Untuk memastikan pelaksanaan Program Budaya di masing-masing Satker, dilakukan *Monitoring* program budaya melalui berbagai metode, antara lain memberikan kesempatan kepada Satker melakukan *self-assessment* yang didukung bukti-bukti pelaksanaan program budaya. Penilaian dan pengumpulan bukti-bukti tersebut dilakukan secara *online* melalui aplikasi *dashboard monitoring*. Penilaian *self-assessment* dilakukan berdasarkan skala 1-6 terhadap seluruh program budaya OJKway 2016.



Untuk mengetahui tingkat keterikatan Insan OJK terhadap organisasinya, dilakukan *Employee Opinion Survei* (EOS). Beberapa aspek yang diukur antara lain citra perusahaan, praktik manajemen *human capital*, praktik manajemen umum, kepemimpinan, lingkungan kerja dan pekerjaan. Hasil *Employee Opinion Survei* menunjukkan bahwa 71,1% Insan OJK berkomitmen (*engaged*) terhadap organisasi. Selain itu, OJK juga melaksanakan Survei Budaya OJK untuk memberikan *insight* mengenai pelaksanaan program budaya di OJK dan perubahan perilaku yang terjadi di lingkungan Satker. Survei ini juga ditujukan untuk memberi masukan terhadap prioritas pengembangan implementasi nilai-nilai budaya OJK di masa mendatang. Hasil Survei Budaya menunjukkan bahwa tingkat pemahaman Insan OJK terhadap nilai strategis OJK dan perilaku utamanya sudah cukup baik dengan rata-rata di atas 80%.

#### 4.10.3 Media Komunikasi Budaya dan Perubahan

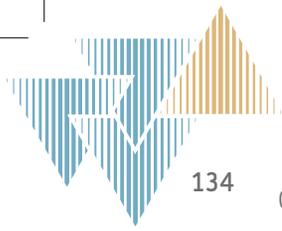
Untuk meningkatkan *awareness* kegiatan budaya, OJK melakukan sejumlah pengembangan media komunikasi di antaranya menerbitkan tiga edisi Majalah Integrasi dengan tema “Mengembangkan Kompetensi Insan OJK dalam Bekerja dan Berkarya”, “OJK-isme Sumbangsih Untuk Negeri”, dan “Visioner Beraksi di Luar Kebiasaan untuk Mendukung Perubahan”. OJK juga secara rutin menyebarkan Pesan Ketua Dewan Komisioner dan Pesan ADK melalui *e-mail blast* ke seluruh Insan OJK.

Untuk memberikan *platform* kepada Insan OJK dalam berinteraksi dengan sesama pegawai, berkomunikasi dengan Dewan Komisioner, melakukan transaksi jual-beli, maupun *sharing* kegiatan budaya, telah dikembangkan *Website OJKWay* yang saat ini memiliki 491 pengguna.

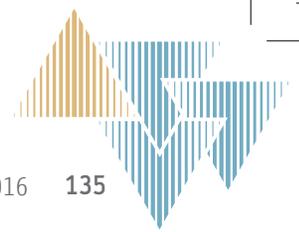


## Akronim

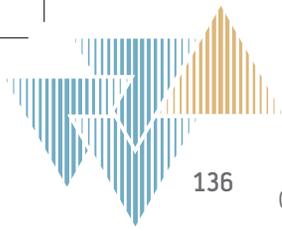
AAJI	: Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia
AAS	: Australia Awards Scholarship
AASI	: Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia
AAUI	: Asosiasi Asuransi Umum Indonesia
ABIF	: ASEAN Banking Integration Framework
ACIA	: ASEAN Comprehensive Investment Agreement
ACKS	: Aku Cinta Keuangan Syariah
ADK	: Anggota Dewan Komisioner
AFAS	: ASEAN Framework Agreement on Services
AHM	: Anugerah Media Humas
AIMRPK	: Audit Internal, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Kualitas
AML	: Anti Money Laundering
APERD	: Agen Penjual Efek Reksa Dana
APRA	: Australia Prudential Regulatory Authority
ASBANDA	: Asosiasi Bank Pembangunan Daerah
ASEAN	: Association of Southeast Asian Nations
ASIC	: Australia Securities and Investment Commission
ATIGA	: ASEAN Trade in Goods Agreement
ATISA	: ASEAN Trade In Services Agreement
ATM	: Automatic Teller Machine
ATMR	: Aset Tertimbang Menurut Risiko
AUTP	: Asuransi Usaha Tani Padi
BAE	: Biro Administrasi Efek
BAMPPPI	: Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia
BAPMI	: Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia
BAVI	: Badan Arbitrase Ventura Indonesia
BEI	: Bursa Efek Indonesia
BI	: Bank Indonesia
BIN	: Badan Intelijen Negara
BMAI	: Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia
BMDP	: Badan Mediasi Dana Pensiun
BMPP	: Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan
BMPPI	: Badan Mediasi Pembiayaan dan Pegadaian Indonesia
BMT	: Baitul Mal Wat Tamwil
BNP2TKI	: Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
BNSP	: Badan Nasional Sertifikasi Profesi
BOPO	: Beban Operasional Pendapatan Operasional
BPD	: Bank Pembangunan Daerah
BPKP	: Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
BPK-RI	: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
BPR	: Bank Perkreditan Rakyat
BRC	: BPD Regional Champion
BS	: Board Seminar
BSA	: Basic Saving Account
BUK	: Bank Umum Konvensional



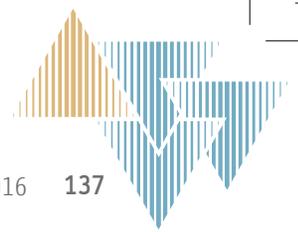
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
BUS	: Bank Umum Syariah
CA	: Combined Assurance
CBRC	: China Banking Regulatory Commission
CDD	: Customer Due Diligence
CFT	: Combating the Financing of Terrorism
CKPN	: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai
CR	: Cash Ratio
CRM	: Customer Relationship Management
CTKI	: Calon Tenaga Kerja Indonesia
DCC	: Data Center Collocation
DES	: Daftar Efek Syariah
DFSA	: Dubai Financial Service Authority
DJPU	: Direktorat Jendral Pengelola Utang
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPK	: Dana Pihak Ketiga
DPLK	: Dana Pensiun Lembaga Keuangan
DPPK PPIP	: Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Iuran Pasti
DPPK PPMP	: Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Manfaat Pasti
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DRC	: Disaster Recovery Center
EBA-SP	: Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi
EDC	: Electronic Data Capture
Eduwan	: Edukasi Wartawan
ETP	: Electronic Trading Platform
FAPM	: Forum Akuntan Pasar Modal
FGD	: Focus Group Discussion
FKMM	: Forum Koordinasi Makroprudensial-Mikroprudensial
FKSSK	: Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan
FREKS	: Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah
FSA	: Financial Services Agency
FSAP	: Financial Sector Assessment Program
FSC	: Financial Service Commission
FSS	: Financial Supervisory Service
FTA	: Free Trade Agreement
GCG	: Good Corporate Governance
GeNTa PM	: Gerakan Nasional Cinta Pasar Modal
GIZ	: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
GMRA	: Global Master Repurchase Agreement
GRC	: Governance Risk and Compliance
HKHPM	: Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
HMETD	: Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
ICMA	: International Capital Market Association
IDB	: Islamic Development Bank
IFAC	: International Federation of Accountant
IFAR	: Investasi Terhadap Total Aset
IFC	: International Finance Corporation



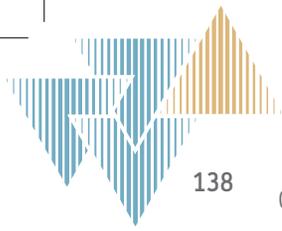
IFCC	: Integrated Financial Customer Care
IFN	: International Finance News
IFSB	: Islamic Financial Services Board
IGBF	: Indonesia Government Bond Futures
IHSG	: Indeks Harga Saham Gabungan
IJEPA	: Indonesia-Jepang Economic Partnership Agreement
IJK	: Industri Jasa Keuangan
IKI	: Indikator Kinerja Individual
IKNB/NBFI	: Industri Keuangan Non Bank/Non Bank Financial Industry
IKU/KPI	: Indikator Kerja Utama/Key Performance Indicators
ILM	: Iklan Layanan Masyarakat
IMF	: International Monetary Fund
INDOBeX	: Indonesia Bond Indexes
IOSCO	: International Organization of Securities Commission
IRR	: Integrated Risk Rating
IS	: Inisiatif Strategis
JARING	: Jangkau, Sinergi, dan Guideline
JII	: Jakarta Islamic Index
JPSK	: Jaring Pengaman Sistem Keuangan
KDK	: Keputusan Dewan Komisiner
Kemenaker	: Kementerian Ketenagakerjaan
Kemendagri	: Kementerian Dalam Negeri
Kemendesa	: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
KI	: Kredit Investasi
KIK	: Kontrak Investasi Kolektif
KK	: Kredit Konsumsi
KKB	: Kredit Kendaraan Bermotor
KKP	: Kementerian Kelautan dan Perikanan
KLHK	: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KMK	: Kredit Modal Kerja
KOINKU	: Kompetisi Inklusi Keuangan
KOJK	: Kantor OJK
KPD	: Kontrak Pengelolaan Dana
KPJKS	: Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah
KPMM/CAR	: Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum/Capital Adequacy Ratio
KPMR	: Kualitas Penerapan Manajemen Risiko
KPPU	: Komisi Pengawasan Persaingan Usaha
KPR	: Kredit Pemilikan Rumah
KR	: Kantro Regional
KSEI	: Kustodian Sentral Efek Indonesia
KUB	: Kelompok Usaha Bersama
KYC	: Know Your Customer
KYFC	: Know Your Financial Conglomerates
LAPS	: Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa
LAPSPI	: LAPS Perbankan
LAPSPI	: Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia
LDR	: Loan to Deposit Ratio
LJK	: Lembaga Jasa Keuangan



LJKNB	: Lembaga Jasa Keuangan Non Bank
LKM	: Lembaga Keuangan Mikro
LoI	: Letter of Intent
LoU	: Letter of Understanding
LPEI	: Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
LPHE	: Lembaga Penilaian Harga Efek
LPS	: Lembaga Penjamin Simpanan
LTV	: Loan to Value
MCRA	: Market Conduct Risk Assessment
MEA/AEC	: Masyarakat Ekonomi Asean/Asean Economic Community
MI	: Manajer Investasi
MIA	: Manajer IKU dan Anggaran
MoU	: Memorandum Of Understanding/Nota Kesepahaman
MPSJKI	: Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia
MSAK	: Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja
NAB	: Nilai Aktiva Bersih
NIM	: Net Interest Margin
NPF	: Non Performing Finance
NPL	: Non-Performing Loan
OECD	: Organisation for Economic Co-operation and Development
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
ORP	: Outreach Program
OSINT	: Open Source Intelligence
PCE	: Pendidikan Calon Staf Edukasi dan Perlindungan Konsumen
PCP	: Pendidikan Calon Pejabat
PCS	: Pendidikan Calon Staf
PCT	: Pendidikan Calon Pegawai Tata Usaha
PDB	: Produk Domestik Bruto
PDK	: Peraturan Dewan Komisiner
PDN	: Posisi Devisa Neto
PE	: Perusahaan Efek
PELAKU	: Pusat Edukasi, Layanan Konsumen dan Akses Keuangan UMKM
PESTEL	: Politic, Economy, Social, Technology, Environment, and Law
PI	: Penasihat Investasi
PKR	: Pasar Keuangan Rakyat
PM	: Pasar Modal
PMK	: Protokol Manajemen Krisis
POJK	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
POKTAN	: Kelompok Tani
PPF	: Program Pendidikan Formal
PPG	: Program Pengendalian Gratifikasi
PPK	: Program Pengembangan Kompetensi
PPKB	: Program Pengembangan Kepemimpinan Berjenjang
PPKD	: Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah
PPL	: Program Pendidikan Lanjutan
PPP	: Program Penugasan Pegawai
PSP	: Pemegang Saham Pengendali
PUB	: Penawaran Umum Berkelanjutan



PUJK	: Pelaku Usaha Jasa Keuangan
Rakerstra	: Rapat Kerja Strategis
RBS	: Risk Based Supervisory
RCEP	: Regional Comprehensive Economic Partnership
RDK	: Rapat Dewan Komisioner
REPO	: Repurchase Agreement
RGS	: Risk and Governance Summit
RKA	: Rencana Kerja Anggaran
ROA	: Return on Assets
ROE	: Return on Equity
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RSS	: Rumah Sehat Sejahtera
Satgas	: Satuan Tugas
SBN	: Surat Berharga Negara
SBSN	: Surat Berharga Syariah Negara
SDM	: Sumber Daya Manusia
SEDK	: Surat Edaran Dewan Komisioner
SEOJK	: Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan
SIAI	: Sistem Informasi Audit Internal
SID/DIS	: Sistem Informasi Debitur/Debtor Information System
SIELOG	: Sistem Informasi Ekspedisi Logistik
SIMARIO	: Sistem Informasi Manajemen Risiko
SIMFOSIA	: Sistem Informasi Sumber Daya Manusia
SiMOLEK	: Mobil Literasi Keuangan
SimPel	: Simpanan Pelajar
SIMPEL	: Sistem Pengelolaan Kinerja
SIPMI	: Sistem Informasi Pelaporan Market Intelijen
SIPP	: Sistem Informasi Perusahaan Pembiayaan
SISKA	: Sistem Aplikasi Keuangan OJK
SISPANDI	: Sistem Informasi Pengelolaan Kendaraan Dinas
SISPUAS	: Sistem Informasi Penatausahaan Aset
SJK	: Sektor Jasa Keuangan
SKM	: Sahat Keuangan Maritim
SKP	: Satuan Kredit Profesi
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SLA	: Service Level Agreement
SMES	: Sederhana, Mudah, Ekonomis, dan Segera
SNKI	: Strategis Nasional Keuangan Inklusif
SNLKI	: Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia
SPE	: Sistem Pelaporan Emiten
SPP/WBS OJK	: Sistem Pelaporan Pelanggaran OJK/Whistle Blowing System OJK
SRO	: Self Regulatory Organization
STP	: Straight Through Processing
STTD	: Surat Tanda Terdaftar
SUN	: Surat Utang Negara
SWOT	: Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats
TKHT	: Tunjangan Kesehatan Hari Tua
TKI	: Tenaga Kerja Indonesia



TOT	: Training of Trainers
TPHT	: Tunjangan Perumahan Hari Tua
TPI	: Tempat Pelelangan Ikan
UMKM/MSME	: Usaha Mikro, Kecil dan Menengah/Micro, Small, and Medium Enterprises
UU	: Undang-Undang
UU LKM	: Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro
UU OJK	: Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan
UUS	: Unit Usaha Syariah
WAPERD	: Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana
WBS	: Whistle Blowing System
WCFSL	: Working Committee on Financial Services Liberalisation
WMI	: Wakil Manajer Investasi
WPEE	: Wakil Penjamin Emisi Efek
WPPE	: Wakil Perantara Pedagang Efek
XBRL	: Extensible Business Reporting Language
YKP OJK	: Yayasan Kesejahteraan Pekerja
yoy	: year over year
ytd	: year to date
ZMET	: Zaltman Metaphor Elicitation Technique